



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**STRATEGI KEAMANAN AMERIKA SERIKAT DI TENGAH  
PENINGKATAN KAPABILITAS MILITER CHINA 2002-2010**

**TESIS**

**FAHMI TARUMANEGARA  
1006743512**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
MAGISTER ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
JAKARTA  
JUNI 2012**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**STRATEGI KEAMANAN AMERIKA SERIKAT DI TENGAH  
PENINGKATAN KAPABILITAS MILITER CHINA 2002-2010**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains  
(M.Si) dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**

**FAHMI TARUMANEGARA  
1006743512**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
MAGISTER ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
JAKARTA  
JUNI 2012**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya Saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Fahmi Tarumanegara

NPM : 1006743512

Tanda Tangan :



Tanggal : 13 Juni 2012

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : Fahmi Tarumanegara  
NPM : 1006743512  
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional  
Judul Tesis : Strategi Keamanan Amerika Serikat di tengah  
Peningkatan Kapabilitas Militer China 2002-  
2010

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia**

### DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Evi Fitriani, Ph.D (.....)  
Sekretaris Sidang : Asra Virgianita, MA (.....)  
Pembimbing : Prof. Zainuddin Djafar, Ph.D (.....)  
Penguji Ahli : Broto Wardoyo, MA (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 25 Juli 2012



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fahmi Tarumanegara  
NPM : 1006743512  
Program Studi : Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional  
Departemen : Hubungan Internasional  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah Saya yang berjudul:

**Strategi Keamanan Amerika Serikat di tengah Peningkatan Kapabilitas Militer China 2002-2010**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Ekklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir Saya tanpa meminta izin dari Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Jakarta

Pada tanggal: 25 Juni 2012

Yang menyatakan



(Fahmi Tarumanegara)

**UNIVERSITAS INDONESIA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**  
**PROGRAM PASCASARJANA**

Fahmi Tarumanegara  
1006743512

Strategi Keamanan Amerika Serikat ditengah Peningkatan Kapabilitas Militer  
China 2002-2010

**ABSTRAK**

Amerika saat ini menghadapi berbagai tantangan dan ancaman sepanjang periode 2002-2010. Strategi keamanan Amerika Serikat pada periode ini menunjukkan peningkatan intensitas defensif dan kooperatif, di tengah peningkatan kapabilitas militer China sepanjang periode 2002-2010, dimana China berpotensi melakukan aksi ofensif dan mengancam Amerika Serikat. Tesis ini akan fokus pada pertanyaan mengapa strategi Amerika Serikat mengalami peningkatan intensitas defensif terhadap terhadap China yang mengalami peningkatan kapabilitas militer di tahun 2002-2010. Tesis ini menggunakan metode kuantitatif dan menggunakan teori dilema keamanan, dalam rangkaian pengujian hipotesa. Hasil temuan dalam tesis ini mengungkapkan bahwa intensitas defensif dan kooperatif yang ditunjukkan Amerika Serikat melalui strateginya disebabkan oleh peningkatan intensitas dilema keamanan. Argumen ini juga dipengaruhi perhitungan rasional terhadap keunggulan defensif yang dimiliki AS, serta intensitas ofensif-defensif China yang tidak dapat dibedakan. Sifat defensif dalam strategi keamanan Amerika Serikat memungkinkannya untuk memitigasi meningkatnya intensitas dilema keamanan, khususnya melalui peningkatan kekuatan defensif diantara tahun 2002-2010, serta melalui peningkatan kerjasama pada periode 2006-2010.

Kata kunci:

Strategi Keamanan, Amerika Serikat, China, Dilema Keamanan

**THE UNIVERSITY OF INDONESIA**  
**THE FACULTY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES**  
**DEPARTEMENT OF INTERNATIONAL RELATIONS**  
**POSTGRADUATE PROGRAME**

Fahmi Tarumanegara  
1006743512

United States Security Strategy in mids of the Increasing of China Military Capability 2002-2010.

**ABSTRACT**

United States facing numerous challenges and threat during the period 2002-2010. United States security strategy in this period showed an increase in the intensity of defensive and uncooperative, in mid of the increasing of Chinese military capabilities over the period 2002-2010, which China could potentially take offensive action and threaten the United States. This thesis focused on the question of why the strategy of the United States experienced an increase in defensive intensity against China, which its military capabilities have increased in the years 2002-2010. This thesis uses quantitative methods and security dilemma theory, in a series of hypothesis testing. The findings in this thesis reveal that the intensity of defensive and cooperative, caused by the increasing of the security dilemma intensity. This argument is also influenced by rational calculations of United States defensive advantage and China offensive-defensive that can not be distinguished. Defensive nature of the security strategy of the United States allowed it to mitigate the increasing intensity of security dilemmas, particularly through increasing the defensive strength between the years 2002-2010, as well as through increased cooperation in the period 2006-2010.

Key words:

Security Strategy, United States, China, Security Dilemma

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang berkat rahmat-Nya penulisan tesis ini berhasil rampung, dan diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk dedikasi penulis untuk memperkaya keilmuan Hubungan Internasional. Di tengah semakin dinamisnya pergerakan berbagai fenomena politik yang terjadi, tulisan ini berusaha mengelaborasi sebagian kecil dari fenomena tersebut, khususnya mengenai strategi keamanan yang diimplementasikan Amerika Serikat (AS) di tengah pergerakan dan perubahan kekuatan negara-negara besar, yang kemudian fokus pada pola diadiknya dengan China di periode 2002-2010.

Topik utama tesis ini menarik untuk diperdebatkan, dikarenakan fakta-fakta mengenai bagaimana strategi AS di abad 21 menunjukkan peningkatan aksi-aksi defensif dan kooperatifnya dengan China. Aksi tersebut muncul dan terefleksikan dalam strategi keamanan AS, di tengah peningkatan besar dari kapabilitas militer China dan negara-negara lain di dunia. China yang juga menjadi fokus dalam tesis ini, memperlihatkan peningkatan kekuatannya, yang tidak hanya mencakup permasalahan persenjataan dan kekuatan militernya semata, namun di dukung pula oleh kemajuan industri pertahanan, peningkatan ekonomi dan anggaran pertahanan, termasuk perluasan strategi keamanan nasionalnya. Dalam kondisi ini, strategi keamanan AS justru memperlihatkan pola yang berbeda dari strategi yang umumnya digunakan dalam menghadapi negara-negara lain, yang memiliki potensi mengancam dan bersifat ofensif terhadap AS.

Berawal dari pengamatan penulis mengenai perkembangan dan terjadinya standar ganda dari sifat strategi keamanan AS tersebut, tesis ini mencoba menjawab pertanyaan mengenai: mengapa strategi keamanan AS mengalami peningkatan intensitas ke arah defensif terhadap China yang mengalami peningkatan kapabilitas militer sepanjang periode 2002-2010. Dimana hal ini juga memperlihatkan perbedaan dari asumsi kaum realisme Hubungan Internasional yang umumnya menganggap negara cenderung bersifat ofensif di tengah sistem internasional yang anarki.

Dalam proses penulisan, penulis menyadari keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki baik dalam segi pengetahuan maupun keterbatasan teknis. Karenanya, argumen dalam tesis ini terbuka untuk segala masukan dan perdebatan, guna perbaikan selanjutnya. Penulis berharap bahwa tesis ini dapat menjadi bahan pembelajaran yang baik bagi penulis sendiri, pembaca, dan peneliti lain memiliki perhatian pada tema yang terkait.

Penulis,

Juni 2012

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur juga dipanjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk memperoleh pendidikan hingga ke jenjang pascasarjana, serta memberikan kesempatan bagi penulis untuk mendapatkan perluasan pengalaman, ilmu, serta jaringan pertemanan dan persahabatan selama penulis menjalani proses studi tersebut. Penulis juga menyadari bahwa tanpa rahmat-Nya dan dukungan orang-orang di sekitar, maka penulis tidak akan mampu menyelesaikan studi dan tesis ini secara maksimal. Oleh karena itu, penulis melalui kesempatan ini juga mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

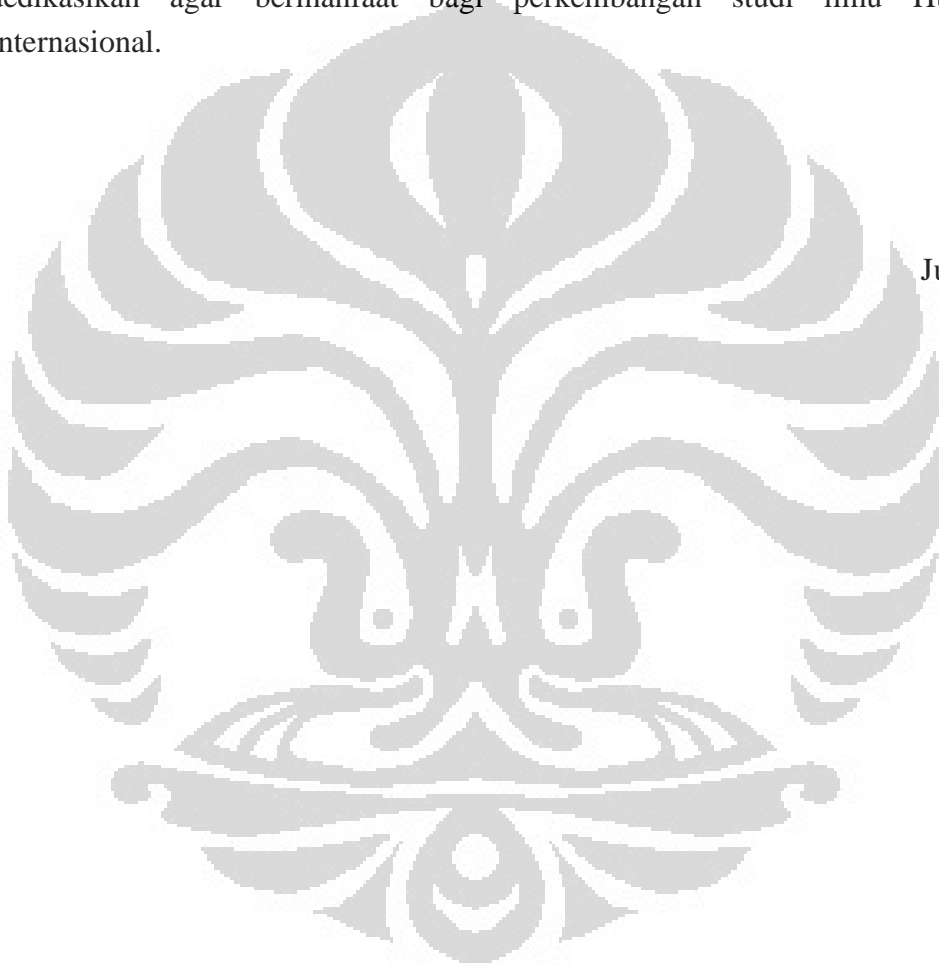
- (1) Prof. Zainuddin Djafar, Ph.D. selaku dosen pembimbing, yang secara kooperatif telah menyediakan waktu dan pikirannya selama proses penulisan tesis ini. Terima kasih atas bimbingan, dan dukungannya.
- (2) Dr. Makmur Keliat selaku ketua Program Pasca Sarjana Hubungan Internasional Universitas Indonesia; serta Broto Wardoyo, M.A; Evi Fitriani Ph.D; dan Asra Virgianita, MA; selaku tim penguji. Terimakasih atas segala masukannya yang telah membantu menyempurnakan penulisan tesis ini.
- (3) Seluruh dosen Program Pascasarjana Hubungan Internasional Universitas Indonesia. Terimakasih telah membuka wawasan penulis, pengalaman proses belajar serta atas ilmu berharga yang telah diberikan.
- (4) Terima kasih yang sangat mendalam kepada ayah dan ibu tercinta, Setia Buddi Abdullah dan Zahara Setia Buddi; atas segala doa, cinta, kesabaran dan segala pengorbanan yang kalian berikan, sehingga mampu mengantarkan para buah hatinya hingga ke jenjang pendidikan yang tinggi. Terima kasih juga kepada adik tercinta Dinda Rakhma Fitriani yang selalu siap membantu dan menceriakan suasana.
- (5) Para sahabat terbaik: Meita, Epica, Akbar, Archel, Edit, Adina, Ganesha, Deska, Yusa, Luthfi, Rinda, Yolis, dan Monica. Terimakasih atas persahabatan dalam senang maupun susah selama dua tahun terakhir, serta segala dukungan yang kalian berikan dalam proses penulisan tesis yang kita lakukan bersama. Terimakasih atas saran dan kritik yang kalian berikan. Semoga ini menjadi awal terwujudnya segala impian kita.
- (6) Seluruh teman-teman mahasiswa Magister HI FISIP UI angkatan 2010 – Adi, Poeti, dan Shally; Magister Kajian Terorisme angkatan 2010, dan Putra (2009).Terima kasih atas dukungan dan pertemanan selama ini.
- (7) Pak Udin, Mbak Ice, dan seluruh staf manajemen Pascasarjana Hubungan Internasional UI di Kampus Salemba. Terimakasih atas bantuannya selama ini yang sangat berarti.

- (8) Teman-teman dan dosen S1 HI FISIP UNPAD dan MM UGM. Terimakasih karena masih bersedia memberikan masukan bagi penulisan tesis ini, serta dukungan dan semangat yang kalian berikan.
- (9) Para keluarga dan sahabat yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang selalu setia mendukung, serta memberika doa selama ini.

Terima kasih atas semua bimbingan, dukungan, doa, dan cinta yang telah kalian berikan, dan semoga hubungan baik ini terus berlangsung. Karena kalianlah proses penulisan tesis ini akhirnya selesai, dan bersama kalianlah tesis ini penulis dedikasikan agar bermanfaat bagi perkembangan studi ilmu Hubungan Internasional.

Penulis,

Juni 2012



## DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
UCAPAN TERIMAKASIH	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR, GRAFIK, DAN TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH	xiv
<b>I. PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Signifikansi Penelitian	8
1.5. Tinjauan Pustaka	9
1.6. Kerangka Konseptual	14
Variabel Deneden – <i>Grand Strategy</i>	14
Variabel Independen – <i>Security Dilemma</i>	17
1.7. Model Analisa dan Operasionalisasi Konsep	21
1.8. Hipotesa	23
1.9. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	23
1.10. Sistematika Penulisan	25
<b>II. TINJAUAN KONSEP DILEMA KEAMANAN DAN STRATEGI AMERIKA SERIKAT TERHADAP CHINA 2002-2010</b>	<b>27</b>
2.1. Konsep Dilema Keamanan	27
2.2. Konsep Strategi dalam Tinjauan Dilema Keamanan	36
2.3. Indikator-indikator Pergeseran Strategi Keamanan Amerika Serikat Periode 2002-2010	44
2.3.1. Anggaran Belanja Militer dan Bantuan Luar Negeri	45
2.3.2. Aktivitas Diplomasi Keamanan dan Komitmen Kerjasama	53
2.3.3. Sebaran Pasukan dan Strategi	60

<b>III. PERKEMBANGAN DAN KOMPARASI INDIKATOR- INDIKATOR UTAMA KAPABILITAS MILITER CHINA 2002-2010</b>	<b>65</b>
3.1. Sumber Daya Strategis	65
3.1.1. Anggaran Pertahanan	66
3.1.2. Sumber Daya Manusia	73
3.1.3. Industri Pertahanan	79
3.2. Kapabilitas Konversi	85
3.3. Keandalan Tempur	92
3.3.1. Tank – <i>Main Battle Tank</i>	93
3.3.2. <i>Armoured Combat Vehicle</i>	94
3.3.3. <i>Artillery</i>	96
3.3.4. <i>Principle Surface Combatants</i>	98
3.3.5. <i>Submarine</i>	100
3.3.6. <i>Combat Aircraft</i>	101
3.3.7. <i>Attack Helicopter</i>	103
<b>IV. ANALISIS KEUNGGULAN DAN DIFERENSIASI OFENSIF- DEFENSIF: SEBAGAI PERTIMBANGAN RESIKO STRATEGI AMERIKA SERIKAT</b>	<b>107</b>
4.1. Penilaian Keunggulan Ofensif Defensif Amerika Serikat ditengah Peningkatan Kapabilitas Militer China	107
4.2. Penilaian Diferensiasi Ofensif Defensif dari Peningkatan Kapabilitas Militer China 2002-2010	119
4.3. Strategi Keamanan Amerika Serikat dan Mitigasi Dilema Keamanan	126
<b>V. KESIMPULAN DAN SARAN</b>	<b>131</b>
DAFTAR PUSTAKA	136



## DAFTAR GAMBAR, GRAFIK, DAN TABEL

### Gambar:

Gambar 1.1	Model Analisa	21
Gambar 1.2	Operasionalisasi Konsep	22
Gambar 2.1	Hubungan Kausalitas Anarki - Dilema Keamanan	35
Gambar 2.2.	<i>Realism's Ladder of Strategies</i>	42
Gambar 2.3	Keterlibatan AS dan China pada berbagai Organisasi / Institusi Internasional.	60
Gambar 2.4	Cakupan Wilayah Tanggung Jawab <i>US Command</i>	62
Gambar 3.1	<i>First and Second Islands Chain.</i>	88
Gambar 3.2	Jalur <i>Critical Sea Lanes</i> China	89
Gambar 3.3	<i>Area Anti-Acess</i> dan Jangkauan Misil China.	91
Gambar 3.4	Cakupan Jarak Misil China	105
Gambar 4.1	Kesimpulan Analisa mengenai Strategi Keamanan AS di tengah Peningkatan Kapabilitas Militer China 2002-2010	130

### Grafik:

Grafik 2.1	Distribusi dan Pertumbuhan Anggaran Belanja Militer AS	48
Grafik 2.3	Perbandingan Presentase Anggaran Perang dan Anggaran Operasional Non Perang AS Tahun 2002-2010	49
Grafik 2.4	Perbandingan Pertumbuhan <i>Foreign Military Aid</i> dan <i>Foreign Economic Aid</i> AS Tahun 2002-2010	50
Grafik 2.5	Jumlah Aktivitas Hubungan Pertananan dan Militer AS- China	53
Grafik 2.6	Jumlah Kontak Antara AS dan China Berdasarkan Cakupannya.	59
Grafik 3.1	Persentase Anggaran Pertahanan China dan AS terhadap GDP dan Anggaran Belanja Pertahanan	69
Grafik 3.2	Perbandingan Anggaran Pertahanan China dengan Negara-Negara lain di dunia	71
Grafik 3.3	Perbandingan Anggaran Pertahanan-Militer China dan Amerika Serikat 2002-2009	73
Grafik 3.4	Perbandingan Jumlah Pasukan Aktif China dan AS (Angkatan Laut, Udara, Darat)	78
Grafik 3.5	Perbandingan Jumlah <i>Tank</i> Milik AS dan China	93
Grafik 3.6	Perbandingan Jumlah <i>Armoured Combat Vehicle</i> Milik AS dan China	95

Grafik 3.7	Perbandingan Jumlah <i>Artillery</i> Milik AS dan China	97
Grafik 3.8	Perbandingan Jumlah <i>Principle Surface Combatants</i> Milik AS dan China	99
Grafik 3.9	Perbandingan Jumlah <i>Submarines</i> Milik AS dan China	101
Grafik 3.10	Perbandingan Jumlah <i>Combat Aircraft</i> Milik AS dan China	102
Grafik 3.11	Perbandingan Jumlah <i>Attack Helicopter</i> Milik AS dan China	104
Grafik 4.1	Estimasi Departemen Pertahanan AS terhadap Besaran Anggaran Pertahanan China 1996-2008	121
<b>Tabel:</b>		
Tabel 1.1	Deskripsi Operasionalisasi Konesp	22
Tabel 1.2	Deskripsi Pelaksanaan Penelitian	25
Tabel 2.1	Rangkuman Realisme Politik dan Hubungan Internasional, serta Tipologi Berbagai Aliran Pemikiran Realisme	30
Tabel 2.2	Perbedaan Dilema Keamanan Menurut Butterfield, Herz, dan Jervis	32
Tabel 2.3	Tipologi Empat Kondisi Dunia Robert Jervis	33
Tabel 2.4	Perbedaan Konsep Strategi dalam Paradigma, Realisme Ofensif, Realisme Defensif, dan Neoliberalisme	41
Tabel 2.5	Alokasi Anggaran Belanja Pertahanan AS tahun 2002-2010	47
Tabel 2.6	10 Negara Penerima Bantuan Terbesar AS Tahun 2002-2009	51
Tabel 2.7	Anggaran Bantuan AS kepada China 2002-2010	52
Tabel 4.1	Perhitungan Kekuatan Amerika Serikat	110
Tabel 4.2	Perhitungan Kekuatan China	111
Tabel 4.3	Perbandingan kekuatan China dan Kekuatan Amerika Serikat	112
Tabel 4.4	Data Perbedaan Jumlah Peralatan China terhadap AS tahun 2003-2010	113
Tabel 4.5	Pertumbuhan Anggaran Pertahanan dan GDP AS dan China (faktual dan proyeksi)	118

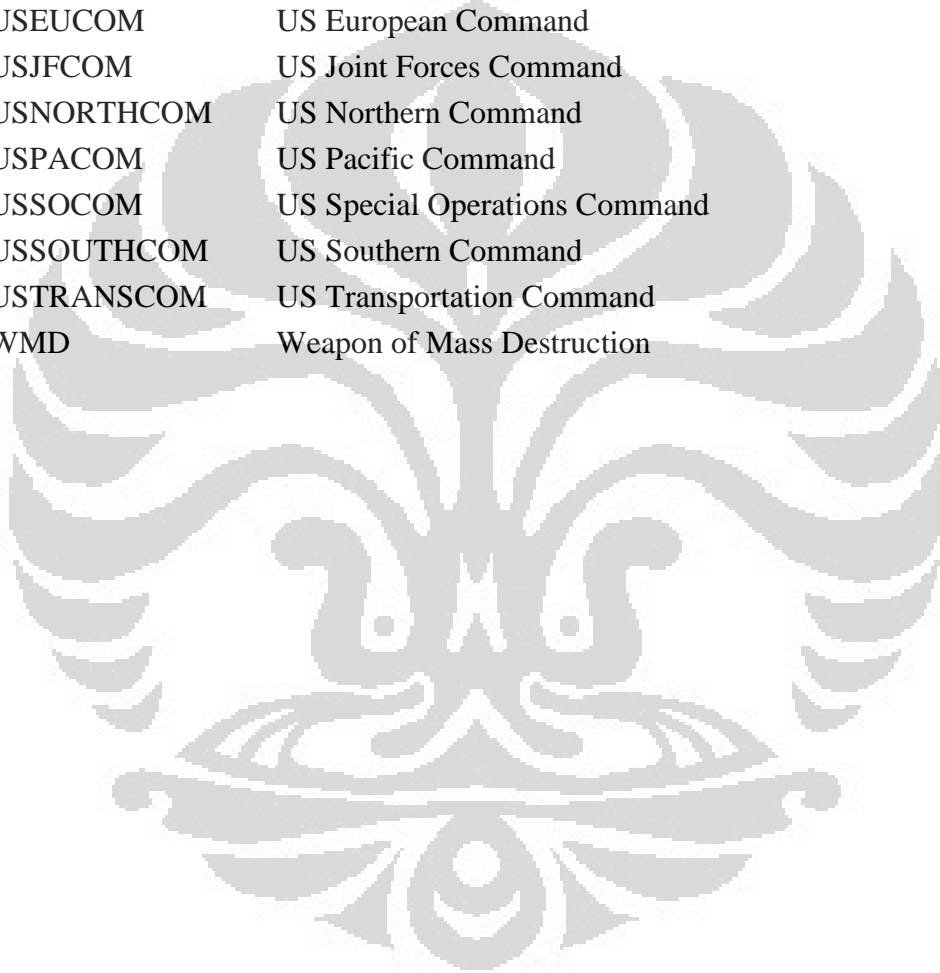
## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran 1:</b> Data Keseluruhan Ekonomi dan Anggaran Belanja Negara Amerika Serikat 2002-2010	143
<b>Lampiran 2:</b> Data Keseluruhan Anggaran Pertahanan Amerika Serikat 2002-2010	144
<b>Lampiran 3:</b> Bantuan Ekonomi dan Militer Amerika Serikat 2002-2009	144
<b>Lampiran 4:</b> <i>Timeline</i> Kontak Militer Amerika Serikat dan China 2002-2010	149
<b>Lampiran 5:</b> Penggalan Isi <i>National Security Strategy</i> dan <i>Military/Defense Strategy</i> Amerika Serikat dalam Kaitannya Dengan China, Sepanjang Periode 2002-2010.	160
<b>Lampiran 6:</b> Data Umum Ekonomi dan Anggaran Pertahanan China Periode 2002-2010	163
<b>Lampiran 7:</b> Perbandingan Anggaran Pertahanan China dengan Berbagai Negara 2002-2010	164
<b>Lampiran 8:</b> Alokasi Anggaran Pertahanan China 2002-2010	165
<b>Lampiran 9:</b> Perbandingan Jumlah Personil Militer dan Sipil Antara Amerika Serikat dan China 2002-2010	166
<b>Lampiran 10:</b> Struktur dan Pola Pengawasan Industri Pertahanan China	167
<b>Lampiran 11:</b> Sebaran Kekuatan Militer Amerika Serikat di Berbagai Negara dan Wilayah Dunia	168
<b>Lampiran 12:</b> Rekap Data Persenjataan China dan Amerika Serikat	175

## DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH

ACC	Air Combat Command
ACV	Armoured Transport Vehicle
AFSC	Air Force Space Command
AMC	Air Mobility Command
APSCO	Asia-Pacific Space Cooperation Organization
AS	Amerika Serikat
ATC	Air Traffic Control
CBMs	Confidence-Building Measures
CCP	Chinese Communist Party
CMC	Central Military Commission
COPUOS	United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space
COSTIND	Commission on Science, Technology, and Industry for National Defense
DCT	Defense Consultative Talks
DPCT	Defense Policy Coordination Talks
DWT	Deadweight Tonnage
ICBM	Intercontinental Range Balistic Missile
IFF	Identification, Friend or Foe
INCSEA	Incidents at Sea Protocol
GDP	Gross Domestic Product
GEO	Geostationary Orbit
GEODSS	Ground Based Electro Optical Deep Space Surveillance System
GLCM	Ground Launched Cruise Missile
GPS	Global Positioning System Navigation And Targeting
LACM	Land Attack Cruise Missile
MBT	Main Battle Tank
MLRS	Multi-Launch Rocket System
MMCA	Military Maritime Consultative Agreement
NATO	North Atlantic Treaty Organization
PACOM	Pacific Command
PLA	People's Liberation Army
RDT&E	Research, Development, Test, and Evaluation Institutions
R&D	Research and Development
S&ED	Stategic and Economic Dialogue

SAREX	Search and Rescue Exercise
SCO	Shanghai Cooperation Organization
SEWS	Satellite Early Warning Station
SIGNIT	Signals Intelligence
STRATCOM	Strategic Command
SRBM	Short Range Ballistic Missile
UNROCA	UN Register of Conventional Arms
USAFRICOM	US Africa Command
USCENTCOM	US Central Command
USEUCOM	US European Command
USJFCOM	US Joint Forces Command
USNORTHCOM	US Northern Command
USPACOM	US Pacific Command
USSOCOM	US Special Operations Command
USSOUTHCOM	US Southern Command
USTRANSCOM	US Transportation Command
WMD	Weapon of Mass Destruction



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Keamanan saat ini menjadi isu yang kian fundamental bagi keberlangsungan suatu negara di dalam dinamika hubungan internasional kontemporer. Keamanan sendiri merupakan tujuan dari kepentingan nasional suatu negara, yang dicapai dengan membangun serta mengimplementasikan suatu strategi keamanan berdasarkan pertimbangan rasional atas segala peluang dan tantangan yang dihadapinya. Pertimbangan ini menjadi kian kompleks ketika berbagai ancaman baru hadir dalam sistem internasional, yang melibatkan berbagai aktor negara dan non negara, mencakup berbagai isu keamanan tradisional dan non tradisional, serta dinamika dari kejatuhan maupun pertumbuhan kekuatan militer berbagai negara di dunia. Kondisi tersebut berlaku di banyak negara, termasuk yang kini dialami Amerika Serikat (AS).

Abad 21 merupakan periode yang penuh tantangan bagi stabilitas keamanan AS, yang awalnya menjadi hegemon dalam unipolaritas sistem internasional pasca berakhirnya Perang Dingin di tahun 1991. Dalam sepuluh tahun terakhir, AS menghadapi berbagai ancaman nasional meliputi ancaman kelompok terorisme yang menjadi signifikan khususnya sejak peristiwa 9/11 di tahun 2001, krisis keuangan sejak tahun 2007 yang kemudian berimplikasi pada perekonomian dan kehidupan sosial domestik; serta berbagai tantangan dan ancaman dari aktor negara dan non-negara lainnya. Pada periode ini AS juga dihadapkan pada kemunculan kekuatan-kekuatan negara-negara penanading seperti China, dengan pertumbuhan anggaran belanja militer<sup>1</sup> dan pertumbuhan ekonomi terbesar di dunia saat ini.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Angka pertumbuhan anggaran belanja militer China didukung oleh peningkatan GDP, mengalami pertumbuhan sebesar 19% menjadi sebesar US\$ 119 milyar, yang merupakan 7,3% dari total anggaran belanja militer dunia. Angka pertumbuhan AS ini adalah yang terbesar bila dibandingkan dengan negara lainnya. Bates Gill *et.all*, “*SIPRI Year Book 2011: Armaments, Disarmaments and International Security Summary*” (Stockholm International Peace Research Institute: 2011), hlm 8-9

<sup>2</sup> PDB China hingga Oktober 2011, telah tumbuh sebesar 9,1% atau berpotensi mencapai angka US\$ 7,3 trilyun pada akhir tahun 2011. Dalam <http://www.trading economics.com/china/gdp-growth>. Diakses pada 25 Oktober 2011, pukul 23.04

Diantara berbagai tantangan yang dihadapi AS, peningkatan kekuatan dan kapabilitas militer China merupakan salah satu perhatian yang penting. Keseriusan AS dalam melihat potensi ini bukan merupakan hal yang baru dan bahkan telah berlangsung sejak awal tahun 2000, ketika senat AS mengesahkan *National Defense Authorization Act (Section 1202)* yang merupakan bagian dari Undang-Undang Federal, dimana negara mengamanatkan pemerintah melalui Sekretaris Pertahanan untuk memberikan laporan tahunan mengenai:

*“...on the current and future military strategy of the People’s Republic of China. The report shall address the current and probable future course of military-technological development on the People’s Liberation Army and the tenets and probable development of Chinese grand strategy, security strategy, and military strategy, and of the military organizations and operational concepts, through the next 20 years.”<sup>3</sup>*

Laporan ini menggambarkan pentingnya perkembangan teknologi militer, strategi, serta organisasi militer China, baik pada saat ini dan masa yang akan datang bagi AS. Laporan ini juga ditujukan sebagai bahan pertimbangan bagi penetapan strategi keamanan AS, yang kemudian juga difokuskan pada berbagai indikator utama lainnya.

Sepanjang periode 2002-2010, fokus perhatian AS terhadap China meluas pada berbagai hal. Laporan tahunan sepanjang periode tersebut, mencatat peningkatan yang dilakukan China pada: anggaran pertahanan, perkembangan industri pertahanan, modernisasi militer *People’s Liberation Army (PLA)*, hingga kepemilikan *weapon of mass destruction (WMD)*, merupakan beberapa hal yang mengiringi peningkatan kapabilitas militer China dan membawa problematikanya tersendiri. Khusus pada masalah peningkatan anggaran pertahanan, AS menyebutkan bahwa China dengan peningkatan anggaran militer sebesar lebih dari 100 % selama periode delapan tahun terakhir, tidak transparan dalam memberikan laporan anggaran belanja militernya. Dalam konteks ini, AS mengestimasi secara faktual anggaran belanja militer China dapat mencapai lebih dari dua kali lipat anggaran yang diumumkan. Pada peningkatan industri pertahanan, AS mencermati peningkatan besar China terjadi khususnya pada *misille and space industry, shipbuilding industry, dan armament industry*. Dalam

<sup>3</sup> <http://www.defense.gov/pubs/china.html>. Diakses pada 25 Oktober 2011, pukul 23.08

hal ini China yang didukung kemajuan teknologi dan penguasaan sumber-sumber daya alam, diyakini AS telah mampu mengejar ketertinggalannya dan menjadi negara yang harus semakin diperhitungkan sebagai bagian dari kekuatan militer besar dalam sistem internasional. Sedangkan dalam mencermati peningkatan kekuatan angkatan bersenjata China, AS melihat perkembangan signifikan khususnya dalam hal jumlah dan teknologi persenjataan, dimana China telah melakukan penambahan dan pembaharuan persenjataan: tank, artileri, kapal perang, pesawat-pesawat tempur (jenis *ground attack*, *fighter*, dan *bombers*).<sup>4</sup>

Fokus perhatian AS juga mencakup pengembangan dan penempatan sistem persenjataan terbaru China. Laporan AS mencatat China saat ini terus melakukan pengembangan pesawat *fighter jet* J-20, uji coba *aircraft carrier* pertama dari total tiga unit yang diproduksi dan dikembangkan China, serta rampungnya pengembangan Dong Feng 21D (*land-based ballistic missile* pertama di dunia yang mampu menghancurkan *aircraft carrier* musuh dalam jarak 2.000 mil).<sup>5</sup> Peningkatan kekuatan militer China juga menjadi semakin signifikan dengan kepemilikan senjata nuklir berupa *intercontinental range ballistic missile* (ICBM), *short range ballistic missile* (SRBM), termasuk penambahan *Ground Launched Cruise Missile* (GLCM) berjarak tembak lebih dari 1.500 km. Dalam catatan AS, dari 1800 misil yang dimiliki China, 70 diantaranya berjarak lebih dari 7.200 km (seperti pada seri DF-31, DF-31A, CSS-4, dan JL-2) serta berpotensi mengandung material nuklir serta dapat menjangkau hingga wilayah daratan AS. Hal ini menambah kompleksitas pertimbangan keamanan AS, jika mengingat SRBM China sebelumnya ditempatkan pada titik-titik tertentu hingga dapat menjangkau wilayah Taiwan dan Jepang,<sup>6</sup> yang juga merupakan bagian dari kepentingan AS serta negara-negara utama mitra strategisnya di wilayah Pasifik. Yang mana dengan peningkatan persenjataan dan penempatan tersebut, China secara faktual berpotensi melakukan aksi yang bersifat ofensif terhadap AS.

<sup>4</sup> Lihat US Secretary of Defense, "Annual Reprt to Congress: Military and Security Developments Involving The People's Republic of China 2010" (US Department of Defense: 2010).

<sup>5</sup> <http://www.businessinsider.com/china-military-modernization-2011-1?slop=1#slideshow-start#ixzz1A119dF00>. Diakses pada 28 Maret 2011, pukul 23.22

<sup>6</sup> Lihat US Secretary of Defense, "Annual Report to Congress: Military Power of The People's Republic of China 2007" (US Department of Defense: 2007); dan "Annual Reprt to Congress: Military and Security Developments Involving The People's Republic of China 2011" (US Department of Defense: 2011).



Berbagai catatan AS mengenai tren peningkatan kapabilitas militer China sepanjang periode 2002-2010, pada saat bersamaan sejalan dengan perubahan perilaku China dalam berbagai hubungan politik kedua negara. AS bahkan mencatat intensitas arah aksi China bersifat fluktuatif, baik dalam percaturan politik internasional maupun regional, khususnya dalam bidang militer. Hal ini didasari sentralisasi kekuatan China di wilayah selat taiwan, serta perluasannya hingga ke Laut China Selatan dan Laut Pasifik.<sup>7</sup> Menanggapi hal tersebut, AS sejak tahun 2002 melalui *The Security Strategy of United States* secara normatif hanya mengingatkan kepada China agar tidak mengancam negara-negara tetangganya di dalam kawasan tersebut.<sup>8</sup> Tidak hanya itu, AS dan China seringkali berseberangan pendapat dalam berbagai kasus seperti: perbedaan posisi kedua negara pada isu Taiwan dan Korea Utara, penentangan China atas invasi AS terhadap Irak dan Libya, posisi China dalam masalah nuklir Iran, termasuk pertentangan kepentingan kedua negara dalam isu-isu perdagangan dan mata uang, yang keseluruhannya juga terjadi dalam kurun sepuluh tahun terakhir.

Fakta dari peningkatan kekuatan dan perubahan perilaku China dalam hubungan internasional tidak serta-merta merubah arah strategi keamanan AS, baik secara normatif melalui strategi keamanan yang dikeluarkan pemerintah setiap empat tahun sekali, maupun secara praktis. Contoh hal ini terlihat ketika kemajuan perkembangan persenjataan nuklir dan misil China dilaporkan departemen pertahanan AS pada tahun 2007 sebagai *initial threat*, yang hal ini tidak ditindaklanjuti lebih jauh dengan dikeluarkannya pernyataan resmi negara mengenai adanya ancaman China.<sup>9</sup> Hal serupa kembali terjadi pada 10 Maret 2011, dimana dalam sidang laporan kepada kongres, *US Director of National Intelligence* James Clapper menyebutkan bahwa arsenal nuklir China telah berada

<sup>7</sup> Lihat peta sebaran kekuatan angkatan militer China. *Ibid*, halaman 69-77

<sup>8</sup> Sebagian pendapat publik menyatakan himbauan ini tidak menunjukkan bahwa AS merasa terganggu dan terancam atas tindakan China tersebut, namun sebagian pendapat menyatakan hal ini adalah pernyataan AS atas adanya ancaman dari China, dikarenakan kenyataan bahwa, AS merupakan negara yang berada dalam wilayah yang sama dengan China, yaitu wilayah Pasifik. Geoff Metcalf mencatat ada lebih dari 3 juta tulisan membahas perdebatan ini dalam bentuk buku dan jurnal, yang membahas permasalahan status China yang mengancam. Geoff Metcalf, "China Is a Significant Threat to the U.S.". Dalam <http://archive.newsmx.com/archives/articles/2005/6/5/174150.shtml>. Diakses pada 25 Oktober 2011, pukul 23.28

<sup>9</sup> Kasus ini terjadi ketika pengembangan DF-31 pertama kali rampung, dan berlanjut pada tahun 2008 dengan selesainya pengembangan DF-31A. *Op.Cit, Annual Report to Congress: Military Power of The People's Republic of China 2007*, halaman I.

dalam status sebagai “*mortal threat*” bagi AS, dibandingkan dengan keberadaan senjata-senjata serupa yang dimiliki negara lain.<sup>10</sup> Menanggapi hal tersebut, pemerintah AS tetap tidak menaikkan status China sebagai ancaman negara serta tidak memperlihatkan peningkatan perhatian dan penanganannya, meskipun hal tersebut telah memicu perdebatan di kongres AS serta para pejabat pemerintahan AS khususnya dari kalangan militer.

Di tengah meningkatnya potensi aksi ofensif dan ancaman dari China, fokus strategi keamanan nasional AS tetap berada pada penanganan isu terorisme global, yang telah berlangsung sejak tahun 2001. “*War on terror*” atau perang terhadap terorisme yang dideklarasikan AS pada 20 September 2001 tidak lama setelah peledakan *World Trade Center* – New York dan Markas Militer AS *Pentagon* – Virginia pada tanggal 9 September 2001, justru tetap menjadi agenda utama nasional. AS menjadikan “*War on Terror*” sebagai ajakan, serta ancaman bagi negara-negara dan masyarakat dunia untuk berpihak pada AS dalam penuntasan terorisme global, dengan cara apapun dan tanpa batas waktu.<sup>11</sup> Bahkan pencapaian target *war on terror* seperti tumbangnya rezim Saddam Husein, wafatnya Osama bin Laden sebagai pimpinan jaringan Al Qaeda, serta suksesi Moammar Khadafy, tidak menurunkan intensitas aksi AS dalam memerangi terorisme global. Menjadikan isu kontra-terorisme ini seakan sangat penting bagi seluruh elemen di dalam sistem internasional pasca berakhirnya perang dingin, serta lebih signifikan dibandingkan potensi ancaman yang ditimbulkan China.

Tidak fokusnya strategi keamanan AS terhadap China, juga diiringi dengan semakin meningkatnya aksi defensif AS terhadap China baik secara normatif maupun praktis. Secara normatif, sebagaimana disebutkan dalam *The National Security Strategy of The United States of America* tahun 2002 hingga

<sup>10</sup> <http://www.washingtontimes.com/news/2011/mar/10/china-deemed-biggest-threat-to-us/?page=all>. Diakses pada 26 Oktober 2011, pukul 00.01

<sup>11</sup> Isi teks pidato Bush di depan *Congress and the American People* – Washington DC, 20 September 2001, 9pm, diantaranya berisi: “*Every nation, in every region, now has a decision to make.... Either you are with us, or you are with the terrorists..... This is the world's fight..... We will direct every resource at our command -- every means of diplomacy, every tool of intelligence, every instrument of law enforcement, every financial influence, and every necessary weapon of war -- to the disruption and to the defeat of the global terror network... This is civilization's fight. It may include dramatic strikes, visible on TV, and covert operations, secret even in success... A war on terror has no end...*”. Dalam <http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2001/09/20010920-8.html>, diakses pada 27 Oktober 2011, pukul 18.22

2010, AS tidak menyebutkan China dalam identifikasi mengenai ancaman keamanan nasional maupun target dalam pencegahan ancaman WMD serta pencegahan konflik; yang mana China justru disebut sebagai bagian dari negara tujuan kerjasama strategis AS.<sup>12</sup> Hal ini juga terlihat ketika di tahun 2006, ketika AS membuat pernyataan serupa dengan menyebutkan akan membina kerjasama harmonis dengan China, jika negara tersebut memegang komitmen kerjasama yang berlangsung saat ini, serta memperbaharui berbagai hal seperti: tindakan tidak transparan dan dukungan China pada negara-negara yang bermasalah dengan AS, serta ekspansi perdagangan China yang berpotensi merugikan AS.<sup>13</sup> Bahkan pada tahun 2010, AS menanggapi keberadaan China dengan menyatakan:

*“We will monitor China’s military modernization program and prepare accordingly to ensure that U.S. interests and allies, regionally and globally, are not negatively affected. More broadly, we will encourage China to make choices that contribute to peace, security, and prosperity as its influence rises. We are using our newly established Strategic and Economic Dialogue to address a broader range of issues, and improve communication between our militaries in order to reduce mistrust.”<sup>14</sup>*

Meski terlihat peningkatan intensitas tanggapan AS mengenai posisi China, pernyataan tersebut memperlihatkan pula komitmen AS untuk meningkatkan kerjasama dengan China.

Wujud lain dari peningkatan intensitas defensif AS juga ditunjukkan melalui proses penciptaan *strategic partner* yang terjadi di tahun 2009. AS menggagas diadakannya *US-China Strategic and Economic Dialogue (S&ED)*, yang merupakan langkah konstruktif hubungan politik, pertahanan dan ekonomi kedua negara. Gagasan AS ini kemudian mendapat tanggapan positif dari pemerintah China dan direalisasikan pada April 2009.<sup>15</sup> Dialog ini kemudian melahirkan *US-China Joint Statement* pada November 2009, yang berisi kesepakatan enam aspek strategis dari hubungan kedua negara.<sup>16</sup>

<sup>12</sup> President of The United States, *“The National Security Strategies of The United States of America 2002”*, (White House: 2002), halaman 27

<sup>13</sup> President of The United States, *“The National Security Strategies of The United States of America 2006”*, (White House: 2006), halaman 41-42

<sup>14</sup> President of The United States, *“The National Security Strategies of The United States of America 2010”*. (White House: 2010), halaman 43

<sup>15</sup> <http://www.treasury.gov/initiatives/Pages/china.aspx>, diakses pada 27 April 2012, pukul 22.00

<sup>16</sup> Aspek-aspek strategis kerjasama ini, mencakup: : (1) *Strengthening U.S. - China Relations*, (2) *Promoting High-Level Exchanges*, (3) *Addressing Regional and Global Challenges*, (4)

Meningkatnya kapabilitas militer China selama tahun 2002-2010, dapat disimpulkan justru sejalan dengan strategi keamanan AS yang dalam konteks normatif maupun praktis, memperlihatkan peningkatan aksi yang bergerak ke arah yang lebih bersifat defensif dan kooperatif. Kondisi ini berbeda dari karakteristik ofensif AS yang umumnya muncul dalam menghadapi berbagai tantangan dan ancaman negara, seperti yang terlihat dalam aksi-aksi AS menghadapi potensi ofensif dari: Irak, Iran, Libya, Korea Utara, dan beberapa negara lainnya, yang juga hadir di periode yang sama. Secara faktual kondisi ini menjadi menarik untuk diperhatikan, mengingat kekuatan China hingga saat ini terus mengalami peningkatan ditengah berbagai problematika yang sedang dihadapi AS.

## 1.2. Rumusan Masalah

Penjabaran mengenai latar belakang kondisi kedua negara pada tahun 2002-2010 menghasilkan beberapa kesimpulan. *Pertama*, perbedaan sifat strategi AS terhadap China tidak sepenuhnya berlaku dalam strategi AS terhadap negara lain yang juga memiliki potensi untuk bersifat ofensif. *Kedua*, peningkatan intensitas strategi AS ke arah defensif dan kooperatif terhadap China, tidak hadir secara insidental semata (seperti disebabkan karena faktor ekonomi yang memiliki relasi dengan terjadinya krisis keuangan global sejak 2007), namun telah berlangsung sejak awal abad 21 (seperti dilihat dari kerjasama *war on terror* dan deskripsi strategi keamanan 2002 dan 2006). Serta *ketiga*, gambaran kondisi AS dalam arah strategi pertahanannya memperlihatkan hal yang berbeda dari asumsi yang selama ini diyakini peneliti Hubungan Internasional khususnya dari perspektif realisme maupun neorealisme.

Pemikiran neorealisme umumnya berasumsi bahwa dalam kondisi anarki, negara berada pada keadaan *competition* dan *self help condition*. Karenanya dalam konteks kewananan internasional, aksi negara akan sangat dipengaruhi oleh peningkatan kekuatan negara lain, dimana: “*the systemic conditions that influence*

---

*Building a Comprehensive and Mutually Beneficial Economic Partnership*, (5) *Cooperating on Climate Change, Energy and the Environment*, dan (6) *Expanding People-to-People Exchanges*. Dalam <http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/01/19/us-china-joint-statement>, diakses pada 27 April 2012, pukul 23.30

*the ways in which states make each other feel more or less secure*".<sup>17</sup> Yang lebih lanjut, peningkatan kapabilitas militer China dalam konteks *high-politics*, seharusnya akan memicu kondisi dilema keamanan, dimana:

*"Rising and declining powers threaten each other's security, and the economic and military measures states take to preserve their security are easily, and often rightly, seen by others as threatening."*<sup>18</sup>

Strategi AS selama sepuluh tahun terakhir ini, memperlihatkan perbedaan dari asumsi tersebut. Apa yang terjadi dalam arah strategi AS memperlihatkan bahwa peningkatan kekuatan suatu negara yang dalam hal ini adalah China, tidak serta merta menjadikan AS harus bertindak ofensif ditengah potensi ancaman yang mungkin muncul dari China. Berdasarkan penjabaran tersebut, tulisan ini akan mencoba menganalisis permasalahan yang fokus pada pertanyaan yaitu: *"Mengapa strategi keamanan Amerika Serikat mengalami peningkatan intensitas ke arah defensif terhadap China yang mengalami peningkatan kapabilitas militer sepanjang periode 2002-2010?"*, khususnya pada aspek keamanan dan militer.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penyebab pergerakan intensitas defensif dari strategi keamanan AS terhadap China yang mengalami peningkatan kapabilitas militer sepanjang periode tahun 2002-2010. Tulisan ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan arah strategi keamanan AS, dan mendeskripsikan komparasi kapabilitas militer AS dan China pada periode yang sama. Sedangkan tujuan terakhir dari tulisan ini adalah untuk menganalisis eksistensi konsep dilema keamanan dalam pertimbangan strategi AS.

### **1.4. Signifikansi Penelitian**

Tulisan ini diharapkan dapat membantu pemerhati keamanan internasional dalam memahami kompleksitas dari pembentukan strategi keamanan sebagai landasan utama dari keseluruhan strategi negara menghadapi ancaman yang

<sup>17</sup> Barry Buzan, *"People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era"*, 2<sup>nd</sup> ed, (New York: Harvester Wheatsheaf, 1991), halaman 12-13

<sup>18</sup> *Ibid*, halaman 234

dipersepsikannya, beserta indikator-indikator utama yang menjadi pertimbangan rasional untuk menghadapi ancaman tersebut. Tulisan ini juga diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi serta penjelasan mengenai strategi keamanan Amerika Serikat terhadap China khususnya pada periode 2002-2010, serta memberikan gambaran proyeksi pergeseran intensitas strategi keamanan tersebut di waktu yang akan datang. Yang pada akhirnya tulisan ini diharapkan dapat memperkaya keilmuan Hubungan Internasional, khususnya dalam menjelaskan pentingnya kerjasama dengan tetap melihat pentingnya kekuatan militer ditengah dinamika hubungan internasional di abad 21, sebagaimana perspektif defensif neorealisme.

### **I.5. Tinjauan Pustaka**

Berbagai penelitian mengenai strategi keamanan AS di era *war on terror* dan peningkatan kapabilitas militer China di abad 21, telah banyak dilakukan oleh berbagai akademisi Hubungan Internasional. Umumnya berbagai penelitian yang ada memfokuskan pada salah satu tantangan atau ancaman yang dihadapi AS, baik atas strategi yang diterapkan AS dalam hal penanganan terorisme, maupun dalam hal menanggapi peningkatan kekuatan China. Hal ini menunjukkan pula besarnya perhatian para akademisi atas intensitas dan semakin signifikannya peran aktor-aktor keamanan baik negara maupun non-negara di dalam sistem internasional, serta pengaruhnya dalam menggeser intensitas strategi keamanan suatu negara. Tinjauan pustaka ini akan melihat berbagai hasil analisis dari berbagai publikasi, baik berupa buku, jurnal, maupun penelitian ilmiah, yang telah dilakukan sebelumnya dari berbagai perspektif, khususnya dengan memperhatikan signifikansi lingkungan eksternal (kondisi di dalam sistem internasional) sebagai pertimbangan utama AS dalam menetapkan strategi keamanan nasionalnya.

Penelitian sebelumnya yang juga mendasari tulisan ini adalah dari Barry R. Posen dan Andrew L. Ross dalam "*Competing Visions of US Grand Strategy*", yang mengambil *setting* penelitian dalam kondisi dinamika internasional pasca Perang Dingin. Setidaknya pada masa tersebut, Posen dan Ross menyatakan ada empat *grand strategy* yang secara relatif diperdebatkan untuk menjelaskan strategi keamanan yang dapat diimplementasikan AS, yaitu: *neo-isolationism*; *selective engagement*; *cooperative security*; dan *primacy*. Keempat konsep tersebut

kemudian digunakan Posen dan Ross untuk menjelaskan bagaimana premis utama melihat politik internasional, terutama dalam memahami maksud dan tujuan AS.

Posen dan Ross kemudian melakukan analisis dengan memperbandingkan keunggulan masing-masing konsep strategi dengan berbagai kritik dari para akademisi lainnya. Analisis Posen dan Ross melibatkan berbagai dimensi seperti: pengaruh AS dalam sistem internasional, sifat dari negara dalam politik internasional, pengaruh persenjataan (nuklir khususnya) dalam pencapaian kepentingan, dan berbagai hal lainnya; serta melibatkan pula objek pembandingan yaitu hubungan AS dengan aliansinya (NATO); termasuk dalam hubungannya menanggapi negara-negara lain, seperti China, Irak, dan Iran. Meskipun tidak menganalisis lebih lanjut dan memfokuskan pada aktor-aktor non negara, analisis Posen dan Ross membuka peluang atas munculnya kemungkinan ancaman aktor non-negara dalam mempengaruhi keseluruhan *grand strategy* suatu negara.

Dalam kesimpulannya, Posen dan Ross menyatakan bahwa berbagai konsep strategi akan membawa konsekuensi masing-masing terhadap maksud dan tujuan kepentingan AS, khususnya menyangkut tiga hal, yaitu: konsekuensi mengenai pentingnya AS dalam menggunakan *force* di luar negeri, konsekuensi pada terciptanya *force structures* berbeda, serta adanya kemungkinan melakukan *mix and match* atas komponen masing-masing strategi, meski secara utuh sulit diterapkan karena sifat keempat konsep tersebut pada dasarnya tidak sepenuhnya *mutually exclusive*. Dengan konsekuensi yang ada, perhitungan rasional atas kemungkinan munculnya kegagalan menjadi penting untuk dipertimbangkan.<sup>19</sup>

Berbeda dari penelitian sebelumnya, Keir A. Lieber dan Gerald Alexander dalam “*Waiting for Balancing: Why the World Is Not Pushing Back*” secara eksplisit menjelaskan permasalahan strategi negara-negara, baik AS maupun penantang kekuatan AS; khususnya di era *war on terror* dalam invasi AS ke Irak serta pengaruhnya terhadap negara lain seperti dalam hal ini China. Dalam kondisi ini berbagai negara di dunia memperlihatkan penurunan perilakunya dalam melakukan *balancing* terhadap AS, yang pada sisi lainnya memperlihatkan peningkatan pula ancaman terhadap AS dari kelompok-kelompok terorisme.

---

<sup>19</sup> Barry R. Posen dan Andrew L. Ross, “Competing Visions of US Grand Strategy”, *International Security* Vol. 21, No. 3 (Winter, 1996-1997), MIT Press, halaman 5-53



Dimana hal ini diamati sebagai bentuk adanya celah dari penjelasan teori-teori realis klasik.

Lieber dan Alexander kemudian menyebutkan adanya pola bahwa saat ini *balancing* dari suatu negara atas ancaman yang dipersepsikannya, tidak hanya hadir atas permasalahan *raw power*. Mengadopsi pemikiran Stephen Walt, ancaman negara saat ini meluas dan merupakan kombinasi dari komponen *aggregate power, geography, technology, intentions, and foreign policy behavior*. Dengan adanya ancaman tersebut, AS kemudian menghadapi *simetric balancing*, baik *hard* maupun *soft balancing* dari aktor-aktor negara, serta mengalami *asymetric balancing* dari kelompok-kelompok terorisme.

Dalam kesimpulannya Lieber dan Alexander, mengemukakan bahwa saat ini *balancing* terhadap AS tidak secara umum dan nyata hadir, bukan dikarenakan karena negara lain tidak memiliki kapabilitas kekuatan dalam menandingi AS, melainkan perhitungan atas bagaimana hubungan antara AS dan jaringannya termasuk aliansinya dibangun. Dimana AS memanfaatkan hal ini sebagai bentuk dari *counter-balancing* dari negara-negara yang mungkin mengancamnya.<sup>20</sup>

Analisis mengenai strategi AS juga dibahas dalam tulisan G. John Ikenberry dalam “*America’s Imperial Ambitions*” yang menganalisis bagaimana *war on terrorism* telah menjadi *US grand strategy* ditengah dunia yang unipolar saat ini. Dalam kondisi seperti ini setidaknya ada tujuh elemen dari *grand strategy* AS, meliputi:

- *fundamental commitment to maintaining a unipolar world in which the United States has no peer competitor,*
- *dramatic new analysis of global threats and how they must be attacked,*
- *the new strategy maintains that the Cold War concept of deterrence is outdated,*
- *this new emerging grand strategy involves a recasting of the terms of sovereignt,*
- *this new grand strategy is a general depreciation of international rules, treaties, and security partnerships,*
- *the new grand strategy argues that the United States will need to play a direct and unconstrained role in responding to threats,*

<sup>20</sup> Keir A. Lieber dan Gerald Alexander, “Waiting for Balancing: Why the World Is Not Pushing Back”, *International Security* Vol. 30, No. 1 (Summer, 2005) MIT Press, halaman 109-139



- *the new grand strategy attaches little value to international stability.*"

Ikenbery memberikan argumen bahwa saat ini sebagaimana perang-perang yang telah terjadi sebelumnya dan dengan kondisi sistem internasional, telah merubah cara negara-negara besar melakukan perang, membangun perdamaian, dan membangun strategi keamanannya, serta mempengaruhi sistem internasional. Dimana dalam memobilisasi sumber daya yang dimilikinya, kini perang dan strategi tidak hanya dijalankan demi tujuan mengalahkan musuh.

Pada akhirnya Ikenbery menyimpulkan bahwa meski tetap mempertahankan kondisi unipolar, AS secara rasional akan menjauhkan dari penerapan kekerasan dalam pencapaian *power* yang dikehendaknya atas negara-negara penantang. Dimana hal ini dilakukan bukan dengan mengubah strategi negara secara keseluruhan, yang justru dapat membahayakan AS dan keseluruhan sistem internasional, melainkan dengan memperkuat kerjasama dengan mitra-mitranya.<sup>21</sup>

Christopher Layne dalam "*From Preponderance to Offshore Balancing: America's Future Grand Strategy*", meski ditulis dengan latar belakang permasalahan berbeda, memberi perspektif tambahan pada bagaimana prediksi *grand strategy* AS di abad 21 yang penuh problematika, tantangan dan ancaman.

Layne memulai analisisnya dengan mengkritisi *preponderance balancing* yang diterapkan AS selama ini sejak era 1940. Kunci utama dari strategi ini merupakan gambaran dari bagaimana kekuatan politik, militer dan ekonomi AS, serta nilai-nilai yang dibawanya, digunakan untuk memaksimalkan kontrol AS terhadap sistem internasional. Dalam kondisi ini AS cenderung akan menghadapi langsung segala kekuatan pesaing yang muncul dan dianggap membahayakan interdependensi ekonomi, sebagai kepentingan kemananan utama AS. Karenannya strategi dibangun untuk menghadapi segala bentuk aksi yang mengancam hal tersebut.

Sebagaimana perdebatan *preponderance* dan *offshore balancing*, strategi AS juga berada di tengah perdebatan antara *offensive realism* dan *defensive*

---

<sup>21</sup> G. John Ikenbery, "America's Imperial Ambitions", *Foreign Affairs* Vol. 81, No. 5 (Sep. - Oct., 2002) Council of Foreign Relations, halaman 44-60

*realism*. Perbedaan keduanya bukan hanya terletak pada penggunaan aksi-aksi yang bersifat *soft* ataupun *hard* dalam interaksi yang dilakukan negara, serta dasar pemikiran yang bersifat pesimistis dan optimistis dalam memandang sistem dan aktor-aktor internasional, namun yang terpenting adalah bagaimana bagi *offensive realism* mengasumsikan bahwa *power maximizing* menjadi dasar aksi negara, sedangkan *defensive realisme* mempercayai *security maximizing* lebih baik. Layne yang melakukan analisis mengenai masa depan sistem internasional, memprediksikan bahwa AS akan berada ditengah pergeseran dari unipolar ke multipolar. Yang kemudian mendorong AS harus melakukan pergeseran strategi utama yang digunakannya, ke arah *offshore balancing*.

Dalam kesimpulannya, Layne menutup analisisnya dengan menyatakan AS tidak lagi dapat bertahan dengan pemikirannya untuk memperbesar kekuatannya dengan mengorbankan keamanannya, ketika menyadari bahwa kondisi politik internasional merupakan suatu hal yang dinamis dan bukan statis. Karenanya akan lebih aman bagi AS dan sistem internasional ketika negara menghindari ambisi eksternal dan intervensinya terhadap aktor-aktor internasional lain. Bagi Layne hal ini tidak hanya akan lebih efektif dan efisien sebagai strategi masa depan AS karena pengaruhnya terhadap keamanan negara, tetapi juga menghasilkan minimnya resiko yang ditimbulkan.<sup>22</sup>

Tulisan terakhir dalam tinjauan pustaka ini adalah karya Colin Dueck yang berjudul "*Ideas and Alternatives in American Grand Strategy 2000-2004*". Tulisan ini mengkritik ide-ide dibalik *grand strategy* AS pada tahun 2000-2004. Dueck yang berangkat dari pemikiran *structural realism* mengasumsikan bahwa idealnya kebijakan strategi keamanan suatu negara dibangun dan dipengaruhi oleh kondisi sistem internasional yang berlaku. Dimana dalam era tersebut AS menerapkan dua strategi bersamaan mencakup invasi ke Afganistan dan Irak dalam rangkaian *war on terror*, meski untuk tujuan berbeda.

Bagi Dueck kegagalan AS dalam membangun *grand strategy*-nya saat itu tidak merepresentasikan bagaimana kepentingan AS dalam mengamankan dan menjaga stabilitas sistem internasional atas dua kasus tersebut. Pada kasus

---

<sup>22</sup> Christopher Layne, "From Preponderance to Offshore Balancing: America's Future Grand Strategy", *International Security* Vol. 22, No. 1 (Summer, 1997) MIT Press, halaman 86-124

serangan ke Afganistan, tujuan AS adalah memerangi kelompok terorisme Al-Qaeda yang secara jelas dapat dikategorikan sebagai aktor yang mengancam. Namun dalam kasus Irak, aksi AS tidak merepresentasikan secara keseluruhan adanya ancaman bagi AS dan sistem internasional. Dueck menyimpulkan bahwa selain pertimbangan masalah identifikasi ancaman dan sumber ancaman yang jelas, suatu strategi harus diimplementasikan dengan pertimbangan agresifitas yang berbeda pula.<sup>23</sup>

### 1.6. Kerangka Konseptual

Berbagai penelitian yang ada, sebagaimana dijelaskan pada tinjauan pustaka, menjelaskan bahwa kondisi sistem internasional dan berbagai faktor material akan saling mempengaruhi strategi AS ditengah berbagai tantangan yang dihadapinya saat ini. Peningkatan aksi dan intensitas defensif dan kooperatif menjadi penting bagi AS, ditengah segala tantangan yang dihadapinya di abad 21. Oleh karena itu, tulisan ini menggunakan berbagai konsep dan teori, yang mampu menjelaskan peningkatan intensitas defensif strategi AS ditengah meningkatnya potensi China melakukan aksi ofensif yang berpotensi mengancam AS, yaitu teori dilema keamanan dari Robert Jervis. Sejalan dengan itu, tulisan ini juga menggunakan konsep kapabilitas militer dan *offense defense balance* sebagai alat ukur variabel independen, serta konsep *grand strategy* sebagai alat ukur variabel dependen.

#### *Variabel Dependen – Grand Strategy*

Strategi keamanan sering disebut dalam istilah berbeda, yaitu sebagai *grand strategy*. Colin Dueck menyatakan *grand strategy* melibatkan kesadaran negara atas identifikasi dan prioritas atas tujuan akhir dari kebijakan luar negeri, identifikasi sumber-sumber daya potensial yang dimiliki, serta pemilihan rencana dalam memanfaatkan sumber daya yang ada guna mencapai tujuan tersebut<sup>24</sup>. Dalam perumusannya, setiap strategi negara akan melalui tiga proses utama yaitu, yang dijabarkan Christopher Layne meliputi:

<sup>23</sup> Colin Dueck, "Ideas and Alternatives in American Grand Strategy 2000-2004", *Review of International Studies* Vol. 30, No. 4 (Oct., 2004) Cambridge University Press, halaman 511-535

<sup>24</sup> *Ibid*, halaman 512

- Penentuan kepentingan keamanan paling vital bagi negara,
- Identifikasi ancaman-ancaman terhadap kepentingan tersebut,
- Dan penentuan cara terbaik untuk mengerahkan sumber daya secara politik, militer, bahkan ekonomi, untuk melindungi kepentingan yang ada.<sup>25</sup>

Strategi suatu negara tidak bersifat statis, melainkan dinamis sesuai dengan perubahan-perubahan faktor domestik dan sistemik yang terjadi pada suatu waktu. Dueck dalam pembahasan lebih mendalam, menjelaskan perubahan intensitas ataupun strategi negara dalam konsep *strategic adjustment*, bahkan mungkin terjadi secara signifikan. Perubahan ini dikarenakan adanya pergeseran asumsi atas berbagai faktor seperti: anggaran belanja pertahanan, bantuan luar negeri, perilaku aliansi, sebaran pasukan, hingga aktivitas diplomasi, serta pola negara terhadap negara lawan.<sup>26</sup> Faktor-faktor tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dipengaruhi faktor kondisi internasional sebagaimana argumen kaum *structural realist*. Sedangkan sebagian lain menganggap faktor internal negara (*strategic ideas*) dari para pembuat kebijakan merupakan faktor yang signifikan.<sup>27</sup> Dikarenakan tulisan ini menggunakan pendekatan neorealisme yang memfokuskan bahwa “*international relations conceive the international system as a set of elements (nation-states) that interact in an anarchic world*”. Negara, termasuk pembuat kebijakan luar negeri yang merepresentasikan negara, bertindak cenderung seragam khususnya dalam memaksimalkan keamanannya, dengan memperhatikan pula aksi-aksi yang dilakukan oleh negara lainnya di dalam sistem internasional. Hal ini, sebagaimana disimpulkan oleh Majeski dan Fricks:

<sup>25</sup> Christopher Layne. *Loc.Cit*, halaman 88

<sup>26</sup> Perubahan strategi dapat diidentifikasi dari berbagai pertanyaan, diantaranya: *Do perceptions of external threats change, Is military spending raised or lowered?, Are alliance commitments extended or withdrawn?, Is foreign aid increased or decreased? Does the state engage in significant new diplomatic initiatives, or does it disengage from existing diplomatic activities?*, serta *does the state adopt a more aggressive and confrontational stance towards potential adversaries, or does it adopt a less confrontational stance?*. Dalam Colin Dueck, *Loc.Cit*

<sup>27</sup> Dueck dalam argumennya mengenai *strategic ideas*, tidak menolak adanya tekanan atas pemikiran para pembuat kebijakan yang dipengaruhi faktor kondisi internasional. Namun berbagai faktor lain yang penting justru mencakup adanya: 'belief systems', 'operational codes', 'policy paradigms', atau 'policy ideas' dari para pembuat kebijakan. Lihat *Ibid*. Halaman 519-522

*“Yet, a nation-state's ability to achieve these objectives is almost always a function of the actions of other nation-states in the international system.”*<sup>28</sup>

Berbagai arah intensitas dalam pergeseran strategi suatu negara khususnya dalam konteks ofensif dan defensif, disimpulkan oleh Shipping Tang dalam *Realism's Ladder of Strategies*. Tang membagi sifat strategi ke dalam beberapa jenjang, yakni: *preventive war, active containment, pasive containment, engagement, security competition, do nothing*, serta *appeasement*.<sup>29</sup> Urutan strategi tersebut merupakan opsi strategi yang umumnya dapat digunakan negara, dari yang bersifat paling ofensif hingga ke yang bersifat defensif. Sebagaimana dikemukakan para peneliti *defensive realism* yang menyatakan: *“the international system provides incentives for expansion only under certain conditions”*, membuat negara baik dalam merumuskan maupun merubah intensi suatu strategi, dalam kenyataannya akan memperhitungkan keuntungan yang dapat dicapai serta biaya yang mungkin muncul. Sehingga meski dalam kondisi anarki sistem internasional dimana peningkatan keamanan negara akan mengurangi keamanan negara lainnya, pola ekspansionis dan ofensif belum tentu akan digunakan oleh negara.<sup>30</sup>

Strategi keamanan negara dengan begitu merupakan suatu konsep yang kompleks dan melibatkan berbagai konsep lain dalam analisisnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Jeffrey W. Taliaferro menambahkan bahwa ada empat asumsi mengenai bagaimana variabel struktural dapat diterjemahkan menjadi *international outcomes* dan kebijakan, yang juga dalam bentuk strategi negara, yakni:<sup>31</sup>

- Pertama, dilema keamanan adalah *intractable feature* dari anarki.

<sup>28</sup> Krasner 1978, 1991; Waltz 1979; Gilpin 1981, 1987; Lebow 1981; Walt 1987; Gowa 1989; Grieco 1988. Dalam Stephen J. Majeski and Shane Fricks, “Conflict and Cooperation in International Relations”, *The Journal of Conflict Resolution* Vol. 39 – No. 4 (December 1995) California: SAGE Publications Inc, halaman 622-623

<sup>29</sup> Schweller menjelaskan setidaknya ada enam opsi strategi yang dapat dipilih negara, yaitu: *preventive war, balancing, bandwagoning, binding, engagement*, dan *distancing/buckpassing*. Sedangkan bagi Copeland opsi tersebut mencakup: *reassurance, doing nothing, deterrence/containment, crisis initiation*, and *preventive war*. Lihat Shipping Tang, *Op.Cit*, Shipping Tang, “*A Theory of Security Strategy for Our Time*” (Palgrave MacMillan: 2010), halaman 100-103

<sup>30</sup> Istilah *offensive* dan *deensive realism* dipopulerkan oleh Jack Snyder, serta Robert Jarvis dan Stephen M. Walt (*defensive realism*). Dalam Jeffrey W. Taliaferro, “Security Seeking under Anarchy: Defensive Realism Revisited”, *International Security* Vol.25, No.3, Winter 2000-2001), halaman 128-129

<sup>31</sup> *Ibid*, halaman 131

- Kedua, *structural modifiers* seperti *offense-defense balance*, *geographic proximity*, dan akses ke sumber daya, *gross distribution of power*, serta faktor material lainnya, meningkatkan atau menurunkan kecenderungan konflik, serta mempengaruhi dilema keamanan,
- Ketiga, kekuatan material tersebut mempengaruhi pola aksi negara, dengan menjadi medium dalam kalkulasi dan persepsi suatu kebijakan.
- Terakhir, politik domestik membatasi efisiensi dari respon negara terhadap lingkungan eksternal.

### ***Variabel Independen – Security Dilemma***

Dari penjabaran Collin Dueck, Shipping Tang, Christopher Layne, dan Jeffrey W. Taliaferro dapat dirangkum bahwa strategi melibatkan pertimbangan negara terhadap variabel-variabel yang langsung berhubungan dengan strategi yaitu sumber daya yang dimiliki negara dan faktor material dari negara lain. Dua faktor utama ini adalah bagian dari indikator pengukuran kapabilitas negara, yang disebut Christopher Layne dan kawan-kawan yang terdiri dari *strategic resources*, *conversion capability*, hingga *combat proficiency*.<sup>32</sup> Sumber daya strategi dalam hal ini dapat diukur dari anggaran, industri, dan sumber daya manusia di bidang pertahanan; sedangkan kemampuan konversi melibatkan doktrin dan cakupan strategi negara; dimana kemampuan tempur dapat diartikan sebagai kemampuan kekuatan militer untuk menghalau ancaman dan menjalankan operasinya.

Secara definitif, kapabilitas militer menurut Glaser dan Kaufman secara sederhana dapat dinyatakan sebagai “*state’s ability to perform military missions*”,<sup>33</sup> yang erat kaitannya dengan kekuatan negara untuk mempertahankan dirinya dari segala lawan, baik luar negeri maupun domestik, dan secara stimultan

<sup>32</sup> *Strategic resources* dimaksudkan segala sumber dan modal pertahanan negara seperti: anggaran belanja militer, institusi dan industri pertahanan, infrastruktur militer, dan sumber daya manusia. Negara yang memiliki *strategic resources* tinggi belum tentu akan memiliki kapabilitas militer tinggi tanpa faktor *conversion capability*. *Conversion capability* dimaksudkan sebagai: doktrin, ancaman, kapasitas inovasi, hubungan sipil-militer, serta hubungan militer dengan negara lain. Perpaduan kedua faktor tersebut menghasilkan *combat proficiency* yang menggambarkan kapabilitas militer suatu negara. Ashley J. Tellis, Janice Bially, Christopher Layne, Melissa McPherson, “*Measuring National Power in the Postindustrial Age*”, (RAND: 2000), halaman 137-145

<sup>33</sup> Charles L. Glaser dan Chaim Kaufmann, “What is the Offense-Defense Balance and Can We Measure it?”, *International Security* Vol.22 No.4 (Spring 1998) Massachusetts: MIT Press, halaman 45

membantu negara mengejar kepentingannya.<sup>34</sup> Hubungan antara faktor materi (*struktural modifiers*) dan strategi sebagaimana dijelaskan sebelumnya, juga memiliki relasi dengan teori *offense-defense balance*, dimana prediksi umum dari teori ini menyatakan:

*“International conflict and war are more likely when offense has the advantage, while peace and cooperation are more probable when defense has the advantage.”*<sup>35</sup>

Berdasarkan penjabaran di atas, teori **dilema keamanan** dari Robert Jervis akan digunakan dalam penelitian ini sebagai teori utama yang menjelaskan hubungan antara terjadinya peningkatan kekuatan dan kapabilitas militer China terhadap strategi keamanan AS. Jervis menggunakan dua dasar pemikiran dalam menjabarkan *security dilemma*, yaitu:

- *whether defensive weapons and policies can be distinguished from offensive ones*, serta
- *Whether the defense or the offense has the advantage.*

Dalam argumennya Jervis menyatakan, ketika senjata dan kebijakan defensif dapat dibedakan intensitasnya dari senjata dan kebijakan ofensif, maka mungkin bagi negara untuk lebih mengamankan dirinya tanpa membuat negara lain merasa tidak aman. Selain itu ketika pola defensif lebih menguntungkan dari pola ofensif, maka peningkatan keamanan dalam jumlah besar pada suatu negara akan menyebabkan pengurangan sedikit pada keamanan negara lain. Karenanya, negara dengan *status quo* akan dapat menikmati tingkat keamanan tertinggi dan keluar dari kondisi *the state of nature*.<sup>36</sup>

Dengan begitu, operasionalisasi konsep dan teori yang ditawarkan Jervis menggunakan dua penilaian yaitu atas keuntungan ofensif-defensif (*offense-defense advantage*) dan diferensiasi ofensif-defensif (*offense-defense differentiaton*). Jervis membedakannya penilaian kedua variabel tersebut dengan mempertanyakan dua hal. *Pertama*: apakah negara harus mengeluarkan lebih banyak atau lebih sedikit biaya dalam konteks defensif, untuk setiap jumlah biaya

<sup>34</sup> Ashley J. Tellis, Janice Bially, Christopher Layne, Melissa McPherson, “*Measuring National Power in the Postindustrial Age*”, (RAND: 2000), halaman 133

<sup>35</sup> Sean M. Lynn Jones, “Does Offense-Defense Theory Have a Future”, *REGIS Working Papers* - Dépôt légal-Bibliothèque nationale du Canada (2001), halaman 8

<sup>36</sup> Dalam Robert Jervis, “Cooperation Under the Security Dilemma”, *World Politics* Vol.30, No.2 (January 1978) New York: Cambridge University Press, halaman 187-188

yang sama guna menghadapi serangan pihak lawan?; serta apakah setiap pengeluaran lebih baik digunakan untuk peningkatan ofensif atau defensif?. Sedangkan yang *kedua*: dengan inventori kekuatan yang dimiliki, apakah negara lebih baik menyerang atau bertahan?. Bagi Jervis penilaian terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut memperlihatkan aksi keamanan yang ideal dilakukan negara baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek.

Penilaian keuntungan ofensif-defensif yang dimiliki atau akan dibangun negara, bagi Jervis didasari dua variabel material yaitu teknologi dan geografi. Sedangkan dalam pembahasan diferensiasi ofensif-defensif dua hal penting adalah identifikasi kekuatan antar kekuatan *status quo*, serta pentingnya peringatan atas serangan ketika negara akan melakukan agresi.<sup>37</sup> Meski begitu, negara tetap dapat menerapkan pola ofensif meski diferensiasi memungkinkan, diantaranya dikarenakan faktor biaya defensif yang tinggi, serta antisipasi serangan lawan baik atas faktor teritorial maupun kecepatan gelaran defensif.<sup>38</sup>

Secara umum sejalan dengan pemikiran sebelumnya, Jervis juga mengelompokkan strategi yang akan ditempuh negara dalam kondisi dilema keamanan dapat bersifat ofensif ataupun defensif. Dilema keamanan dalam konteks berbeda (*real/faktual* atau *imagined*/yang dipersepsikan),<sup>39</sup> mendorong negara mempersepsikan ketidak-amanan, ancaman, dan cara menanggulangnya; yang kemudian mendorong negara membangun strategi lainnya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai hasil analisis peneliti hubungan internasional lainnya, seperti Posen dan Ross yang menjabarkan secara lebih rinci empat alternatif strategi yang dapat ditempuh negara, dalam hal ini AS, sebagai strategi yang bersifat: *neo-isolationism*; *selective engagement*; *cooperative security*; dan *primacy*.<sup>40</sup> Dueck

<sup>37</sup> *Ibid.* Halaman 199-201.

<sup>38</sup> Jervis menjelaskan hal tersebut dengan menyebutkan: (i) *If the offense has a great advantage over the defense, protection through defensive forces will be too expensive.* (2) *Status-quo states may need offensive weapons to regain territory lost in the opening stages of a war. It might be possible, however, for a state to wait to procure these weapons until war seems likely, and they might be needed only in relatively small numbers, unless the aggressor was able to construct strong defenses quickly in the occupied areas.* (3) *The state may feel that it must be prepared to take the offensive either because the other side will make peace only if it loses territory or because the state has commitments to attack if the other makes war on a third party.* *Ibid.*, halaman 201-202

<sup>39</sup> Philip G. Cerny, "The New Security Dilemma: Divisibility, Defection and Disorder in the Global Era", *Review of International Studies* Vol.26 No.4 (October 2000) New York: Cambridge University Press, halaman 624

<sup>40</sup> Barry R. Posen and Andrew L. Ross, *Loc.Cit*, halaman 304



juga membahas mengenai strategi dengan mengkategorikan strategi ke dalam ekspansionis ataupun defensif.

Penelitian ini dengan begitu, memiliki variabel independen yakni **dilema keamanan AS dan China**, yang intensitasnya dipengaruhi oleh pertimbangan keuntungan dan diferensiasi ofensif-defensif dari kapabilitas militer AS-China. Dengan indikatornya yaitu: perbandingan sumber daya strategis, kapabilitas konversi, dan kehandalan tempur kedua negara.

Teori *offense-defense balance* dari Stephen Van Evera juga akan dilibatkan dalam menjelaskan analisis lebih lanjut, serta menjelaskan pengukuran indikator kehandalan tempur, dimana *offense-defense balance* juga digunakan Jervis sebagai alat ukur keunggulan ofensif defensif dalam membangun teorinya. *Offense-defense balance* secara umum dijelaskan Evera dengan menyebutkan: secara relatif faktor-faktor material akan mempengaruhi operasi militer secara ofensif maupun defensif, serta mempengaruhi potensi krisis dan terjadinya perang dalam sistem internasional.<sup>41</sup>

Argumen Evera menyatakan bahwa nilai dari *offense-defense balance* akan menentukan apakah terjadinya dominasi ofensif ataupun defensif, yang mempengaruhi besaran resiko dan kemungkinan terjadinya perang, yang dalam tulisan ini diasumsikan sejalan dengan keuntungan dan diferensiasi ofensif-defensif yang dikemukakan Jervis. Penilaian *offense-defense balance* menurut Evera merupakan agregat dari faktor-faktor militer, geografi, sosial dan diplomatik.<sup>42</sup> Khususnya dalam menjelaskan faktor militer yang menjadi penilaian kehandalan tempur, indikator Evera yang akan digunakan dalam tulisan ini adalah dalam hal sub-faktor teknologi militer, *force posture* dan *deployments*. Dalam bidang teknologi militer, indikator seperti *strong methods of siege warfare*, teknologi yang sangat baru, teknologi yang mendorong peningkatan mobilitas, serta yang memungkinkan terciptanya *mass infantry* (seperti murahya pengolahan biji besi dan lainnya), memungkinkan teknologi dapat dikategorikan bersifat defensif maupun ofensif. Sedangkan *force posture* dapat disimpulkan sebagai jumlah dan

<sup>41</sup> Yoav Gortzak, Yoram Z. Haftel, Kevin Sweeney, "Offense-Defense Theory: An Empirical Assessment", *The Journal of Conflict Resolution*, Vol.49, No.1 (February 2005) SAGE Publications Inc, halaman 68-69

<sup>42</sup> Stephen van Evera, "Offense, Defense, and the Causes of War", *International Security* Vol.22 No.4 (Spring-1998) Massachusetts: MIT Press, halaman 6

jenis persenjataan yang dikerahkan, dan *force deployments* merupakan sebaran dari gelaran pasukan. Kedua indikator ini berhubungan dengan penilaian teknologi, seperti sebaran pasukan yang bersifat jauh dari pihak lawan dan pada posisi membentengi diri, akan lebih bersifat defensif, dibandingkan dengan sebaran yang diposisikan dekat dengan pihak lawan dan mengepung yang cenderung bersifat ofensif.<sup>43</sup>

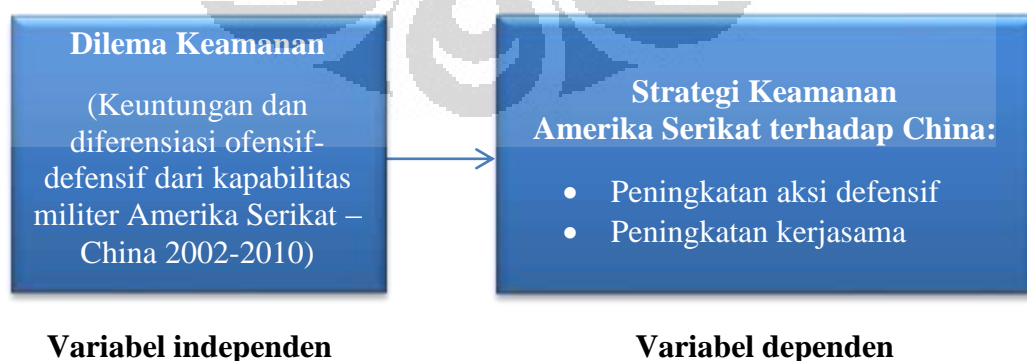
Faktor geografi, sosial dan politik, serta faktor diplomatik dari Evera yang disimpulkan oleh penulis difungsikan sebagai pendukung dalam menjelaskan potensi terjadinya konflik akibat karakteristik ofensif dan defensif yang ditimbulkan negara, serta bukan dalam perhitungan rasio biaya. Pola serupa juga merupakan fokus analisis yang dilakukan Biddle, termasuk Gleser dan Kaufman yang fokus pada permasalahan militer. Faktor militer akan menunjukkan rasio biaya (*cost ratio*), dimana Gleser dan Kaufman menyebutkan:

*Offense-defense balance should be defined as the ratio of the cost of the forces that the attacker requires to take territory to the cost of the defender's forces. This definition of the balance is especially useful because the offense-defense balance then provides an essential link between a state's power and its military capability, that is, its ability to perform military missions.*<sup>44</sup>

### 1.7. Model Analisa dan Operasionalisasi Konsep

Model analisis yang dibangun dari kerangka konseptual yang dijabarkan sebelumnya, serta mendasari hipotesis yang akan diuji dalam tulisan ini, adalah:

**Gambar 1.1: Model Analisa**



<sup>43</sup> *Ibid*

<sup>44</sup> Charles L. Glaser dan Chaim Kaufmann, "What is the Offense-Defense Balance and Can We Measure it?", *International Security* Vol.22 No.4 (Spring 1998) Massachusetts: MIT Press, halaman 45

Model analisis digunakan dalam tulisan ini sebagai dasar untuk menganalisis berbagai data yang relevan dari berbagai indikator yang ada, serta menghasilkan relasi kausalitas dari variabel dependen dan independen untuk menjawab pertanyaan yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini. Model analisis tersebut menggunakan indikator dan kategori penilaian sebagai berikut:

**Tabel 1.1:** Deskripsi Operasionalisasi Konsep

Variabel	Konsep	Indikator	Kategori
Dependen	Strategi Keamanan (Collin Dueck)	Anggaran militer dan <i>Force Deployment</i>	Meningkat/ potensi ofensif
			Menurun / potensi defensif
		Bantuan luar negeri, aktivitas diplomasi serta komitmen kerjasama	Meningkat / potensi defensif
			Menurun / potensi ofensif
Independen	Dilema Keamanan: Keuntungan dan Diferensiasi Ofensif-Defensif Kapabilitas Militer (Robert Jervis, Layne dkk, Stephen van Evera)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sumber Daya Strategis (anggaran pertahanan, sumber daya manusia, industri pertahanan),</li> <li>▪ Kapabilitas Konversi (Doktrin, Strategi Militer),</li> <li>▪ Kehandalan Tempur (teknologi, postur, dan <i>deployment</i>)</li> </ul>	Ofensif Lebih Menguntungkan
			Defensif Lebih Menguntungkan
			Offensif Defensif dapat dibedakan
			Offensif Defensif tidak dapat dibedakan

Dalam analisis lebih lanjut, operasionalisasi konsep yang mendasari analisis penelitian dengan melibatkan teori dilema keamanan Robert Jervis, serta pengukuran kapabilitas militer dari Layne dan kawan-kawan, serta pengukuran *ofense defense balance* Stephen van Evera, dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 1.2:** Operasionalisasi Konsep



### 1.8. Hipotesa

Penelitian ini akan menggunakan beberapa asumsi dan hipotesa yang akan digunakan sebagai dasar analisis lebih lanjut. Asumsi dimaksudkan sebagai suatu pernyataan yang dianggap benar oleh penulis sebagai landasan awal berfikir, sedangkan hipotesis merupakan pernyataan yang dalam penelitian ini akan diuji kebenarannya. Penelitian ini menggunakan asumsi bahwa pada dasarnya AS sebagai sebuah negara dalam sistem internasional merupakan aktor yang rasional dalam membangun strategi keamanannya, baik dalam tujuan menghadapi tantangan dan ancaman dari aktor negara maupun non-negara, termasuk dalam strategi yang dibangunnya di era kebangkitan China abad 21. Asumsi lain dari penelitian ini bahwa Strategi Keamanan Nasional Amerika Serikat merepresentasikan keseluruhan misi, visi dan tujuan negara dalam mengejar kepentingan-kepentingannya, untuk berbagai permasalahan yang dihadapinya, dan tidak hanya berfokus pada satu kasus tertentu. Dengan begitu, sebagaimana teori dilema keamanan, dalam analisis lebih lanjut akan diuji dua hipotesis dalam penelitian ini, yang mencakup:

**Hipotesis 1:** Strategi Amerika memperlihatkan intensitas yang bersifat defensif dikarenakan peningkatan intensitas dilema keamanan ditengah peningkatan kapabilitas China.

**Hipotesis 2:** Peningkatan dilema keamanan terjadi karena kapabilitas militer China pada indikator *strategic resources*, *conversion capability* dan *combat proviciency* yang sulit dibedakan intensitasnya, menyebabkan opsi untuk meningkatkan aksi yang bersifat defensif lebih menguntungkan bagi Amerika Serikat.

### 1.9. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode kuantitatif. Metode ini menggunakan logika berfikir yang lebih mementingkan *reconstucted logic*, mengedepankan objektivitas dalam kenetralan penelitian, menggunakan alur penelitian yang sistematis dan linear, serta langkah dalam pengembangan

hipotesis untuk memandu rancangan penelitian sebelum pengumpulan data.<sup>45</sup> Penelitian kuantitatif juga berdasar pada logikanya mengenai unsur kausalitas, dimana meneliti hubungan pengaruh atau sebab akibat (*cause-effect relationship*, *causal-effectual relationship*) antara satu atau lebih variabel dengan variabel lainnya, dan adanya hubungan antar variabel,<sup>46</sup> yang mendasari uji hipotesa. Metode kuantitatif yang digunakan untuk menjelaskan hubungan strategi AS dengan dilema keamanan, serta keunggulan dan diferensiasi ofensif defensif dari kapabilitas militer AS dan China ini, bukan berfokus pada analisis uji signifikansi secara statistik, namun lebih menekankan pada logika berfikir kausalitas antara variabel independen dan dependen dengan data-data distribusi frekuensi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer (*primary data*), yang dipublikasikan dari penelitian dan pengamatan peneliti sebelumnya dengan prosedur secara langsung sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitiannya;<sup>47</sup> serta data sekunder (*secondary data*) dimana peneliti sebelumnya tidak terlibat langsung dalam pengumpulan data-data tersebut;<sup>48</sup> baik bersifat teks informasi maupun data kuantitatif yang umumnya berbentuk numerik baik metrik atau nonmetrik.<sup>49</sup> Data-data dalam tulisan ini dikumpulkan dengan teknik observasi tidak langsung, dengan sumber data baik dari buku, dokumen (cetak dan online), termasuk laporan dan kebijakan yang diterbitkan institusi-institusi pemerintahan AS maupun dokumen yang diterbitkan pemerintah China.

Sedangkan dalam hal penulisan, akan digunakan teknik penulisan analisis deskriptif yang mengelaborasi berbagai indikator-indikator yang ada, dengan sebelumnya melakukan pengolahan data di setiap indikator yang digunakan dalam tulisan ini, yaitu data dari berbagai indikator kapabilitas militer AS dan China.

---

<sup>45</sup> W. Lawrence Neuman “*Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches 6<sup>th</sup> edition*” (Boston: Pearson Education, 2006), halaman 149-150

<sup>46</sup> Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), halaman 27-28

<sup>47</sup> Boije, Hennie R Boije, “*Data Collection: Primary VS Secondary - Encyclopedia of Social Measurement*”, Vol I, ISBN: 978-0-12-369398-3 (Elsevier Inc: 2005), halaman 593

<sup>48</sup> Alan Bryman, *Social Research 3<sup>rd</sup> edition*. (New York: Oxford University Press, 2008). Halaman 296

<sup>49</sup> Lisa Given *et.all*. *The SAGE Encyclopedia of Qualitative Research Methods* (London: SAGE Publications, 2008), halaman 123-125.

Sehubungan dengan kepentingan penelitian serta berbagai tahap pengumpulan data yang umumnya difokuskan pada sumber-sumber kepustakaan, maka penelitian ini mengambil lokasi di tempat-tempat sebagai berikut:

1. Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia – Depok,
2. Perpustakaan HI FISIP Universitas Internasional – Depok,
3. PACIVIS Universitas Indonesia – Depok,
4. Freedom Institute – Jakarta.

Penelitian yang menjadi isi tulisan ini, secara keseluruhan berlangsung lebih kurang empat bulan sejak diajukannya judul penelitian, yaitu pada bulan Februari hingga Mei 2011, dengan deskripsi waktu penelitian sebagai berikut:

**Tabel 1.2:** Tabel Deskripsi Pelaksanaan Penelitian

No	Aktifitas	Waktu (Minggu ke)																			
		Februari			Maret					April				Mei							
		2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5			
1	Pra Riset :																				
	a. Pencarian data																				
	b. Pengajuan Judul																				
	c. Penunjukan Dosen Pembimbing																				
2	Riset :																				
	a. Pencarian Data																				
	b. Pembuatan Proposal																				
3	Bimbingan Usulan Penelitian																				
4	Seminar Usulan Penelitian																				
5	Bimbingan Tesis																				
7	Sidang Tesis																				

### 1.10. Sistematika Penulisan

Keseluruhan penulisan penelitian ini akan dibagi kedalam sistematika sebagai berikut:

**Bab I (Pendahuluan)** - berisikan kerangka utama dari keseluruhan penelitian; yang terdiri dari: latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan

dan signifikansi penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**Bab II (Tinjauan Konsep Dilema Keamanan dan Strategi Keamanan Amerika Serikat 2002-2010)** - berisi tinjauan konsep dilema keamanan dan strategi, yang dilanjutkan dengan latar belakang historis dari perkembangan strategi keamanan AS selama dua periode 2002-2010, dengan disertai penjelasan dan penilaian dari indikator-indikator atas intensitas strategi keamanan AS.

**Bab III (Perkembangan dan Komparasi Indikator-Indikator Utama Kapabilitas Militer China 2002-2010)** – berisi pembahasan indikator-indikator peningkatan kapabilitas militer China dan perbandingan poisisinya dengan kapabilitas militer AS, yang meliputi indikator: sumber daya strategis, kapabilitas konversi dan kehandalan tempur. Bab ini secara khusus akan berisi informasi dari pemaparan dan pengolahan data-data yang telah dikumpulkan.

**Bab IV (Analisis Intensitas Strategi Keamanan Amerika Serikat ditengah Peningkatan Kapabilitas Militer China)** – bab ini secara khusus akan berisi analisis dan penilaian keuntungan ofensif-defensif yang dimiliki AS terhadap China, serta melihat diferensiasi ofensif-defensif dari intensitas peningkatan kapabilitas militer China sepanjang periode 2002-2010. Bab ini akan ditutup dengan memperlihatkan keberlakuan konsep dilema keamanan dan pengaruhnya terhadap strategi AS, serta potensi keuntungan penerapan strategi tersebut.

**Bab V (Kesimpulan dan Saran)** – berisi kesimpulan atas pertanyaan penelitian, serta penjabaran singkat hasil uji hipotesis yang telah dibangun sebelumnya. Bab ini juga akan menjabarkan kelemahan yang dimiliki penelitian ini, serta saran-saran baik bersifat teknis penelitian maupun substansif keilmuan guna kelanjutan penelitian serupa di waktu yang akan datang.

## BAB II

### TINJAUAN KONSEP DILEMA KEAMANAN DAN STRATEGI AMERIKA SERIKAT TERHADAP CHINA 2002-2010

Penjelasan mengenai strategi keamanan Amerika Serikat (AS) ditengah peningkatan kapabilitas militer China 2002-2010, membutuhkan tinjauan konseptual yang mampu menjelaskan bagaimana intensitas defensif dari strategi suatu negara, dapat meningkat di tengah peningkatan potensi ancaman dari negara lain. Bab ini akan menjelaskan konsep dilema keamaan sebagai pola utama yang di dalam hipotesa tulisan ini diduga hadir dalam hubungan AS dan China. Penjelasan dilema keamanan tersebut meliputi: pemaparan perdebatan paradigma ofensif–defensif realisme (neorealisme), pemaparan definisi umum, serta penjelasan faktor-faktor kunci dari konsep dilema keamanan Robert Jervis dan beberapa peneliti lainnya. Selanjutnya juga akan dijelaskan konsep dan indikator-indikator strategi keamanan, khususnya dari pemikiran Collin Dueck, Garry Hart dan Stephen Tang, yang menjadi dasar penilaian strategi keamanan AS pada periode 2002-2010, yang juga merupakan variabel dependen dari penelitian ini.

#### **2.1. Konsep Dilema Keamanan**

Konsep dilema keamanan kerap digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena hubungan internasional khususnya di bidang keamanan, sejak pertama kali digunakan pada tahun 1951 oleh John Herz dalam tulisannya *Political Realism and Political Idealism*.<sup>1</sup> Layaknya perdebatan antar paradigma Hubungan Internasional, konsep dilema keamanan juga membuka perdebatan antar para akademisi yang setidaknya manyangkut paradigma dan asumsi dasar, validitas dan realibilitasnya menjelaskan berbagai fenomena kemaan, hingga hubungannya dengan konsep Hubungan Internasional lainnya. Nama lain seperti Herbert Butterfield dan Robert Jervis, adalah beberapa akademi yang dianggap memberi kontribusi besar pada perkembangan konsep ini.

---

<sup>1</sup> Meskipun istilah dilema keamanan pertama kali digunakan oleh Herz, namun ekplanasi logis konsep tersebut baru dijelaskan secara spesifik oleh Herbert Butterfield, seorang sejarawan Inggris yang kemudian dianggap sebagai ‘grandfather’ dari dilema keamanan. Alan Collins, “*The Security Dilemmas of Southeast Asia*” (Institute Of Southeast Asian Studies: 2000), halaman 3.



Perkembangan konsep dilema keamanan dalam pemikiran Butterfield dan Herz, pada awalnya ditujukan untuk menjelaskan terjadinya perang, konflik, serta perlombaan senjata, yang terjadi di masa Perang Dunia. Bagi Butterfield perang merupakan efek dari keberadaan *fear* dan *uncertainty* yang dimiliki setiap manusia termasuk negara, yang menjadikan dilema keamanan berlaku di dalamnya. Butterfield menjelaskan dilema keamanan dalam enam aspek penting, yang mencakup: (1) adanya rasa takut yang berasal dari “*the universal sin of humanity*” sebagai sumber utamanya (pemikiran ini beranjak dari *Hobbesian fear*); (2) adanya ketidakpastian yang dimiliki suatu pihak mengenai niat pihak lain; (3) pada dasarnya tidak ada tujuan untuk membuat kerusakan yang disengaja; (4) dilema keamanan menyebabkan terjadinya hal-hal tragis; (5) faktor psikologikal dapat memperkeruh dilema keamanan; serta (6) merupakan pendorong terjadinya semua konflik yang terjadi antar umat manusia.<sup>2</sup>

Berbeda dari pemikiran Butterfield, Herz kemudian juga mencoba menjelaskan dilema keamanan dari enam aspek berbeda. Aspek ini meliputi: (1) kondisi anarki (*lack of “a higher unity”*) sebagai sumber utamanya; (2) kondisi tersebut memunculkan ketidakpastian dan ketakutan atas potensi antar negara untuk melakukan kejahatan; (3) negara-negara mencoba keluar dari dilema keamanan secara *self-help* dengan mengakumulasi terus-menerus kekuatannya (*power*), yang mendorong terciptanya siklus kompetisi kekuatan; (4) Akumulasi kekuatan tersebut ternyata tidak serta-merta meningkatkan keamanan negara (bahkan cenderung terjadi *self-defeating*); (5) dilema keamanan dapat merupakan penyebab perang, meskipun tidak semua perang disebabkan karenanya; serta (6) dilema keamanan dengan begitu merupakan *self-reinforcing “vicious cycle.”*<sup>3</sup>

Meskipun Butterfield dan Herz memiliki konsensus mengenai adanya faktor ketidakpastian dan ketakutan, serta keberlangsungan dilema keamanan pada berbagai level analisis (baik kelompok etnis, bangsa, termasuk negara);<sup>4</sup> namun keduanya memiliki perbedaan dalam hal sumber utama, cakupan serta bagaimana dilema keamanan berlangsung. Bagi Butterfield, karena dilema

<sup>2</sup> Shiping Tang, “*A Theory of Security Strategy for Our Time*” (Palgrave MacMillan: 2010), halaman 35.

<sup>3</sup> *Ibid*, halaman 35-36.

<sup>4</sup> Alan Collins, *Op.Cit*, halaman 4-5.

keamanan bersumber dari *'man's universal sin'*, serta aspek psikologikal di dalam kehidupan manusia, maka fokus pada level individu menjadi lebih penting. Sedangkan bagi Herz, dengan pemikiran utamanya *"tendency for efforts to increase a state's security to decrease the security of others,"*<sup>5</sup> dilema keamanan tidak sepenuhnya terjadi dan mampu menjelaskan konflik di dalam dunia sosial.

Herz memberi kontribusi besar bagi ilmu Hubungan Internasional, dengan penjelasannya mengenai bagaimana konsep dilema berelasi dengan hubungan antar negara dalam sistem internasional yang anarki. Selain itu, dikarenakan dilema keamanan tidak selalu hadir sebagai penyebab seluruh konflik di dunia sosial dan antar negara, Herz menambahkan bahwa: *"security dilemma can only be mitigated but not eliminated"*. Mitigasi ini terjadi ketika kedua pihak yang terlibat memahami bahwa mereka berada dalam dilema keamanan yang dapat membahayakan kepentingan vital dari keamanan mereka masing-masing.<sup>6</sup> Pendapat Herz tersebut pada akhirnya menjadi dasar pemikiran dari berbagai akademisi dalam menjawab berbagai pertanyaan mengenai mengapa konflik tidak selalu terjadi, serta menjelaskan bagaimana pola defensif negara hadir dalam kondisi anarki internasional. Pemikiran ini kontras dengan pemikiran Butterfield, yang mengarahkan bahwa negara-negara di dunia cenderung akan bersifat ofensif.

Penjelasan mengenai pola negara ofensif dan defensif sebagai konsekuensi perbedaan perspektif sebagaimana pemikiran Butterfield dan Herz, juga membuka perdebatan pemikiran ofensif realisme (mengenai negara ofensif) dan defensif realisme (mengenai negara defensif). Stephen Tang secara rinci menjelaskan perdebatan ini dengan mengelaborasi berbagai pemikiran akademisi terdahulu,<sup>7</sup> dan menyimpulkan bahwa perbedaan ini setidaknya terletak pada tujuan dan aksi yang dilakukan negara di dalam sistem yang anarki. Tang menjelaskan dalam perspektif ofensif realisme, apa yang seharusnya diperjuangkan negara adalah memaksimalkan kekuatan (*power*); karenanya untuk bertahan, negara ofensif akan mengakumulasi kekuatan untuk tindakan ofensif (seperti anihilasi lawan dan

<sup>5</sup> Robert Jervis, *"System Effects: Complexity in Political and Social Life"* (Princeton University Press: 1997), halaman 60.

<sup>6</sup> Shiping Tang, *Op.Cit*, halaman 70.

<sup>7</sup> Tang mencoba membahas inti berbagai pemikir seperti: Brooks (1997), Frankel (1996), Glaser (1994–1995), Jervis (1999), Kydd (2005), Labs (1997), Layne (2006), Liu dan Zhang (2006), Lobell (2002–2003), Lynn-Jones (1998), Schweller (1996), Snyder (1991), serta Taliaferro (2000–2001, 2004).

negara lainnya). Sedangkan bagi defensif realisme, tujuan utama negara adalah memaksimalkan keamanan; karenanya untuk meminimalisir resiko tindakan ofensif pihak lawan, maka aksi yang bersifat kooperatif terkadang dibutuhkan (seperti *reassurance* ataupun kerjasama).<sup>8</sup>

**Tabel 2.1:** Rangkuman Realisme Politik dalam Hubungan Internasional, serta Tipologi Berbagai Aliran Pemikiran Realisme.<sup>9</sup>

<b>Political Realism: Four Core Assumptions</b>		
1. <i>The nature of politics is fundamentally conflictual.</i>		
2. <i>Actors in politics are strategic.</i>		
3. <i>Power is the fundamental feature of politics.</i>		
4. <i>Political outcomes are determined primarily by material forces.</i>		
<b>Political Realism in International Politics: Two additional assumptions</b>		
1. <i>International politics is anarchical.</i>		
2. <i>Collective units (e.g., states) are the principal actors of international politics.</i>		
<b>Political Realism in International Politics: Various Versions</b>		
	<i>Offensive Realism</i> Additional assumption: <i>States are inherently aggressive (whether by nature or because of anarchy).</i>	<i>Defensive Realism</i> Additional assumption: <i>States are not inherently aggressive.</i>
<b>Structural realism</b>	<i>Structural offensive realism</i>	<i>Structural defensive realism</i>
<b>Neoclassical Realism</b>	<i>Neoclassical offensive realism</i>	<i>Neoclassical defensive realism</i>
<b>Individual level realism: human nature realism</b>	<i>Human nature offensive realism</i>	<i>Human nature defensive realism</i>
<b>Individual level realism: the social psychological school</b>	<i>Social psychological offensive realism</i>	<i>Social psychological defensive realism</i>

Dilema keamanan kemudian menjadi pusat dari pemikiran realisme defensif,<sup>10</sup> yang hubungan ini sangat jelas terlihat di dalam pemikiran Robert Jervis. Pemikiran Jervis yang juga berangkat dari pemikiran Herz dan Butterfield, menyebutkan tujuh aspek yang menjadi argumentasi baru mengenai dilema

<sup>8</sup> *Ibid*, halaman 16-22.

<sup>9</sup> *Ibid*, halaman 11.

<sup>10</sup> *Ibid*, halaman 33.

keamanan. Aspek ini meliputi: (1) permasalahan struktural menjadi dasar terjadinya dilema keamanan; (2) ketidakpastian dan ketakutan yang dimiliki negara terhadap negara lainnya di saat ini dan masa depan, sangat menentukan keberlangsungan dilema keamanan; (3) karena disebabkan oleh aksi defensif, dilema keamanan cenderung tidak bersifat disengaja; (4) dilema keamanan mendorong terciptanya hasil yang tidak diinginkan dan merusak diri, yaitu berupa penurunan keamanan; (5) cenderung menghasilkan sesuatu yang tidak diinginkan dan tragis, yaitu perang; (6) meskipun begitu, dilema keamanan tidak serta-merta menjadi penyebab dari terjadinya semua perang; serta (7) dinamika dilema keamanan terletak pada penguatan diri secara terus-menerus (terjadinya efek *spiral*). Jervis dalam argumentasinya lebih lanjut, juga menekankan bahwa intensitas dilema keamanan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik material/fisik maupun faktor psikologikal/perseptual.<sup>11</sup>

Penjelasan Jervis atas konsep dilema keamanan dimulai dengan dasar logika *stag hunt* dari Rossenau, serta *prisoner's dilemma* dari Anatol Rapoport dan Albert Chamma.<sup>12</sup> Meski penjelasan awal Jervis ditujukan sebagai argumentasi untuk menjelaskan perlombaan senjata,<sup>13</sup> kesimpulannya argumentasi Jervis cukup mampu menjelaskan alasan logis dibalik berbagai perang dan kerjasama yang terjadi dalam kondisi anarki internasional.

Penjelasan Jervis mengenai potensi dilema keamanan, terjadinya konflik, dan kerjasama diterangkan melalui dua variabel yang krusial, yaitu: *pertama*, apakah senjata atau kebijakan yang bersifat defensif dapat dibedakan dari yang bersifat ofensif (disebut sebagai *offense defense differentiation*); serta *kedua*, apakah senjata atau kebijakan defensif atautkah ofensif yang lebih menguntungkan (disebut sebagai *offense diffense advantage*). Baginya, ketika intensitas ofensif-defensif dapat dibedakan, maka mungkin bagi negara meningkatkan keamanannya

<sup>11</sup> *Ibid*, halaman 37.

<sup>12</sup> Rossenau menjelaskan konsep *stag hunt* menjadi: (1) *cooperate and trap the stag (the international analogue being cooperation and disarmament)*; (2) *chase a rabbit while others remain at their posts (maintain a high level of arms while others are disarmed)*; (3) *all chase rabbits (arms competition and high risk of war)*; dan (4) *stay at the original position while another chases a rabbit (being disarmed while others are armed)*. Lihat Robert Jervis, "Cooperation under the Security Dilemma", *World Politics* Vol. 30 No. 2 (Cambridge University Press: Januari 1978), halaman 167 dan 171.

<sup>13</sup> Paul Wilkinson, "*International Relations: A Very Short Introduction*" (Oxford University Press: 2007), halaman 28.

tanpa membuat negara lain merasa tidak aman. Sedangkan ketika aksi defensif lebih menguntungkan dibandingkan aksi ofensif, maka peningkatan keamanan suatu negara akan berdampak lebih kecil dalam mengancam negara lain.<sup>14</sup>

**Tabel 2.2:** Perbedaan Dilema Keamanan Menurut Butterfield, Herz, dan Jervis.<sup>15</sup>

<i>Aspects of the security dilemma</i>	<i>Butterfield (1951, 1960)</i>	<i>Herz (1950, 1951, 1966)</i>	<i>Jervis (1976, 1978, 1982, 1999, 2001)</i>
<i>The ultimate source is anarchy</i>	No	Yes	Yes
<i>Uncertainty over others' intentions</i>	Yes	Yes	Yes
<i>Fear about each other</i>	Yes	Yes	Yes
<i>Lack of malign intentions</i>	Yes, but inconsistent	Yes	Yes, but inconsistent
<i>Power competition</i>	Not explicit	Yes	Yes
<i>Spiral-like situation</i>	Not explicit	Yes	Yes
<i>Unintended tragic results</i>	Yes	Yes	Yes
<i>Unintended (and partially) self-defeating results</i>	Not explicit	Yes	Yes
<i>Regulators of the security dilemma</i>	Only psychological factors were emphasized	Not emphasized	Both material and psychological factors were emphasized
<i>Universal or conditional</i>	Universal	Conditional	Conditional
<i>An important cause of war?</i>	Yes	Yes	Not explicit, close to a Yes
<i>The cause of all wars?</i>	Yes	No	No

Konsekuensi dari perbedaan dalam masing-masing variabel dilema keamanan, membawa negara-negara berada suatu kondisi tertentu, yang Jervis sebut sebagai empat kondisi dunia. *Kondisi dunia pertama*, bagi Jervis sangat tidak stabil dan buruk bagi negara-negara *status-quo*. Hal ini dikarenakan aksi ofensif lebih menguntungkan, dan karena cara terbaik memproteksi diri adalah bertindak agresif, maka tidak ada cara untuk meraih keamanan tanpa membahayakan negara lain. Konsekuensi dari kondisi ini, mendorong perlombaan

<sup>14</sup> Robert J Art dan Robert Jervis, “*International Politics, Enduring Concepts and Contemporary Issues*” (Harper Collins College Publishers: 1996), halaman 183.

<sup>15</sup> Shiping Tang, *Op.Cit*, halaman 38.

senjata dan potensi untuk terjadinya perang menjadi besar, sebagaimana terjadi di Eropa sebelum PD I. Dilema keamanan sendiri baru terjadi pada *kondisi dunia kedua*, yang disebabkan aksi defensif lebih menguntungkan meskipun .postur ofensif maupun defensif tidak dapat dibedakan. Dimana kondisi ini, menurut Jervis paling menggambarkan hampir seluruh periode sejarah. Dalam *kondisi dunia ketiga*, dilema keamanan tidak terjadi, namun justru memperlihatkan terjadinya masalah keamanan. Dalam kondisi ini, meski aksi defensif dapat digunakan untuk mengurangi munculnya persepsi ancaman, namun agresi sangat berpotensi hadir akibat resiko yang besar untuk bertahan. Sedangkan pada *kondisi dunia keempat*, tidak ada alasan bagi negara untuk mengancam negara lain, karena aksi ofensif lebih menguntungkan dan dapat diketahui intensitasnya. Kondisi ini juga merupakan yang paling stabil dan aman bagi negara di dunia.<sup>16</sup>

**Tabel 2.3:** Tipologi Empat Kondisi Dunia Robert Jervis.<sup>17</sup>

	<i>Offense has the advantage</i>	<i>Offense has the advantage</i>
<i>Offensive posture not distinguishable from defensive one</i>	<i>Doubly dangerous</i>	<i>Security dilemma, but security requirements may be compatible</i>
<i>Offensive posture distinguishable from defensive one</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>No security dilemma, but aggression possible.</i></li> <li>- <i>Status quo states can follow different policy than aggressors.</i></li> <li>- <i>Warning Given</i></li> </ul>	<i>Doubly stable</i>

Empat kesimpulan dapat diperoleh dari penjabaran argumentasi Jervis tersebut, serta dengan mempertimbangkan implementasinya untuk nantinya digunakan dalam menelaah strategi keamanan AS di tengah peningkatan China saat ini. *Pertama*, karena *offense defense differentiation* dan *offense defense advantage* masing-masing dinilai Jervis dengan berbagai indikator seperti: geografi, teknologi, dan karakteristik persenjataan;<sup>18</sup> maka terbuka bagi akademisi untuk mengelaborasi indikator material lain yang signifikan untuk mengukur kedua variabel di atas. Sebagaimana Kolodziej, yang membahas hubungan dilema keamanan dengan strategi dari pemikiran Clausewitz's; mengemukakan meskipun

<sup>16</sup> Lihat *Robert J Art dan Robert Jervis, Op.Cit*, halaman 197-200.

<sup>17</sup> *Ibid*, halaman 198.

<sup>18</sup> *Ibid*, halaman 188.

kekuatan militer tetap menjadi fokus dalam dilema keamanan, permasalahan politik dan sosial ekonomi juga memiliki pengaruh.<sup>19</sup> Termasuk dari faktor psikologikal yang terbangun dari masalah persepsi ketidakpastian, yang disebut juga oleh Ken Booth sebagai ‘*other minds problem*’.<sup>20</sup>

*Kedua*, dikarenakan batasan atas *offense defense differentiation* dan *offense defense advantage* pada kenyataannya tidak sepenuhnya rigid,<sup>21</sup> maka mungkin bagi suatu negara dapat keluar dari kondisi dilema keamanan (atau setidaknya dimitigasi sebagaimana pendapat Herz), jika seluruh indikator terkait berubah. Hal ini sejalan dengan perluasan pemikiran beberapa ahli akan pentingnya keberadaan *common interest* dalam mempengaruhi dilema keamanan dan dinamika politik internasional. Karenanya, meskipun dilema keamanan dapat mendorong terjadinya kerjasama guna memitigasi intensitas dilema,<sup>22</sup> yang dapat dilihat dari usaha negara-negara untuk memperkuat institusi ataupun integrasi politik global,<sup>23</sup> perlu diingat bahwa dilema keamanan tetap terjadi jika negara masih merasakan ketidakpastian atau mempersepsikan ancaman dari negara lain.<sup>24</sup>

*Ketiga*, dikarenakan Jervis menyatakan siklus penguatan diri secara terus-menerus akan terjadi dan dilakukan negara, maka konsep *struggle for power* juga berlaku dalam dilema keamanan.<sup>25</sup> Dengan begitu negara berdaulat masih harus dihadapkan pada kemampuannya memobilisasi sumber-sumber strategis untuk mengatasi ancaman dari luar,<sup>26</sup> yang berarti pula sebagaimana Waltz sebutkan, dalam kondisi anarki: prinsip di dalam sistem, karakter unit, serta distribusi kapabilitas tetap merupakan hal yang harus dipertimbangkan.<sup>27</sup> Hal ini terjadi meskipun prinsip di dalam dilema keamanan menyebutkan bahwa negara yang

<sup>19</sup> Edward A Kolodziej, “*Security and International Relations*” (Cambridge University Press: 2005), halaman 61.

<sup>20</sup> Ken Booth, “*Theory of World Security*” (Cambridge University Press: 2007), halaman 404.

<sup>21</sup> Lihat Alan Collins, *Op.Cit*, halaman 16.

<sup>22</sup> Khususnya dalam mendeskripsikan karakteristik senjata; senjata ofensif dianggap memiliki tingkat mobilitas dan jangkauan yang besar, sedangkan senjata defensif memiliki daya ledak tinggi, tetapi dengan mobilitas dan jangkauan terbatas; Richard Cohen dan Michael Mihalka, “Cooperative Security: New Horizons for International Order”, *The Marshall Center Papers* No. 3 (European Center for Security Studies: 2001) , halaman 40.

<sup>23</sup> Paul Wilkinson, *Op.Cit*, halaman 27.

<sup>24</sup> Martin Griffiths dan Terry O’Collaghan, “*International Relations: The Key Concepts*” (Routledge: 2002), halaman 292-293.

<sup>25</sup> Richard Cohen dan Michael Mihalka, *Loc.Cit*, halaman 36.

<sup>26</sup> Scott Burchill *et.all*, “*Theories of International Relations*” 2<sup>nd</sup> edition (Palgrave: 2001), halaman 87.

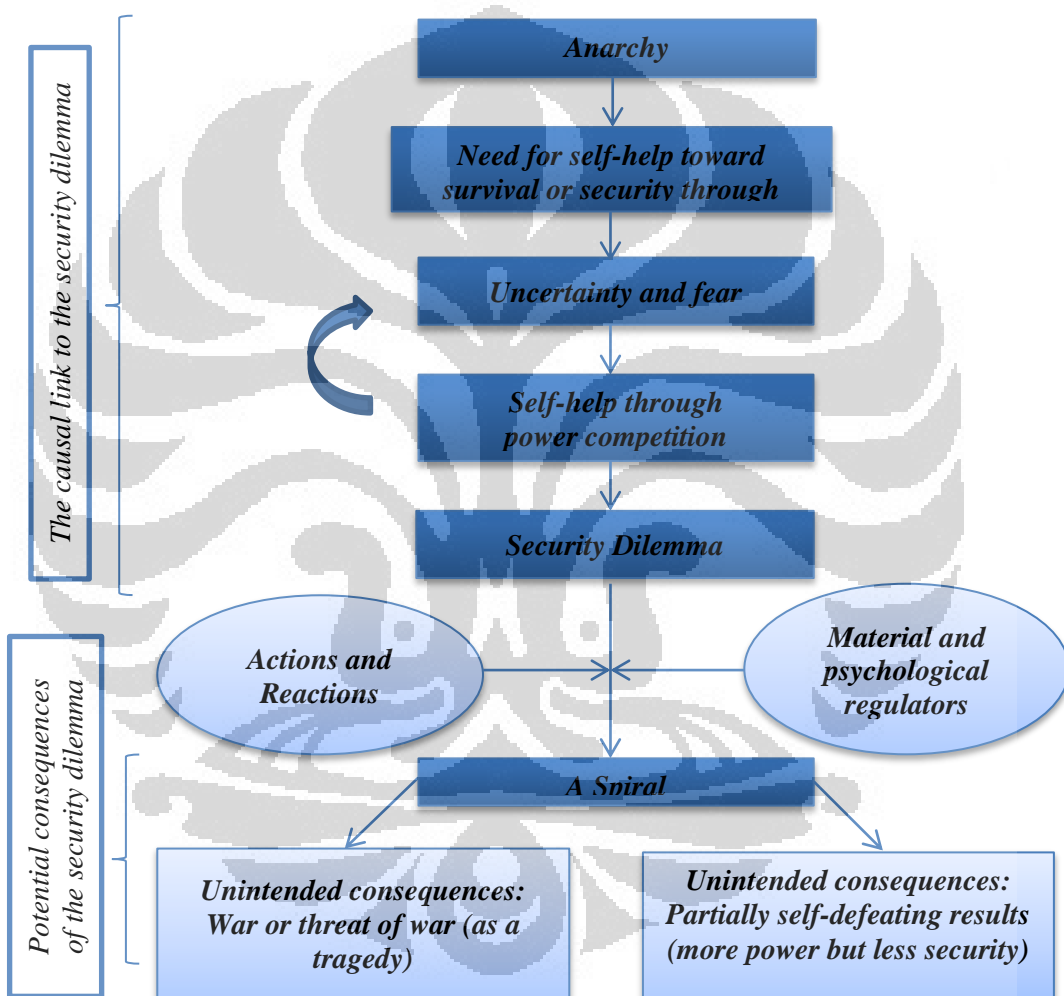
<sup>27</sup> *Ibid*, halaman 91.



terlibat akan menjaga agar tidak ada negara lain yang memiliki kekuatan yang terlalu berlebihan.<sup>28</sup>

*Keempat*, karena *offense defense differentiation* dan *offense defense advantage* dapat dinilai dari berbagai faktor dan dapat pula berubah, maka efek spiral dari dilema keamanan akan bergerak sangat dinamis dan reaktif, serta dirasakan berbeda oleh negara-negara.

**Gambar 2.1:** Hubungan Kausalitas Anarki - Dilema Keamanan.<sup>29</sup>



Kesimpulan ini sejalan dengan pendapat Griffiths dan O'Collaghan yang menyatakan '*since these factors are variable over space and time, the intensity of security dilemma is very unevenly distributed among states*',<sup>30</sup> serta keyakinan

<sup>28</sup> Peter Hough, "*Understanding Global Security*" (Routledge: 2004), halaman 4.

<sup>29</sup> Shiping Tang, *Op.Cit*, halaman 41.

<sup>30</sup> Martin Griffiths dan Terry O'Collaghan, *Op.Cit*, halaman 292.



Cohen dan Mihalka bahwa “*action–reaction sequence cannot be avoided.*”<sup>31</sup> Terlebih dalam kasus seperti di dalam penelitian ini yang melibatkan dua negara besar, serta pendapat Jervis yang juga mengikuti keyakinan Herz akan adanya ‘*vicious circle of security and power accumulation*’, maka membuat dilema keamanan akan menjadi lebih kompleks.<sup>32</sup>

Berbagai penjelasan mengenai konsep dilema keamanan di atas akan digunakan dalam sebagai alat bantu operasionalisasi penelitian, untuk menjelaskan secara umum hubungan pola dan kondisi hubungan antara AS dan China. Konsep dilema keamanan juga secara spesifik akan digunakan sebagai alat analisis untuk mengelaborasi faktor-faktor material dan psikologikal, menjelaskan bagaimana proses aksi reaksi terjadi, serta untuk mengetahui intensitas efek spiral dari dilema keamanan kedua negara. Keseluruhan analisis yang berangkat dari konsep dilema keamanan, secara umum menggunakan prinsip-prinsip yang dikemukakan Jervis, dengan mengadopsi model yang merupakan kesimpulan pemahaman Stephen Chang dari pemikiran Butterfield, Herz, dan Jervis.

## 2.2. Konsep Strategi Keamanan dalam Tinjauan Dilema Keamanan

Layaknya konsep dilema keamanan, strategi keamanan juga merupakan suatu konsep yang kompleks dan memiliki beragam definsi, aspek dan elemen atau indikator pengukurannya. Konsep strategi keamanan (dalam konteks militer) telah dikenal sejak awal negara modern lahir, khususnya melalui pemikiran Carl von Clausewitz yang juga dikenal sebagai ‘*the father of modern strategy*’ melalui karyanya yang berjudul ‘*On War*. Dalam pandangan Clausewitz’ apa yang dimaksud dengan strategi merupakan: ‘*[is] the use of engagement for the object of the war*’, dimana perang sendiri dimaksudkan sebagai: “*the pursuit of policy by other means*”.<sup>33</sup> Strategi dalam pemikiran Clausewitz dengan begitu tidak berarti tanpa adanya pertempuran. Kunci pemikiran ini terletak pada perbedaan antara konsep taktik dan strategi, dimana strategi lebih memiliki cakupan ke arah bagaimana pengerahan kekuatan untuk berperang, sedangkan taktik dimaksudkan

<sup>31</sup> Richard Cohen dan Michael Mihalka, *Loc.Cit*, halaman 29.

<sup>32</sup> Felix Berebskoetter dan M.J Williams, *et.all*, “*Power in World Politics*” (Routledge: 2007), halaman 75.

<sup>33</sup> Gary Hart, “*The Fourth Power: A Grand Strategy for the United States in the Twenty-First Century*” (Oxford University Press: 2004), halaman 21-22.

sebagai ‘*the employment of military*’ di saat perang.<sup>34</sup> Prinsip utama yang juga penting dalam pemikiran Clausewitz adalah strategi akan bergantung pada tempat, waktu, serta kekuatan ketika potensi pertempuran hadir.<sup>35</sup>

Dalam bidang politik, militer dan keamanan serta dalam konteks hubungan internasional, konsep strategi kemudian berkembang dan disebut dalam berbagai versi.<sup>36</sup> Collin Gray yang juga seorang akademisi yang mengikuti pemikiran Clausewitzian, mendefinisikan strategi sebagai: “*the use that is made of force and the threat of force for the ends of policy*”; selain itu, Edward Mead Earle yang juga beranjak dari pemikiran Liddell Hart’s juga memperkenalkan istilah *grand strategy* sebagai tipe tertinggi dari strategi yang dibangun negara. Dimana *grand strategy* merupakan:

“*...integrates the policies and armaments of the nation that the resort to war is either rendered unnecessary or is undertaken with the maximum chance of victory.*”<sup>37</sup>

Meskipun definisi-definisi strategi tersebut terlalu jauh untuk dijadikan dasar pemikiran dari kondisi dunia saat ini, dimana unsur pemikiran Clausewitz mengenai serangkaian rencana dari aksi penggunaan militer dalam mencapai tujuan politik masih sangat jelas terlihat,<sup>38</sup> asumsi-asumsi dasar tersebut menjadi awal perkembangan konsep strategi yang lebih kontemporer.

Konsep *grand strategy* atau *security strategy* kemudian dapat dikatakan merupakan konsep yang lebih relevan untuk digunakan saat ini. Berbagai definisi selanjutnya muncul mengenai *grand strategy*, yang mencakup: kebijakan negara yang luas menyangkut keamanan, rangkaian dari tujuan politikal dan militer, sebagai keseluruhan rencana negara mengenai keamanan dengan mempertahankan sumber daya nasional dan komitmen eksternal, hingga dianggap sebagai keseluruhan paket kebijakan untuk meningkatkan kekuatan nasional. Dibalik perbedaan tersebut, setidaknya terdapat dua limitasi dalam perumusan

<sup>34</sup> Antulio J. Echevarria II, “*Clausewitz and Contemporary War*” (Oxford University Press: 2007), halaman 16.

<sup>35</sup> *Ibid*, halaman 163.

<sup>36</sup> Dalam konteks keamanan sendiri, strategi sering pula disebut sebagai *military strategy* / *security strategy* / *grand strategy*, dan lainnya. Tidak ada yang berubah dari makna umum strategi terhadap berbagai sebutan tersebut, namun perbedaan sebutan ‘strategi’ menandai cakupan makna yang dimaksud.

<sup>37</sup> Gary Hart, *Op.Cit*, halaman 21.

<sup>38</sup> Colin S.Gray, “*Strategy for Chaos: Revolutions in Military Affairs and the Evidence of History*” (Frank Cass Publishers: 2002), halaman 81.

strategi, yakni adanya keberadaan kalkulasi atas maksud dan tujuan negara, serta keberadaan lawan (termasuk permasalahan) potensial.<sup>39</sup> Karenanya, tidak semua kebijakan luar negeri merupakan bagian dari *grand strategy* (yang selanjutnya dalam penelitian ini akan disebut sebagai strategi). Instrumen kebijakan militer dalam pencapaian keamanan tetap menjadi syarat dan bagian sentral di suatu strategi; meskipun bantuan luar negeri, aktivitas diplomatik, bahkan kebijakan perdagangan (dalam kondisi tertentu) kini harus turut dipertimbangkan dan akan mempengaruhi strategi negara.

Saat ini strategi secara lebih luas mencakup racangan aplikasi penggunaan kekuatan dan sumber daya untuk pencapaian tujuan nasional.<sup>40</sup> Salah satu definisi strategi yang lebih sistematis untuk penjelasan pemahaman tersebut, dikemukakan oleh Collin Dueck, dengan menyatakan strategi akan melibatkan identifikasi dan prioritasi tiga elemen utama, yaitu: (1) kepentingan, sasaran, dan tujuan akhir nasional; (2) ancaman potensial terhadap kepentingan tersebut; serta (3) sumber daya yang dibutuhkan menghadapi ancaman guna melindungi kepentingan tersebut. Suatu strategi merupakan sebuah bentuk rencana konseptual, sekaligus merupakan suatu paket preskripsi kebijakan.<sup>41</sup> Gary Hart menambahkan, bahwa langkah awal dalam membangun kerangka berfikir atas strategi adalah pemahaman negara mengenai realitas sejarah dan karakteristik zaman saat itu, serta memahami pakem-pakem nasional.<sup>42</sup> Strategi dengan begitu tidak hanya perlu untuk dibangun secara sistematis, terencana dan koheren, dalam mempertimbangkan keseluruhan sumber daya nasional; tetapi butuh untuk melibatkan pertimbangan kemampuan, kendala, tradisi dan budaya, serta nilai-nilai untuk mencapai tujuan nasional, yang tidak hanya pada masalah keamanan.<sup>43</sup>

Gary Hart dalam argumennya menyimpulkan bahwa logika dasar strategi juga melibatkan tiga *power* utama negara: ekonomi, politik dan militer.<sup>44</sup> Ketika strategi secara khusus dipersepsikan sebagai bentuk strategi keamanan nasional yang membutuhkan pemahaman atas perubahan intensitas persaingan atau konflik

<sup>39</sup> Colin Dueck, *Reluctant Crusaders: Power, Culture, And Change In American Grand Strategy* (Princeton University Press: 2006), halaman 9-10.

<sup>40</sup> Gary Hart, *Op.Cit*, Halaman 3.

<sup>41</sup> Colin Dueck, *Op.Cit*, halaman 11.

<sup>42</sup> Lihat Gary Hart, *Op.Cit*, Halaman 5-7.

<sup>43</sup> *Ibid*, Halaman 12.

<sup>44</sup> *Ibid*, halaman 14.

terhadap negara lain,<sup>45</sup> sehingga prinsip umum menyatakan dibutuhkannya konsentrasi kekuatan maksimal dari kekuatan militer; maka maksimalisasi konsentrasi kemampuan dalam bidang lainnya juga dibutuhkan.<sup>46</sup>

Pemaksimalan kekuatan di dalam strategi erat kaitannya dengan dilema keamanan, yang sebagaimana disebutkan John Mearsheimer bahwa: “*international systemic pressures and constraints exert an all-powerful influence on grand strategy*”. Mearshimer juga menegaskan bahwa faktor budaya akan berpengaruh, meskipun pengaruhnya tidak terlalu besar. Faktor ini erat kaitannya dengan faktor *perceptual* dalam dilema keamanan, yang nantinya mempengaruhi opsi pilihan strategi negara.<sup>47</sup> Dalam implementasi strategi, hal ini terefleksikan dalam doktrin, dan pola pelatihan pasukan tempur, yang digunakan negara.<sup>48</sup>

Strategi negara juga erat kaitannya dengan model aksi reaksi yang disebabkan oleh dilema keamanan.<sup>49</sup> Analisa penelitian ini yang melibatkan analisis pola diadik di dalam hubungan internasional, sebelumnya juga telah dijelaskan Buzan dalam pembahasannya mengenai tensi antara kepentingan negara *status quo* dan revisionis. Buzan menjelaskan negara revisionis selalu akan menekan kekuatan dominasi *status quo*, yang menyebabkan ‘*power struggle*’ muncul dan menjadi tantangan bagi keamanan nasional.<sup>50</sup> Karenanya, selama persaingan tetap bertahan (meskipun tidak tereskalasi pada tahap konflik) maka dilema keamanan akan terus menyertainya, dan selama tantangan tersebut menyangkut keamanan dan kepentingan negara maka hubungan aksi reaksi antara strategi kedua negara yang bersaing akan bertahan.

Intensitas dilema keamana dengan begitu akan dipengaruhi, sekaligus mempengaruhi bagaimana strategi dibangun. Ini dikarenakan dalam menjelaskan hubungan kausalitas tersebut, harus dipahami adanya ‘*ability*’ dan ‘*willingness*’ dari aktor-aktor negara yang terlibat di dalam sistem,<sup>51</sup> yang dalam kondisi anarki

<sup>45</sup> *Ibid*, halaman 107.

<sup>46</sup> *Ibid*, halaman 9-10.

<sup>47</sup> Colin Dueck, *Op.Cit*, halaman 17.

<sup>48</sup> Antulio J. Echevarria II, *Op.Cit*, halaman 58.

<sup>49</sup> Barry Buzan, “*An Introduction to Strategic Studies: Military Technology and International Relations*” (MacMillan Press: 1987), halaman 78.

<sup>50</sup> Barry Buzan, “*People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era*”, 2<sup>nd</sup> ed (Harvester Wheatsheaf: 1991), halaman 299.

<sup>51</sup> Schweller, 2004. Dalam Birthe Hansen, Peter Toft dan Anders Wivel, “*Security Strategies and American World Order: Lost power*” (Routledge: 2009), halaman 8.

akan melawan konsentrasi kekuatan yang berlawanan atau ancaman yang dihadapinya.<sup>52</sup> Dalam kondisi ini, strategi bergerak bukan sebagai usaha yang netral, atau dengan kata lain sangat erat tujuannya untuk memperkuat posisi suatu pihak diantara pihak lain.<sup>53</sup> Negara dalam strategi yang dibangunnya kemudian tidak hanya memperhitungkan aspek *relative-power* namun juga akan memperhitungkan aspek *relative security*. Waltz menyatakan pola ini membuat negara menjadi '*sensitive to costs*,'<sup>54</sup> atau disebut pula oleh Wyn Jones "*to become concerned with a calculus of means*."<sup>55</sup> Yang hal ini menggambarkan bahwa negara akan melakukan perhitungan resiko dalam membangun strateginya.

Persepsi dan pertimbangan resiko kemudian menjadikan negara sebagai unit yang rasional, akan memilih pilihan opsi strategi yang berbeda dengan negara lainnya. Sebagaimana penjelasan pada bagian-bagian sebelumnya, hal tersebut membagi negara-negara di dunia untuk bersifat ofensif atau defensif. Bagi negara yang ofensif, dengan menggunakan logika ini maka tindakan agresif tidak serta-merta merupakan hasil dari adanya ketakutan semata, namun merupakan pilihan dengan resiko terkecil. Hal yang sama juga berlaku bagi negara yang defensif. Bahkan bagi negara defensif, memilih opsi strategi terutama dalam konteks terjadinya dilema keamanan memiliki dua tujuan yang sangat fundamental, yaitu: (1) untuk memitigasi dilema keamanan – dengan mengurangi mispersepsi, menghindarkan diri dari perlombaan senjata, serta mencegah konflik diantara negara; serta (2) untuk lebih memperkuat hubungan antar dua negara – dengan bergerak dari suatu langkah meredam intensitas dilema keamanan, ke arah bentuk kerjasama yang lebih tinggi.<sup>56</sup> Tidak hanya didasari sifat dan karakter negara, perbedaan dari bagaimana para akademisi memproyeksikan strategi yang dipilih suatu negara, juga dapat berbeda dengan didasari perspektif yang mereka gunakan. Bahkan hal ini menyangkut pertimbangan mengenai bagaimana karakter negara lain yang dihadapi suatu negara. Tang menjelaskan hal ini dengan:

<sup>52</sup> Ikenberry, 2002. *Ibid*, halaman 11.

<sup>53</sup> Luttwak, 1985. Dalam Richard Wyn Jones, "*Security, Strategy, and Critical Theory*" (Lynne Rienner Publishers, Inc: 1999), halaman 116.

<sup>54</sup> Birthe Hansen, Peter Toft dan Anders Wivel, "*Security Strategies and American World Order: Lost power*" (New York: Routledge, 2009), halaman 16.

<sup>55</sup> Richard Wyn Jones, "*Security, Strategy, and Critical Theory*" (Lynne Rienner Publishers, Inc: 1999), halaman 128.

<sup>56</sup> Shiping Tang, *Op.Cit*, halaman 122.

**Tabel 2.4:** Perbedaan Konsep Strategi dalam Paradigma, Realisme Ofensif, Realisme Defensif, dan Neoliberalisme.<sup>57</sup>

<i>Aspects of Operational Codes</i>	<i>Offensive Realism</i>	<i>Defensive Realism</i>	<i>Neoliberalism</i>
<i>Are there defensive realist states out there?</i>	No	Yes	Yes
<i>Should a state try to assess the other state's intention?</i>	No, because all states are offensive realist states.	Yes, there are both defensive realist states and offensive realist states out there.	Yes, there are both defensive realist states and offensive realist states out there
<i>General Strategies</i>	To constantly seek and take advantage of opportunities to weaken all other states, temporarily pausing only when an alliance is necessary.	<b>When facing like-minded defensive realist states:</b> self-restraint and willingness to be restrained. Seeking cooperation. <b>When facing offensive realist states:</b> deterrence and defense with arms and alliances; attempt to change the nature of the adversary if possible	<b>When facing like-minded defensive realist states:</b> self-restraint and willingness to be restrained. Seeking cooperation. <b>When facing offensive realist states:</b> deterrence and defense with arms and alliances; attempt to change the nature of the adversary if possible
<i>Moving toward codified cooperation (i.e., institutions)?</i>	No	Yes, institutions are helpful, but they are not necessary.	Yes, institutions are both necessary and helpful.
<i>Behave according to the norms and ideas dictated by institutions?</i>	No, only according to interests.	No, only according to interests.	Yes. Ideas, Norms dictated by institutions are interest themselves.

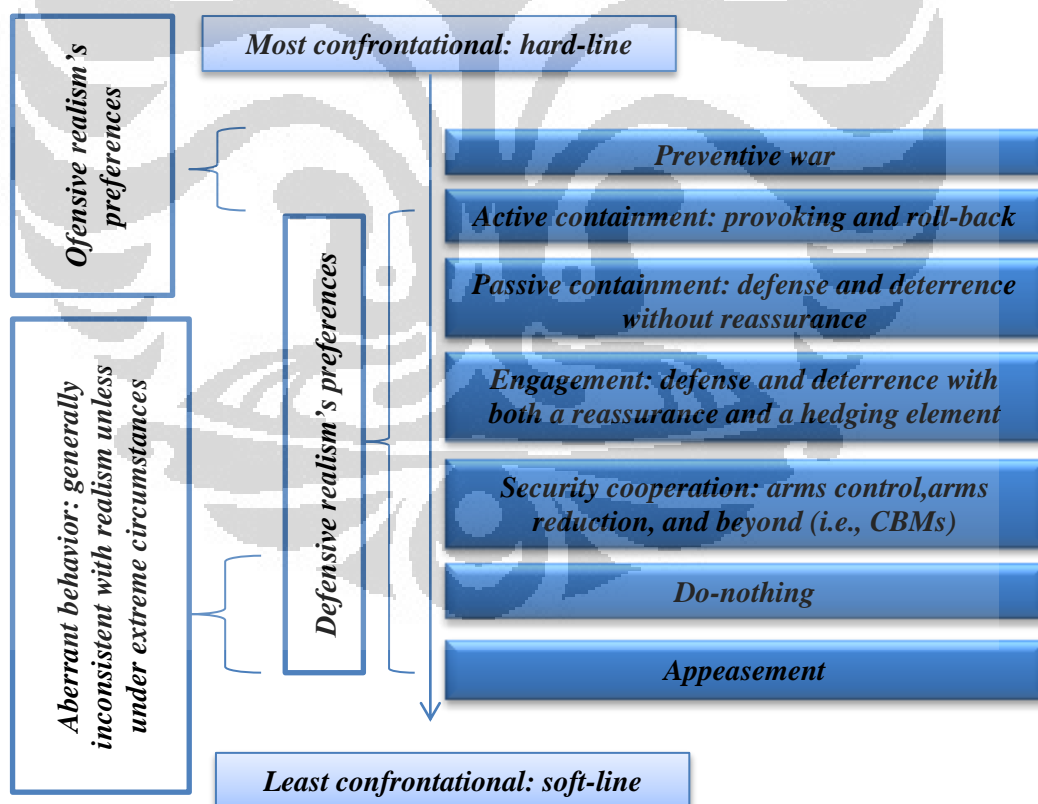
Terlepas dari bagaimana sifat negara, pada implementasinya strategi suatu negara kemudian juga dapat berubah secara dramatik.<sup>58</sup> Strategi negara dapat diperluas atau dipersempit cakupannya, maupun mengalami perubahan secara keseluruhan. Proses tersebut dikenal dengan istilah “*strategic adjustment*”, yang dapat diukur melalui berbagai dimensi; diantaranya: (1) kenaikan atau penurunan anggaran belanja pertahanan maupun militer; (2) perluasan atau penyempitan komitmen aliansi; (3) perluasan ataupun pengurangan militer di luar negeri; (4)

<sup>57</sup> *Ibid*, halaman 126.

<sup>58</sup> Colin Dueck, *Op.Cit*, halaman 1.

penurunan atau penambahan bantuan luar negeri; serta (5) apakah negara semakin terlibat ataukah semakin melepaskan diri dari aktivitas diplomatik; dan (6) apakah negara bersikap agresif dan konfrontasional atau lebih kooperatif dengan negara lawan.<sup>59</sup> Proses pergeseran dan perubahan strategi Dueck di atas memiliki relevansi dengan pemikiran Shiping Tang mengenai strategi. Tang mencoba merangkum strategi yang mungkin dipilih oleh suatu negara dalam konteks diadik menggunakan dasar pemikiran Schweller dan Copeland yaitu dalam kondisi ketika suatu negara (yang secara relatif mengalami penurunan kekuatan) berhadapan dengan negara yang memperlihatkan peningkatan kekuatannya. Tang kemudian menggunakan istilah *Realism's Ladder of Strategies* untuk menjelaskan tujuh jenjang opsi strategi yang dapat dipilih negara, yaitu: *preventive war*, *active containment*, *pasive containment*, *engagement*, *security cooperation*, *do nothing*, serta *appeasement*.<sup>60</sup>

**Gambar 2.2:** *Realism's Ladder of Strategies*.<sup>61</sup>



<sup>59</sup> *Ibid*, halaman 12.

<sup>60</sup> Lihat Shiping Tang, *Op.Cit*, halaman 100-103.

<sup>61</sup> *Ibid*, halaman 104.

Dalam menjelaskan karakteristik strategi negara, Tang menyebutkan bahwa *preventive war* dapat dikatakan merupakan pilihan yang hanya akan diambil oleh negara ofensif, yang dalam ketidakpastian dilakukan untuk meminimalisir resiko lebih besar atas kemungkinan mendapat serangan dari pihak lawan. Dengan kata lain, strategi ini akan dipilih karena strategi defensif lebih beresiko dari strategi ofensif. Berbeda dari *preemptive war*, Tang menjelaskan strategi *containment* merupakan persimpangan yang umumnya dipilih negara ofensif maupun defensif. Strategi ini dapat dibedakan ke dalam dua bentuk: aktif dan pasif. Strategi *active containment* sendiri merupakan kombinasi aksi *deterrence* dan bertahan, namun dengan melakukan tindakan seperti melakukan provokasi yang mengancam atau inisiasi krisis. Sedangkan strategi *pasive containment* merupakan serupa strategi *active containment*, namun dengan tidak aktif dalam melakukan provokasi terhadap pihak lawan.

Strategi *engagement*, adalah strategi yang umum dipilih negara defensif. Strategi ini dikemukakan Tang akan mengkombinasikan elemen pemastian (*reassurance*) atas pihak lawan, dengan elemen *defense/deterrence*. Strategi ini memiliki tiga komponen utama yaitu: (1) butuh dipastikan bahwa pihak lawan tidak akan melakukan ancaman, (2) adanya perluasan ajakan kerjasama, untuk mengukur intensitas lawan, serta (3) dengan tetap melindungi diri dari kemungkinan pihak lawan tetap akan menjadi agresor. Dalam konteks sulitnya terjadi kombinasi elemen *reassurance* dan *defense/deterrence*, maka strategi *engagement* setidaknya memiliki empat tujuan; yaitu: (1) untuk memastikan bahwa pihak lawan tidak berbahaya, tanpa mempertaruhkan kepentingan vital negara; (2) dilakukan setidaknya untuk mencegah lawan berfikir untuk melakukan agresi; (3) untuk merubah intensi pihak lawan yang merugikan, meskipun lawan tersebut adalah agresor; serta (4) untuk memberi waktu bagi negara mempersiapkan kekuatan, jika lawan tetap beraksi sebagai agresor.

Strategi berikutnya dalam pemikiran Tang adalah strategi *security cooperation* yang merupakan kelanjutan *strategi engagement*. Strategi ini merupakan ajakan terhadap negara lain untuk bergerak ke arah kerjasama yang lebih luas dan menuju hubungan yang lebih kooperatif. Sedangkan strategi *do nothing* dan *appeasement* menurut Tang, adalah strategi yang hampir tidak



mungkin dilakukan negara dalam menghadapi lawan, termasuk bagi negara defensif. Strategi *do nothing* terjadi ketika negara tidak bereaksi sama sekali terhadap aksi yang dilakukan pihak lawan. Sedangkan strategi *appeasement* merupakan strategi peredaan yang ditujukan dengan menarik diri secara pasti (seperti ketika negara sedang disedang diakomodir atau didamaikan), meskipun dan hanya berlaku jika pihak lawan berulang-kali mengambil keuntungan dalam kondisi tersebut, dan bahkan menekan dengan agresif. Karenanya jika suatu negara menggunakan serupa strategi *appeasement* tanpa adanya sikap agresif atau tekanan pihak lawan, maka konsep ini tidak berlaku.

Hubungan antara strategi dan peningkatan kapabilitas, serta relasinya dengan dilema keamanan, diterangkan oleh Jervis melalui tulisannya “*System Effect*”, yang juga dijadikan kerangka berfikir awal pada penelitian ini. Jervis menyebutkan bahwa: strategi suatu negara akan dipengaruhi oleh strategi negara lain.<sup>62</sup> Karenanya dalam penelitian yang mempertanyakan strategi, Jervis menyarankan penggunaan analisis non-linear untuk dapat menjelaskan variabel dependen dari aktor lain, baik yang mempengaruhi maupun dipengaruhi lingkungan (sistem), dimana Jervis menyebutkan:

*“Additive and linear operations cannot capture what happens because the impact of one variable or strategy depends on others as actors both shape and are shaped by their environments.”*<sup>63</sup>

Hal-hal tersebut menjadi landasan penelitian ini, untuk tidak menggunakan variabel-variabel yang bersifat linear dalam menjelaskan indikator peningkatan kapabilitas militer, yang akan diterangkan lebih lanjut pada bab selanjutnya.

### **2.3. Indikator-indikator Pergeseran Strategi Keamanan Amerika Serikat Periode 2002-2010**

Pergerakan intensitas strategi keamanan AS selama periode 2002-2010, dapat dilihat dari indikator-indikator *strategic adjumstment*. Data dari indikator ini nantinya berfungsi untuk menjelaskan peningkatan atau penurunan intensitas defensif maupun ofensif dari strategi AS khususnya terhadap China, serta bentuk pergeserannya.

<sup>62</sup> *Ibid*, halaman 40.

<sup>63</sup> Robert Jervis, “*System Effects: Complexity in Political and Social Life*” (Princeton University Press: 1997), halaman 91.

### 2.3.1 Anggaran Belanja Militer dan Bantuan Luar Negeri

Anggaran belanja pertahanan dan anggaran militer merupakan salah satu indikator penilaian strategi, dikarenakan kemampuannya untuk menjelaskan prioritas negara dalam memanfaatkan salah satu sumber strategis, baik pada masa saat ini maupun masa yang akan datang. Pemahaman mengenai anggaran belanja pertahanan dapat berbeda dari istilah anggaran belanja militer, yang istilah ini dapat bergeser sesuai pemahaman dari tiap-tiap negara.

Anggaran belanja pertahanan AS selama periode tahun 2002 hingga 2010, secara umum meningkat secara signifikan. Total anggaran belanja pertahanan AS meningkat dari sebesar US\$ 423,03 milyar di tahun 2002, menjadi sebesar US\$ 894,97 milyar pada 2010. Rata-rata pertumbuhan per tahun anggaran pertahanan AS pada periode tersebut adalah sebesar 8.83%, dimana peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2004 yaitu sebesar 20,76%.<sup>64</sup>

Anggaran pertahanan merupakan alokasi anggaran belanja negara pemerintah AS yang terbesar sejak tahun 2004, jauh melampaui alokasi anggaran belanja lainnya, yaitu: pensiun, kesehatan, pendidikan, transportasi, kesejahteraan, proteksi, transportasi, pengeluaran umum, pembayaran bunga, dan pengeluaran tambahan. Selama periode 2002-2010 AS menggunakan 20,61% hingga 24,86%, atau rata-rata 22,87% anggaran belanja negara untuk dialokasikan pada bidang pertahanan. Persentase ini meningkat di setiap tahunnya, dan sempat terkoreksi di tahun 2009 akibat krisis keuangan yang dihadapi AS. Meski begitu, anggaran pertahanan AS memiliki persentase yang cukup besar, serta tumbuh secara stabil dari 4% menjadi 6% bila dibanding GDP AS pada periode yang sama, dimana pertumbuhan ini terus berlangsung dalam kondisi krisis yang di hadapi AS.<sup>65</sup>

Dari data-data tersebut dapat disimpulkan bahwa pertahanan merupakan prioritas utama pemerintah AS. Hal ini tidak hanya ditunjukkan dari bagaimana anggaran pertahanan memiliki bagian terbesar dalam anggaran negara, serta GDP AS, tetapi juga ditunjukkan dari bagaimana peningkatan yang stabil dalam hal

---

<sup>64</sup> Data diolah dari berbagai laporan “*US Federal Government Budget Spending*” yang dikeluarkan pemerintah untuk laporan kepada kongres (setiap *winter* per tahunnya), Data resmi dapat dilihat pada <http://www.gpo.gov/> dan <http://www.worldbank.org/>, serta [http://www.usgovernment\\_spending.com/](http://www.usgovernment_spending.com/), diakses pada 28 April 2012, pukul 23.00. Lihat lampiran 1.

<sup>65</sup> *Ibid*

nominal dan presentase tersebut bahkan dilakukan ketika defisit anggaran negara terjadi. Dimana krisis keuangan domestik dan global telah menyebabkan turunya tingkat pertumbuhan ekonomi AS sebesar 0.02% hingga 3,5% pada periode 2008-2010.<sup>66</sup> Kondisi ini menyebabkan timbulnya defisit dalam tanggung jawab pembelanjaan pemerintah, khususnya pada beberapa hal yakni: (1) defisit anggaran belanja pemerintah yang puncaknya terjadi pada 2009 sebesar US\$ 1,841 trilyun, dan (2) meningkatnya tanggungan hutang US\$ 12,867 trilyun pada tahun yang sama. Yang pada awal tahun 2008 sebelumnya, defisit anggaran pemerintah hanya sebesar US\$ 410,04 milyar, sedangkan tanggungan hutang sebesar US\$ 9,654 trilyun.<sup>67</sup>

Anggaran pertahanan AS sendiri secara umum mencakup enam area, yang empat terbesarnya adalah untuk pembiayaan *military defense*, *veterans*, *foreign military aid* dan *foreign economic aid*. Keseluruhan anggaran ini hampir sebagian besar merupakan wewenang Departemen Pertahanan, sedangkan sisanya merupakan wewenang Departemen Tenaga Kerja, Departemen Energi, Departemen Keadilan, Departemen Luar Negeri, serta Departemen *Homeland Security*.<sup>68</sup>

Sepanjang periode 2002-2010, anggaran *military defense* (dikenal dengan sebutan anggaran militer), selalu menjadi bagian terbesar dari keseluruhan anggaran pertahanan AS, dan tumbuh dari US\$ 347,986 milyar di tahun 2002, menjadi US\$ 719,179 milyar di tahun 2010. Anggaran militer tumbuh lebih dari 106% dalam satu dekade, dimana rata-rata total anggaran lainnya hanya tumbuh sebesar 24,4%. Bahkan anggaran militer memiliki bagian rata-rata sebesar 82,85% per tahunnya dari total anggaran pertahanan. Anggaran lain seperti *foreign military aid* sendiri tumbuh dari US\$ 7,548 milyar di 2002, menjadi US\$ 9,986 milyar di 2010, atau 31,1% dalam satu dekade, sedangkan *foreign economic aid* tumbuh dari US\$ 15,97 milyar menjadi \$ 41,24 milyar. Meskipun keduanya bukan prioritas utama anggaran pertahanan, pertumbuhan *foreign economic aid* selama satu dekade telah melebihi anggaran militer, yakni sebesar 158,2%.

---

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> Tod Harrison, "Analysis of the FY 2012 Defense Budget" (Center for Strategic and Budgetary Assessments: 2012), halaman 1.

**Tabel 2.5:** Alokasi Anggaran Belanja Pertahanan AS tahun 2002-2010.<sup>69</sup>

Aanggaran Pertahanan Amerika Serikat 2002-2010 (dalam milyar \$)									
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Military Defense</b>	347.986	376.286	453.684	465.871	535.943	571.869	607.263	690.308	719.179
<b>Veterans</b>	51.527	57.07	60.454	68.161	70.41	72.401	86.618	96.677	124.655
<b>Foreign Military Aid</b>	7.548	6.765	9.545	8.773	8.202	9.286	9.025	9.986	9.896
<b>Foreign Economic Aid</b>	15.972	13.97	24.691	23.188	26.548	25.785	25.801	24.736	41.242

Penjabaran data alokasi anggaran pertahanan menunjukkan bahwa anggaran militer merupakan prioritas AS, dibandingkan anggaran pertahanan lainnya yang berupa bantuan luar negeri. Meski begitu tidak dapat dipungkiri bahwa AS memperlihatkan peningkatan komitmennya untuk semakin memperbesar bantuannya di tengah semakin meningkatnya aksi peningkatan intensitas pertahanan militer yang dilakukan.

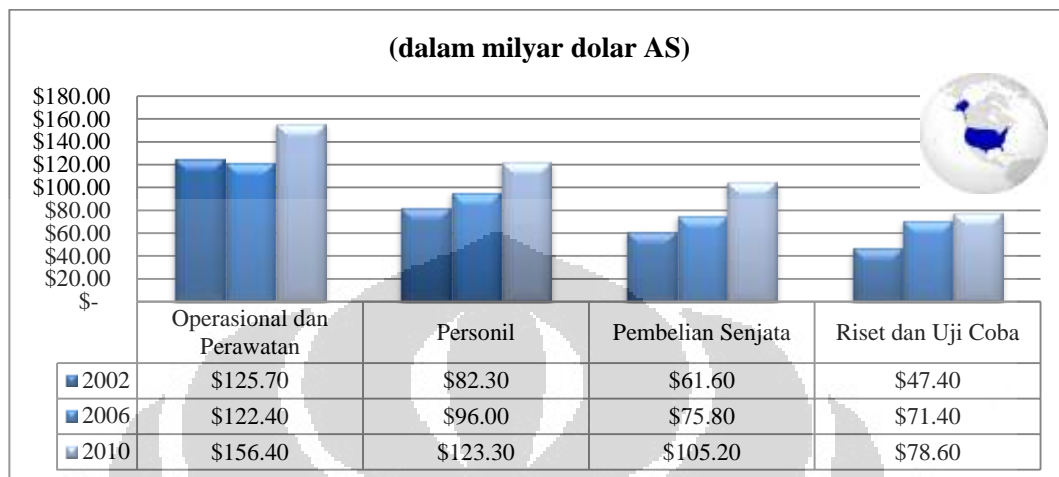
Lebih jauh anggaran militer AS, setidaknya dapat dipaparkan untuk melihat kecenderungan atau potensi pergeseran strategi AS, melalui beberapa aspek distribusi anggarannya. Dilihat dari jenis kepentingannya, anggaran militer didistribusikan untuk empat kepentingan besar yaitu: (1) operasional dan perawatan, (2) personil (gaji dan insentif), (3) pembelian dan akuisisi persenjataan, serta (4) riset dan uji coba persenjataan. Anggaran militer juga dapat dilihat dari tujuannya yang diperuntukan sebagai anggaran perang dan anggaran operasional non perang, serta untuk melihat pola distribusi terhadap angkatan bersenjata yaitu: darat, laut, udara, serta keperluan operasi luar angkasa.

Dari distribusi berdasarkan sifat kepentingannya, alokasi untuk operasional dan perawatan merupakan yang terbesar selama tahun 2002-2010. Anggaran untuk keperluan ini, mengalami penurunan pada periode 2002-2006 dari sebesar US\$ 125,7 milyar di tahun 2002 menjadi US\$ 122,4 milyar di 2006. Periode 2006-2010 anggaran ini kembali ditingkatkan hingga pada level US\$ 156,4 milyar di 2010. Di sisi lain, anggaran personil, pembelian senjata, dan riset, masing-masing mengalami peningkatan yang stabil dari sebesar US\$ 82,3 milyar,

<sup>69</sup> Lihat lampiran 2. <http://www.gpo.gov/> dan <http://www.usgovernmentpending.com/>. *Loc. Cit.*

US\$61,6 milyar, dan US\$ 47,4 milyar di tahun 2002; menjadi sebesar US\$ 125, 3 milyar, US\$ 71,4 miliar, dan US\$ 78,6 milyar di tahun 2010.

**Grafik 2.1:** Distribusi dan Pertumbuhan Anggaran Militer AS.<sup>70</sup>



Catatan penting dalam hal ini adalah terjadinya pergeseran fokus pemerintah AS untuk membangun sistem persenjataan dari yang bersifat pengembangan menjadi pengadaan. Hal ini ditunjukkan ketika pada periode 2002-2006 AS lebih banyak melakukan riset pengembangan sistem persenjataan, namun pada periode 2006-2010 riset pengembangan persenjataan mengalami penurunan, dan pembelian senjata mengalami kenaikan signifikan,<sup>71</sup> yang salah satunya dipicu oleh kegagalan beberapa riset tersebut, yang menimbulkan US\$ 46.1 milyar *sunckcost* dalam anggaran.<sup>72</sup> Perubahan pola ini juga menunjukkan bahwa AS khususnya sejak tahun 2006, membutuhkan akuisisi sistem persenjataan secara cepat untuk menambah inventori yang dimilikinya.

Sedangkan dari segi tujuannya, AS selama tahun 2002-2010 meningkatkan anggaran perangnya, dari sebesar \$ 33,8 milyar pertahun di tahun 2002, menjadi \$ 165,3 milyar di tahun 2010, yang ditujukan untuk operasi *war on terror* yang

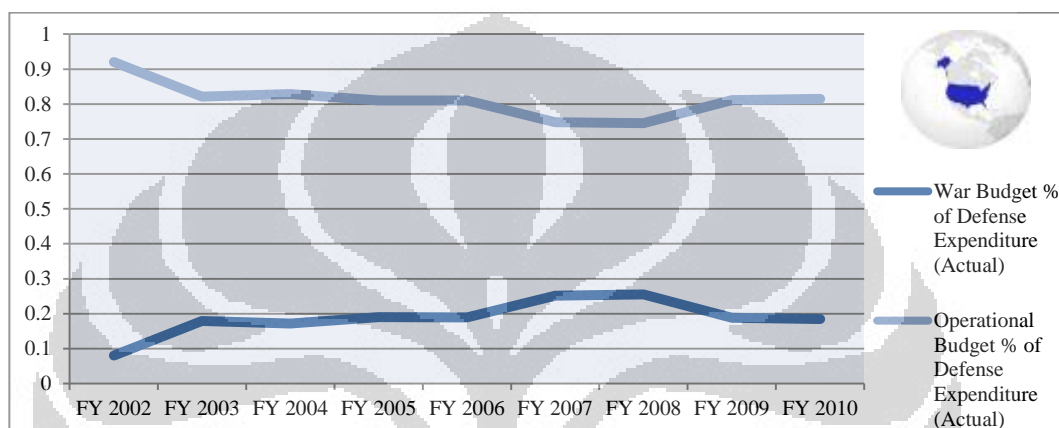
<sup>70</sup> Anggaran operasional mencakup juga untuk pembiayaan seluruh markas militer AS yang berada di berbagai negara di dunia. Data diolah dari tabel laporan keuangan departemen pertahanan AS. Untuk tahun 2002 didapat dari: Amy Balesco, *et.all*, "Appropriations and Authorization for FY2002: Defense" (Congressional Report Servicee for Congress: 2001), halaman 13; tahun 2006: Stephen Dagett *et.all*, "Appropriations and Authorization for FY2007: Defense", *Congresional Report Servicee for Congress* (2006), halaman 5; serta tahun 2010: Pat Towell *et.all*, "Appropriations and Authorization for FY2010: Defense", *Congresional Report Servicee for Congress* (2009), halaman 5.

<sup>71</sup> Tod Harrison, *Op. Cit*, halaman 40-59.

<sup>72</sup> Proyek riset tersebut diantaranya meliputi: *Future Combat Systems* (FCS), VH-71 Presidential Helicopter, dan lainnya. *Ibid*, halaman 36.

kemudian dikenal dengan *Overseas Contingency Operations* (OCO), khususnya di Irak dan Afganistan. Total anggaran perang AS bahkan mencapai US\$1,115 trilyun, atau sebesar 23% total anggaran militer AS selama 10 tahun terakhir, dimana anggaran perang AS tersebut adalah yang terbesar dari sejarah anggaran perang AS dan hampir sama dengan total biaya Perang Dunia ke II.<sup>73</sup>

**Grafik 2.2:** Perbandingan Presentase Anggaran Perang dan Anggaran Operasional Non Perang AS Tahun 2002-2010.<sup>74</sup>



Sedangkan untuk alokasi operasi angkatan perang, terdapat beberapa perbedaan, khususnya jika dihubungkan dengan anggaran perang dan non perang AS. Jika dilihat dari rata-rata biaya perang AS selama tahun 2002-2010, anggaran (diluar personil dan riset) umumnya dialokasikan terbesar bagi angkatan darat, maka anggaran operasional non perang AS dari berbagai *base* yang ada, terbesar didistribusikan bagi Angkatan Udara. Distribusi pada periode tersebut juga berbeda dari sebelumnya, dimana sebelumnya angkatan laut mendapat porsi anggaran militer yang cukup besar sebelum tahun 2002.

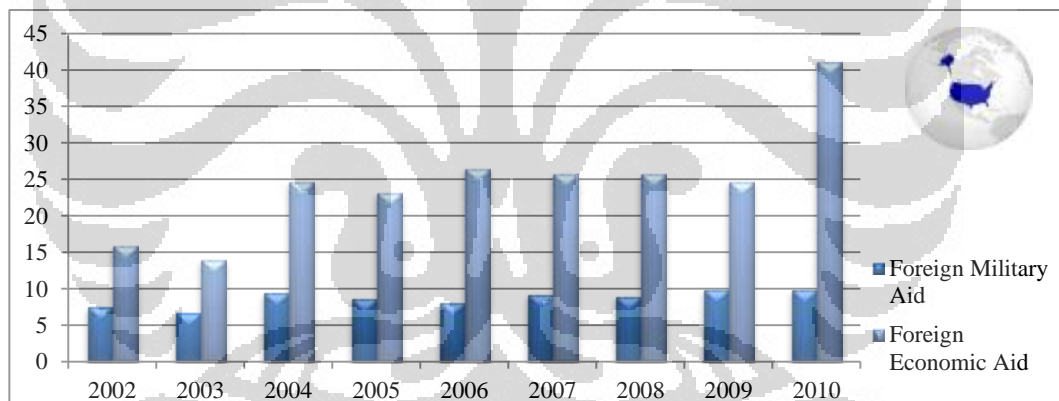
Sebagaimana disebutkan sebelumnya anggaran non militer yang merupakan bantuan luar negeri baik *foreign military aid* dan *foreign economic aid*, juga mengalami peningkatan dalam keseluruhan anggaran pertahanan AS,

<sup>73</sup> Berbagai peneliti menganggap total anggaran OCO tidak lebih besar dari anggaran biaya PD II yang sebesar \$ 296 milyar. Namun pendapat lainnya menyatakan jika diperhitungkan inflasi dan peningkatan nilai tukar dolar, maka biaya PD II pada saat ini mencapai \$ 4,104 trlyun. Besarnya anggaran perang ini, mendorong Presiden Obama berencana menurunkan secara bertahap anggaran perang hingga tahun 2016. Data diperoleh dari: Stephen Daggett, “*Costs of Major U.S. Wars*” (Congressional Research Service: 2010), halaman 2.

<sup>74</sup> Data perbandingan ini didapat dari data yang diolah dari: <http://www.usgovernment.spending.com/> dan Amy Balesco, “*The Cost of Iraq, Afghanistan, and Other Global War on Terror Operations Since 9/11*” (Congressional Research Service: 2011), halaman 3.

selama periode 2002-2010. Secara umum *foreign military aid* ditujukan sebagai bantuan bagi negara-negara dan institusi internasional untuk keperluan: (1) bantuan hutang belanja militer; (2) dukungan *counterinsurgency*; (3) bantuan keuangan bagi program militer internasional (lebih untuk industri pertahanan dan persenjataan); (4) pendidikan dan pelatihan militer internasional; (5) berbagai program keamanan internasional (anti-terorisme, *nonproliferation*); dan (6) operasi perdamaian. Sedangkan *foreign economic aid* memiliki tujuan berbeda, yaitu: (1) untuk pembangunan dan dukungan kemanusiaan; (2) untuk pembiayaan aktivitas hubungan luar negeri; (3) dukungan program pertukaran informasi; serta (4) bantuan keuangan internasional. Dimana bantuan luar negeri ini juga mencakup dukungan bagi aspek politik, hukum, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, dan berbagai aspek lainnya.<sup>75</sup>

**Grafik 2.3:** Perbandingan Pertumbuhan *Foreign Military Aid* dan *Foreign Economic Aid* AS Tahun 2002-2010 (dalam milyar US\$).<sup>76</sup>



Keseluruhan bantuan luar negeri AS dialokasikan bagi 179 negara di dunia. Dari tren data yang ada selama periode 2002-2010, fokus bantuan luar negeri AS mengalami pergeseran tujuan dan kepentingan utama, menyangkut berbagai kasus seperti: usaha perdamaian di Jalur Gaza (yang juga melibatkan Israel di dalamnya), demokratisasi dan rehabilitasi Irak, perang terhadap terorisme yang melibatkan Afganistan dan Pakistan; yang juga dapat disimpulkan semakin terpusat ke kawasan Timur Tengah.

<sup>75</sup> [http://www.usfederalbudget.us/federal\\_budget\\_detail\\_fy13bs12011n\\_303435\\_152#\\_usgs\\_302](http://www.usfederalbudget.us/federal_budget_detail_fy13bs12011n_303435_152#_usgs_302).  
*Loc. Cit.*

<sup>76</sup> *Ibid.*



**Tabel 2.6:** 10 Negara Penerima Bantuan Terbesar AS Tahun 2002-2009.<sup>77</sup>

10 Negara Penerima Bantuan Terbesar dari AS dan Jumlah Bantuan (Dalam juta dolar)																
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009								
1	Israel	2788	Iraq	3885	Iraq	8675	Iraq	9482	Iraq	10563	Iraq	7959	Afghanistan	8892	Afghanistan	8764
2	Egypt	2202	Israel	3729	Israel	2722	Israel	2714	Afghanistan	3740	Afghanistan	5813	Iraq	7506	Israel	2432
3	Pakistan	1080	Egypt	1716	Afghanistan	2032	Afghanistan	2252	Israel	2544	Israel	2510	Israel	2425	Iraq	2256
4	Afghanistan	585	Jordan	1696	Egypt	1958	Russia	1585	Egypt	1787	Egypt	1972	Egypt	1492	Egypt	1785
5	Colombia	536	Afghanistan	1077	Russia	941	Egypt	1563	Russia	1530	Russia	1593	Sudan	1416	Pakistan	1783
6	Russia	447	Russia	722	Colombia	758	Sudan	1043	Colombia	1348	Sudan	1180	Russia	1261	Sudan	1213
7	Jordan	339	Colombia	683	Jordan	637	Colombia	824	Pakistan	954	Pakistan	975	Tanzania	1056	West Bank/Gaza	1039
8	Peru	286	Ethiopia	602	Sudan	482	Pakistan	758	Sudan	908	Jordan	542	Ethiopia	996	Ethiopia	940
9	Turkey	278	Pakistan	587	Pakistan	441	Ethiopia	693	Jordan	562	Kenya	515	Pakistan	963	Kenya	918
10	India	228	Peru	230	Ethiopia	436	Jordan	683	Kenya	391	Colombia	497	Colombia	888	Colombia	895
	81. China (PRC)	23	86. China (PRC)	28	72. China (PRC)	39	81. China (PRC)	40	75. China (PRC)	45	58. China (PRC)	65	51. China (PRC)	103	63. China (PRC)	62

China sendiri juga merupakan salah satu negara tujuan AS dalam mengalokasikan *Foreign Military Aid* dan *Foreign Economic Aid*. Sepanjang periode 2002-2010, posisi China sebagai negara penerima bantuan meningkat dari urutan 81 di tahun 2002, ke urutan 63 di 2010. Bantuan kepada China berbeda kesepuluh negara penerima bantuan AS terbesar lainnya, yang terhadap China hampir keseluruhannya bukanlah bantuan terhadap pemerintah, melainkan sebagai biaya operasionalisasi program internasional AS di China; serta diperuntukan bagi *non-governmental organization* (NGO), universitas, dan komunitas tertentu yang menjalin kerjasama dengan pemerintah AS.<sup>78</sup> Secara spesifik, bantuan AS terhadap China meliputi: *Human Rights and Democracy Fund* (DF) untuk program-program dukungan demokrasi di China, *Development Assistance* (DA) khususnya di bidang hukum, *Economic Support Fund* (ESF) baik untuk NGO di China maupun masyarakat Tibet, *Global Health and Child Survival* (GHCS) untuk mengatasi penyebaran penyakit dan virus berbahaya, serta *International Narcotics Control and Law Enforcement* (INCLE) guna membangun prosedur penegakan hukum dan penaggulangan obat-obat terlarang.<sup>79</sup>

Besarnya bantuan AS terhadap China tersebut mendapat kritik dari kalangan kongres, mengingat naik-turunnya kedekatan hubungan kedua negara,

<sup>77</sup> Data ini telah diolah dari data *United States Census Bureau*. Data tersebut memiliki perbedaan secara nominal dengan data deskripsi anggaran pertahanan AS yang telah disebutkan sebelumnya, namun memiliki persentase dengan tren serupa. Lihat lampiran 4. [http://www.census.gov/compendia/statab/cats/foreign\\_commerce\\_aid/foreign\\_aid.html](http://www.census.gov/compendia/statab/cats/foreign_commerce_aid/foreign_aid.html), diakses pada 28 April 2012, pukul 23.06

<sup>78</sup> Thomas Lum, "U.S. Assistance Programs in China", *Congressional Research Service* (2012), halaman 1.

<sup>79</sup> Lihat *Ibid*, halaman 6-10.



serta kesanggupan China dalam pembangunan ekonomi dan militer. Namun berbagai pihak merasa tindakan AS ini telah tepat, sebagai salah satu cara untuk melanggengkan nilai-nilai dan kepentingan AS baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>80</sup> Di tengah kontroversi yang terjadi, program bantuan AS terhadap China tetap berjalan dan semakin meluas, baik dalam bidang ekonomi maupun militer.

**Tabel 2.7:** Anggaran Bantuan AS kepada China 2002-2010.<sup>81</sup>

Foreign Military and Economic Aid AS kepada China 2002-2010 (dalam ribu dolar)									
Program	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
GHCS (HIV/AIDS)	0	0	0	0	0	6750	6960	7308	7000
DA (Rule of Law, Environment)	0	0	0	0	4950	5000	9919	11000	12000
ESF/DF (Democracy Programs)	10000	15000	13500	19000	20000	20000	15000	17000	17000
ESF (Tibet)	0	0	3976	4216	3960	3960	4960	7300	7400
INCLE (Criminal Justice)	0	0	0	0	0	0	0	600	800
Peace Troops	1559	977	863	1476	1683	1748	1980	2057	2718

Gambaran arah strategi keamanan AS, dapat disimpulkan berdasarkan berbagai data mengenai anggaran pertahanan AS selama periode 2002-2010. Secara umum peningkatan anggaran pertahanan AS memperlihatkan peningkatan intensitas ofensif potensi strategi AS, yang potensi ini semakin besar khususnya jika melihat fakta peningkatan anggaran pertahanan yang tetap stabil termasuk di saat krisis ekonomi dan defisit anggaran pemerintah sejak akhir tahun 2008. Potensi ofensif strategi AS juga diperkuat dengan fakta bahwa anggaran pertahanan menjadi prioritas negara terbesar, baik dari bagiannya terhadap anggaran belanja negara maupun GDP AS. Peningkatan anggaran pertahanan dalam merepresentasikan potensi ofensif strategi AS terhadap China, juga diperlihatkan dari kenyataan bahwa alokasi terbesarnya adalah anggaran militer.

<sup>80</sup> Pemerintah AS melalui USAID, menyatakan dalam mendukung kepentingan dan nilai-nilai AS, bantuan yang diberikan bukan diperuntukan bagi pemerintah China dan tidak melibatkan transfer teknologi. Hal ini untuk melindungi kepentingan AS baik dalam konteks keamanan dan pertahanan negara, serta kepentingan-kepentingan ekonomi lainnya, dimana berbagai perusahaan dan bisnis besar AS terjadi di wilayah China. (seperti: General Electric, Honeywell, Wal-Mart, Alcoa, Pfizer, dan lainnya) Dalam Matthew Pennington, "Lawmakers take aim at millions in US aid to China" (Business Week: 2011). Diakses melalui <http://www.businessweek.com/ap/financialnews/D9R1DON80.htm>, pada 29 April 2012, pukul 20.05.

<sup>81</sup> Thomas Lum, *Op.Cit*, halaman 11.

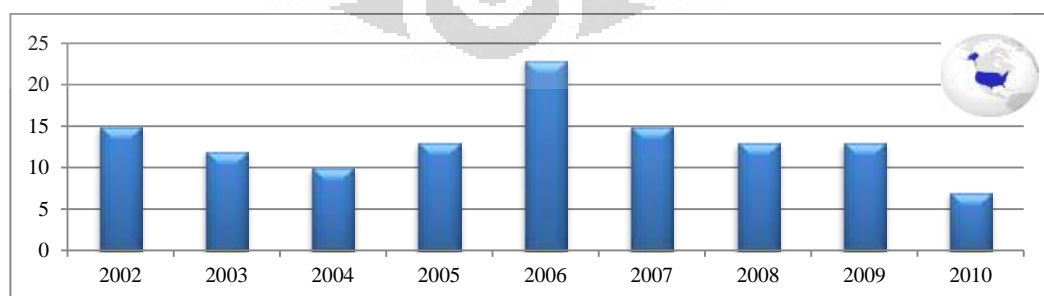
Dimana alokasi anggaran militer juga terus mengalami peningkatan di tengah krisis AS dan menurunnya tingkat ancaman terorisme setelah keberhasilan AS dalam berbagai aksi kontra-terorisme, yang memungkinkan anggaran ini untuk dimanfaatkan dan dialokasikan dalam menghadapi ancaman lainnya termasuk China. Terlebih pada periode ini, AS juga meningkatkan alokasi bagi pengadaan senjata khususnya sejak tahun 2006. Meski begitu, di sisi lain bantuan AS terhadap negara-negara di dunia termasuk China juga mengalami peningkatan, khususnya dalam bentuk bantuan ekonomi, yang menunjukkan pula peningkatan intensitas defensif yang dilakukan AS.

### 2.3.2 Aktivitas Diplomasi Keamanan dan Komitmen Kerjasama.

Aktivitas diplomasi (khususnya di bidang keamanan dan pertahanan) merupakan cara lain dalam menilai strategi suatu negara. Aktivitas diplomasi dapat diukur dari berbagai faktor, termasuk pada aspek perdagangan dan ekonomi. Faktor-faktor tersebut baru dikatakan memiliki relevansi atas strategi keamanan negara hanya jika ditujukan untuk mengejar kepentingan nasional dalam konteks menghadapi konflik bersenjata dari musuh potensial yang dimilikinya.<sup>82</sup>

Aktivitas diplomasi dalam penelitian ini akan dinilai terbatas pada kontak (aktivitas hubungan diplomasi) militer AS dan China, yang melibatkan kunjungan militer, latihan dan misi bersama, hingga aktivitas lainnya. Dari segi kuantitasnya, jumlah pertemuan AS dan China selama periode 2002-2010 mengalami peningkatan khususnya sejak tahun 2004 hingga tahun 2006, dan kemudian aktivitas ini kembali mengalami penurunan hingga tahun 2010.

**Grafik 2.4:** Jumlah Aktivitas Hubungan Pertahanan dan Militer AS-China.<sup>83</sup>



<sup>82</sup> Collin Dueck, *Op.Cit*, halaman 10.

<sup>83</sup> Lihat lampiran 4. Data diolah dari laporan kongres AS. Dalam Shirley A. Kan, “*U.S.-China Military Contacts: Issues for Congress*” (Congressional Research Service: 2012), halaman 57-68.

Aktivitas hubungan pertahanan AS dan China sepanjang tahun 2002-2010 setidaknya dilakukan untuk pembahasan komitmen kerjasama serta membicarakan berbagai aspek strategis yang selama ini sensitif di antara kedua negara. Aspek-aspek tersebut mencakup: (1) *Communication, Conflict Avoidance, and Crisis Management*; (2) *Civilian Control over PLA and Civil-Military Coordination*, (3) *Transparency, Reciprocity, and Information Exchange*; (4) *Tension Reduction over Taiwan*; (5) *Weapons Nonproliferation*, (7) *Strategic Nuclear, Missile, Space, and Cyber Security*; serta (8) *Counterterrorism*.<sup>84</sup>

Aspek *Communication, Conflict Avoidance, and Crisis Management* merupakan aspek paling sensitif di antara kedua negara mengingat sering terjadinya ketegangan di wilayah maritim Laut China Selatan. Salah satu komitmen dalam menanggapi hal ini adalah inisiatif untuk mengintensifkan *Military Maritime Consultative Agreement* (MMCA), yang merupakan perjanjian bilateral militer pertama antara AS dan China, yang ditandatangani pada tahun 1998. Perjanjian ini difungsikan untuk mengurangi kemungkinan miscalculation, guna menjaga perdamaian di kawasan Asia-Pasifik. Pertemuan-pertemuan dalam rangkaian MMCA menjadi semacam mekanisme kontrol persenjataan, serta implementasi *Confidence-Building Measures* (CBMs) antara AS dan China, membangun *mutual trust*, keterbukaan dan transparansi.<sup>85</sup> Selama periode 2002-2010, setidaknya dua hingga tiga pertemuan dilangsungkan setiap tahunnya.

MMCA bukan satu-satunya komitmen yang digagas AS untuk memperbesar intensitas komunikasi, serta meningkatkan usaha pencegahan konflik dan peredaman konflik dengan China. Pada Awal tahun 2005, Departemen Pertahanan AS memprakarsai diadakannya dialog khusus untuk membahas kebijakan-kebijakan pertahanan di luar pembahasan MMCA yakni *Defense Policy Coordination Talks* (DPCT). DPCT diadakan pertama kali di Washington pada Desember 2006, yang hingga tahun 2010 hanya berlangsung selama tiga kali. Dengan segala kendalanya, meskipun DPCT selalu menghasilkan rumusan hasil pertemuan yang terbatas, namun DPCT mampu menggabungkan

<sup>84</sup> Lihat Dalam Shirley A. Kan, "U.S.-China Military Contacts: Issues for Congress" (Congressional Research Service: 2012), halaman 23-40.

<sup>85</sup> Tao Li, "Confidence-Building Measure and Sino-US Military Maritime Consultative Agreement", Halaman 9. Diakses melalui: [http://www.chinaipa.org/cpaq/v1i1/Paper\\_Li.pdf](http://www.chinaipa.org/cpaq/v1i1/Paper_Li.pdf), pada 23 April 2012, pukul 09.20.

pembicaraan dalam ranah MMC dan *search and rescue exercise* (SAREX), khususnya ketika MMCA mulai dianggap menemui hambatan. Seperti di tahun 2007, dimana pertemuan MMCA tidak dilangsungkan sama sekali. Meski begitu, di tahun 2008 hingga tahun 2010, pertemuan MMCA kembali diprakarsai AS, namun secara umum lebih berisi perdebatan dan perbedaan kepentingan antara AS dan China, yang menyangkut masalah kebebasan navigasi di laut lepas termasuk kawasan Zona Ekonomi Eksklusif China.<sup>86</sup>

Inisiatif AS lainnya adalah pengajuan *Incidents at Sea Protocol* (INCSEA), yang serupa dengan protokol 1972 antara AS dan Uni Sovyet. Inisiatif ini diajukan AS pada Maret 2007, guna menanggulangi kemungkinan terjadinya kasus “EP-3”<sup>87</sup> terjadi di kemudian hari. Protokol INCSEA sendiri masih belum mencapai titik temu khususnya menyangkut syarat-syarat tertentu yang diajukan pihak China, serta kejadian pada Maret 2009 ketika Pentagon melaporkan beberapa kapal Angkatan Laut China secara agresif menghadang kapal pengawas laut AS di laut China Selatan.<sup>88</sup>

*Defense Consultative Talks* (DCT) merupakan inisiatif AS yang kembali intensif dilakukan pada periode 2002-2010. Setelah pertemuan ke empat tahun 2000, DCT mulai diadakan kembali setiap tahunnya, dimana tercatat 7 kali pertemuan telah berlangsung hingga tahun 2010. Meski pada awalnya DCT bukan pertemuan yang diadakan untuk pembahasan keamanan strategis dan hanya menjadi ajang dialog antar departemen, pada 2007 pertemuan DCT menghasilkan solusi penting ketika China menyetujui dibangunnya *telephone link* (DTL) antara markas angkatan bersenjata China, Markas *Pacific Command* (PACOM) dan Pentagon AS. DTL mulai digunakan tahun 2008, dan cukup berhasil mengatasi kesalah-pahaman antar dua negara dan mengkomunikasikan aktivitas teknis. Pada waktu yang sama AS juga mengajukan proposal *Air Traffic Control* (ATC), untuk meningkatkan komunikasi dan mencegah kecelakaan udara di wilayah China, yang umumnya dikendalikan Angkatan Udara *People's Liberation Army* (PLA). Hal ini dilakukan guna mencegah kecelakaan yang melibatkan penerbangan sipil

---

<sup>86</sup> Shirley A. Kan, *Loc.Cit.*

<sup>87</sup> Kasus EP-3 atau dikenal dengan *Hainan Island Accident*, terjadi pada 1 April 2001 dikarenakan kesalahpahaman protokol patroli udara yang melibatkan pesawat EP-3E Aries II milik Angkatan Laut AS dengan J-8II *fighter jet* milik Angkatan Laut China.

<sup>88</sup> Shirley A. Kan, *Loc.Cit.*

dan militer, pasca kekacauan *traffic* udara tahun 2006 yang menyebabkan PLA harus menutup salah satu bandara tersibuk *Pudong International Airport* dan tiga bandara lainnya di wilayah militer Nanjing. Berbagai inisiatif lainnya yang lahir antara AS dan China adalah *Sanya Initiative* yang dimulai tahun 2008. *Sanya Initiative* merupakan forum dialog dan pertukaran pensiunan pejabat departemen pertahanan, pensiunan jenderal, dan peneliti antar kedua negara; yang diyakini mampu membangun kesaling-pengertian serta menghasilkan usulan bagi rumusan kebijakan antar dua negara.<sup>89</sup>

Aspek strategis kedua yang tidak kalah pentingnya adalah mengenai *Civilian Control over PLA and Civil-Military Coordination*. Aspek ini erat kaitannya dengan inisiatif-inisiatif yang telah dijalankan AS sebelumnya melalui dialog-dialog ekonomi antar kedua negara. Komitmen AS untuk memperluas dialog ekonomi menjadi *security and economic dialogue* (S&ED) dan perluasan cakupannya hingga ke permasalahan warga negara ini dimulai sejak pemerintahan Obama. S&ED ditujukan untuk sebagai bentuk *comprehensive engagement* dan *advance coordination* yang tidak hanya melibatkan petinggi serta memaksimalkan keterlibatan masyarakat sipil dalam hubungan luar negeri, namun ditujukan juga untuk memperluas kerjasama ditengah *overlapping interests* antar kedua negara. Pada penanda tangan *U.S-CHINA Joint Statements* November 2009, Kepala Negara China - Hu Jintao bahkan menyatakan: “*China welcomes the United States as an Asia-Pacific nation that contributes to peace, stability, and prosperity in the region.*”<sup>90</sup>

Aspek ketiga yaitu *transparency, reciprocity, and information-exchange* yang merupakan salah satu yang vital dan menjadi perhatian AS selama periode 2002-2010. Perhatian ini menjadi kian penting khususnya ditengah ketidakjelasan perilaku dan ketidakterbukaan China dalam pertukaran informasi, sebagaimana terlihat ketika China pada tahun 2005 dan 2007, mulai menolak tentara AS untuk hadir dalam latihan bersama PLA dan Russia, yang biasanya dhadiri AS selama beberapa tahun terakhir. AS menanggapi hal ini dengan mengambil inisiatif untuk mengundang pejabat tinggi pertahanan China maupun anggota PLA untuk datang ke markas AS di Pentagon maupun markas PACOM,

<sup>89</sup> Shirley A. Kan, *Loc. Cit*, halaman 26-27.

<sup>90</sup> *Ibid*, halaman 29.

termasuk diantaranya dengan mengadakan latihan maupun misi bersama meskipun tidak dalam konteks latihan tempur. Sepanjang periode 2002-2010 setidaknya berlangsung 37 kali kunjungan militer dan delapan kali latihan maupun misi bersama yang dilakukan tentara dari kedua negara. Meski tidak maksimal dalam mendorong pihak China untuk bersifat transparan atas peningkatan kapabilitasnya, namun insiatif AS tersebut membuahkan hasil, seperti ketika China beberapa kali membuka akses bagi AS, bahkan sebagai pengunjung internasional pertama untuk melihat:

- Pusat pelatihan PLA di Mongolia (2003),
- Pangkalan *PLAN's South Sea Fleet* di Zhanjiang (2003),
- *Aerospace Control Center* China di Beijing (2004),
- Markas *2<sup>nd</sup> Artillery* PLA (2005) dan kekuatan *39<sup>th</sup> Group Army* (2006),
- Pesawat *FB-7 fighter* di Divisi 28 Angkatan Udara PLA (2006),
- Pesawat *Su-27 fighter* and *T-99 tank* (2007),
- Pangkalan Angkatan Udara PLA di Jining (2007),
- Kapal Selam *Song-class* dan kapal *destroyer* *Luzhou-class* (2007), serta
- *CSS-7 short-range ballistic missile* dan kapal selam *Yuan-class* (2011).<sup>91</sup>

Peredaan ketegangan di antara China dan Taiwan merupakan aspek lain dari komitmen serta tujuan AS dalam strateginya selama periode 2002-2010. Pertemuan antara AS dan China menyangkut Taiwan pada periode tersebut dapat dikatakan merupakan yang terbanyak, bahkan melibatkan aspek-aspek lainnya seperti: proliferasi senjata nuklir, kedaulatan wilayah, kemanusiaan dan lainnya. Dalam periode ini telah diadakan kurang lebih 21 kali pertemuan, namun sejak pemilihan presiden dan referendum di Taiwan pada 22 Maret 2008, pembicaraan antara AS dan China tersebut sering tidak mencapai kesepakatan. Sedangkan untuk aspek proliferasi senjata nuklir terdapat dua perbedaan penting dari inisiatif yang diambil AS. Khusus dalam menanggapi proliferasi di wilayah negara-negara di Laut China selatan yang juga mencakup permasalahan nuklir Korea Utara, AS menggunakan jalur *Six-Party Talks* yang juga melibatkan Jepang, Russia dan

---

<sup>91</sup> *Ibid.*

Korea Selatan. Sedangkan dalam konteks bilateral aspek ini dibicarakan melalui jalur MMCA, DPCT, dan DCT sebagaimana telah berlangsung sebelumnya.<sup>92</sup>

Aspek *Strategic Nuclear, Missile, Space, and Cyber Security* menjadi kian penting ditengah meningkatnya kemampuan China dalam penguasaan teknologi satelit, dan ruang angkasa. Dalam konteks ini, pertemuan antara kedua negara telah berlangsung sejak AS mengundang petinggi China Jendral Jing untuk melihat to *Strategic Command* (STRATCOM), di Washington tahun 2006. Pertemuan-pertemuan kedua negara pada akhirnya membuahkan *U.S.-CHINA "Joint Statement"* pada tahun 2009, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Setidaknya ada beberapa poin penting dari kesepakatan antara kedua negara dalam aspek ini, yang mencakup:

- AS dan China sepakat untuk "*not to target at each other the strategic nuclear weapons under their respective control*", serta
- Adanya "*common interests*" kedua negara untuk "*promoting the peaceful use of outer space*."<sup>93</sup>

Hal terakhir yang menjadi aspek utama diplomasi komitmen AS dalam hubungannya dengan China adalah dalam aspek *counterterrorism*. Pembicaraan mengenai hal ini telah berlangsung sejak Februari 2002, dan direalisasikan ketika AS dan China sepakat bekerjasama, yang presiden Bush pada Oktober 2002 menyebutkan: "*two countries were "allies" in fighting terrorism*".<sup>94</sup> Pertemuan lanjutan mengenai pemberantasan terorisme umumnya melibatkan inisiatif kedua negara dan melibatkan berbagai organisasi internasional, seperti G-7, G-8, WTO dan lainnya; sedangkan pada pertemuan-pertemuan bilateral pembahasan ini dilakukan dalam rangkaian DCT. Komitmen AS dalam konteks pemberantasan dan pencegahan aksi terorisme juga ditunjukkan melalui tawaran pengawalan Olimpiade 2008 di Beijing. Pembicaraan mengenai bantuan ini telah dilakukan sejak tahun 2006, yang akhirnya pada 2007 ditolak oleh pihak China. Pembicaraan kedua negara mengenai isu terorisme masih berlangsung hingga

<sup>92</sup> *Ibid*, halaman 35-36.

<sup>93</sup> *Ibid*, halaman 38. Untuk isi selengkapnya dari US-China Joint Statement 2009, dapat dilihat melalui: <http://www.whitehouse.gov/the-press-office/us-china-joint-statement>, diakses pada 29 April 2012, pukul 05.33.

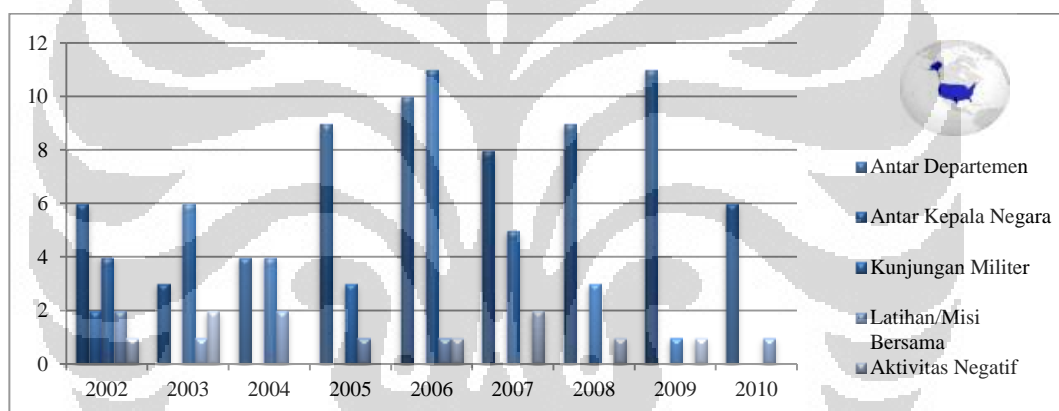
<sup>94</sup> Shirley A. Kan, "*U.S.-China Counterterrorism Cooperation: Issues for U.S. Policy*" (Congressional Research Service: 2010), halaman 3.



tahun 2009, yang umumnya merupakan ajakan AS terhadap China untuk berpartisipasi dalam misi kemanusiaan di Afganistan, dimana perlu diingat kerjasama *counterterrorism* kedua negara tidak termasuk keterlibatan China dalam operasi militer yang dilakukan AS selama ini.<sup>95</sup>

Dari berbagai pertemuan dan kontak antar AS dan China menyangkut pertahanan dan keamanan secara bilateral yang dilakukan sejak tahun 2002 hingga 2010, maka dapat dilihat terjadi peningkatan pada intensitas pertemuan tingkat departemen, yang melibatkan pejabat senior departemen pertahanan dan petinggi angkatan bersenjata masing-masing negara. Peningkatan ini juga memperlihatkan peningkatan komitmen AS dan China untuk memperluas dialog dan kesepahaman dalam berbagai aspek keamanan strategis.

**Grafik 2.5:** Jumlah Kontak Antara AS dan China Berdasarkan Cakupannya.<sup>96</sup>



Penurunan pada berbagai cakupan kontak kedua negara, seperti: antar kepala negara, kunjungan militer, latihan dan misi bersama, pada dasarnya diimbangi dengan semakin minimnya aksi negatif yang ditimbulkan masing-masing pihak, khususnya sejak tahun 2006. Selain itu, komitmen besar yang terjadi di penghujung tahun 2009 yaitu kesepakatan *U.S-CHINA Joint Statements* menjadi penilaian positif dari intensitas kontak antar kedua negara. Perlu dicatat pula selama periode ini, AS dan China juga memanfaatkan berbagai pertemuan-pertemuan organisasi internasional lainnya, sebagai alternatif media kontak hubungan kedua negara, baik dalam pembahasan pertahanan dan keamanan dalam konteks konvensional, termasuk keamanan dalam konteks yang lebih luas.

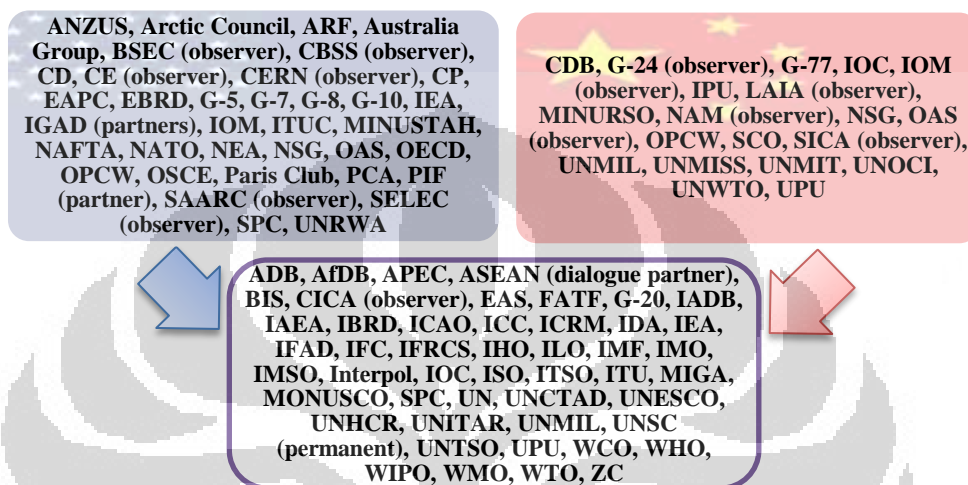
<sup>95</sup> Shirley A. Kan (2012), *Loc. Cit.*, halaman 40-41.

<sup>96</sup> Lihat lampiran 5. *Ibid*, halaman 57-68.



Komitmen kerjasama melalui berbagai organisasi ini menjadi semakin besar, dilihat dari keterlibatan kedua negara pada berbagai organisasi internasional yang memiliki peran vital.

**Gambar 2.3:** Keterlibatan AS dan China pada berbagai Organisasi/Institusi Internasional.<sup>97</sup>



Dari penjabaran mengenai aktivitas diplomasi di atas, dapat ditarik kesimpulan terlihat peningkatan intensitas defensif dari strategi AS terhadap China. Peningkatan intensitas defensif AS ini didasari pada peningkatan jumlah aktivitas diplomasi, yang umumnya didominasi oleh kontak antar departemen pertahanan kedua negara, serta inisiatif kerjasama pertahanan dan keamanan yang umumnya digagas oleh AS.

### 2.3.3 Sebaran Pasukan dan Strategi

Penempatan pasukan (*military deployment*) adalah hal yang penting lainnya dalam memahami strategi keamanan suatu negara, karena setidaknya memberikan gambaran perkembangan kepentingan negara di wilayah penempatan kekuatannya. Collin Dueck menganggap penempatan kekuatan militer di luar negeri (*overseas*) lebih tepat untuk memahami strategi negara-negara besar, seperti AS. Militer AS sendiri memiliki berbagai definisi mengenai penempatan pasukan, yang jika disimpulkan dapat dimaknai sebagai penempatan kekuatan dan

<sup>97</sup> Data diperoleh melalui <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2107.html>, diakses pada 28 April 2012, pukul 11.01.

persenjataan yang tidak sebatas pada kebutuhan pertempuran, tetapi termasuk juga di wilayah operasional.<sup>98</sup> Sedangkan *grand strategy* yang dibahas pada bagian ini, berfungsi untuk menjelaskan indikator dari Dueck mengenai apakah negara secara normatif lebih konfrontasional atautkah kooperatif dalam hubungannya dengan negara lain, yang dalam hal ini adalah China.

Keseluruhan operaional kekuatan militer AS berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab komando-komado militer, yang dibagi baik berdasarkan fungsi maupun wilayah regional. Dari fungsinya, terdapat tujuh area komando yang meliputi: (1) *US Strategic Command* (USSTRATCOMs), (2) *Air Combat Command* (ACC), (3) *Air Force Space Command* (AFSC), (4) *US Joint Forces Command* (USJFCOM), (5) *US Special Operations Command* (USSOCOM), (6) *US Transportation Command* (USTRANSCOM), dan (7) *Air Mobility Command* (AMC).<sup>99</sup> Sedangkan berdasarkan tanggung jawab wilayah, komado militer AS terbagi menjadi:

- *US Pacific Command* (USPACOM),
- *US Northern Command* (USNORTHCOM),
- *US Southern Command* (USSOUTHCOM),
- *US Africa Command* (USAFRICOM),
- *US Central Command* (USCENTCOM), serta
- *US European Command* (USEUCOM).<sup>100</sup>

USPACOM merupakan komando militer AS dengan wilayah operasional yang sama dengan area kepentingan China, yang meliputi Laut Pasifik Utara hingga Samudra Hindia dan bahkan selatan Australia. Sepanjang tahun 2002-2010, USPACOM berbasis di sembilan negara atau wilayah di Asia Pasifik. tujuh diantaranya adalah: Australia, Diego Garcia – Samudra Hindia, Guam, Jepang, Korea Selatan, dan Laut Pasifik. Sedangkan di tiga negara lainnya, USPACOM

<sup>98</sup> Militer AS mendefinisikan *military deployment* sebagai: (1) Dalam angkatan laut, sebagai perubahan penempatan dari posisi jelajah ke posisi pertempuran, (2) Pergerakan dan penempatan pasukan di daerah operasional, (3) Penempatan pasukan dalam formasi pertempuran, (4) Relokasi pasukan dan perlengkapan untuk wilayah operasional yang diinginkan. Dalam [http://www.dtic.mil/doctrine/new\\_pubs/jp1\\_02.pdf](http://www.dtic.mil/doctrine/new_pubs/jp1_02.pdf), diakses pada tanggal 21 Mei 2012, pukul 23.10.

<sup>99</sup> IISS, “*The Military Balance 2004-2005*” (The International Institute for Strategic Studies: 2011), halaman 33.

<sup>100</sup> [http://www.defense.gov/home/features/2009/0109\\_unifiedcommand/](http://www.defense.gov/home/features/2009/0109_unifiedcommand/), diakses pada 22 Mei, pukul 00.00

menempatkan perwakilan dari personil militernya, yakni di: Singapura, Thailand dan Filipina (yang dimulai kembali pada tahun 2010).<sup>101</sup>

**Gambar 2.4:** Cakupan Wilayah Tanggung Jawab *US Command*.<sup>102</sup>



Kekuatan AS di wilayah Asia Pasifik selama periode 2002-2010 dapat dikatakan mengalami penurunan. Contoh dari hal ini terlihat di Jepang dan Korea sebagai dua negara dimana AS menempatkan kekuatan terbesarnya di wilayah ini. Personil militer AS di Jepang mengalami penurunan dari sebesar 43.550 personil di tahun 2003 menjadi sebesar 35.598 personil di tahun 2010. Di Korea Selatan, angka ini menurun dari sebesar 34.500 menjadi 25.374 personil. Sedangkan dalam konteks penempatan persenjataan, AS juga masih memusatkan kekuatannya di Jepang dan Korea Selatan dengan menempatkan pesawat tempur, kapal perang, *main battle tank* dan sistem artileri, hingga *aircraft carrier*. Di wilayah lainnya seperti Australia dan Diego Garcia, AS menempatkan fasilitas *satellite early warning station* (SEWS), *signals intelligence* (SIGNIT), dan *ground based electro optical deep space surveillance system* (GEODSS). AS selama periode ini juga memperlihatkan penurunan pengerahan kekuatan *surface combatant* (seperti *destroyers* dan *frigates*) di Laut Pasifik, namun mengalami peningkatan dalam penempatan kapal selam dari sebesar 27 unit di tahun 2006 menjadi 39 unit di tahun 2010. Penempatan kekuatan militer AS baik personil maupun persenjataan juga terlihat di berbagai area *US Command* lainnya, yang umumnya mengalami peningkatan di tahun 2006, namun kembali mengalami

<sup>101</sup> Lihat lampiran 11. Diolah dari IISS, "The Military Balance" tahun 2002 hingga 2010.

<sup>102</sup> [http://www.defense.gov/home/features/2009/0109\\_unifiedcommand/](http://www.defense.gov/home/features/2009/0109_unifiedcommand/), *Loc. Cit.*

penurunan di tahun 2010. Kecuali yang terjadi di Afganistan sebagai tanggung jawab USCENTCOM, yang mengalami peningkatan dalam penempatan kekuatan militer AS karena kelanjutan operasi kontra terorisme.<sup>103</sup>

Dalam hal strategi keamanan, AS dalam *National Security Strategy AS* pada tahun 2002, 2006, dan 2010, secara normatif memfokuskan pada rencana intensifikasi kerjasama kedua negara di berbagai bidang, serta rencana untuk mendorong China untuk melakukan transparansi informasi modernisasi militernya. Dalam strategi keamanan tahun 2002, AS menyatakan bahwa kerjasama dengan China kedepannya sangat penting dalam mendukung stabilitas, perdamaian, dan kesejahteraan di wilayah Asia Pasifik. AS meyakini kerjasama ini, dengan kesuksesan beberapa kerjasama pada isu transnasional sebelumnya seperti: lingkungan hidup, kesehatan, perdagangan, serta bergabungnya China di dalam *World Trade Organization* (WTO). Fokus perhatian AS terhadap China tetap berada pada perbedaan posisi kedua negara dalam isu Taiwan, yang dalam kondisi ini AS mengharapkan agar China memegang komitmennya dalam hal nonproliferasi. AS menyatakan agar China lebih terbuka terhadap informasi, mendukung pembangunan masyarakat sipil dan meningkatkan penghormatan terhadap hak azazi manusia.<sup>104</sup>

Di tahun 2006, AS kembali mencatat keberhasilan kerjasama dengan China, setelah keduanya sepakat untuk menekan Korea Utara dalam ketegangan isu nuklir melalui jalur *Six-Party Talks* pada September 2005. Di bidang lainnya non keamanan tradisional AS di tahun ini mengajak China untuk bergerak ke dalam ekonomi pasar dan intensifikasi kerjasama di bidang keamanan energi. Perhatian strategi keamanan AS terhadap China di tahun ini, masih berfokus pada masalah keterbukaan informasi, serta cara-cara lama yang masih digunakan pemerintah China seperti: meneruskan ekspansi kekuatan militer secara tidak transparan, melakukan ekspansi perdagangan dengan tidak membuka pasar, serta mendukung negara-negara yang kaya akan sumber daya alam tanpa memperhatikan perilaku buruk pemerintahan negara tersebut secara domestik.<sup>105</sup>

<sup>103</sup> *Ibid.*

<sup>104</sup> Lihat lampiran 6. President of The United States., “*The National Security Strategies of The United States of America 2002*” (White House: 2002).

<sup>105</sup> Lihat lampiran 6. President of The United States., “*The National Security Strategies of The United States of America 2006*” (White House: 2006).

Pada tahun 2010, perhatian AS masih berfokus pada pembangunan kerjasama dengan menjunjung *mutual interest* dan *mutual respect* di antara kedua negara, pada bidang-bidang ekonomi, lingkungan, dan isu nuklir. Berbagai pemaparan indikator-indikator dalam menilai arah dan intensitas strategi AS selama periode 2002-2010 di atas, secara umum menggambarkan pergerakan perhatian AS dalam menghadapi tantangan, ancaman dan peluang baik dalam konteks makro maupun khusus dalam menghadapi peningkatan kapabilitas militer China.

Dari data-data mengenai sebaran militer dan *grand strategy* AS terhadap China, terlihat peningkatan intensitas defensif. Dalam sebaran kekuatan militer, AS memperlihatkan pengurangan jumlah pasukan dan persenjataan di wilayah Pasifik yang juga bersinggungan dengan kepentingan China. Sedangkan implementasi strateginya, AS menunjukkan peningkatan dan perluasan kerjasama baik dalam hal keamanan tradisional dan non tradisional dengan China. Meski begitu, AS juga memperlihatkan peningkatan aksi ofensif yang lebih bersifat *reassurance* dan bukan dalam hal peningkatan agresifitas. Dimana AS menabahkan jumlah kapal selam, serta himbauan mengenai transparansi dan komitmen China dalam turut menjaga stabilitas sistem internasional dan regional.

Keseluruhan tren intensitas indikator-indikator penilai strategi AS yaitu: anggaran pertahanan, bantuan luar negeri, aktivitas diplomasi, komitmen kerjasama, sebaran kekuatan militer, dan sifat *grand strategy* AS; secara keseluruhan dapat dikatakan memperlihatkan peningkatan intensitas defensifnya. Beberapa indikator memperlihatkan pula peningkatan intensitas ofensif khususnya dalam hal anggaran pertahanan dan militer berupa peningkatan pengadaan senjata, dan peningkatan beberapa jenis persenjataannya di wilayah Pasifik. Yang dalam hal ini disimpulkan bukan sebagai potensi AS untuk melakukan agresi, namun lebih ke arah *reassurance*. Yang merupakan perkuatan pertahanan diri, pemastian aksi dari China, serta persiapan diri dari kemungkinan meningkatnya ancaman dan aksi ofensif yang dilakukan China. Data-data dan informasi yang telah dipaparkan di atas, akan menjadi sumber utama dalam analisa tulisan ini pada bab selanjutnya.

### **BAB III**

## **PERKEMBANGAN DAN KOMPARASI INDIKATOR-INDIKATOR UTAMA KAPABILITAS MILITER CHINA 2002-2010**

Bab ini akan menjelaskan berbagai indikator utama dan tren peningkatan kapabilitas militer China, serta komparasinya terhadap kemajuan kapabilitas militer Amerika Serikat (AS) sepanjang tahun 2002 hingga 2010. Bagian pertama bab ini menjelaskan sumber-sumber strategis (*strategic resources*) peningkatan kapabilitas militer China; seperti: data ekonomi pertahanan, data sumber daya manusia dan pasukan, termasuk industri pertahanan. Bagian kedua akan menjelaskan kapabilitas konversi (*conversion capability*), seperti: doktrin militer dan strategi. Sedangkan di bagian ketiga akan menjelaskan kemampuan tempur (*combat proficiency*), yang mencakup: peningkatan jumlah persenjataan, peningkatan teknologi persenjataan, serta sebaran pasukan.

. Secara umum bab ini berisi pemaparan data-data agregat yang diolah dari sumber utama yaitu: *The Military Balance*, *China Defense White Paper*, dan *Annual Report To Congress Military Power Of The People's Republic Of China* tahun 2002-2011,<sup>1</sup> serta tambahan data dari berbagai sumber lainnya. Meskipun tidak berfungsi untuk uji signifikansi secara statistik, data-data tersebut akan digunakan di dalam bab empat untuk dasar analisis dan pembuktian guna menjawab pertanyaan penelitian.

### **3.1. Sumber Daya Strategis**

Penilaian kapabilitas militer negara harus dimulai dengan mengidentifikasi sumber daya strategis yang tersedia bagi organisasi militer, yang berupa: sumber finansial, sumber daya manusia, serta ketersediaan sarana fisik dan teknologi. Sumber daya strategis idealnya merupakan aset nasional yang harus dimiliki dan dipersiapkan negara sebagai hasil analisis ideasional para pembuat kebijakan guna

---

<sup>1</sup> *The Military Balance* merupakan buku tahunan yang berisi data-data kepemilikan senjata, sebaran pasukan, ekonomi pertahanan, jumlah personil, serta analisis dari kejadian internasional selama satu tahun, dari berbagai negara di dunia; yang dikeluarkan oleh *The International Institute for Strategic Studies*. Sedangkan *Annual Report to Congress Military Power Of The People's Republic Of China* (pada tahun 2010-2011 disebut *Military and Security Developments Involving the People's Republic of China*) merupakan laporan tahunan *Department of Defense* kepada kongres AS, mengenai berbagai indikator kemajuan militer China, yang menjadi salah satu alat pertimbangan kebijakan AS.

menghadapi potensi tantangan dan ancaman eksternal. Di sisi lain, sumber daya strategis dapat dipandang pula sebagai hasil performa nasional semata, tanpa dipengaruhi pertimbangan adanya dinamika eksternal.<sup>2</sup>

Ashley J. Telis, Christopher Layne dan kawan-kawan, menyebutkan enam faktor dalam penilaian sumber daya strategis suatu negara, yakni: (1) *defense budget*, (2) *manpower*, (3) *military infrastructure*, (4) *combat RDT&E institutions*, (5) *defense Industrial Base*, (6) *warfighting inventory and support*. Telis dan Layne kemudian menjelaskan bahwa keenam faktor ini dapat saling berhubungan satu dengan lainnya, yang dalam penilaian kapabilitas suatu negara, terkadang tidak keseluruhan faktor-faktor tersebut dilibatkan.<sup>3</sup> Karenanya, dalam penjelasan mengenai sumber daya strategis dalam kapabilitas militer China ini, hanya akan difokuskan pada beberapa faktor utama, yaitu anggaran pertahanan dan sumber daya manusia. Sedangkan faktor-faktor fisik lainnya akan dirangkum sebagai faktor industri dan infrastruktur pertahanan.

### 3.1.1 Anggaran Pertahanan.

Besaran anggaran pertahanan merupakan alat ukur tunggal dan terpenting yang umum digunakan para analis guna mengukur sumber daya yang secara politis dialokasikan oleh para pembuat kebijakan negara bagi kepentingan militer, serta untuk mengidentifikasi pentingnya bidang militer sebagai kekuatan koersif dibandingkan bidang lainnya di dalam negara. Telis dan Layne menyatakan untuk tujuan analisis tersebut maka dibutuhkan data persentase anggaran pertahanan terhadap pengeluaran publik dan GDP/GNP negara. Sedangkan untuk mengidentifikasi bagaimana bidang militer secara internal dibangun, dibutuhkan ukuran mikro lainnya; seperti persentase alokasi anggaran pertahanan untuk keperluan: pengajian personil, operasional, perawatan, pengadaan, hingga kebutuhan riset dan pengembangan sistem dan teknologi pertahanan. Dengan adanya data agregat dalam urutan waktu, dapat pula diidentifikasi perubahan fokus negara pada berbagai elemen tersebut.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Ashley J. Tellis, Janice Bially, Christopher Layne, Melissa McPherson; “*Measuring National Power in the Postindustrial Age*” (RAND: 2000), halaman 136.

<sup>3</sup> Lihat *Ibid*, halaman 136-143.

<sup>4</sup> *Ibid*, halaman 136-137.



Secara historis, Pemerintah China pernah beberapa kali menggeser pola penganggaran militernya sepanjang periode 1978 hingga 2010. Antara tahun 1978 hingga 1987, pembangunan pertahanan menjadi subordinat, yang menjadikan pertahanan mendapat porsi kecil dalam substansi keseluruhan pembangunan negara. Pola ini berubah pada periode tahun 1988-1997, ketika pemerintah mulai menaikkan anggaran pertahan secara signifikan, sebagai biaya untuk menutupi ketidak cukupan anggaran peridoe sebelumnya. Pola penganggaran pertahanan China kembali berubah sejak periode 1998 hingga saat ini, yang kini didasari pada besaran pertumbuhan ekonomi.<sup>5</sup> Konsekuensi dari hal ini adalah terjadinya peningkatan anggaran pertahanan yang sangat besar yang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi China sepanjang periode 2002-2010. Pemerintah juga menyatakan kenaikan anggaran pertahanan dimaksudkan untuk untuk pembiayaan berbagai hal utama, yaitu untuk pembiayaan: personil dan sistem pengaman sosial, reformasi struktural dan organisasi di tubuh PLA, kerjasama dan aksi internasional, serta inventasi penciptaan “*high-caliber talents in the military*.”<sup>6</sup>

Pembiayaan personil dan sistem pengaman sosial, merupakan bagian terbesar dari peningkatan anggaran pertahanan militer China, yang berlangsung hingga tahun 2010. Di tahun 2002, pemerintah China menaikkan anggaran gaji sebesar 84% dan tunjangan sebesar 92%, yang anggaran tersebut mencakup pembiayaan asuransi kesehatan, kecelakaan, kematian dan juga subsidi anggaran perumahan; yang keseluruhannya diperuntukan bagi perwira dan prajurit PLA. Tahun 2004 pemerintah menambahkan anggaran bagi subsidi pangan dan kebutuhan listrik, yang berlanjut di 2008 dengan memberikan tunjangan bagi

<sup>5</sup> Pada periode 1978-1987, pertumbuhan rata-rata anggaran pertahanan CHINA hanya sebesar 3,5% pertahun, sedangkan rata-rata pertumbuhan GDP dan anggaran negara masing-masing sebesar 14,1% dan 10,4% pertahunnya. Pada periode 1988-1997, pertumbuhan rata-rata anggaran pertahanan menjadi sebesar 14,4% per tahun, dimana GDP dan anggaran pemerintah tumbuh sekitar 20,7% dan 15,1% per tahunnya. Sedangkan sejak tahun 1998, pertumbuhan rata-rata anggaran pertahanan sebesar 15,9% per tahun, sedangkan pertumbuhan GDP dan anggaran keuangan negara sebesar 12,5% dan 18,4% per tahunnya. Data diperoleh dari *China Defense White Paper* 2008. [http://www.china.org.cn/government/whitepaper/2009-01/21/content\\_17162799.htm](http://www.china.org.cn/government/whitepaper/2009-01/21/content_17162799.htm), diakses pada 22 April 2012, pukul 13.01.

<sup>6</sup> *China's Defense White Paper* 2002, 2004, 2006, 2008, dan 2010. <http://china.org.cn/e-white/20021209/IV.htm#4>, diakses pada 23 April 2012, pukul 19.24. <http://china.org.cn/e-white/20041227/IV.htm#1>, diakses pada 23 April 2012, pukul 17.56. <http://www.china.org.cn/english/features/book/194470.htm>, diakses pada 22 April 2012, pukul 13. 24. [http://www.china.org.cn/government/whitepaper/2009-01/21/content\\_17162799.htm](http://www.china.org.cn/government/whitepaper/2009-01/21/content_17162799.htm), diakses pada 22 April 2012, pukul 13.01. [http://news.xinhuanet.com/english2010/china/2011-03/31/c\\_13806851\\_32.htm](http://news.xinhuanet.com/english2010/china/2011-03/31/c_13806851_32.htm), diakses pada 21 April 2012, pukul 03.02.



keluarga perwira sipil dan prajurit PLA. Sedangkan menjelang tahun 2010, pemerintah memberikan tambahan dana untuk tunjangan dan pembiayaan akses logistik bagi sejumlah personel militer yang bertugas di perairan dan perbatasan yang jauh dan terpencil. Kenaikan anggaran yang berkelanjutan untuk pembiayaan personel ini, berbeda dari pembiayaan reformasi struktural dan organisasi di tubuh PLA, yang hanya berlangsung hingga tahun 2004. Kenaikan ini dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran operasional yang sebelumnya dipenuhi dari keuntungan perusahaan-perusahaan komersial PLA, yang telah dihentikan sejak tahun 1998.<sup>7</sup>

Faktor lain yang menjadi alasan pemerintah China meningkatkan anggaran pertahanan adalah faktor kerjasama dan aksi internasional. Hingga tahun 2002 pemerintah China menambahkan alokasi guna operasional aksi anti-terorisme, yang kemudian diperluas pada tahun 2004-2006 untuk mendukung aspek keamanan non-tradisional lainnya. Insentif ini berlangsung hingga tahun 2010, khususnya untuk program *accomplishing diversified military tasks* dengan meningkatkan investasi ke arah pengembangan kapabilitas *military operations other than war* (MOOTW); seperti operasi penyelamatan dan penanggulangan bencana gempa bumi, operasi di perairan Teluk Aden - Somalia, operasi darurat dan pengendalian banjir, serta operasi penyelamatan internasional lainnya.<sup>8</sup>

Dengan melihat kondisi yang harus dihadapi dan alasan pemerintah China atas kebutuhan dana tambahan tersebut, maka secara umum peningkatan anggaran pertahanan adalah suatu hal yang tidak dapat dihindari, yang juga menjadikan anggaran pertahanan China mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan pada periode 2002-2010. Dari *China Defense White Paper* tahun 2002, 2004, 2006, 2008, serta 2010, dapat dirangkum bahwa anggaran pertahanan China meningkat dari sebesar 170,78 milyar RMB atau senilai US\$ 20,63 milyar pada tahun 2002, menjadi 532,11 milyar RMB senilai US\$ 78,60 milyar pada tahun 2010. Persentase peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2006 sebesar 20,4% dan terkecil terjadi di tahun 2010 sebesar 7,47 %, dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 15,34 %. Data lain yang termuat, memperlihatkan bahwa persentase anggaran pertahanan terhadap GDP China mengalami angka yang fluktuatif

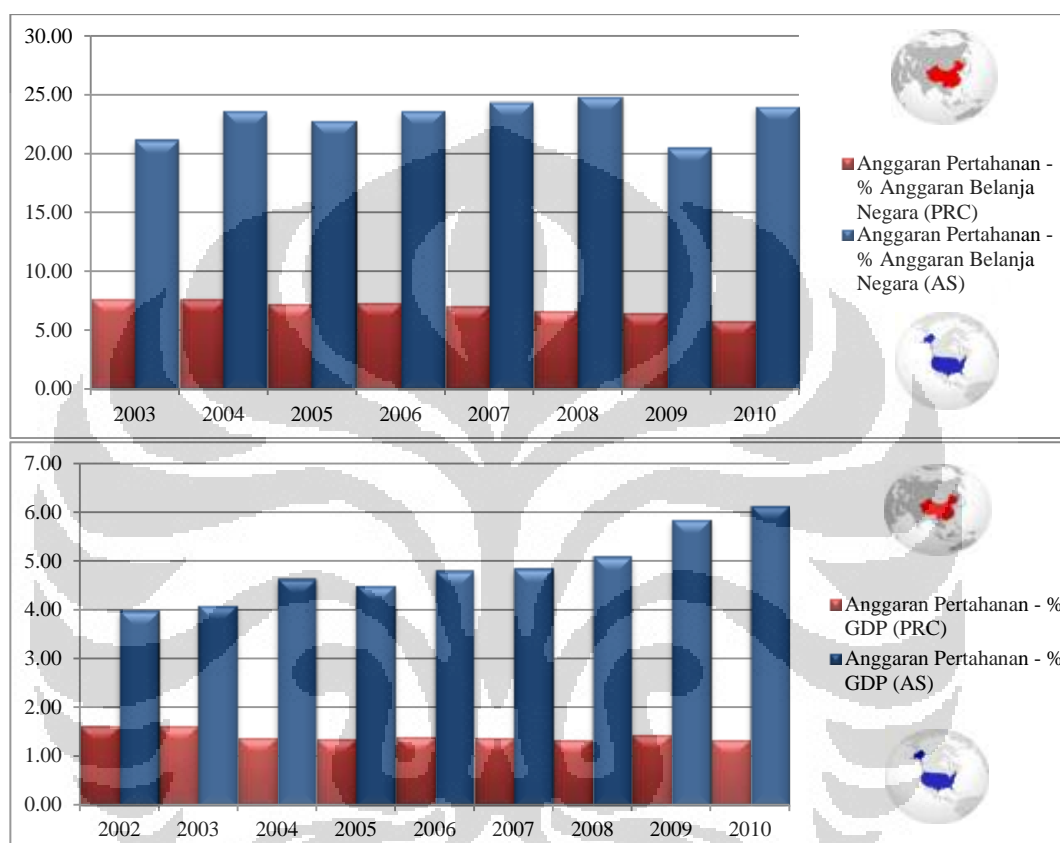
---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

dengan rata-rata sebesar 1,43 %; hal ini berbeda dari presentase anggaran pertahanan dibandingkan anggaran belanja negara secara keseluruhan dengan rata-rata sebesar 7,19 % atau secara umum mengalami penurunan.

**Grafik 3.1:** Persentase Anggaran Pertahanan China dan AS terhadap GDP dan Anggaran Belanja Negara.<sup>9</sup>



Presentase peningkatan anggaran pertahanan China secara relatif masih tergolong kecil bila dibandingkan peningkatan anggaran pertahanan AS. Hal ini diperlihatkan dari fakta bahwa anggaran pertahanan China selama 2002-2010 hanya sebesar 5%-8% dari anggaran belanja negara, sedangkan anggaran pertahanan AS sebesar 20% hingga 25% pada periode yang sama. Selain itu, jika dilihat dari presentase terhadap GDP negara, anggaran pertahanan China masih berada di bawah 2%, dimana AS telah berada di atas 4% dan bahkan terus

<sup>9</sup> Lihat lampiran 1 (untuk data AS) dan 6 (untuk data China). Data AS diolah dari publikasi "US Federal Government Budget Spending", dan situs World Bank. <http://www.worldbank.org/> dan <http://www.usgovernmentsspending.com/>, diakses pada 28 April 2012, pukul 23.00. Sedangkan data China diolah dari *Defense White Paper* (2002, 2004, 2006, 2008, dan 2010), yang diperoleh melalui <http://www.china.org.cn/>.

mengalami peningkatan. Perbandingan ini juga berlaku jika dilihat dari nominal besaran anggaran kedua negara. Sebagai contoh, pada tahun 2002 anggaran pertahanan China sejumlah US\$ 20,633 milyar adalah sebesar 5,3% dari anggaran pertahanan AS yang sebesar US\$ 389,233 milyar; sedangkan di 2010, anggaran pertahanan China sebesar US\$ 78,605 milyar, masih dibawah atau sebesar 10,77% dari US\$ 729,672 milyar anggaran pertahanan AS. Satu hal yang penting dari perbandingan data-data ekonomi pertahanan di atas adalah kemampuan China untuk semakin memperkecil perbedaan nominal anggaran pertahanannya terhadap AS, meskipun *share* anggaran ini terhadap anggaran belanja negara maupun GDP mengalami penurunan.

Berbeda dari perbandingan di atas, anggaran pertahanan China justru relatif mengalami peningkatan yang sangat besar jika dibandingkan negara-negara lain di dunia. Dari data yang dihimpun melalui situs World Bank memperlihatkan bahwa anggaran pertahanan China telah menjadi yang terbesar diantara negara-negara di Asia sejak tahun 2005. Sebelumnya pada tahun 2002, anggaran pertahanan China merupakan yang kedua terbesar di Asia, yakni sebesar 80,1% dari anggaran pertahanan Jepang yang merupakan terbesar di Asia dengan US\$ 39,52 milyar. Presentase ini berubah di tahun 2010, ketika anggaran pertahanan China mencapai dua kali lipat (219%) anggaran pertahanan Jepang, dan masih lebih besar dari akumulasi total anggaran pertahanan lima negara lainnya dengan anggaran pertahanan terbesar, yaitu: Jepang, India, Korea Selatan, Arab Saudi, termasuk dengan memperhitungkan Australia.

Kondisi yang sama juga terjadi dalam cakupan yang lebih luas. Anggaran pertahanan China yang pada tahun 2002 sebesar 86,97% dari anggaran Perancis (US\$36,4 milyar) dan 79,83% anggaran pertahanan Inggris (US\$ 39,67 milyar), pada tahun 2006 berhasil melampaui Perancis, dan Inggris pada tahun 2007. Pada tahun 2010 China telah melampaui anggaran pertahanan kedua negara hingga lebih dari 200%,<sup>10</sup> yang dengan begitu menjadikan China sebagai negara dengan anggaran pertahanan terbesar kedua di dunia setelah AS.

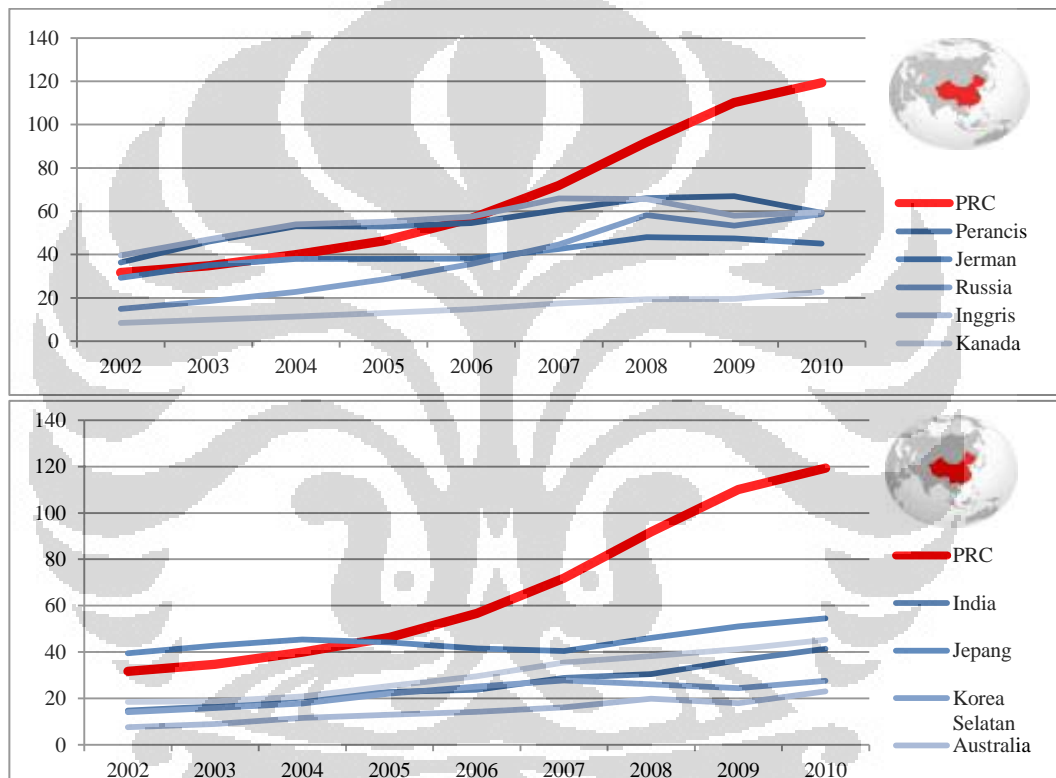
Tren peningkatan anggaran pertahanan China juga memperlihatkan beberapa informasi penting lainnya. Anggaran pertahanan tahun 2002 (US\$

---

<sup>10</sup> Lihat lampiran 7. Data dihimpun dari <http://www.worldbank.org/>, *Ibid.*

20,63) telah meningkat lebih dari dua kali lipat pada tahun 2007 (US\$ 46,7 milyar), dan menjadi lebih dari tiga kali lipat pada tahun 2009 (US\$ 72,48), yang keseluruhan peningkatan ini terjadi hanya dalam kurun waktu enam tahun. Peningkatan ini sejalan dengan tingkat pertumbuhan anggaran pertahanan China yang selalu positif di setiap tahunnya, serta dukungan pertumbuhan ekonomi yang signifikan.<sup>11</sup>

**Grafik 3.2:** Perbandingan Anggaran Pertahanan China dengan Negara-Negara lain di dunia.<sup>12</sup>



Anggaran pertahanan China secara reguler setiap tahunnya dialokasikan untuk tiga jenis pengeluaran utama; yaitu: (1) *Personnel*, (2) *Training and Maintenance*, dan (3) *Equipment*. Biaya personil (*personnel expenses*) digunakan untuk pembayaran gaji rutin, tunjangan, perumahan, asuransi, pangan, serta pakaian dan kebutuhan harian seluruh personil PLA, baik militer maupun sipil.

<sup>11</sup> China dan AS merupakan dua negara dari 10 negara dengan pertumbuhan anggaran pertahanan yang selalu positif setiap tahunnya selama periode 2002-2010. Negara lainnya pernah mencatat pertumbuhan negatif, seperti Perancis (2005, 2010) dan Inggris (2008, 2009). Lihat lampiran 6. *China's Defense White Paper 2002, 2004, 2006, 2008, dan 2010. Loc.Cit.*

<sup>12</sup> Data diolah dari sumber data anggaran pertahanan negara-negara dalam situs World Bank. Lihat lampiran 8. <http://www.worldbank.org/>. *Loc.Cit.*

Biaya pelatihan dan perawatan (*training and maintenance expenses*) menutupi biaya pelatihanpasukan, pendidikan di dalam institusi, operasional kelembagaan, pemeliharaan instalasi dan fasilitas PLA, serta biaya rutin operasional lainnya.Sedangkan biaya peralatan (*equipment expenses*) menutupi anggaran penelitian dan pengembangan, eksperimen, pengadaan dan perawatan, serta biaya transportasi dan inventori persenjataan dan peralatan PLA. Keseluruhan anggaran tersebut mencakup biaya bagi pasukan aktif, pasukan cadangan, maupun milisi; serta pembiayaan keluarga (pasangan dan anak dari personil PLA).Anggaran pertahanan juga mencakup biaya pembangunan ekonomi dan sosial, baik di tingkat nasional maupun lokal.<sup>13</sup>

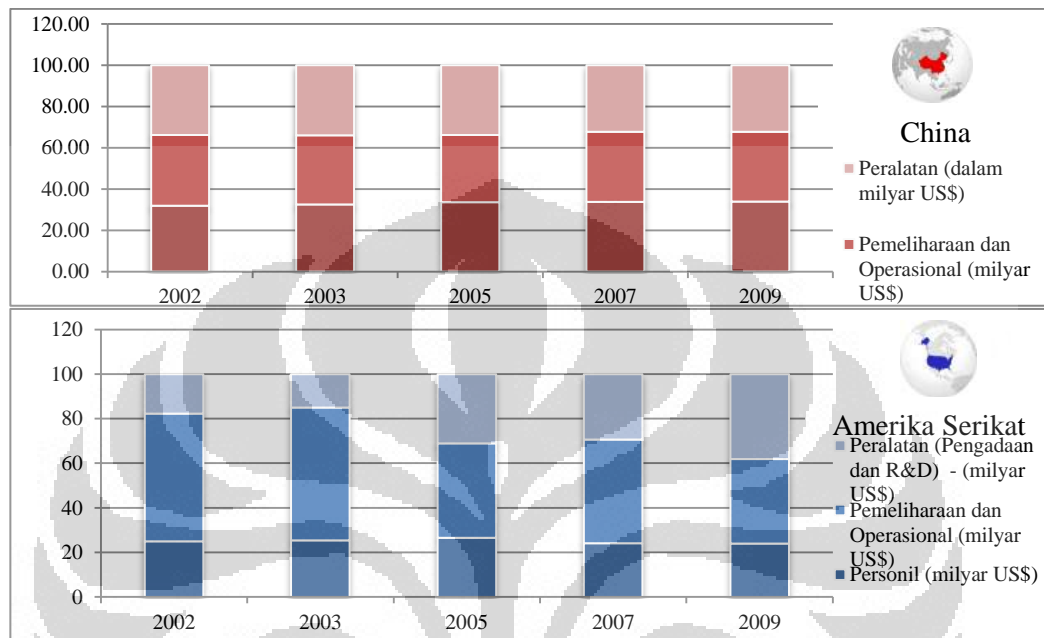
Pemerintah China melalui *Defense White Paper* menjelaskan selama periode 2002-2010, alokasi anggaran untuk personil mengalami peningkatan dari 31,9% di tahun 2002 menjadi 34,04% di 2009. Alokasi ini berbeda dari pengeluaran untuk kebutuhan peralatan, serta pelatihan dan perawatan yang bersifat fluktuatif dengan rata-rata 33,19% dan 33,66% dari total 100% anggaran pertahanan militer per tahunnya. Alokasi anggaran pertahana China untuk ketiga jenis pengeluaran tersebut relatif seimbang bila dibandingkan dengan anggaran pertahanan AS khusus kebutuhan militer. Dengan hanya memperhitungkan anggaran militer tanpa melibatkan anggaran perang dan anggaran bantuan keuangan ekonomi internasional, AS memperlihatkan peningkatan persentase alokasi anggaran peralatan (khususnya pengadaan, penelitian dan pengembangan), serta mengalami penurunan alokasi operasional dan perawatan. Anggaran bagi peralatan meningkat dari 17,67% di tahun 2001 menjadi 38,02% di 2009. Sedangkan anggaran operasional dan perawatan menurun dari 57,31% di 2001, menjadi 38,02 di 2009.

Pemerintah China pada *Defense White Paper* tahun 2008 dan 2010 juga menambahkan informasi mengenai alokasi anggaran pertahanan yang mencakup alokasi bagi *active force*, *reserve force*, dan *militia*. Informasi ini menyebutkan di tahun 2007, pasukan aktif PLA menerima alokasi 96,61%, pasukan cadangan 1,04% dan milisi sebesar 2,35% dari total anggaran. Sedangkan pada tahun 2009,

<sup>13</sup> [http://news.xinhuanet.com/english2010/china/2011-03/31/c\\_13806851\\_32.htm](http://news.xinhuanet.com/english2010/china/2011-03/31/c_13806851_32.htm), diakses pada 21 April 2012, pukul 03.02.

pasukan aktif, pasukan cadangan dan milisi masing-masing menerima sebesar 96,27%, 0,98%, 2,74% dari total anggaran.<sup>14</sup>

**Grafik 3.3:** Perbandingan Alokasi Anggaran Pertahanan-Militer China dan Amerika Serikat 2002-2009.<sup>15</sup>



### 3.1.2. Sumber Daya Manusia

Ukuran dan kualitas dari personil militer (*military manpower*) merupakan sumber strategis yang juga memiliki potensi dalam mendukung peningkatan kapabilitas militer China. Telis dan Layne menjelaskan alasan sumber daya personil militer menjadi penting dalam hubungannya sebagai bagian kekuatan nasional suatu negara, serta kemampuannya dimanfaatkan dalam pertempuran. Dengan alasan tersebut, ukuran keseluruhan personil militer baik aktif maupun cadangan, serta distribusi berdasarkan angkatan perang menjadi sangat penting. Tetapi ditengah semakin intensif dan pentingnya informasi dalam mendukung suatu pengamanan negara ataupun pertempuran, Telis dan Layne menambahkan bahwa ukuran kualitatif seperti tingkat pendidikan, kehandalan teknis, dan berbagai hal lainnya juga dibutuhkan.<sup>16</sup>

<sup>14</sup> *China's Defense White Paper (2002, 2004, 2006, 2008, 2010), Loc.Cit.*

<sup>15</sup> Data China diolah dari *China's Defense White Paper (2002, 2004, 2006, 2008, 2010)*, sedangkan Data AS diolah dari *Appropriations and Authorization for FY (2002, 2003, 2005, 2007, 2009)*, *Ibid.*

<sup>16</sup> Ashley J. Tellis, Janice Bially, Christopher Layne, Melissa McPherson, *Op.Cit.* halaman 138.

Tidak banyak informasi yang menjelaskan kualitas dari personil militer China. Hal ini umumnya berkenaan dengan reformasi di bidang pendidikan militer yang relatif baru berlangsung selama satu dekade terakhir dan masih berlangsung hingga saat ini, yang awalnya terjadi sejak Deng Xiaoping memerintahkan reformasi militer di era 1980an.<sup>17</sup> Meskipun begitu, berbagai informasi mengenai bagaimana proses reformasi pendidikan berjalan, dapat memberikan gambaran umum potensi kemajuan kualitas personil militer China.

Secara keseluruhan kekuatan sumber daya strategis personil militer China merupakan bagian dari total kekuatan *Chinese Armed Forces*. Sesuai *China's National Defense Law* Maret 1997, *Chinese Armed Forces* terdiri dari: (1) *People's Liberation Army* atau PLA – baik pasukan aktif dan cadangan), (2) *People's Armed Police* (PAP), dan (3) *People's Militia* – yang mencakup unit umum dan khusus. PLA merupakan sumber strategis utama China dari ketiga elemen tersebut, yang meskipun berbeda organisasi namun erat hubungannya, dengan elemen lainnya. Tugas utama PLA adalah menjaga CHINA dari segala ancaman luar, termasuk ancaman domestik dalam kondisi tertentu sesuai hukum yang berlaku. Otoritas perintah tertinggi dalam PLA berada di *Central Military Commission* (CMC), dimana komando berada di bawah empat markas umum di Beijing dan tujuh daerah komando militer di seluruh negara.<sup>18</sup> Sebagaimana tanggung jawab yang diemban PLA, kualitas personil menjadi sangat menentukan kemampuan pertahanan negara dan kapabilitas militer China secara keseluruhan.

Peningkatan kualitas sumber daya personil militer PLA yang saat ini terjadi, tidak dapat dilepaskan dari visi Deng Xiaoping yang menciptakan *PLA Education System* (PME), dan menjadikannya sebagai prioritas aspek pertahanan. Ide awal ini berangkat dari pemikiran bahwa ketika teknologi persenjataan tinggi menjadi sangat penting, maka personil militer yang sangat memiliki talenta intelektual, mampu membuat keputusan, dan dapat mengoperasikan peralatan teknologi tinggi juga sangat dibutuhkan. Ide Deng Xioping mengenai "*Two Transformation*" yaitu mentransformasi kekuatan militer PLA dari awalnya

---

<sup>17</sup> <http://www.journal.forces.gc.ca/vo11/no2/11-desjardins-eng.asp>, diakses pada 7 Mei 2012, pukul 08.33.

<sup>18</sup> Lieutenant Colonel Dennis J. Blasko. "*Chinese Army Modernization: An Overview*" (Military Review: September-Oktober 2005), halaman 69. <http://usacac.leavenworth.army.mil/CAC/milreview/download/English/SEPOCT05/blasko.pdf>, diakses pada 7 Mei 2012, pukul 13.29.



berbasis kuantitas menjadi kualitas, terus dijadikan acuan hingga era Hu Jintao sejak 2003. Investasi *human capital* sejak saat itu, diyakini petinggi China setingkat dengan investasi persenjatan teknologi tinggi.<sup>19</sup>

Modernisasi PLA yang berhubungan langsung dengan pembangunan sumber daya manusia setidaknya menyakut hal-hal berikut ini: (1) pengurangan jumlah kekuatan personil militer, (2) perubahan struktur kekuatan; (3) reformasi struktur dan misi dari personil aktif, cadangan dan milisi, (4) Perubahan sistem personil, (5) penggunaan peralatan baru, (7) revisi doktrin PLA dalam pertempuran dan pencapaian kemenangan dengan *Local Wars Under Modern high-Technology Conditions* atau *Local Wars Under Informationalization Conditions*, (8) peningkatan frekuensi, materi dan metode pendidikan militer yang menekankan pada operasi bersama, (9) transformasi sistem logistik PLA, (10) peningkatan standar hidup personil militer, dan (11) memodifikasi profesionalisme sistem pendidikan militer.<sup>20</sup>

Secara praktis, modernisasi aspek peronil dimulai dengan pengurangan hampir tiga juta personil, yang telah dilakukan secara bertahap pada tahun 1995, periode 1997-2000, hingga tahun 2003-2005.<sup>21</sup> PLA melakukan reformasi sitem akademik dan pendidikan, dan alih fungsi serta penggabungan institusi pendidikan untuk kebutuhan pelatihan militer, guna menjaga agar pendidikan personil militer sejalan dengan struktur kekuatan militer dan doktrin yang diterapkan. Berbagai kursus tambahan yang fokus pada penanggulangan bencana, operasi perdamaian, hingga penggunaan media informasi seperti internet juga diberikan.<sup>22</sup> Tercatat saat ini lebih dari 50 institusi pendidikan di bawah PLA dan institusi pendidikan militer umum lainnya terbuka bagi sarana para personil untuk mengejar pendidikan lebih tinggi.

Penurunan jumlah personil militer pada awal periode reformasi pendidikan militer tersebut, kemudian membawa konsekuensi dibutuhkannya suatu perbaikan besar-besaran kualitas personil militer PLA. Untuk mengganti

<sup>19</sup> Thomas Skypek , “*Soldier Scholars: Military Education as an Instrument of China's Strategic Power*” (The Jamestown Foundation: 2008). <http://www.asianresearch.org/articles/3122.html>, diakses pada 7 Mei 2012, pukul 08.12.

<sup>20</sup> Lieutenant Colonel Dennis J. Blasko, *Op.Cit.*

<sup>21</sup> *Ibid*, halaman 70.

<sup>22</sup> *Ibid*, halaman 73.



kekurangan sumber daya secara kuantitas, pemerintah China dan PLA sebagaimana disebut dalam *China Defense White Paper 2004*, melakukan peningkatan kualitas personil militer berupa penciptaan “*high-caliber talents in the military*”. Tindakan ini menjadi penting, mengingat dalam satu dekade terakhir PLA telah memproduksi dan mengakuisisi senjata teknologi tinggi, yang dalam kondisi lain, kualitas personil militer yang dimiliki tidak memadai. Untuk tujuan tersebut PLA melakukan optimalisasi struktur personil militer, peningkatan kemampuan personil militer dalam penggunaan persenjataan teknologi tinggi, membangun intelejensi untuk keperluan luar negeri dan dengan kualitas pendidikan yang tinggi, pelatihan personil untuk penggunaan senjata tempur baru, pengenalan perang *cyber* dan menjalankan misi keamanan non-tradisional di dalam negeri dan luar negeri.<sup>23</sup>

Hal lain yang diberlakukan pemerintah China dalam reformasi pendidikan militer adalah dengan memberlakukan *The Military Training and Evaluation Program* (MTEP), yang mengatur standar pelatihan dan evaluasi bagi seluruh tipe unit dan elemen PLA, baik bagi personil aktif dan cadangan. Bentuk pendidikan militer ini mengharuskan berbagai unit untuk terlibat dari berbagai operasi di seluruh bagian negara, dan dipersiapkan untuk menghadapi berbagai kondisi serta latihan pertahanan dari ancaman luar seperti penanganan serangan terorisme. Di dalam setiap pendidikan yang diberikan, latihan gelaran pasukan dan mobilisasi secara cepat menjadi fokus utama, di samping latihan lainnya seperti pertahanan dari serangan misil udara. Pendidikan militer dijalankan kepada unit-unit kecil prajurit dalam kondisi yang intensif dan progresif selama beberapa bulan. Latihan penyerangan dan *force on force confrontation* juga menjadi elemen yang terintegrasi, yang dilakukan baik secara langsung maupun simulasi dengan menggunakan teknologi komputerisasi, serta disesuaikan dengan berbagai aspek kondisi lingkungan saat pertempuran. Pola pendidikan militer ini berbeda dari sebelumnya di tahun 1996 yang umumnya fokus pada latihan operasi amfibi, serta berbeda dari kondisi 10 tahun sebelumnya di pertengahan 1980an ketika para prajurit umumnya langsung ditugaskan dengan hanya beberapa pelatihan.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> <http://english.people.com.cn/90001/90776/90786/7358334.html>, diakses pada 5 Mei 2012, pukul 13,59.

<sup>24</sup> Lieutenant Colonel Dennis J. Blasko. *Op.Cit*, halaman 72.

Untuk memenuhi tujuan reformasi pendidikan untuk meningkatkan kemampuan bersaing dan menang “*informationalized wars*”, sejak tahun 2001, kurikulum sekolah personil militer juga mengalami pergeseran dengan didominasi kurikulum strategi dan *information warfare*.<sup>25</sup> Tidak hanya itu, sejak tahun 2003, personil PLA yang umumnya kemudian menjadi *PLA officer*, berasal dari empat sumber pendidikan, yaitu: lulusan universitas sipil terpilih, “*national defense students*” yang berasal dari beasiswa untuk kemudian mengabdikan, taruna dari berbagai universitas dan akademi di bawah PLA, serta tentara terpilih berdasarkan ranking performa.<sup>26</sup> Saat ini tercatat 80 % dari total personil militer PLA telah memenuhi kualifikasi akademis setingkat sarjana dan 20% setingkat master.<sup>27</sup> Yang memperlihatkan setidaknya perbaikan kualitas dari personil militer PLA sepanjang periode 2002-2010.

Meskipun sumber daya personil militer PLA yang secara kualitas masih relatif rendah serta masih dalam proses perbaikan,<sup>28</sup> China tetap merupakan negara terbesar dalam jumlah kekuatan personil militer. *The Military Balance* 2002-2006 menunjukkan total kekuatan militer aktif PLA adalah 2.250.000 orang, yang hingga tahun 2010 berjumlah 2.185.000 orang. Di sepanjang periode, angkatan darat PLA memiliki porsi terbesar dari seluruh kekuatan angkatan bersenjata yaitu sebesar 72,39%, sedangkan angkatan udara dan laut sebesar 16,18% dan 11,43% dari keseluruhan total kekuatan PLA aktif. Dari tren data selama periode 2002-2010 juga didapatkan informasi bahwa, kelanjutan dari penurunan jumlah keseluruhan personil militer juga merupakan lanjutan dari reformasi dan modernisasi PLA, yang khususnya terjadi pada angkatan darat dan angkatan udara. Sedangkan angkatan laut PLA justru mengalami penambahan jumlah personil. Besarnya kekuatan keseluruhan *Chinese Armed Forces* sendiri adalah 4.450.000 personil di tahun 2002 dan turun menjadi 3.355.000 personil di 2010. Angka tersebut termasuk tambahan jumlah kekuatan personil cadangan dan paramiliter China lebih dari satu juta orang selama periode 2002-2010.<sup>29</sup>

---

<sup>25</sup> Thomas Skypek, *Op.Cit.*

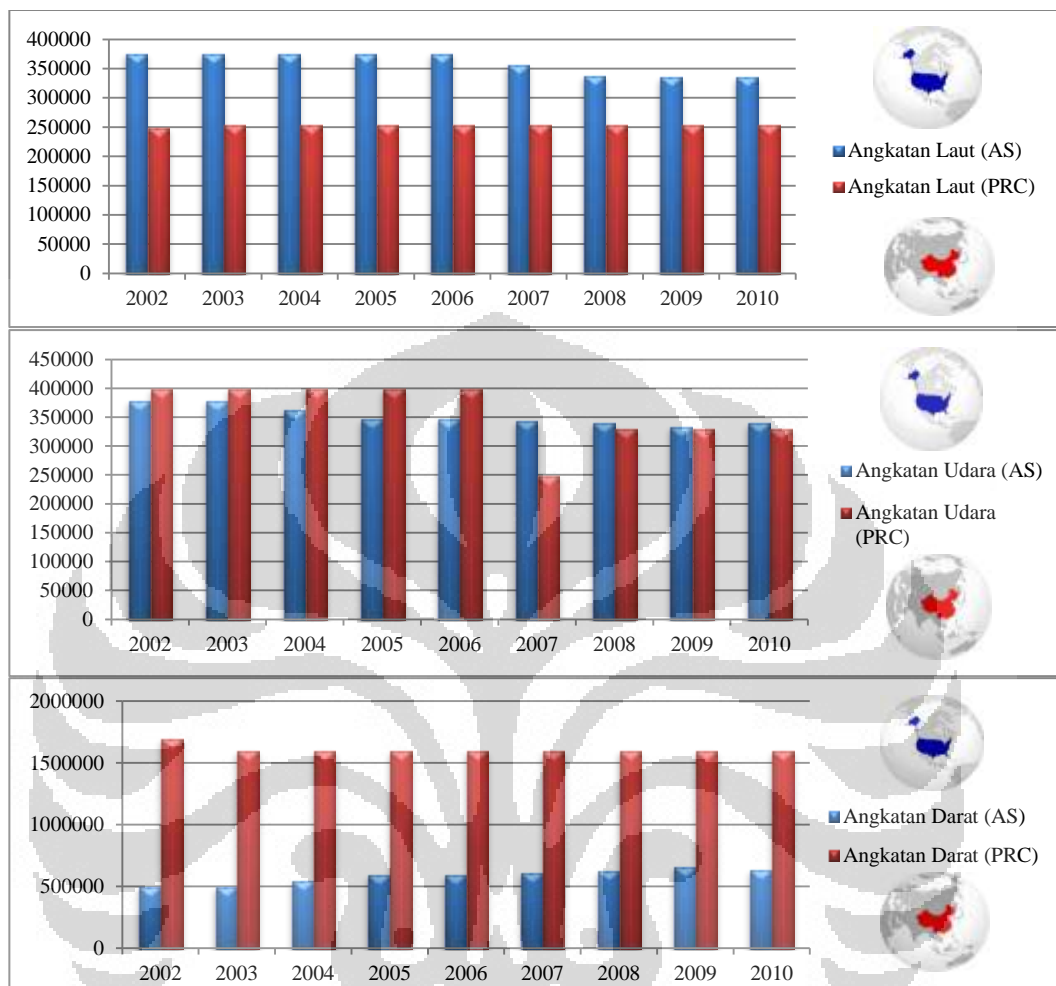
<sup>26</sup> Lieutenant Colonel Dennis J. Blasko. *OpCit*, halaman 71.

<sup>27</sup> <http://english.people.com.cn/90001/90776/90786/7358334.html>, diakses pada 5 Mei 2012, pukul 13.59.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Data diolah dari *The Military Balance* 2003-2010. Lihat Lampiran 9.

**Grafik 3.4:** Perbandingan Jumlah Pasukan Aktif China dan AS (Angkatan Laut, Udara, Darat).<sup>30</sup>



Kondisi kuantitas personel militer China tersebut, berbeda dengan kondisi kekuatan sumber daya manusia yang dimiliki AS. Total personel AS aktif, baik angkatan darat, laut dan udara, menunjukkan peningkatan, dari sebesar 1.258.250 orang di tahun 2004 menjadi 1.316.342 orang di 2010. Angkatan darat AS memiliki porsi rata-rata sebesar 44,86 % dari jumlah tersebut, sedangkan angkatan laut dan udara masing-masing sebesar 27,83 % dan 27,31 %. AS melakukan penambahan jumlah pasukan angkatan darat dari sebesar 502.000 personel di tahun 2004 menjadi 639.063 personel di 2010,<sup>31</sup> sedangkan jumlah personel di angkatan laut dan udara AS mengalami penurunan. Kondisi ini cenderung merupakan kebalikan dari yang terjadi di besaran personel militer PLA.

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.*

Angkatan bersenjata AS selama periode 2004-2010 didukung juga didukung rata-rata dari 186.779 personil *US Marine Corps* dan 41.174 personil *US Coastal Guard*, termasuk total pasukan cadangan sebesar 846.975 personil, yang keseluruhan elemen tersebut mengalami peningkatan jumlah pada periode ini. Jika total kedua kekuatan negara dibandingkan pada tahun 2004 dan 2010, maka terlihat terjadi penurunan kesenjangan total kuantitas kekuatan. Dimana perbedaan total kekuatan personil kedua negara dari yang sebelumnya sebesar lebih dari 2,3 juta personil di 2004, telah menjadi sebesar 982.764 personil di 2010. Sedangkan perbedaan jumlah kekuatan angkatan darat, laut, dan udara kedua negara hanya mengalami penurunan sebesar 100 ribu personil, dari 996.750 personil di 2004 menjadi 868.658 personil di 2010. *The Military Balance 2011*, juga mencatat pada tahun 2010, total keseluruhan *Chinese Armed Forces* hanya berbeda sekitar 200 ribu personil jika dibandingkan dengan total personil aktif dari negara-negara NATO yang sebesar 3,7 juta personil.

### 3.1.3. Industri Pertahanan

Dua variabel lain yang menurut Telis dan Layne menjadi sumber strategis negara adalah industri pertahanan dan keberadaan institusi *research, development, test, and evaluation institutions* (RDT&E) yang dimiliki suatu negara. Industri pertahanan merupakan sumber strategis yang erat kaitannya dengan efektivitas peningkatan kapabilitas militer. Industri pertahanan secara sederhana adalah perusahaan atau industri yang menjadi basis produksi militer negara. Pemahaman atas industri pertahanan negara menurut Telis dan Layne, tidak hanya akan memberikan informasi mengenai kemampuan dan tingkat dependensi negara untuk memproduksi peralatan dan instrumen militer, seperti: persenjataan, produk-produk strategis non persenjataan, hingga produk konsumsi militer lainnya.<sup>32</sup>

Industri pertahanan tersebut erat kaitannya dengan institusi RDT&E negara, berupa institusi akademis, *technical centers*, maupun organisasi penelitian pertahanan. Informasi mengenai kuantitas dan kualitas dari berbagai institusi RDT&E suatu negara, menurut Telis dan Layne akan menggambarkan tingkat

<sup>32</sup> Ashley J. Tellis, Janice Bially, Christopher Layne, Melissa McPherson. *Op.Cit.* halaman 139-140.

profesionalisme dan percepatan transformasi teknologi untuk berbagai kebutuhan operasional militer, termasuk mempengaruhi kemampuan industri pertahanan.<sup>33</sup>

Industri pertahanan China mulai dibangun pada era 1950an dengan model industri dan bantuan Uni Sovyet. Di era reformasi China pada akhir 1970an, industri pertahanan China mulai diambil alih kepemilikannya menjadi perusahaan milik negara, seperti *6<sup>th</sup> Machine Building Industry*, dan *China State Shipbuilding Corporation* di tahun 1982. Di tahun 1992, sebagian besar industri pertahanan seperti *Aviation Industries of China* dan *China Aerospace Corporation* (yang mengembangkan misil dan sistem luar angkasa), *Northern Chinese Industries Corporation* (mengembangkan dan memproduksi persenjataan khususnya bagi kebutuhan angkatan darat), dan *China National Nuclear Corporation* (memproduksi tenaga nuklir bagi kebutuhan sipil dan militer) telah menjadi perusahaan milik negara. Beberapa perusahaan diawasi secara ketat dan langsung oleh pemerintah, diantaranya *China's Nuclear Weapons Complex* yang berada di bawah pengawasan langsung *Commission on Science, Technology, and Industry for National Defense* (COSTIND) dan PLA; serta *China Defense Electronics Complex* dibawah pengawasan kementerian Industri Elektronika.<sup>34</sup>

Di tahun 1999, hampir seluruh industri pertahanan China dibagi ke dalam dua perusahaan yang memiliki fungsi yang berbeda, sedangkan *China Defense Electronics Complex* pada tahun 2002 berganti nama menjadi *China Electronic Technology Corporation*. Sejak 2002, industri pertahanan China telah didukung oleh 11 kelompok perusahaan yang juga membawahi anak-anak perusahaan lainnya. Kelompok perusahaan ini terdiri dari: (1) *China National Nuclear Corporation*, (2) *China Nuclear Engineering and Construction Corporation*, (3) *China Aerospace Science and Technology Corporation*, (4) *China Aerospace Science and Industry Corporation*, (5) *China Aviation Industry Corporation I*, (6) *China Aviation Industry Corporation II*, (7) *China State Shipbuilding Corporation*, (8) *China Shipbuilding Industry Corporation*, (9) *China North Industries Group Corporation*, (10) *China South Industries Group Corporation*,

<sup>33</sup> *Ibid*, halaman 139-140.

<sup>34</sup> Roger Cliff, "Advances Underway in China's Defense Industries" (RAND: Maret 2006), halaman 1-2. [http://www.rand.org/pubs/testimonies/2006/RAND\\_CT256.pdf](http://www.rand.org/pubs/testimonies/2006/RAND_CT256.pdf), Diakses pada 10 Mei 2012, pukul 15.21.

dan (11) *China Electronic Science and Technology Corporation*. Setiap perusahaan ini bertanggung jawab terhadap administrasi dan pengelolaan perusahaan, termasuk proyek *research and development* (R&D), hingga tahap manufaktur. Pada tahun 2002, industri pertahanan China dari catatan pemerintah, digerakan oleh 141 ahli yang terdiri: 52 akademisi ahli dari *Chinese Academy of Science* dan 95 akademisi ahli *Chinese Academy of Engineering*, yang enam orang diantaranya berasal dari kedua akademi tersebut.<sup>35</sup>

Kemajuan industri pertahanan China tidak hanya sebatas pada perbaikan pengelolaan, tetapi juga dari ukuran *output* industri. Hal ini diawali dengan peningkatan 19% produksi dan 14% perdagangan yang membuat China mencatatkan *break even point* pada industri pertahanan di tahun 2001-2002, pasca kerugian yang dialami lebih dari delapan tahun. Meskipun keuntungan ini sebagian besar dihasilkan oleh sektor industri misil dan perkapalan, dengan keseluruhan kapasitas industri yang dimilikinya yang mencakup 1,000 anak perusahaan, tiga juta pekerja, serta dukungan total 300.000 tenaga ahli, China menjadi negara yang memiliki industri pertahanan terbesar. Jaringan industri pertahanan Dengan modal sumber daya yang dimilikinya China kemudian mampu mengembangkan industri pertahanan hingga mencakup produksi berbagai skala peralatan dan sistem persenjataan, yaitu: *small arms*, *armored vehicles*, pesawat tempur, kapal perang, kapal selam, senjata nuklir dan *intercontinental ballistic missiles* (ICBM).<sup>36</sup>

Jika dilihat dari jenisnya, industri pesawat terbang dan produksi misil China merupakan salah satu yang paling progresif selama periode 2002-2010. Dalam industri penerbangan, China telah berhasil memproduksi pesawat untuk kebutuhan sipil; yaitu: Xinzhou 60, ARJ21, Y-12E, ERJ145, Xiaoying 500; juga beberapa tipe helicopter EC120 (kerjasama China, Perancis, Singapura), Z-11 dan Z-9, yang juga mencatatkan China sebagai negara yang terintegrasi dalam industri pesawat terbang internasional. Untuk kebutuhan militer, beberapa hasil produksi China melalui *Shenyang Aircraft Corporation* adalah: *Su-27 fighters* yang

<sup>35</sup> *China Defense White Paper 2002-2004*. Loc. Cit

<sup>36</sup> Richard A. Bitzinger, "The China's Defense Industry: Reform Without Improvement" (The JamesTown Foundation). [http://www.jamestown.org/single/?no\\_cache=1&tx\\_ttnews\[tt\\_news\]=3726](http://www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=3726), diakses pada 10 Mei 2012, pukul 16.11.



sebanding dengan F-15, J-10 yang sebanding dengan performa F-16, hingga J-20 *stealth fighter* yang memiliki teknologi serupa dengan F-117 milik AS.<sup>37</sup> Sedangkan dalam produksi misil domestik, beberapa jenis yang telah diproduksi China dengan penerapan teknologi tinggi adalah: PL-9 *infrared-homing air-to-air missile* yang setara kapabilitasnya dengan U.S. AIM-9M “*Sidewinder*,” SA-10 *surface-to-air missile system*, PL-12 *active radar guided missile* yang sebanding dengan U.S. AIM-120 “*AMRAAM*”, serta C-802 *anti-ship missile*.<sup>38</sup>

Industri teknologi luar angkasa China juga merupakan salah satu yang mengalami kemajuan di periode 2002-2010, bahkan sejak tahun 1996. Terhitung dari waktu tersebut, hingga tahun 2002 China dengan *Long March* (roket pengangkut), telah berhasil meluncurkan 27 satelit asing, bahkan hingga tahun 2003 China mencatat telah melakukan 41 peluncuran roket luar angkasa. Selain itu, China juga berhasil meluncurkan tiga kali pesawat luar angkasa tanpa awak pada tahun 1999, 2001 dan 2002; dan peluncuran “*Shenzhou V*” pesawat antariksa pertama China dengan awak pada Oktober 2003. Hingga 2004, untuk kebutuhan pertahanan dan sipil berbagai satelit pendukung nasional telah diluncurkan, mencakup: SSO (*Sun Synchronous Orbit*), satelit meteorogikal GEO (*Geostationary Orbit*) satelit meteorogikal, satelit oceanografi HY-1, serta CBERS (satelit bersama China-Brazil).<sup>39</sup>

Berbeda dari industri pertahanan lainnya, industri perkapalan China telah lebih dulu matang dengan menjadi salah satu industri terbesar di dunia. Di tahun 2002, industri perkapalan China telah tujuh tahun berada dalam posisi industri perkapalan terbesar di dunia, dengan menghasilkan 6% total output produksi global. Tahun 2003, China mencatat telah menrampungkan produksi kapal dengan kapasitas besar (6,41 hingga 26,23 DWT (*deadweight tonnage*)), serta mengeksport produksinya ke lebih dari 90 negara. Industri perkapalan China bahkan mulai menjadi yang terbesar kedua di dunia setelah melampaui produksi Jepang pada tahun 2008.<sup>40</sup> Untuk kebutuhan militer China telah melakukan

<sup>37</sup> Infomasi mengenai produksi F-20 diperoleh dari <http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-12266973>, diakses pada 12 Mei 2012, pukul 20,45.

<sup>38</sup> Roger Cliff, *Op.Cit*

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> US Secretary of Defense, “*Annual Reprt to Congress: Military Power of The People’s Republic of China 2009*” (USA: Department of Defense: 2009), halaman 36.

berbagai kemajuan dengan meluncurkan: dua jenis kapal *destroyer* yang sebanding dengan *Aegis-class cruisers-destroyers* milik AS, meluncurkan beberapa tipe *diesel-electric submarines* modern, pembangun jenis baru *nuclear submarine* yang sebanding untuk menghadapi *Los Angeles-class ships* milik AS, serta produksi dua *aircraft carrier*. Sedangkan kemajuan lainnya dari industri sistem persenjataan darat, adalah produksi berbagai artileri jenis baru, *armoured combat vehicles*, serta peluncuran tank Tipe 98 yang memiliki kapabilitas sebanding dengan *main battle tanks* yang dimiliki negara-negara barat.<sup>41</sup>

Peningkatan industri pertahanan China tidak hanya terlihat pada tipe-tipe baru sistem persenjataan yang diproduksi, tetapi juga terlihat dalam ukuran ekonomi. Pada tahun 2005, nilai produksi, *value added* dan keuntungan bersih seluruh industri pertahanan China meningkat secara drastis masing-masing 24.3%, 20.7%, dan 21.6% dibanding tahun sebelumnya. Hal ini dilaporkan pemerintah China dalam *Defense White Paper 2005* sebagai kesuksesan dari pergeseran industri manufaktur pertahanan ke arah informatisasi, yang mengintegrasikan sistem teknologi yang selama ini telah dikembangkan, serta restrukturisasi dan reformasi perusahaan-perusahaan dalam industri pertahanan. Di tahun ini perkembangan teknologi diperlihatkan juga dari peningkatan 40% *intellectual property rights* yang didaftarkan secara independen oleh institusi R&D China.<sup>42</sup>

Ditengah kemajuan progresif industri pertahanannya, China juga menandatangani berbagai perjanjian bagi pengadaan peralatan dan sistem persenjataan, guna menutupi kekurangan produksi bagi kebutuhan domestik. Tahun 2005, total nilai kerjasama China dengan pemasok dari luar negeri adalah sebesar US\$ 2,8 milyar.<sup>43</sup> Oktober 2007 China kembali menambahkan pengadaan senjata senilai lebih dari US\$ 150 juta, yang lebih besar dari nilai di tahun 2006 yang sebesar US\$ 100 juta.<sup>44</sup> Dimana Israel dan khususnya Rusia merupakan negara utama pemasok senjata bagi China, untuk pesawat tempur, sistem misil,

<sup>41</sup> Roger Cliff, "Advances Underway in China's Defense Industries" (RAND: Maret 2006), halaman 4. [http://www.rand.org/pubs/testimonies/2006/RAND\\_CT256.pdf](http://www.rand.org/pubs/testimonies/2006/RAND_CT256.pdf), Diakses pada 10 Mei 2012, pukul 15.21.

<sup>42</sup> US Secretary of Defense, "Annual Reprt to Congress: Military Power of The People's Republic of China 2006" (USA: Department of Defense: 2006).

<sup>43</sup> US Secretary of Defense, "Annual Reprt to Congress: Military Power of The People's Republic of China 2007" (USA: Department of Defense: 2007), halaman 28.

<sup>44</sup> US Secretary of Defense, "Annual Reprt to Congress: Military Power of The People's Republic of China 2008" (USA: Department of Defense: 2008), halaman 35.



kapal selam dan kapal *destroyers*.<sup>45</sup> Sedangkan secara domestik, industri pertahanan China didukung pula dengan hubungan dan kolaborasi R&D, dengan perusahaan-perusahaan informasi teknologi domestik seperti Huawei, Datang, dan Zhongxing.<sup>46</sup>

Berbagai langkah kerjasama juga telah dilakukan oleh pemerintah China guna mendukung keberhasilan industri pertahanan. Pada Januari 2002, Menteri Pertahanan China dan Ketua Komisi Pertahanan Kazakhstan menandatangani *Frontier Defense Cooperation Agreement Between China and Kazakhstan*. Di tahun yang sama juga terjadi pembicaraan mengenai kelanjutan dan perkuatan kerjasama *Shanghai Cooperation Organization* (SCO) antara China, Rusia, Kazakhstan, Kyrgyzstan dan Tajikistan, yang fokus pada masalah industri pertahanan. China sebagaimana disebutkan dalam *Defense White Paper 2010*, pertahanan adalah penggunaannya untuk kepentingan perdamaian, terlebih dalam konteks teknologi ruang angkasa dan nuklir. Untuk itu China telah mencapai kesepakatan dengan 23 negara mengenai pengembangan nuklir untuk tujuan damai, termasuk bagi negara-negara berkembang. Dengan tujuan yang sama, China mengadakan pertemuan tingkat menteri negara-negara anggota *International Atomic Energy Agency* (IAEA) pada April 2009, serta kerjasama bilateral dengan Russia, Perancis, Brazil, Ukraina, AS, dan *European Space Agency* (ESA) dalam hal pengembangan teknologi, eksplorasi, dan ilmu pengetahuan luar angkasa. Hal lain yang dilakukan China adalah dengan mendukung berbagai kerjasama dan komitmen di dalam *United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space* (COPUOS) dan *Asia-Pacific Space Cooperation Organization* (APSCO).

Bagi China kemajuan ini bukanlah suatu pertanda buruk dari peningkatan kapabilitas China. Pemerintah China dalam *Defense White Paper 2004* menyatakan tanggung jawab China dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan industri pertahanan adalah untuk memastikan produksi dan penyediaan kebutuhan militer untuk memenuhi kebutuhan nasional atas pertahanan, yang pada saat bersamaan harus mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan seluruh aspek kekuatan nasional, untuk tujuan-tujuan damai. Pengembangan dan inovasi

---

<sup>45</sup> Roger Cliff, *Op.Cit.*

<sup>46</sup> *Annual Reprt to Congress: Military and Security Developments Involving The People's Republic of China 2010, Op.Cit*, halaman 43.

teknologi *dual-use technology*, yang mendukung pembangunan militer dan sipil secara bersamaan, kembali menjadi perhatian utama pemerintah China pada tahun 2007. President Hu mengekspresikan hal ini dengan menyebutkan:

*“We must establish sound systems of weapons and equipment research and manufacturing... and combine military efforts with civilian support, build the armed forces through diligence and thrift, and blaze a path of development with Chinese characteristics featuring military and civilian integration.”<sup>47</sup>*

Dengan harga yang murah, termin pembayaran yang menarik, teknologi yang memadai, serta proses pengiriman solid yang dapat dipercaya, industri pertahanan China tumbuh pesat, serta memperkecil perbedaan *gap* teknologi antara China dengan AS, yang diperkirakan keduanya akan sejajar dalam hal teknologi dalam waktu 10 hingga 20 tahun kedepan. China juga terus menjajaki pasar baru negara-negara di Asia, Afrika, Amerika Selatan dan Eropa,<sup>48</sup> dan terus memperbaiki sistem investasi, manajemen produksi serta pengawan kualitas dari industri pertahanannya.<sup>49</sup>

### **3.2. Kapabilitas Konversi**

Kapabilitas konversi adalah salah satu elemen penting dalam peningkatan kapabilitas militer suatu negara, dimana militer yang efektif adalah yang mampu mengkonversi sumber daya yang dimilikinya menjadi kemampuan menjalankan operasi dalam menghadapi musuhnya. Dengan begitu, proses konversi sangat kritical menentukan keberhasilan militer negara di medan pertempuran, baik secara kualitas maupun kuantitas. Telis dan Layne mengungkapkan bahwa faktor-faktor dalam variabel ini dapat diidentifikasi melalui: (1) strategi, (2) ancaman yang dihadapi negara, (3) struktur hubungan sipil-militer, (4) keeratan hubungan militer-militer antar negara, (5) doktrin organisasi angkatan bersenjata, (6) potensi dan kapasitas negara melakukan inovasi.<sup>50</sup> Pada bagian ini, indikator tersebut akan dijabarkan khususnya pada kondisi strategi dan doktrin militer China. Doktrin

<sup>47</sup> *Annual Reprt to Congress: Military and Security Developments InvolvingThe People’s Republic of China 2010, Op.Cit.*

<sup>48</sup> Michael Santo, “China On The Way To Becoming A Defense Superpower” (H&Z Vienna). Dalam [http://www.huz.de/sites/default/files/presse-events/120308\\_pm\\_chinastudie\\_final\\_eng.pdf](http://www.huz.de/sites/default/files/presse-events/120308_pm_chinastudie_final_eng.pdf), diakses pada 9 Mei 2012, pukul 14.55.

<sup>49</sup> Roger Cliff, *Op.Cit.*

<sup>50</sup> Ashley J. Tellis, Janice Bially, Christopher Layne, Melissa McPherson, *Loc.Cit.*, halaman 143-144.

militer sendiri menurut Telis dan Layne adalah kerangka penggunaan aset militer dan teknologi ketika terlibat dalam pertempuran atau peperangan, yang berisi juga penjelasan operasional baik secara umum (pada keseluruhan elemen militer) ataupun khusus (pada setiap elemen angkatan bersenjata).<sup>51</sup> Sedangkan penjelasan strategi menurut Telis dan Layne tidak jauh berbeda dari yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, yang setidaknya mencakup tujuan negara, dan kapabilitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut.<sup>52</sup>

Berbagai laporan Departemen Pertahanan AS menyebutkan bahwa China sepanjang 2002-2010 menggunakan strategi “*active defense*” yang telah dipergunakan dari sejak periode sebelumnya. *Active defense* dimaksudkan sebagai persiapan postur kekuatan secara aktif untuk pertahanan diri dari segala ancaman terhadap kepentingan, yang China lakukan dengan mempertajam dan memperkuat keamanan lingkungannya serta mencegah musuh atau pihak lawan melakukan tindakan yang mengganggu atau bertentangan dengan kepentingan China.<sup>53</sup> Di bawah strategi “*active defense*”, China seharusnya tidak akan memicu perang maupun agresi, kecuali untuk mempertahankan kedaulatan dan integrasi teritorial. Meskipun begitu strategi ini tidak sepenuhnya bersifat defensif dibawah jargon “*Three Attacks, Three Defenses*”,<sup>54</sup> yang juga berlaku dalam modernisasi militer PLA, yang dimakudkan bahwa China akan menjaga keseimbangan antara kemampuan defensif dan ofensif yang dimilikinya. Yang lebih lanjut, strategi China dalam penggunaan seluruh kemampuan dan kekuatan negara memiliki dua tujuan umum, yaitu: (1) untuk membangun keseluruhan *comprehensive national power* (kekuatannya jika dibandingkan negara lain), (2) untuk meningkatkan *nasional power* (untuk mempertahankan kemerdekaannya).<sup>55</sup>

Meskipun pemerintah China tidak menjelaskan secara rinci mengenai perkembangan strategi militer negara dari waktu ke waktu, sepanjang periode 2002-2010 terjadi perluasan kepentingan dan strategi yang diimplementasikan

<sup>51</sup> Lihat *Ibid*, halaman 149-150.

<sup>52</sup> *Ibid*, halaman 144-155.

<sup>53</sup> *Annual Reprt to Congress: Military Power of The People’s Republic of China 2005, Loc.Cit*, halaman 15

<sup>54</sup> *Annual Reprt to Congress: Military Power of The People’s Republic of China 2004, Loc.Cit*, halaman 22.

<sup>55</sup> *Annual Reprt to Congress: Military Power of The People’s Republic of China 2003, Loc.Cit*, halaman 1.

China. Dari *Defense White Paper 2010*, dapat dirangkum empat tujuan pertahanan nasional China, yaitu: (1) menjaga kedaulatan nasional, keamanan dan kepentingan dari pembangunan nasional, (2) menjaga keselarasan dan stabilitas sosial, (3) mempercepat modernisasi pertahanan dan angkatan bersenjata nasional, serta (4) menjaga perdamaian dan stabilitas dunia.<sup>56</sup>

Berbagai panduan operasional aktivitas militer juga melengkapi strategi China secara keseluruhan. Di tahun 2003, Komite Pusat *Chinese Communist Party* (CCP) dan *Central Military Commission* (CMC) menyetujui diadopsinya “*Three Warfares*” (*san zhong zhanfa*) sebagai bagian tidak terpisahkan untuk mendukung keberhasilan perang modern. Tiga elemen di dalam konsep ini adalah: (1) *Psychological Warfare* – yaitu penggunaan propaganda, penipuan, ancaman dan paksaan, untuk mempengaruhi pemahaman dan keputusan pihak lawan; (2) *Media Warfare* – berupa diseminasi informasi untuk mempengaruhi opini publik dan mendapatkan dukungan masyarakat domestik dan internasional atas aksi militer China; (3) *Legal Warfare* – penggunaan hukum domestik dan internasional untuk mencari dukungan dan mengelola dampak politik dari aksi militer China.<sup>57</sup>

Panduan staretgi China lainnya adalah pernyataan mengenai misi angkatan bersenjata China yang disebut “*Historic Missions of the Armed Forces in the New Period of the New Century*” (dalam bahasa China disebut: *Xin Shiji Xin Jieduan Wojun Lishi Shiming*) oleh Presiden Hu di tahun 2004, yang kemudian dikodifikasi dalam amandemen CCP 2007. Misi ini membuka China untuk terlibat dalam keamanan internasional dan memperluas definisi keamanan nasional, yang mencakup: (1) Menyediakan jaminan kekuatan yang penting bagi partai dalam mengkonsolidasikan posisinya, (2) Memberikan jaminan keamanan yang kuat untuk menjaga pembangunan nasional, (3) Menyediakan dukungan strategis yang kuat dalam menjaga kepentingan nasional, serta (4) Memainkan peran penting dalam menjaga perdamaian dunia serta pembangunan umum secara keseluruhan.<sup>58</sup>

Sedangkan untuk doktrin militer, China menggunakan konsep “*people’s war*”, yang dapat dimaknai sebagai pertahanan daratan yang mengkombinasikan

<sup>56</sup> *Annual Reprt to Congress: Military and Security Developments InvolvingThe People’s Republic of China 2011, Loc.Cit, halaman 9.*

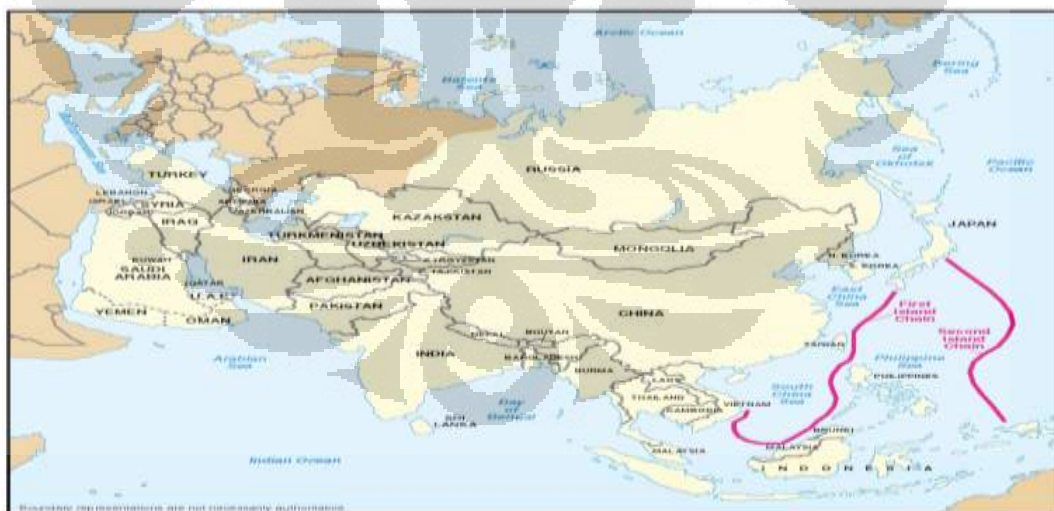
<sup>57</sup> *Ibid, halaman 16.*

<sup>58</sup> *Ibid.*

operasi dari pasukan *regular* dan *irregular* (antara tentara dan rakyat). Secara operasional, *people's war* juga dimaknai dengan mobilitas dan taktik layaknya perang gerilya. Meskipun secara formal tidak banyak informasi yang memuat perubahan doktrin militer yang digunakan angkatan bersenjata PLA, tetapi seiring perluasan strategi dan kemampuan China, konsep "*people's war*" berpotensi mengalami perluasan.<sup>59</sup>

Impelementasi strategi, misi, dan doktrin militer yang ditetapkan para pemimpin China tersebut, secara langsung maupun tidak langsung berimplikasi pada pola peperangan dan operasi militer dari angkatan darat, laut, dan udara. Dalam konteks *naval warfare*, China menggunakan komponen *active defense/offshore defense* (dalam bahasa China: *jinhai fangyu*), sebagai konsep strategik agar angkatan laut PLA selalu siap dalam tiga misi utamanya, yaitu: (1) menjaga musuh agar tidak melampaui batas invasi laut yang telah ditetapkan, (2) menjaga kedaulatan teritorial nasional, dan (3) menjaga kesatuan tanah air dan hak-hak maritim China. Secara praktis konsep strategik tersebut, menjadi arahan bagi angkatan laut China dalam menjalankan operasinya di berbagai wilayah.

**Gambar 3.1:** *First and Second Islands Chain.*<sup>60</sup>



Fokus utama kepentingan China melalui angkatan lautnya, pada awalnya adalah di sekitar *Yellow Sea*, Laut China Timur dan Laut China Selatan, Taiwan,

<sup>59</sup> Alexander Chieh-cheng Huang, "Transformation and Refinement of Chinese Military Doctrine: Reflection and Critique on the PLA's View". [http://www.rand.org/pubs/conf\\_proceedings/CF160/CF160.ch6.pdf](http://www.rand.org/pubs/conf_proceedings/CF160/CF160.ch6.pdf), diakses pada 12 Mei 2012, pukul 18.57.

<sup>60</sup> *Annual Reprt to Congress: Military Power of The People's Republic of China 2006*, Loc.Cit, halaman 15.

serta pulau yang disengketakan seperti Spratly dan kepulauan Diaoyutai/Senkaku.<sup>61</sup> Sesuai perkembangan kepentingan komersial dan diplomasi, China mengembangkan cakupan wilayah kepentingannya hingga ke Laut Filipina dan sekitarnya, yang kemudian dikenal dengan istilah *First Islands Chain* dan *Second Island Chain*.<sup>62</sup> Dalam menjaga kepentingannya di wilayah tersebut, China mengoperasikan pula doktrin angkatan laut PLA untuk operasi maritim yang fokus pada enam hal *offensive and defensive campaigns*; yaitu: *blockade*, *anti-sea lines of communication*, *maritime-land attack*, *anti-ship*, *maritime transportation protection*, dan *naval base defense*. Selain daerah kepentingan yang telah disebutkan sebelumnya, daerah kepentingan maritim lainnya yang juga menjadi tanggung jawab angkatan laut PLA adalah jalur perdagangan komersial dan transportasi minyak mentah China. Jalur ini sangat vital, mengingat jalur ini dilalui 46% transportasi minyak China dari Timur Tengah, dan 32% dari Afrika.<sup>63</sup>

**Gambar 3.2:** Jalur *Critical Sea Lanes* China.<sup>64</sup>



Serupa dengan implementasi strategi yang dimiliki China pada angkatan lautnya, misi angkatan darat China juga mengalami perluasan. Pada dasarnya, dibawah strategi *active defense*, angkatan darat PLA ditugaskan menjaga seluruh perbatasan China, menjamin stabilitas domestik, serta menjadi bagian proyeksi kekuatan regional. Strategi angkatan darat PLA kemudian mengalami transisi, dari sebelumnya bersifat *static defensive* yang ditempatkan di wilayah-wilayah

<sup>61</sup> *Ibid*

<sup>62</sup> *Ibid*.

<sup>63</sup> *Annual Reprt to Congress: Military Power of The People's Republic of China 2009. Loc.Cit*, halaman 4.

<sup>64</sup> *Ibid*.

militer untuk operasi penjagaan; menjadi lebih ofensif bagi operasi di wilayah periferi China. Perluasan ini juga didukung dengan penguatan angkatan darat PLA, sebagaimana disebutkan dalam *Defense White Paper 2010*:

*“emphasized the development of new types of combat forces, optimized its organization and structure, strengthened military training in conditions of informatization, accelerated the digitized upgrading and retrofitting of main battle weaponry, organically deployed new types of weapon platforms, and significantly boosted its capabilities in long-distance maneuvers and integrated assaults.”*<sup>65</sup>

Untuk operasi angkatan udara PLA, China meningkatkan misinya dari sebatas pertahanan regional, menjadi lebih fleksibel dan tangkas di wilayah lepas pantai, baik berperan secara ofensif maupun defensif. Untuk menjalankan hal tersebut, angkatan udara PLA berfokus pada misinya, yaitu: penyerangan, pertahanan udara dan misil, *early warning and reconnaissance*, dan mobilitas strategis. Angkatan udara PLA juga merupakan penanggung jawab elemen strategi China yaitu operasi *anti-access* dan *area denial*. Misi baru PLA juga mendorong konsensus petinggi China mengenai kebutuhannya pesawat tempur, transportasi, dan logistik jarak jauh untuk mendukung kepentingan global China. Hal ini juga didukung dari pengembangan pesawat-pesawat teknologi tinggi seperti sejenis pesawat *stealth*. Dalam integrasi operasinya dengan angkatan laut, maka angkatan udara PLA berperan sebagai penghalau bagi ancaman yang berlangsung di *first* dan *second island chain*.<sup>66</sup>

Selain implementasi strategi pada berbagai misi angkatan bersenjata, China juga mengadopsi konsep *spacewarfare* dan *integrated network electronic warfare* sebagai perkuatan dalam menghadapi perang informasi. Dalam *space warfare*, strategi utama PLA adalah memanfaatkan ruang angkasa dan menghalau akses pihak lawan, sebagai bentuk strategi informatisasi modern. Kepentingan China dalam strategi ini secara lebih terinci adalah maksimalisasi kapabilitas *space and counterspace*, menyangkut: menghancurkan, merusak, dan mengganggu instrumen pengintai milik musuh, serta mempertahankan seluruh sistem (satelit peringatan dini dan navigasi) dari menjadi target utama pihak

<sup>65</sup> *Annual Report to Congress: Military and Security Developments Involving The People's Republic of China 2010, Loc.Cit.*

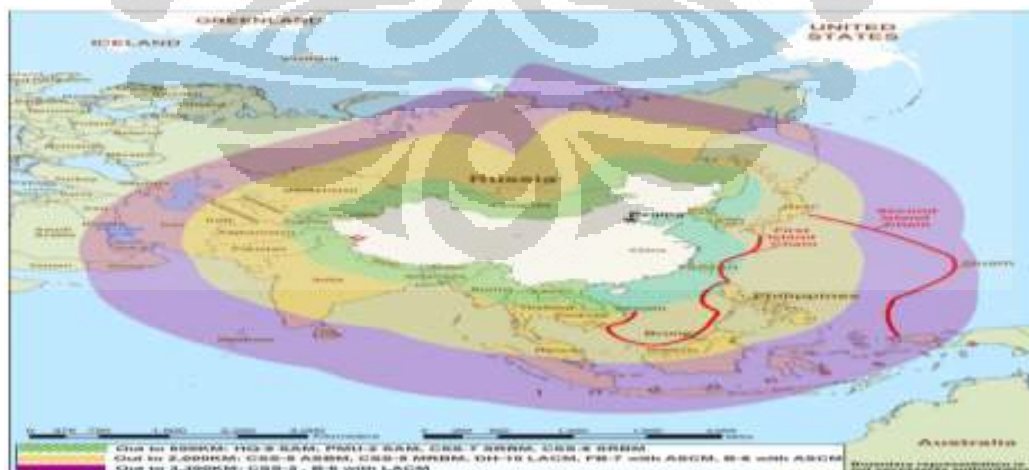
<sup>66</sup> *Ibid*



musuh. Secara operasional, *space warfare* yang diterapkan China berhubungan dengan misinya dalam melakukan C4ISR untuk tujuan China mamperjuangkan dan menang dalam kondisi “*local wars under modern high-tech conditions*”, dengan kemampuan memanfaatkan teknologi informasi baik saat perang maupun damai. Sedangkan *integrated network electronic warfare*, dilakukan PLA yang meyakini dominasi sistem elektromagnetik menjadi salah satu penentu utama keberhasilan di medan perang. Deskripsi strategi ini melibatkan operasi jaringan komputer, serangan kinetik untuk mengganggu sistem informasi yang mendukung pihak lawan.<sup>67</sup>

Strategi-strategi pertempuran di berbagai matra yang telah disebutkan di atas juga terintegrasi untuk mendukung strategi *Anti-Access* yang dijalankan China. Strategi ini merupakan usaha China memperluas penggunaan berbagai aset militernya, yang pada awalnya hanya difokuskan pada angkatan laut ke penggunaan multi-dimensi dari kekuatan PLA lainnya baik udara, bawah laut maupun kekuatan PLA di permukaan laut. Strategi *anti-access* dibentuk untuk menghalau masuknya pihak lawan di daerah kepentingan operasi tersebut. Sehubungan dengan penggunaan aset misil, China juga memberlakukan “*self-defense counter attacks*,” yang logika ini sejalan dengan kebijakan “*no first use*” khususnya dalam konteks penggunaan senjata nuklir.<sup>68</sup>

**Gambar 3.3:** Area *Anti-Access* dan Jangkauan Misil China<sup>69</sup>



<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> *Annual Reprt to Congress: Military Power of The People’s Republic of China 2005, Loc.Cit, halaman 32.*

<sup>69</sup> *Annual Reprt to Congress: Military Power of The People’s Republic of China 2006, Loc.Cit, halaman 13-14.*



### 3.3. Kehandalan Tempur

*Combat proficiency* merupakan indikator terakhir dalam menilai kapabilitas suatu negara. Sebagaimana pendapat Telis dan Layne, ketika sumber daya strategis ditransformasi oleh kapabilitas konversi negara, ini akan menghasilkan kekuatan militer yang mampu digunakan untuk operasi melawan dan mengatasi lawan potensial. Kemampuan ini yang kemudian disebut *combat proviciency*, dengan begitu merupakan output *power* nasional, yang juga dapat dimanfaatkan untuk mengamankan kepentingan politik negara. Secara sempit *combat proviciency* atau kemampuan tempur adalah elemen militer itu sendiri, yang dengan logika Telis dan Layne, besaran kemampuan tempur dapat diperbesar dan diperkecil sesuai dengan sumber daya strategi dan operasi-strategi yang dipersepsikan negara.<sup>70</sup>

Dalam deskripsi selanjutnya, Telis dan Layne menjelaskan secara kompleks bahwa ukuran kemampuan bertempur suatu negara dapat diidentifikasi pula dari kemampuan masing-masing matra angkatan bersenjata. Diantaranya adalah: kemampuan menguasai informasi pertempuran, kemampuan menjalankan operasi *anti-submarine warfare*, kemampuan pertahanan tepi pantai, kemampuan menghalau serangan udara; hingga kemampuan menguasai laut, darat dan udara; dan berbagai variabel terkait lainnya.<sup>71</sup> Penjelasan Telis dan Layne ini secara sederhana dapat diterangkan dari keberadaan kuantitas dan kualitas persenjataan yang dimiliki negara, serta teknologi pertempuran yang bisa didukung oleh masing-masing sistem persenjataan tersebut. Karenanya kemampuan pertempuran sangat erat dengan penilaian *offense defense balance* dari Stephen Van Evera, khususnya menyangkut variabel: teknologi sistem persenjataan militer, *force posture* dan *deployments*.<sup>72</sup>

Karenanya, pada bagian ini, akan dijabarkan perbandingan postur dan teknologi persenjataan AS dan China, khusus pada sistem persenjataan yang disebutkan dalam UN *Register of Conventional Arms* (UNROCA), yaitu: : *main battle tank, armoured combat vehicle, combat aircraft, large-calibre artillery*

<sup>70</sup> Ashley J. Tellis, Janice Bially, Christopher Layne, Melissa McPherson, *Op.Cit*, halaman 158-159.

<sup>71</sup> *Ibid*, halaman 158-159.

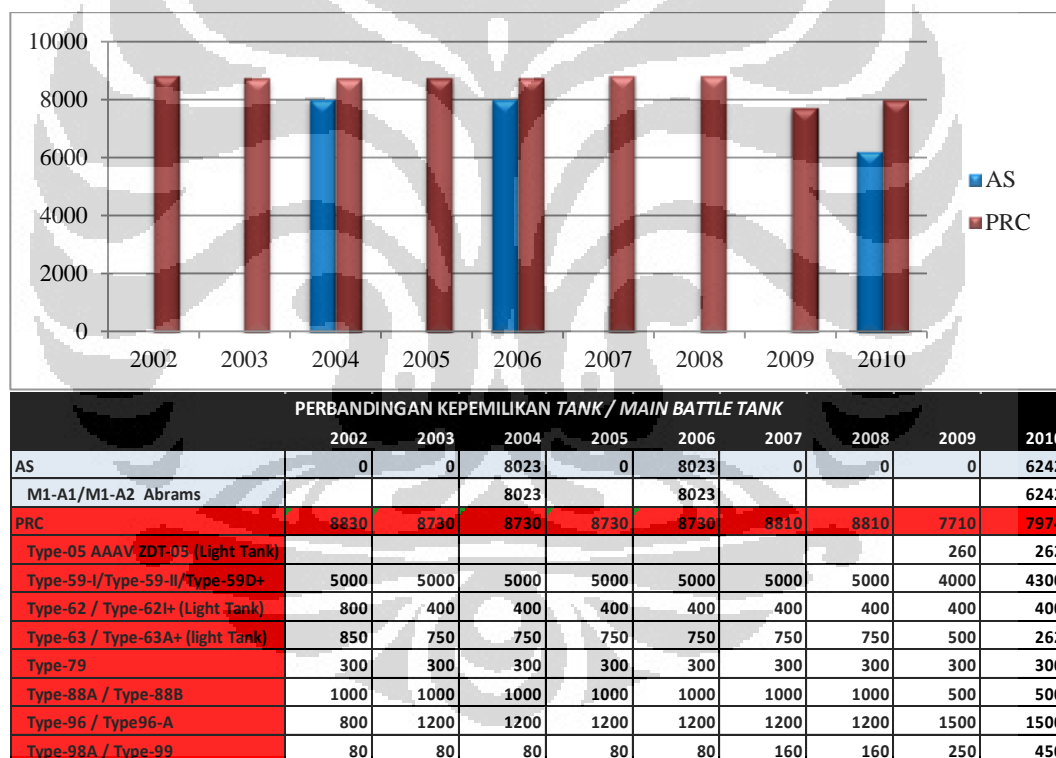
<sup>72</sup> Stephen van Evera, *Offense, Defense, and the Causes of War*, "International Security", Vol. 22, No. 4, (Spring-1998) Massachusetts: MIT Press, halaman 14-15.

systems, combat aircraft, attack helicopter, warship, missiles dan missiles launcher.<sup>73</sup>

### 3.3.1. Tank – Main Battle Tank

Tank/main battle tank (MBT) adalah sistem persenjataan terbesar kedua yang dimiliki China guna mendukung operasionalisasi angkatan darat. *The Military Balance* mencatat selama periode 2002-2010, angkatan darat PLA memiliki tiga tipe utama jenis tank ringan (Tipe-59, Tipe 62, Tipe-63) dan empat tipe utama MBT (Tipe-79, Tipe-88, Tipe-96, Tipe-98, dan Tipe-99), yang keseluruhan tipe tersebut memiliki berbagai varian.

**Grafik 3.5:** Perbandingan Jumlah Tank Milik AS dan China (dalam satuan unit).<sup>74</sup>



Tipe-99MBT/ZTZ-99 merupakan MBT terbaik yang diproduksi dan dimiliki China dalam operasi darat. Tipe-99 MBT/ZTZ-99 mulai dioperasikan pada tahun 2001, dan memiliki kelebihan yang tidak dimiliki generasi MBT China sebelumnya. Tipe ini memiliki sistem senjata utama *dual-axis* kaliber

<sup>73</sup> <http://www.un.org/disarmament/convarms/Register/>, diakses pada 15 Mei 2012, pukul 14.30.

<sup>74</sup> Data diolah dari *Military Balance* 2003 hingga 2010, *Op.Cit*

*125mm/50-calibre ZPT98 smoothbore gun*, serta sistem persenjataan pendukung berupa satu buah *12.7mm anti-aircraft machine gun* dan *7.62mm coaxial machine gun*. Kelebihan lainnya dari tipe ini adalah kemampuan mobilitas yang besar hingga mencapai 600 km (dalam keadaan bahan bakar penuh) dengan kecepatan 60-80 km/jam. Tipe-99 dapat diarahkan sebesar -4 hingga 75 derajat, dengan kecepatan tembak 80-100 rds per menit. Komunikasi untuk keperluan komando juga dilengkapi dengan *transmission device, telephone, laser communications* dan IFF (*identification, friend or foe*).<sup>75</sup> Dengan kemampuan yang dimilikinya, beberapa pengamat sistem persenjataan menyatakan MBT Tipe-99 China patut untuk dibandingkan dengan M1A1 MBT milik AS dan juga Leopard 2.<sup>76</sup>

Di periode 2002-2010 secara keseluruhan China melakukan penurunan jumlah tank dalam inventori persenjataan, yang disebabkan penurunan aset tank kelas ringan, yang disertai dengan penambahan jumlah MBT Tipe-99 dan Tipe-96, yang baru sebesar 34,5% dari total 7.974 unit inventori tank China di 2010. Meski secara kuantitas jumlah tank yang dimiliki China lebih besar dibandingkan AS, sepanjang periode ini AS didukung oleh tank Tipe M1-A1 dan Tipe M1-A2 Abrams yang keseluruhannya merupakan jenis MBT dengan teknologi yang masih lebih canggih. Tipe M1-A2 Abraham ini dilengkapi senjata utama yaitu kaliber *120mm XM256 smooth bore cannon* dan pendukung *7.62 M240 machinegun*.<sup>77</sup>

### 3.3.2. Armoured Combat Vehicle

*Armoured Combat Vehicle/Armoured Fighting Vehicle/Armoured Transport Vehicle* (ACV) merupakan sistem persenjataan konvensional yang bukan menjadi andalan militer China dalam mendukung operasi darat. Meski begitu, sepanjang 2002-2010 China mulai menambahkan dan meluncurkan berbagai tipe ACV guna melengkapi sistem persenjataannya. Penambahan ini mencapai 660 unit pada tahun 2009 dan 918 unit pada tahun 2010, yang meliputi tipe-tipe: Tipe-03/ZBD-03, Tipe-04/ZBD-04/ZBD-97, Tipe-05/ZBD-05, dan Tipe-92B. Sebagai bagian modernisasi sistem persenjataan angkatan darat PLA,

<sup>75</sup> <http://www.sinodefence.com/army/tank/type99-system.asp>, diakses pada 13 Mei 2012, pukul 19.31.

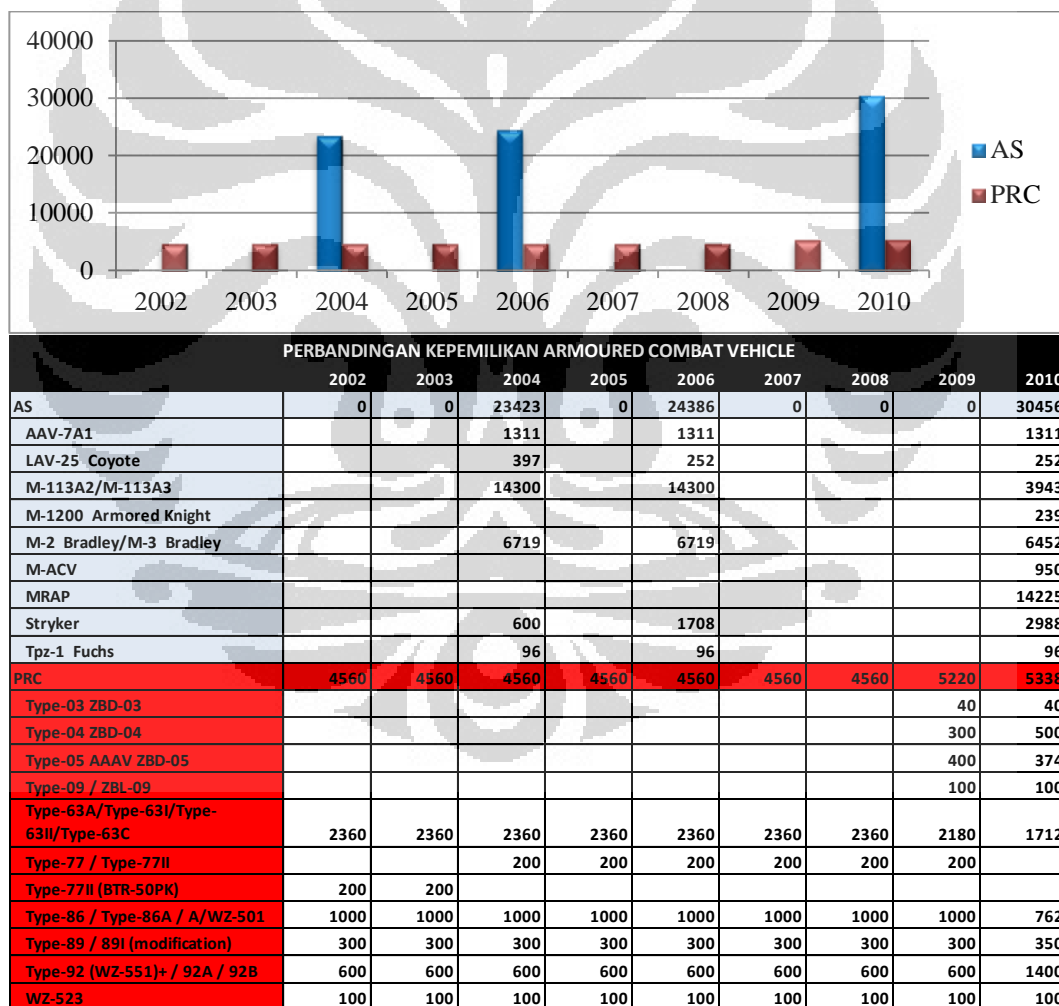
<sup>76</sup> <http://www.army-technology.com/projects/type99chinese-main/>, , diakses pada 13 Mei 2012, pukul 19.35.

<sup>77</sup> <http://www.gdls.com/index.php/products/abrams-family/abrams-m1a2-main-battle-tank>, dikases pada 26 Mei 2012, pukul 13.00.

penambahan ini juga untuk mengganti teknologi ACV generasi sebelumnya, seperti: Tipe-77 dan Tipe-86.

Kendaraan-kendaraan ACV memiliki teknologi dengan pada kecepatan 60-100 km per jam di darat (khususnya ZBD-09), dan 8-45 km per jam di air (ZB-05). Senjata yang dilengkapi pada ACV seri tersebut adalah satu buah senjata 30 mm, satu senjata *coaxial 7.62 mm machine gun*, dan dua *anti-tank missile launcher* HJ-73D. Sedangkan pada Tipe ZBD-04 dilengkapi dengan satu senjata 100 mm (yang mampu menyasar *anti-tank missile*), satu senjata 30 mm, serta tiga *7.62 mm machine guns*.<sup>78</sup>

**Grafik 3.6:** Perbandingan Jumlah *Armoured Combat Vehicle* Milik AS dan China (dalam satuan unit).<sup>79</sup>



<sup>78</sup> Data mengenai ACV China Tipe-03/ZBD-03, Tipe-04/ZBD-04/ZBD-97, Tipe-05/ZBD-05, dan Tipe-92B, diperoleh melalui: [www.armyrecognition.com/](http://www.armyrecognition.com/), diakses pada 13 Mei 2012, pukul 20,08.

<sup>79</sup> Data diolah dari *Military Balance* 2003 hingga 2010, *Op.Cit*

Jumlah kepemilikan angkatan darat PLA atas berbagai jenis ACV jauh lebih rendah, jika dibandingkan dengan AS. Di tahun 2004, AS memiliki 23.423 unit ACV dan bertambah hingga mencapai 30.456 di 2010. Penambahan ini mencakup tipe-tipe terbaru seperti: M-1200 Armoured Knight, Stryker, M-ACV dan MRAP; yang mulai menggantikan tipe-tipe lama ACV AS seperti: M-113A2/M-113A3 dan M-1/M-2 Bradley. Dalam hal teknologi, M-1200 dilengkapi dengan sistem presisi penargetan dengan laser, *day/night electro-optic sensor*, sistem GPS (*global positioning system navigation and targeting*) dan beberapa senjata pengaman,<sup>80</sup> dimana teknologi ini telah ada pada ACV milik AS lainnya.

### 3.3.3. Artillery

Artilleri adalah sistem persenjataan utama dan terbanyak yang dimiliki oleh angkatan darat PLA. Meskipun sistem persenjataan artilleri China mengalami penurunan selama periode 2002-2010, sistem ini mengalami pembaharuan teknologi. Sebagaimana fakta mengenai inventori persenjataan artilleri yang menunjukkan terjadinya konversi sistem persenjataan artilleri, *towed*, dan *howitzer* menjadi bersifat *self-propelled*. Beberapa tipe terbaru dari sistem artilleri China adalah: PHL-03 yang merupakan *multi-launch rocket system* (MLRS), PTL-02, PLL-05, PLZ-05. PHL-03 China menggunakan sistem 300mm MLRS, yang dikembangkan secara domestik. Sistem ini memungkinkan PHL-05 untuk meluncurkan 12 roket pada saat bersamaan, dengan jarak jangkauan diperkirakan lebih dari 150km.<sup>81</sup> Kelebihan lain dari sistem artilleri China adalah pada jenis PLL-05, yang mampu digerakan hingga 360 derajat putaran, dan senjata utamanya mampu bergerak hingga 80 derajat (hampir tegak lurus) untuk juga menjangkau ancaman udara.<sup>82</sup> Sedangkan tipe PLZ-05 dan PTL-02 juga dilengkapi *laser guided missile*, yang memiliki jarak tembak hingga menjangkau lebih dari 50 km. Sedangkan kedua senjata ini juga memiliki kecepatan tembak 8 hingga 10 tembakan per menitnya.<sup>83</sup>

<sup>80</sup> <http://www.army-guide.com/eng/product4704.html>, diakses pada 13 Mei 2012, pukul 20.49.

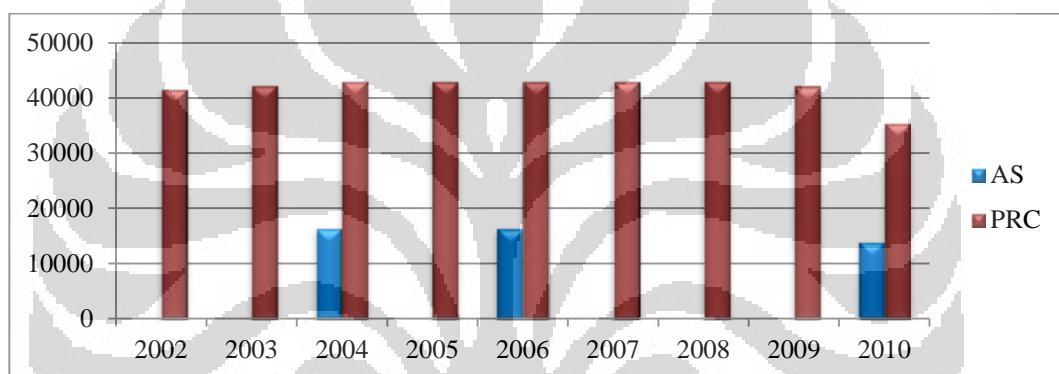
<sup>81</sup> <http://www.sinodefence.com/army/mrl/phl03.asp>, diakses pada 13 Mei 2012, pukul 20.53.

<sup>82</sup> <http://www.sinodefence.com/army/artillery/pll05.asp>, diakses pada 13 Mei 2012, pukul 20.55.

<sup>83</sup> Sistem persenjataan artilleri baru China juga memiliki mobilitas baik, yang mampu dijalankan dengan kecepatan 80 km per jam dalam kondisi normal.. <http://www.sinodefence.com/army/artillery/ptl02.asp>, <http://www.sinodefence.com/army/artillery/plz05.asp>, diakses pada 13 Mei 2012, pukul 21.00.

Persenjataan artileri China secara kuantitas lebih unggul, yaitu dengan jumlah lebih dari dua kali lipat kepemilikan AS atas sistem persenjataan artileri. Namun dalam hal teknologi, beberapa sistem persenjataan AS masih lebih unggul, seperti: MLRS Tipe M-142 HIMARS yang memiliki jangkauan tembak maksimal hingga 300 km. Sedangkan rata-rata tipe lainnya, seperti M-109 Howitzer *Self Propelled* memiliki jangkauan tembak maksimal 30km.<sup>84</sup> Trend perkembangan sistem artileri AS juga sejalan dengan China, yaitu mengalami penurunan secara kuantitas pada periode 2002-2010.

**Grafik 3.7:** Perbandingan Jumlah *Artillery* Milik AS dan China (dalam satuan unit).<sup>85</sup>



	ARTILLERY									
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
<b>AS</b>	0	0	16440	0	16390	0	0	0	13956	
Man Portable Anti-Tank (Predator/TOW)			2204		2204				2204	
Mortar (LAV-M/M-120/M121/M-252)			2701		2651				2651	
Multiple-Launch Rocket System (HIMARS/M-270/M-270)			830		830				1054	
Rocket Launcher (AT-4/M-136/SMAW)			2764		2764					
Self Propelled (FIM-92A/M-109A/M-6/M-901)			4985		4985				4492	
Towed (M-101A1/M-102/M-119/M-198/M-777/M-104 Patriot)			2956		2956				3555	
<b>PRC</b>	41662	42312	43062	43062	43062	43062	43068	42180	35514	
Combined Gun (2S23 Nova/ PLL-05)	100	100	100	100	100	100	100	150	150	
Guided Weapon (Type HJ-73/HJ-9)	6500	7176	7176	7176	7176	7176	7176	7176		
Guns (T-73/T-80/T-86/T-89/T-90)	16350	300	16300	16300	16300	16300	16300	16260	17730	
Mortar									2586	
Multiple Rocket Launcher (T-81 / T-89 SP/T-82 / T-70 SP, T-83, T-96 (WS-1) / T-03 PHL-03/WS-2 / WS-28+)	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	1770	
Recoilles (T-56/T-65/T-78/T-75/T-98)									3966	
Self Propelled (HJ-9/PLZ-05/Type-701/T-83/T-89)	1200	1224	1224	1224	1224	1224	1224	1304	2026	
Surface-to-Air	1112	17112	1862	1862	1862	1862	1868	890	890	
Towed (T-54/T-59/T-88/WAC-21/D-1/M-46)	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	6396	

<sup>84</sup> <http://www.fas.org/man/dod-101/sys/land/m270.htm>, diakses pada 14 Mei 2012, pukul 07.21.

<sup>85</sup> Data diolah dari *Military Balance* 2003 hingga 2010, *Op.Cit.*

### 3.3.4. *Principle Surface Combatants*

Armada angkatan laut PLA pada periode 2002-2010 memiliki kekuatan sistem persenjataan utama permukaan laut (*principle surface combatants*), yang didukung berbagai jenis kapal jenis *frigates* dan *destroyers*, dan belum mengoperasikan *aircraft carrier* yang masih dalam pembangunan. Jenis *destroyers* China meliputi tipe Luzhou, Luyang, Sovremenny, Luhai dan Luda; sedangkan jenis *frigates* meliputi tipe: Jiangkai, Jiangwei, dan Jianghu. Keseluruhan *principle surface combatants* China juga mengalami modifikasi dari waktu ke waktu dengan lahirnya beberapa seri baru dari jenis-jenis tersebut.

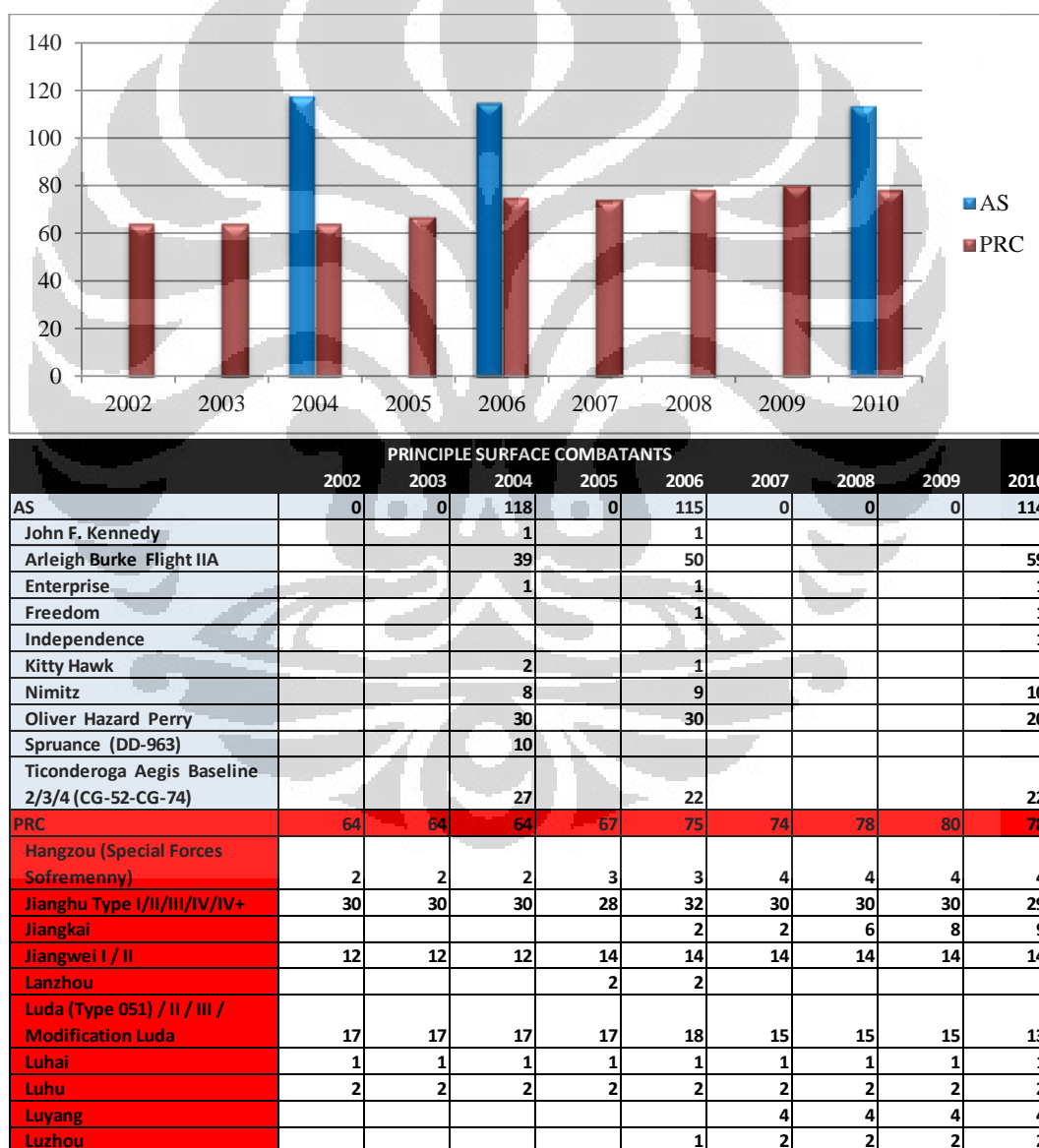
Pada jenis *frigates*, tipe-Jiangwei China dilengkapi dengan enam sistem YJ-8 *surface-to-surface missile* (SSM), satu unit CSA-N-2 *surface-to-air missile* (SAM), dua RBU 1200, sistem artileri kaliber 100mm (2 eff.), dan memiliki kapasitas untuk membawa dua unit helicopter. Tipe Jiangkai dan Jianghu memiliki sistem persenjataan yang hampir serupa dengan tipe Jiangwei, namun dengan jumlah dan kapasitas yang berbeda. Sedangkan pada jenis *destroyer*, tipe terbaru Hangzhou dilengkapi dengan sistem persenjataan yang meliputi: delapan SS-N-22 Sunburn SSM, dua SA-N-7 Grizzly SAM, empat 533mm ASTT, dua RBU 1000 Smerch 3, empat 130mm, serta mampu mengangkut satu unit helicopter kelas Z-9C (AS-565SA) Panther atau Ka-28 Helix. Seluruh kapal *principle surface combatants* China, juga telah dilengkapi berbagai sistem pendukung navigasi, komunikasi dan komando, sensor *anti-submarine* dan *anti-surface*, terbaru.<sup>86</sup>

Total keseluruhan kapal dari berbagai jenis *principle surface combatants* China, mengalami peningkatan selama periode ini, dari sejumlah 64 unit di 2002, menjadi sebesar 80 di 2009. Jumlah ini masih dibawah pemilikan AS atas kapal-kapal *principle surface combatant*. Di awal periode ini, AS memiliki 12 *aircraft carrier* aktif, yang jumlah ini menjadi 13 unit di tahun 2010. Tipe-tipe *aircraft carrier* yang dimiliki AS adalah: Enterprise, Freedom, Independence, Nimitz, John. F. Kennedy dan Kitty Hawk (yang sudah tidak aktif pada tahun 2010). *Aircraft carrier* AS secara umum dipersenjatai dengan: 24 unit Mk29 GMLS (masing-masing dengan RIM-7M/P *Sea Sparrow* SAM), dua unit Mk49 GMLS (masing-

<sup>86</sup> The Military Balance, *Op.Cit.*

masing dengan RIM-116 RAM SAM ), serta memiliki kapasitas 55 pesawat tempur F/A-18 Hornet, empat EA-6B Prowler EW; empat Hawkeye AEW, empat SH-60F Seahawk helicopter, dan dua HH-60H Seahawk SAR helicopter.<sup>87</sup> Unit persenjataan *surface combatants* lain yang dimiliki AS adalah *cruiser* jenis Ticonderoga Aegis Baseline; kapal *frigate* dengan tipe: Freedom, Independence, dan Oliver Hazard Perry; serta *destroyers* dengan tipe: Arleigh Burke Flight yang mengalami jumlah peningkatan di tahun 2010.

**Grafik 3.8:** Perbandingan Jumlah *Principle Surface Combatants* Milik AS dan China (dalam satuan unit).<sup>88</sup>



<sup>87</sup> *Ibid.*

<sup>88</sup> *Ibid.*



### 3.3.5. Submarine

China memiliki 11 jenis kapal selam yaitu: Xia dan Jin (*ballistic-missile submarine nuclear fuelled*); Tipe-091 Han dan Tipe-03 Shang (*attack submarine nuclear powered*); Tipe-EKM 636/877 Kilo, Tipe ES5E Ming, Tipe ES3B Romeo, Song, Yuan, Golf (*submarine with anti submarine warfare/ASW capability*), serta Tipe Romeo. Tipe Xia dengan kemampuan senjata nuklirnya dijadikan China sebagai salah satu bagian strategis dari kekuatan negara.

Dalam teknologi persenjataan, kapal selam balistik China dilengkapi dengan 12 unit CSS-N-3/CSS-NX-4 misil balistik, dengan jangkauan tembak menjangkau lebih dari 8000 km. Rata-rata teknologi bagi kapal selam ASW China dilengkapi dengan 6 unit 533mm torpedo tube (yang mampu menembakan torpedo sejauh lebih dari 40km),<sup>89</sup> SS-N-27 Club SSM, hingga 18 unit TEST71/96 HWT. Rata-rata kecepatan jelajak kapal selam China adalah sebesar 40 knot (mil per jam).<sup>90</sup>

Secara kuantitas, China mengalami peningkatan jumlah kapal selam yang dimilikinya sejak tahun 2006, yang sebelumnya beberapa jenis dari kapal selam tersebut mengalami modifikasi pada periode 2002-2006. Pada tahun 2010, jumlah kapal selam China setara dengan kapal selam AS yaitu sejumlah 71 unit. Jumlah ini merupakan penurunan kuantitas jika melihat kepemilikan AS atas kapal selam pada tahun-tahun sebelumnya.

Keseluruhan kekuatan kapal selam angkatan laut AS didominasi oleh jenis SSBN-76 Ohio, SSN-688 Los Angeles, SSN-774 Virginia dan kelas Sea Wolf, yang umumnya menggunakan tenaga nuklir. Diantara tipe-tipe tersebut, kapal selam kelas Ohio yang berjumlah empat unit merupakan bagian operasi strategik AS, dengan dilengkapi 154 buah misil nuklir Tomahawk yang mampu difungsikan sebagai LACM (*land attack cruise missile*). Ohio yang berkapasitas lebih dari 140 orang memiliki kecepatan 20 knot laut. Seri Virginia merupakan salah satu yang memiliki kemampuan penyelaman paling jauh, yang mencapai lebih dari 800 meter di bawah permukaan laut.<sup>91</sup> Virginia juga merupakan seri

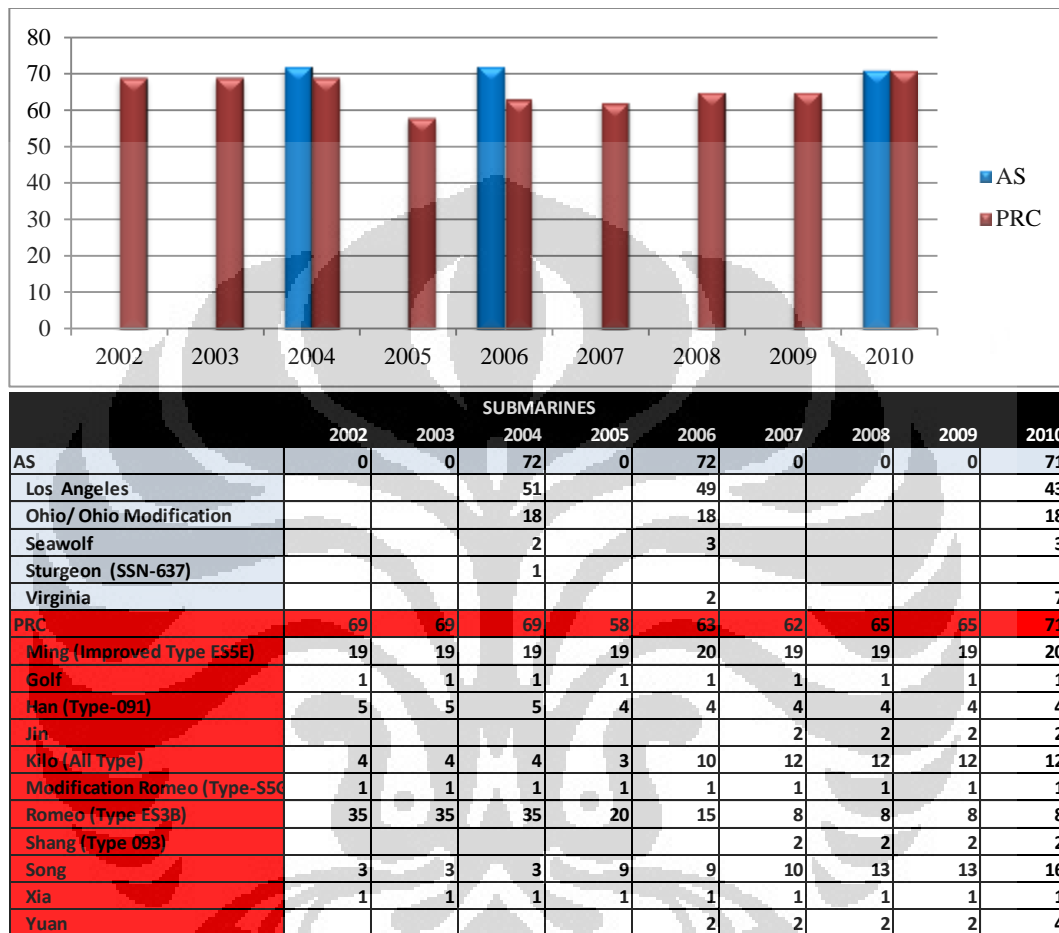
<sup>89</sup> <http://www.sinodefence.com/navy/sub/kilo.asp>, diakses pada 14 Mei, pukul 20.59.

<sup>90</sup> <http://www.sinodefence.com/navy/vessel.asp>, diakses pada 14 Mei, pukul 21.05.

<sup>91</sup> [http://www.fas.org/programs/ssp/man/uswpns/navy/submarines/ssn774\\_virginia.html](http://www.fas.org/programs/ssp/man/uswpns/navy/submarines/ssn774_virginia.html), diakses pada 14 Mei, pukul 21.15.

kapal selam AS yang mengalami peningkatan jumlah selama periode 2002-2010, yang mulai menggantikan posisi kapal selam seri Los Angeles.

**Grafik 3.9:** Perbandingan Jumlah *Submarines* Milik AS dan China (dalam satuan unit).<sup>92</sup>



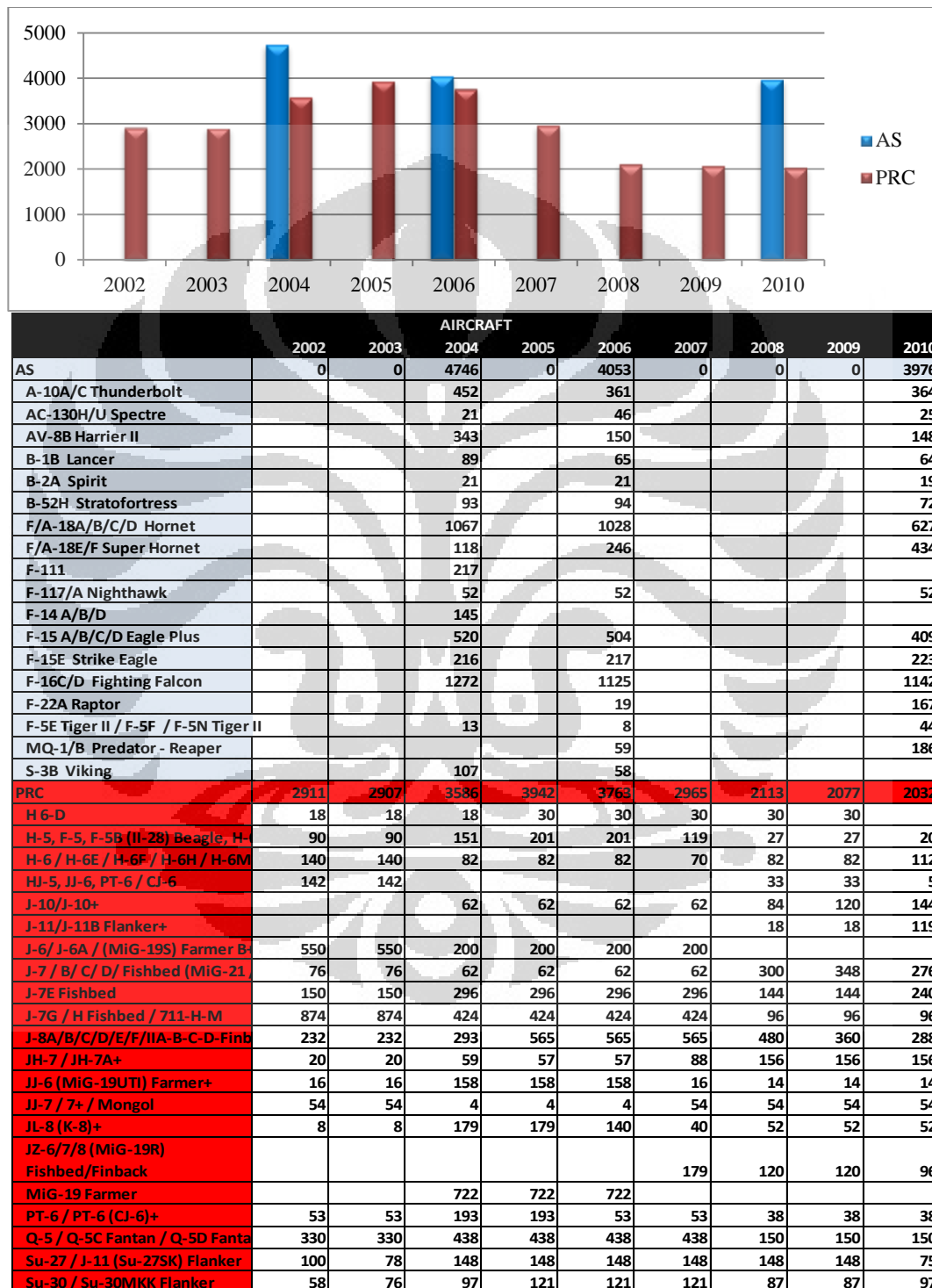
### 3.3.6. Combat Aircraft

Kekuatan utama angkatan Udara PLA didukung oleh dua jenis pesawat tempur jenis *fighter* yaitu: J-8, J-9, J-10, J-11; dan jenis *bomber* yaitu: Hong-6, Jiang Hong-7 dan Qiang-5 (Tipe H-5, H-6, H-7) dari berbagai model. Total pesawat tempur China selama periode ini mengalami penurunan, dari sebesar 2911 di 2002 menjadi 2032 di 2010. Meskipun begitu, peningkatan teknologi pesawat tempur China mengalami peningkatan, khususnya setelah berbagai media mengungkapkan China melakukan tes pesawat *fighter* J-XX (J-20) yang dilengkapi teknologi *stealth*. Teknologi J-20 China diperkirakan akan berada

<sup>92</sup> Data diolah dari *Military Balance* 2003 hingga 2010, *Op.Cit*

hampir sama dengan jenis pesawat stelah AS seperti: F-22A Raptor atau F-35 *Joint Strike Fighter*.

**Grafik 3.10:** Perbandingan Jumlah *Combat Aircraft* Milik AS dan China (dalam satuan unit).<sup>93</sup>



<sup>93</sup> Data diolah dari *Military Balance* 2003 hingga 2010, *Op.Cit*

Tren inventori kapal tempur AS sebagaimana tren inventori kapal tempur China, juga mengalami penurunan. Kebutuhan angkatan udara dan penerbangan angkatan laut AS didukung seri pesawat *bomber*: B-1B Lancer, B-2A Spirit, B-52H *stratofortress*, dan beberapa tipe lainnya. Sedangkan untuk jenis *fighter/fighter ground attack*, kekuatan AS didukung oleh jenis: F-14, F-15, F-16, F-22A, F-111, dan F117, yang juga dibuat dalam berbagai model.<sup>94</sup>

### 3.3.7. Attack Helicopter

Helikopter tempur belum menjadi pilihan utama dalam mendukung kekuatan angkatan udara China, khususnya selama periode 2002-2010. Meski begitu, inventori helikopter China meningkat cukup tajam dari sejumlah 123 unit di tahun 2002, menjadi 244 unit di tahun 2010. China umumnya masih menggunakan *attack helicopter* seri produksi tahun 1990an, seperti: Mi-17/171, S-70C BlackHawk, Tipe-Zhi 9, Tipe-Zhi 10, Tipe Zhi-11, AS 565 Panther, dan SA 321 Super Frelon.

Tipe-Zhi-10/WZ-10 merupakan helikopter tempur China yang relatif terbaik dilihat dari sistem persenjataan dan pendukung, dibandingkan dengan jenis lainnya. Pada sistem pendukung, helikopter ini dilengkapi dengan radar sistem radar dan *laser range finders* untuk deteksi, jika helikopter ini menjadi target pihak lawan, serta berguna untuk memperbesar presisi serangan yang dilakukan. Helikopter ini juga tahan dari serangan amunisi 7.62 mm, dan 12.7 mm *machine gun*.<sup>95</sup>

Jumlah *attack helicopter* AS sepanjang periode ini rata-rata adalah sebesar enam kali lipat dan dari yang dimiliki China, yang menunjukkan perbedaan yang cukup besar. Kekuatan *attack helicopter* dari seluruh angkatan bersenjata AS, umumnya didukung jenis: AH-1, AH-1S, AH-1W Cobra maupun Super Cobra; serta *attack helicopter* ukuran sedang lainnya yaitu: AH-6 dan AH-6A Little Bird.

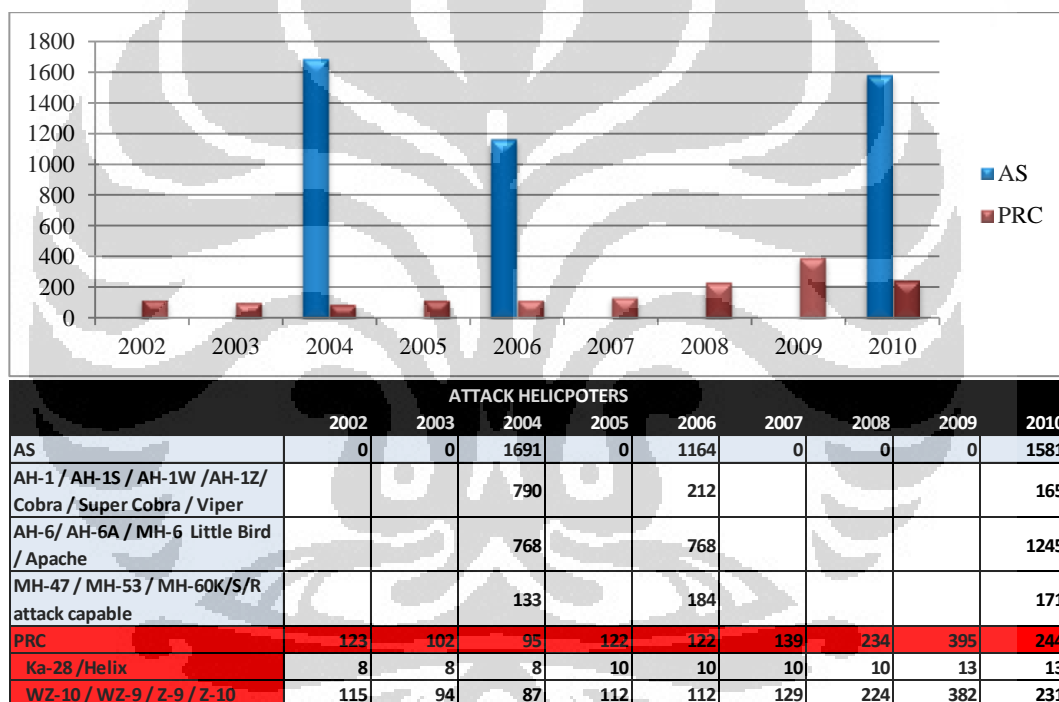
Perbandingan kekuatan kedua negara tersebut di atas, dilengkapi juga dengan kepemilikan misil nuklir dari masing-masing negara. Baik AS dan China

<sup>94</sup> *The Military Balance* dan <http://abcnews.go.com/Blotter/chinese-prototype-stealth-fighter-rival-uss-best-report/story?id=13561596#.T824RIlyZoM>, diakses pada 15 Mei 2012, pukul 13.09.

<sup>95</sup> <http://www.globalsecurity.org/military/world/china/wz-10.htm>, diakses pada 15 Mei 2012, pukul 14.39.

tidak terlalu banyak mempublikasikan secara jelas jumlah misil yang dimilikinya. Informasi mengenai kepemilikan misil China yang didapat dari laporan Departemen Pertahanan AS menyebutkan bahwa pada tahun 2005, China diperkirakan memiliki 729 unit misil dari berbagai jenis, yaitu: CSS-4 dan CSS-3 (*intercontinental ballistic missile / ICBM*), CSS-2 (*intermediate-range ballistic missile / IRBM*), CSS-5 (*medium range ballistic missile/ MRBM*), CSS-6 dan CSS-7 (*short-range ballistic missile/ SRBM*) serta sedang mengembangkan ICBM jenis baru yaitu: DF-31 dan DF-31 A.<sup>96</sup>

**Grafik 3.11:** Perbandingan Jumlah *Attack Helicopter* Milik AS dan China (dalam satuan unit).<sup>97</sup>



Pada tahun 2010, Departemen Pertahanan AS mengeluarkan kembali prediksi kepemilikan misil China, dengan jumlah yang mengalami penurunan. Pada tahun 2010, AS memperkirakan China telah memiliki beberapa jenis misil, sebagai berikut:

- *ICBM*, sebanyak 50-70 misil dan pelucur dengan jarak jangkauan sejauh 5.400 hingga lebih dari 13.000 km,

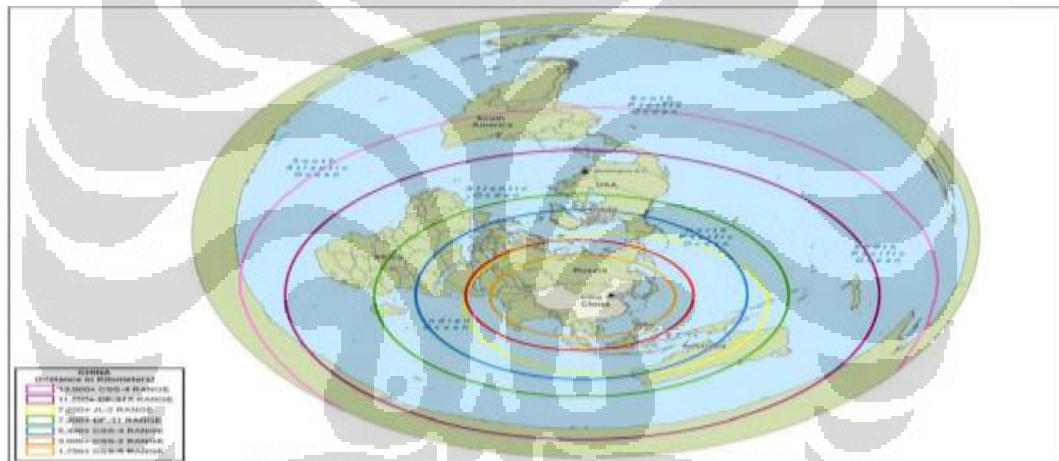
<sup>96</sup> *Annual Reprt to Congress: Military Power of The People's Republic of China 2006, Loc.Cit, halaman 45.*

<sup>97</sup> Data diolah dari *Military Balance 2003 hingga 2010, Op.Cit*

- IRBM sebanyak 5-20 misil dan peluncur, dengan jarak jangkau 3.000 km.
- MRBM, 75-100 misil dan pelucur dengan jarak lebih dari 1.750 km,
- SRBM, dengan jumlah misil sebanyak 1.000-1.200, peluncur sebanyak 200-250, dengan rata-rata jarak jangkau 300-600 km, serta
- *ground-launched ballistic missile (GLCM)*, sebanyak 200-500 misil dengan 40-45 pelucur, dan jarak jangkau 1.500 km.

Laporan ini juga menunjukkan terjadinya peningkatan jarak jangkau dari misil China, yang diperkirakan telah mampu mencakup berbagai wilayah di dunia dengan kepemilikan ICBM jenis terbaru.

**Gambar 3.3:** Cakupan Jarak Misil China.<sup>98</sup>



AS juga mencatat berbagai jenis misil China dalam keadaan aktif dan ditempatkan untuk mampu dan berpotensi menjangkau wilayah Jepang, dan khususnya diarahkan kepada wilayah Taiwan. Jumlah misil yang ditempatkan pada posisi aktif ini, berjumlah lebih dari 1000 unit misil SRBM, yang berarti mencakup hampir keseluruhan SRBM China.<sup>99</sup>

Berbagai data yang tersaji mengenai komparasi kapabilitas militer China dan AS selama periode 2002-2010, dengan begitu dapat disimpulkan bahwa AS selama periode ini masih mengungguli China pada berbagai indikator kapabilitas

<sup>98</sup> *Annual Reprt to Congress: Military and Security Developments Involving The People's Republic of China 2011, Loc.Cit, halaman 35.*

<sup>99</sup> *Ibid.*

militer. Dalam faktor-faktor sumber daya strategis, keunggulan AS terhadap China mencakup: anggaran pertahanan yang lebih besar, penguasaan teknologi industri pertahanan yang masih lebih unggul, serta kualitas personil (sumber daya militer) yang telah dipersiapkan untuk menghadapi era perang informasi. Keunggulan AS juga terjadi pada cakupan strategi yang dimilikinya, dimana AS memiliki area kepentingan di hampir seluruh wilayah dunia. Hal ini juga sejalan dengan keunggulan AS dalam kepemilikan persenjataan dan penempatannya. Untuk sistem persenjataan, secara kualitas AS unggul dalam teknologi seluruh jenis sistem persenjataan, serta mengungguli China dalam hal kuantitas pada persenjataan jenis: ACV, pesawat tempur, kapal perang, kapal selam, hingga helikopter serang.

Di tengah keunggulan yang dimiliki AS, China selama periode 2002-2010 memperlihatkan pula usahanya untuk semakin memperkecil perbedaan kapabilitasnya di hampir seluruh indikator kapabilitas militer. Peningkatan China secara signifikan terjadi dalam hal anggaran pertahanan, perluasan dan intensifikasi industri pertahanan, serta perbaikan kualitas personil militer sebagai modal sumber daya strategis yang dimilikinya. Dalam hal peningkatan kapabilitas konversi, China melakukan perluasan cakupan strategi dan area kepentingannya. Sedangkan dalam hal persenjataan, China saat ini terus melakukan modernisasi sistem persenjataan, dengan memperbarui teknologi pada persenjataan lama, akuisisi persenjataan dengan teknologi baru, baik yang dilakukan melalui industri domestik maupun kerjasama pengadaan senjata dengan negara lain, untuk keseluruhan jenis persenjataannya.

Kondisi ini memungkinkan adanya penurunan kesenjangan kapabilitas militer dari dua negara, yang pola dan tren ini berlangsung semakin intensif hingga akhir tahun 2010. Dimana data-data dari berbagai indikator pada bab tiga ini, juga akan menjadi bahan utama untuk tulisan ini pada analisa bab selanjutnya.



## **BAB IV**

### **ANALISIS KEUNGGULAN DAN DIFERENSIASI OFENSIF-DEFENSIF: SEBAGAI PERTIMBANGAN RESIKO STRATEGI AMERIKA SERIKAT**

Analisa mengenai mengapa strategi keamanan AS semakin memperlihatkan intensitas defensifnya di tengah peningkatan kapabilitas militer China, merupakan fokus utama tulisan pada bab empat ini. Sebagaimana pertanyaan penelitian, tujuan, dan operasionalisasi konsep dari penelitian, maka bab ini akan mengurai kehadiran dilema keamanan sebagai faktor yang dianggap menjadi penyebab peningkatan aksi defensif AS tersebut. Yang sebelumnya akan diawali dengan pembuktian mengenai bagaimana besaran keunggulan ofensif-defensif yang dimiliki AS, serta diferensiasi ofensif-defensif dari China. Bab ini juga merupakan tesis atau argumen utama tulisan ini untuk pengujian hipotesis.

#### **4.1. Penilaian Keunggulan Ofensif-Defensif Amerika Serikat di Tengah Peningkatan Kapabilitas Militer China**

Amerika Serikat (AS) selama periode 2002-2010 secara faktual masih memiliki kapabilitas militer yang lebih unggul dibanding China. Keunggulan ini terlihat dari berbagai indikator kapabilitas militer, khususnya faktor kehandalan tempur dan sumber-sumber daya strategis, yang secara nyata masih berada jauh dari yang dimiliki China. Kondisi ini merupakan pertimbangan utama, yang sebenarnya dapat dimanfaatkan AS, untuk secara politis berhadapan dan menekan posisi China, agar tidak melakukan tindakan dan kebijakan yang berpotensi mengancam kepentingan AS. Meski begitu, pergeseran perbandingan kehandalan tempur dan sumber-sumber strategis kedua negara membawa konsekuensi pada pergeseran keuntungan ofensif-defensif yang dapat mempengaruhi strategi AS.

Keunggulan AS atas faktor-faktor kehandalan tempur terhadap China umumnya terlihat dari kuantitas dan kualitas persenjataan yang dimilikinya. Dari data-data yang berhasil dihimpun dan telah dijabarkan sebelumnya, dapat dikatakan sistem persenjataan konvensional AS masih mengungguli China pada beberapa jenis persenjataan, yang diantaranya adalah:



- *Armoured/Transport Combat Vehicle* – dengan perbandingan jumlah ACV antara China dan AS sebesar 195:1000 di tahun 2003, dan 175:1000 di tahun 2010,
- *Principle Surface Combatants* – dengan perbandingan jumlah kepemilikan China dan AS adalah 524:1000 di tahun 2003, dan 685:1000 di tahun 2010. Keunggulan AS dalam jenis ini juga ditambah dengan kepemilikan 13 unit *aircraft carrier* di 2010,
- *Combat aircraft* – dengan perbandingan jumlah antara China dan AS sebesar 756:1000 di tahun 2003 dan menjadi 511:1000 di tahun 2010, dimana dari jumlah tersebut, kekuatan *combat aircraft* AS didukung sejumlah pesawat dengan teknologi *stealth*, yang teknologi ini masih dalam pengembangan oleh China, serta
- *Attack Helicopter* – yang memiliki perbandingan jumlah 562:1000 di tahun 2003 dan 162:1000 di tahun 2010, antara China dan AS.<sup>1</sup>

Perbandingan keunggulan AS terhadap China pada faktor-faktor kehandalan tempur sepanjang periode 2002-2010, di sisi lain mengalami kemunduran dalam beberapa hal. Dari kepemilikan atas *main battle tank* (MBT), di tahun 2010 kapasitas China berhasil melampaui AS, meskipun secara teknologi sebagian besar teknologi MBT China masih berada di bawah teknologi M1-A1/M1-A2 Abrams MBT milik AS. Hal serupa juga terjadi pada kepemilikan kapal selam peyerang kedua negara yang berada pada kuantitas seimbang pada 2010. Sedangkan dalam hal kepemilikan sistem artileri, meskipun China masih berada di bawah AS dalam kualitas artileri jenis *multiple rocket launcher* dan *self propelled*, namun jumlah keseluruhan artileri China masih berada jauh di atas AS.

Dengan didasari fakta-fakta tersebut, serta berbagai data awal penelitian, berupa jumlah kepemilikan senjata AS dan China, pada bagian ini akan dipaparkan perbandingan dan perubahan kekuatan kedua negara. Perbandingan ini, bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AS memiliki keunggulan ofensif- maupun defensif secara faktual di periode 2002-2010, yang dengan begitu menggambarkan secara umum perbedaan kehandalan tempur kedua negara.

<sup>1</sup> Data lengkap perbandingan kedua negara tercantum dalam penjabaran bab 3 tulisan ini pada halaman 90-104. Data-data ini diolah dari sumber *The Military Balance* tahun 2002-2011.

Pengukuran keunggulan ofensif-defensif yang paling utama adalah dengan pengukuran kehandalan tempur, dengan menggunakan instrumen berbasis kekuatan di setiap matra pada angkatan bersenjata masing-masing negara. Instrumen ini dibangun dengan menggunakan beberapa asumsi. *Pertama*, perbandingan di setiap matra sesuai dengan esensi kemampuan tempur yang dijelaskan oleh Telis dan Layne.<sup>2</sup> *Kedua*, instrumen yang dibangun dikategorisasikan kedalam kategori senjata dan jenis senjata. *Ketiga*, penilaian indeks pada masing-masing kategori, didasari pada besaran pentingnya masing-masing elemen dalam kategori, serta dengan mempertimbangkan penilaian atas variabel-variabel materil yang dikemukakan Van Evera. Variabel ini meliputi: daya ledak, mobilitas, dan daya pelindung.<sup>3</sup> Selain itu, penilaian ini tidak melibatkan perhitungan senjata dan misil nuklir yang dimiliki kedua negara.

Penilaian atas variabel-variabel materil, jenis dan kategori senjata, serta penilaian pentingnya kekuatan matra secara teknis dilakukan dengan memberikan nilai indeks dari masing-masing kategori tercantum. Beberapa hal penting dari instrumen pengukuran ini adalah:

- *Indeks* - pada setiap kategori ditetapkan dengan total nilai penjumlahan maksimal yaitu 1,00 (100%),
- *Jumlah* adalah besaran kuantitas persenjataan pada masing-masing kategori, maupun sub kategori,
- *Skor Jenis* adalah total perkalian indeks dengan jumlah senjata, atau dapat disebutkan sebagai berikut: “**Skor Indeks = Indeks Matra x Indeks Kategori Senjata x Indeks Jenis Senjata x Jumlah**”, sedangkan
- *Total kekuatan* di setiap tahunnya adalah sigma dari perkalian jumlah senjata total di setiap matra dengan skor jenis di setiap matra. Lihat

Dengan penentuan instrumen tersebut maka dapat diperhitungkan kekuatan AS pada periode 2002-2010 sebagai berikut:

<sup>2</sup> Kemampuan tempur dijelaskan Telis dan kawan-kawan sebagai kemampuan militer dalam menjalankan operasi *anti-submarine warfare*, kemampuan pertahanan tepi pantai, kemampuan menghalau serangan udara; hingga kemampuan menguasai laut, darat dan udara; dan operasi lainnya. Dimana hal ini erat kaitannya dengan kemampuan di tiap matra. Ashley J. Tellis, Janice Bially, Christopher Layne, Melissa McPherson; “*Measuring National Power in the Postindustrial Age*” (RAND: 2000), halaman 158-159.

<sup>3</sup> Variabel dari Van Evera yang tidak dipehitungkan adalah modern atau tidaknya senjata. Stephen Van Evera, “Offense, Defense, and the Causes of War”. *International Security*, Volume 22, Number 4 (Spring-1998).Massachusetts: MIT Press, halaman 17.

Tabel 4.1: Perhitungan Kekuatan Amerika Serikat.<sup>4</sup>

Matra	Kategori Senjata	Jenis Senjata	2003		2006		2010	
			Jumlah	Skor Jenis	Jumlah	Skor Jenis	Jumlah	Skor Jenis
UDARA (0.4)	Combat Air Craft (0.7)	Attack (0.1)	895	25.06	461	12.908	389	10.892
		Bomber (o.2)	203	11.368	180	10.08	155	8.68
		Fighter (0.35)	2404	235.59	583	57.134	609	59.682
		Fighter Ground Attack (0.35)	3001	294.1	2749	269.402	2585	253.33
	Attack Helicopter (0.3)	Attack Helicopter (1.00)	1479	177.48	1107	132.84	3825	459
<b>TOTAL</b>			<b>7982</b>	<b>743.6</b>	<b>5080</b>	<b>482.364</b>	<b>7563</b>	<b>791.584</b>
LAUT (0.3)	Surface Combatant (0.4)	Cruiser (0.15)	27	0.486	22	0.396	22	0.396
		Aircraft Carrier (0.35)	12	0.504	12	0.504	11	0.462
		Destroyer (0.15)	49	0.882	50	0.9	59	1.062
		Frigates (0.2)	30	0.72	30	0.72	22	0.528
		Littoral Combat Ship (0.15)	0	0	1	0.018	1	0.018
	Submarine (0.6)	Attack Submarine Diesel, Non-Ballistic Missile Launchers (0.1)	0	0	0	0	0	0
		Attack Submarine Nuclear Powered (0.25)	54	2.43	54	2.43	53	2.385
		Ballistic-Missile Submarine Nuclearfuelled (0.4)	18	1.296	14	1.008	14	1.008
		Patrol Submarine With ASW (Anti-Submarine Warfare) Capability (0.15)	0	0	0	0	0	0
		SSN with dedicated non- ballistic missile launchers (0.1)	0	0	4	0.072	4	0.072
		<b>TOTAL</b>	<b>190</b>	<b>6.318</b>	<b>187</b>	<b>6.048</b>	<b>186</b>	<b>5.931</b>
DARAT (0.3)	Battle Tank (0.50)	MBT (1.00)	8023	1203.5	8023	1203.45	6242	936.3
	ACV (0.2)	Amphibious Assault Vehicle (0.4)	1311	31.464	1311	31.464	1311	31.464
		Armoured Infantry Fighting Vehicle (0.4)	6719	161.26	6719	161.256	6452	154.848
		Armoured Personnel Carrier (0.2)	14900	178.8	16008	192.096	22106	265.272
		Combined Gun (0.25)	0	0	0	0	0	0
	Artillery (0.3)	Multiple Rocket Launcher (0.25)	830	18.675	830	18.675	1054	23.715
		Self Propelled (0.35)	4985	157.03	4985	157.028	4492	141.498
		Towed (0.15)	2956	39.906	2956	39.906	3555	47.9925
	<b>TOTAL</b>			<b>39724</b>	<b>1790.6</b>	<b>40832</b>	<b>1803.87</b>	<b>45212</b>
			47896	2540.5	46099	2292.29	52961	2398.6
<b>Kekuatan AS</b>			<b>121679524.6</b>		<b>105672115.4</b>		<b>127032492.9</b>	

<sup>4</sup> Lihat Lampiran 12. Data ini diolah oleh penulis dari sumber "The Military Balance" 2003-2011, *Op.Cit.*

Tabel 4.2: Perhitungan Kekuatan China.<sup>5</sup>

Matra	Kategori Senjata	Jenis Senjata	2003		2006		2010	
			Jumlah	Skor Jenis	Jumlah	Skor Jenis	Jumlah	Skor Jenis
UDARA (0.4)	Combat Air Craft (0.7)	Attack (0.1)	0	0	0	0	0	0
		Bomber (0.2)	352	19.712	352	19.712	132	7.392
		Fighter (0.35)	1525	149.45	1525	149.45	1070	104.86
		Fighter Ground Attack (0.35)	1538	150.72	1538	150.724	571	55.958
	Attack Helicopter (0.3)	Attack Helicopter (1.00)	31	3.72	31	3.72	379	45.48
<b>TOTAL</b>			<b>3446</b>	<b>323.61</b>	<b>3446</b>	<b>323.606</b>	<b>2152</b>	<b>213.69</b>
LAUT (0.3)	Surface Combatant (0.4)	Cruiser (0.15)	0	0	0	0	0	0
		Aircraft Carrier (0.35)	0	0	0	0	0	0
		Destroyer (0.15)	21	0.378	28	0.504	13	0.234
		Frigates (0.2)	42	1.008	48	1.152	65	1.56
		Littoral Combat Ship (0.15)	0	0	0	0	0	0
	Submarine (0.6)	Attack Submarine Diesel, Non-Ballistic Missile Launchers (0.1)	1	0.018	1	0.018	1	0.018
		Attack Submarine Nuclear Powered (0.25)	5	0.225	4	0.18	6	0.27
		Ballistic-Missile Submarine Nuclearfuelled (0.4)	1	0.072	1	0.072	3	0.216
		Patrol Submarine With ASW (Anti-Submarine Warfare) Capability (0.15)	62	1.674	57	1.539	61	1.647
		SSN with dedicated non- ballistic missile launchers (0.1)	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>			<b>132</b>	<b>3.375</b>	<b>139</b>	<b>3.465</b>	<b>149</b>
DARAT (0.3)	Battle Tank (0.50)	MBT (1.00)	7580	1137	7580	1137	7050	1057.5
	ACV (0.2)	Amphibious Assault Vehicle (0.4)	0	0	0	0	0	0
		Armoured Infantry Fighting Vehicle (0.4)	1000	24	1000	24	2390	57.36
		Armoured Personnel Carrier (0.2)	3560	42.72	3560	42.72	2948	35.376
	Artillery (0.3)	Combined Gun (0.25)	100	2.25	100	2.25	150	3.375
		Multiple Rocket Launcher (0.25)	2400	54	2400	54	1770	39.825
		Self Propelled (0.35)	1224	38.556	1224	38.556	2026	63.819
		Towed (0.15)	14000	189	14000	189	6396	86.346
<b>TOTAL</b>			<b>29864</b>	<b>1487.5</b>	<b>29864</b>	<b>1487.53</b>	<b>22730</b>	<b>1343.6</b>
			33442	1814.5	33449	1814.6	25031	1561.24
<b>Kekuatan China</b>			<b>60680743.09</b>		<b>60696455.05</b>		<b>39079298.32</b>	

<sup>5</sup> *Ibid.*

Perhitungan di atas memperlihatkan bahwa AS selama periode 2003-2010, secara umum menunjukkan terjadinya peningkatan, meski pada periode 2003-2006 mengalami penurunan. Secara rinci, kekuatan AS pada keseluruhan periode ini dipengaruhi oleh penurunan kekuatan persenjataan laut, serta peningkatan kekuatan pada persenjataan udara dan darat. Berbeda dari yang dialami AS, maka kekuatan China antara tahun 2003-2006 justru mengalami peningkatan, meskipun terjadi penurunan di 2010. Hal ini disebabkan oleh terjadinya pengurangan inventori persenjataan artileri, dan pergantian sejumlah pesawat tempur China. Dari data yang tersaji juga dapat disimpulkan terjadinya peningkatan signifikan pada kekuatan angkatan laut China.

Dari data perhitungan total kekuatan di atas, kemudian dapat dihasilkan pola perbandingan kekuatan kedua negara. Pola perbandingan kekuatan dapat dihitung dengan membagi nilai total kekuatan China dengan nilai total kekuatan AS pada masing-masing tahun (**perbandingan kekuatan China dan AS = total kekuatan China : total kekuatan AS**). Karenanya pada periode ini, khususnya di tahun 2003, 2006, dan 2010, pola perbandingan kekuatan kedua negara adalah:

**Tabel 4.3:** Perbandingan kekuatan China dan Kekuatan Amerika Serikat

	2003	2006	2010
Kekuatan China	60680743.1	60696455.1	39079298.3
Kekuatan AS	121679525	105672115	127032493
<b>Perbandingan Kekuatan China terhadap AS</b>	<b>0.49869313 (498:1000)</b>	<b>0.57438478 (574:1000)</b>	<b>0.3076323 (308:1000)</b>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa ditengah peningkatan kapabilitas China yang terjadi, pada hingga tahun 2006 China dapat memperkecil perbandingan kekuatannya dengan AS. Tetapi menjelang tahun 2010, perbandingan kekuatan ini kembali membesar dikarenakan peningkatan kekuatan yang dilakukan AS, serta penurunan kekuatan yang terjadi di China. Membesarnya perbandingan kekuatan akibat penurunan kekuatan China ini, sekali lagi tidak dapat dipandang sebagai penurunan kekuatan China, dikarenakan kenyataan bahwa pada tahun 2010, China tengah melakukan proses peremajaan atau modernisasi sistem persenjataannya, serta masih melakukan peningkatan produksi dan pengembangannya. Hal ini berpotensi untuk kembali merubah nilai perbandingan

kekuatan kedua negara dalam waktu beberapa tahun kedepan, diantaranya dengan hampir rampungnya pengembangan *aircraft carrier* China, serta pesawat-pesawat tempur *stealth* seperti generasi J-XX dan lainnya.

Meski AS dapat meningkatkan memperbesar perbandingan kekuatannya dengan China di tahun 2010, indikator kehandalan tempur, yang juga berarti memperbesar keuntungan ofensif tidak serta merta membuat AS melakukan tindakan tersebut. Fakta-fakta mengenai potensi China kedepannya, dan berbagai fakta lainnya lain menunjukkan kemampuan China untuk mengejar ketertinggalannya. Fakta yang memperkuat argumen ini adalah kenyataan bahwa China yang awalnya hanya mendominasi kekuatannya melalui keunggulan kuantitas dari persenjataan artileri dan *tank*, mampu mampu mengurangi *gap* kuantitas persenjataan yang dimilikinya terhadap AS, di hampir seluruh jenis sistem persenjataan konvensional. Perhitungan mengenai tren kesenjangan kuantitas persenjataan kedua negara dapat disimpulkan sebagai berikut:

**Tabel 4.4:** Data Perbedaan Jumlah Persenjataan China terhadap AS tahun 2003-2010.<sup>6</sup>

	Persentase Jumlah Senjata China terhadap AS		Perubahan Persentase Jumlah Senjata	Tingkat Kenaikan atau Penurunan
	2003	2010		
<i>Combat Aircraft</i>	75.56	51.11	24.45	32.36
<i>Attack Helicopter</i>	5.62	15.43	-9.82	-174.71
<i>Main Battle Tank</i>	94.48	112.94	-18.47	-19.55
<i>Submarine</i>	95.83	100.00	-4.17	-4.35
<i>Principle Surface Combatants</i>	53.39	68.42	-15.03	-28.15
<i>ACV</i>	19.47	17.53	1.94	9.97
<i>Artillery</i>	261.93	254.47	7.46	2.85

<sup>6</sup> Dalam menghitung selisih jumlah persenjataan, besaran persentase dianggap lebih tepat dalam menjelaskan perbedaan kekuatan AS dan China, dibandingkan selisih secara nominal. Data pada tabel 4.1 ini diolah dari data indikator *combat proficiency* pada bab sebelumnya. Persentase jumlah senjata China terhadap AS dihitung berdasarkan persen dari senjata yang dimiliki China dibagi dengan senjata yang dimiliki AS. Perubahan persentase jumlah senjata merupakan selisih persentase pada tahun 2003 dikurangi persentase tahun 2010. Sedangkan Tingkat kenaikan dan penurunan, merupakan persentase *growth* perubahan persentase jumlah senjata tahun 2003 dan 2010. Sumber data “*The Military Balance*” 2004 dan 2011.

Perhitungan mengenai persentase perbandingan kuantitas persenjataan tersebut, memuat informasi berguna bagi tulisan ini. *Pertama*, China selama periode ini mampu menurunkan kesenjangan kuantitas di hampir semua jenis persenjataan yang dimilikinya terhadap AS. Dari perhitungan selisih persentase kuantitas persenjataan China terhadap AS; didapati bahwa perbedaan senjata jenis *attack helicopter*, MBT, *submarine* dan *principle surface combatants* mengalami penurunan sebesar masing-masing 9,82%, 18,47%, 4,17%, dan 15,03%. Meskipun untuk jenis persenjataan lainnya seperti *combat aircraft*, ACV, dan artileri, *gap* kekuatan kedua negara justru membesar, hal ini dikarenakan ditengah peningkatan yang dilakukan China, di sisi lain AS juga melakukan peningkatan pada jenis persenjataan yang sama dengan percepatan yang lebih besar. *Kedua*, penurunan kesenjangan kuantitas persenjataan ini terjadi pada senjata-senjata yang bersifat ofensif, yang dengan begitu menunjukkan peningkatan kemampuan ofensif China serta penurunan kemampuan ofensif AS. *Ketiga*, kemajuan tersebut berlaku pada senjata-senjata yang mendukung kekuatan matra laut dan udara China, yang hal ini menggambarkan peningkatan potensi China untuk bersaing dengan AS pada kedua matra tersebut. Serta *keempat*, dengan mengingat tingkat perubahan yang dapat dilakukan China dalam mempersempit kesenjangan kuantitas persenjataan jenis *attack helicopter*, MBT, *submarine* dan *principle surface combatant* yang berada pada besaran 4,35% hingga 174,71%; maka dapat dikatakan bahwa China tidak hanya melakukan peningkatan, tetapi juga melakukan percepatan peningkatan untuk menutupi ketertinggalannya. Besaran kuantitas persenjataan kedua negara bahkan akan berada pada posisi yang sama kedepannya, jika AS tidak mampu memperbesar tingkat perbedaan tersebut.

Oleh karena itu, dengan melihat berbagai data perbandingan kekuatan dan percepatan peningkatan China dalam mengembangkan sistem persenjataannya yang berimpikasi pada peningkatan kehandalan tempur yang dimiliki, potensi AS untuk melakukan tindakan ofensif terhadap China menurun. Argumen ini sejalan dengan pendapat Jervis mengenai *offense-defense advantage* yang dimiliki negara. Bagi Jervis aksi ofensif akan menguntungkan hanya jika negara memiliki dengan mudah dan efektif memiliki kemampuan untuk menyerang yang lebih besar dari kemampuannya untuk bertahan, sebagaimana disebutkan:

*“offense has the advantage... mean that it is easier to destroy the other's army and take its territory than it is to defend one's own. When the defense has the advantage, it is easier to protect and to hold than it is to move forward, destroy, and take. If effective defenses can be erected quickly, an attacker may be able to keep territory he has taken in an initial victory.”<sup>7</sup>*

Karenanya, tindakan ofensif AS terhadap China merupakan sesuatu hal yang sangat sulit untuk dikatakan terjadi. Penurunan intensitas potensi ofensif AS dalam periode 2002-2010 khusus pada variabel kehandalan timur, dengan begitu dapat disimpulkan bahwa dengan komposisi perbandingan kekuatan kedua negara yang relatif tidak besar (308:1000 hingga 574: 1000), percepatan peningkatan pengembangan sistem persenjataan China, menjadikan AS sulit melakukan tindakan agresif dan ofensif terhadap China secara cepat dan mudah. Bahkan dengan memperhitungkan logika Jervis mengenai konsekuensi spiral, tindakan maupun munculnya intensitas ofensif AS dapat memicu China secara reaktif melakukan peningkatan yang lebih besar, sehingga semakin memperkecil perbandingan kekuatan kedua negara. Bahkan hal ini dapat memicu perlombaan senjata dan konflik, jika yang semakin sulit untuk dimenangkan AS. Hal ini mempertegas jawaban pertanyaan penelitian ini mengenai bagaimana strategi AS terhadap China, tidak serta merta akan membuat AS bertindak agresif dan ofensif, baik dalam tataran normatif seperti pernyataan-pernyataan negara, maupun secara praktis melalui aksi dan operasi militer yang akan memicu konflik.

Faktor-faktor lain berpotensi untuk menjadi pertimbangan atas pembuktian penurunan keunggulan ofensif yang dimiliki AS. Peningkatan China pada faktor lainnya yakni sumber daya strategis menjadi krusial dalam menentukan keunggulan ofensif dan defensif bagi AS, dikarenakan hubungannya dengan peningkatan *power* China secara relatif dibandingkan dengan AS, maupun dalam mempengaruhi keberlangsungan dan percepatan modernisasi angkatan militer PLA yang berarti berpotensi untuk kembali memperbesar kemampuan tempur yang dimiliki China.

Pada industri pertahanan, China telah mencatatkan berbagai kemajuan baik dalam kemampuannya untuk meningkatkan produksi sebesar lebih dari 19%,

<sup>7</sup> Robert Jervis, “Cooperation under the Security Dilemma”, *World Politics* Vol. 30 No. 2 (Cambridge University Press: Januari 1978), halaman 187-188.



perdagangan lebih dari 14% sejak 2002, serta keuntungan bersih sebesar lebih dari 21,6% sejak 2005; maupun dilihat dari keberhasilannya menjadi salah satu yang terbesar di dunia dalam cakupan produksi persenjataan hingga teknologi luar angkasa.<sup>8</sup> Selain itu, intensifnya pengembangan teknologi pertahanan dikarenakan pencapaian China sebagai salah satu negara dengan industri pertahanan terbesar di dunia, yang didukung korporasi-korporasi komersial China seperti seperti Huawei, Datang, dan Zhongxing;<sup>9</sup> serta kerjasama dengan berbagai negara seperti Rusia dan Israel, menjadikan China memiliki modal yang cukup dalam konteks perhitungan kemungkinan terjadinya konflik dengan AS. Keunggulan China ini erat kaitannya untuk memperbesar daya produksi kekuatan militernya, baik dalam konteks melakukan *recovery* jika terjadinya konflik, maupun dalam konteks persaingan senjata.

Tidak hanya itu, pertumbuhan industri pertahanan tersebut juga didukung pencapaian perekonomian China selama 2002-2010 yang berimplikasi pada kenaikan anggaran pertahanan China, yang dapat dimanfaatkan sebagai modal paling vital dalam pertahanannya. Potensi China dalam hal ini semakin diperbesar dengan kenyataan bahwa China tidak hanya merupakan negara dengan pertumbuhan anggaran baik secara persentase maupun nominal terbesar kedua di dunia, tetapi di sisi lain juga menjadi salah satu negara dengan peningkatan anggaran pertahanan yang selalu positif. Terlebih, peningkatan anggaran pertahanan China secara nominal yang besar tersebut, justru bersumber dari *share* terhadap anggaran terhadap GDP maupun anggaran pertahanan pemerintah yang relatif kecil dibandingkan negara lainnya di dunia.

Pertimbangan tersebut menjadi vital dalam penentuan strategi AS, khususnya dalam memperhitungkan kondisi anggaran pertahanan China. Persentase anggaran China terhadap GDP masih berada dibawah 2%, dan sekitar 5%-8% dari anggaran belanja pemerintah yang persentase ini relatif menurun, mampu menghasilkan rata-rata peningkatan nominal anggaran pertahanan China sebesar 20,07%. Kondisi ini menjadikan China memiliki potensi untuk menaikkan

<sup>8</sup> Richard A. Bitzinger, “*The Prc's Defense Industry: Reform Without Improvement*” (The JamesTown Foundation). [http://www.jamestown.org/single/?no\\_cache=1&tx\\_ttnews\[tt\\_news\]=3726](http://www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=3726), diakses pada 10 Mei 2012, pukul 16.11.

<sup>9</sup> *Annual Reprt to Congress: Military and Security Developments Involving The People's Republic of China 2010*,, halaman 43.

persentase tersebut ketika terjadinya konflik dan persaingan dengan AS, bahkan dengan sangat mudah. Potensi China menaikkan persentase anggaran pertahanannya juga berada dalam level yang masih aman bagi China, tanpa harus mempertaruhkan keberlangsungan aspek kehidupan negara lainnya. Sedangkan AS yang mengalokasikan 4%-6% GDP dan 21%-24% anggaran belanja negara untuk anggaran pertahanan serta selalu dalam kondisi meningkat, justru hanya mampu menghasilkan rata-rata pertumbuhan anggaran pertahanan sebesar 9,94%. Berbeda dengan keuntungan yang dimiliki China, maka AS tidak lagi memiliki kesempatan untuk menaikkan anggaran pertahanannya dalam kondisi konflik maupun persaingan dengan China, karena hal ini akan merusak keberlangsungan aspek kehidupan negara AS secara domestik. Dimana anggaran pertahanan AS telah menjadi yang terbesar dari anggaran belanja negara lainnya atau lebih dari 20%, serta dengan memperhitungkan kondisi defisit anggaran negara serta hutang AS yang sangat besar menjelang tahun 2010.

Berbagai kondisi pencapaian China dengan begitu dapat disimpulkan bahwa dari kedua faktor tersebut China memiliki potensi untuk menekan keuntungan ofensif dari aksi atau strategi yang akan dibangun AS. Dalam keadaan terburuk ketika AS memiliki keinginan untuk meningkatkan intensitas strateginya ke arah ofensif, AS harus mempertimbangkan bahwa China memiliki potensi yang besar dan relatif sama untuk meningkatkan kapabilitas ofensif serupa. *Pertama*, China dalam hal ini berpotensi untuk menaikkan persentase anggaran pertahanannya secara insidental menjadi sejajar atau bahkan lebih besar dari yang ditetapkan AS. Konsekuensi *kedua* yang berpotensi hadir adalah munculnya potensi yang agresif dari China untuk secara lebih efektif dan efisien memobilisasi seluruh sumber daya yang ada guna memperbesar produksi industri pertahanannya, dengan keunggulan industri masal biaya murah. Hal ini bahkan menjadi kian dilematis, jika dalam praktiknya China turut memobilisasi sumber daya manusia yang dimilikinya, baik untuk intensifikasi industri pertahanan, maupun menaikkan kembali kekuatan angkatan bersenjata yang dimilikinya.

Konsekuensi tersebut tidak hanya berlaku pada periode 2002-2010, tetapi mencakup pula pada pertimbangan pola hubungan kedua-negara di waktu yang akan datang. Dari fakta yang dihimpun dengan memperhitungkan tingkat

pertumbuhan baik GDP maupun anggaran pertahanan kedua negara, serta dalam kondisi indikator-indikator lainnya yang relatif tetap, dapat disimpulkan bahwa China memiliki potensi untuk berada dalam posisi yang sama dengan AS dalam indikator GDP dan anggaran pertahanan pada tahun 2020-2021 serta 2022-2034.

Hasil perhitungan proyeksi memperlihatkan pada tahun GDP China yang pada tahun 2021 sebesar US\$18,2 trilyun akan melampaui GDP AS yang sebesar US\$17,5 trilyun pada tahun yang sama. Sedangkan anggaran pertahanan China diprediksi akan melampaui AS pada tahun 2034, dimana pada tahun tersebut anggaran pertahanan China akan mencapai US\$ 6,2 trilyun (dengan perhitungan yang di dasari pertumbuhan rata-rata anggaran pertahanan) atau sebesar US\$ 970,3 milyar (jika didasari perhitungan dari rata-rata % anggaran pertahanan terhadap GDP yang sebesar 1,49%, yang merupakan angka yang lebih rasional dalam menjelaskan proyeksi peningkatan anggaran pertahanan China).

**Tabel 4.5:** Pertumbuhan Anggaran Pertahanan dan GDP AS dan China  
(faktual dan proyeksi).<sup>10</sup>

	2002	2006	2010	2020	2021	2033	2034
<b>Anggaran Pertanan China (Milyar US\$)</b>	31.7	56.7	119.4	620.5	731.7	5288.4	6236.0
<b>Anggaran Pertahanan AS (Milyar US\$)</b>	356.7	527.7	698.3	1716.2	1877.6	5523.9	6043.6
<b>Selisih (AS-CHINA) - US\$</b>	325.1	470.9	578.9	1095.7	1146.0	235.5	-192.3
<b>% (AS/CHINA)</b>	1126.7	930.1	585.0	276.6	256.6	104.5	96.9
<b>GDP China (Trilyun US\$)</b>	1.5	2.7	5.9	16.4	18.2	61.8	68.4
<b>GDP AS (Trilyun US\$)</b>	10.6	13.3	14.6	17.2	17.5	21.3	21.7
<b>Selisih (AS-CHINA) - US\$</b>	9.1	10.6	8.7	0.8	-0.7	-40.4	-46.7
<b>% (AS/CHINA)</b>	728.4	491.6	246.1	104.8	96.2	34.6	31.7

Kondisi ini juga menjadi salah satu penentu dalam pertimbangan strategi keamanan AS, dimana sebagaimana dikemukakan Dueck bahwa strategi keamanan merupakan pertimbangan yang dilakukan negara bukan hanya atas segala kondisi yang terjadi saat ini, namun juga terhadap kondisi yang dihadapi di waktu yang akan datang. Pertimbangan ini mempengaruhi bagaimana AS ke-

<sup>10</sup> Untuk anggaran pertahanan perhitungan didasari oleh rata-rata *growth* anggaran pertahanan AS sebesar 9.41% per tahun dan China sebesar 17.92% per tahun. Sedangkan dalam perhitungan GDP didasari pada rata-rata *growth* GDP AS sebesar 1,67% per tahun dan China sebesar 10.73% per tahun. Data diolah dari sumber data dalam <http://www.worldbank.org/>, diakses pada 28 April 2012, pukul 23.00

depannya akan mempersepsikan peningkatan kekuatan suatu negara sebagai ancaman, dan bagaimana negara mengerahkan sumber daya yang dimilikinya untuk menghadapi ancaman tersebut.<sup>11</sup> Yang dengan begitu, AS juga harus mempertimbangkan kemungkinan pergeseran potensi keunggulan ofensif dan defensifnya terhadap China di waktu yang akan datang. Bagaimana pemahaman peningkatan China kemudian juga memunculkan pertimbangan sebagaimana dapat disimpulkan dari penjelasan Barry Buzan, bahwa bahwa dalam kondisi negara revisionis yang akan selalu menekan kekuatan dominan, yang mana negara *status quo* akan berusaha untuk mempertahankan posisinya.<sup>12</sup> Dimana dengan proyeksi tersebut dan fakta mengenai anggaran dan industri China yang tumbuh secara progresif, besar kemungkinan ambang keduanya dalam posisi *break even*, akan menjadi lebih cepat dari proyeksi tersebut. Hal ini terjadi khususnya jika aksi dan strategi AS dianggap dan dipersepsikan mengancam oleh China, sehingga akan memicu perilaku serupa.

Dengan pertimbangan-pertimbangan indikator peningkatan kapabilitas militer China tersebut, dapat disimpulkan bahwa sepanjang periode 2002-2010 opsi untuk menggunakan strategi dan melakukan aksi yang bersifat defensif akan lebih menguntungkan bagi AS. Hal ini tidak hanya disebabkan akibat penurunan tingkat keunggulan ofensif yang dimiliki AS terhadap China, termasuk dengan mempertimbangkan besarnya resiko tindakan ofensif saat ini maupun di masa yang akan datang.

#### **4.2. Penilaian Diferensiasi Ofensif Defensif dari Peningkatan Kapabilitas Militer China 2002-2010**

Penilaian mengenai *offense-defense differentiation* dari peningkatan kapabilitas militer China tahun 2002-2010, juga tidak dapat dipisahkan dari analisis mengenai strategi AS. Penilaian ini berfungsi untuk menganalisis apakah senjata, strategi dan faktor material lain yang dimiliki China dapat dibedakan karakter ofensif dan defensifnya, serta melihat apakah kemungkinan variabel-

<sup>11</sup> Lihat Colin Dueck, *Reluctant Crusaders: Power, Culture, And Change In American Grand Strategy* (Princeton University Press: 2006), halaman 40-50.

<sup>12</sup> Barry Buzan, *People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era*, 2<sup>nd</sup> ed (Harvester Wheatsheaf: 1991), halaman 299.

variabel peningkatan kapabilitas yang berfungsi untuk tujuan pertahanan China, juga memiliki kemampuan untuk menyerang. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan Jervis yang menyebutkan:

*“The other major variable that affects how strongly the security dilemma operates is whether weapons and policies that protect the state also provide the capability for attack”.*<sup>13</sup>

Yang kemudian ditambahkan oleh Jervis bahwa pada dasarnya setiap strategi maupun senjata memiliki kemampuan ofensif maupun defensif, yang dengan begitu intensitas ini akan bergantung pada bagaimana penggunaan senjata dan strategi yang diterapkan negara dalam kondisi tertentu.<sup>14</sup>

Secara umum, intensitas ofensif dan defensif yang menyertai peningkatan kapabilitas militer China sulit untuk dibedakan. Baik pada variabel *strategic resources, converton capability, hingga combat proficiency*. Hal ini umumnya dipicu oleh fakta terjadinya peningkatan cukup besar pada berbagai variabel tersebut, namun dengan disertai tidak jelasnya tujuan aksi dan operasional militer China, maupun laporan-laporan normatif yang dipublikasikan.

Tidak transparannya peningkatan anggaran pertahanan China merupakan salah satu faktor yang sering dikeluhkan oleh pemerintah AS. Pemerintah China didalam publikasi *Defense White Paper* selama tahun 2002-2010, menyebutkan bahwa kenaikan anggaran pertahanan merupakan hal yang tidak dapat dielakan dengan mempertimbangkan berbagai tujuan. Yang pemerintah China sebut sebagai pembiayaan untuk: personil dan sistem pengaman sosial, reformasi di tubuh PLA, kerjasama dan aksi internasional, serta pelatihan personil militer.<sup>15</sup> Bagi pemerintah China kenaikan anggaran pertahanan yang disesuaikan dengan kemajuan ekonomi, telah menunjukkan komitmen China untuk tidak bergerak ke arah yang lebih ofensif. Hal ini didukung dari data-data yang dihimpun, yang memperlihatkan anggaran pertahanan China mengalami

<sup>13</sup> Robert Jervis, “Cooperation under the Security Dilemma”, *Loc.Cit*, halaman 200.

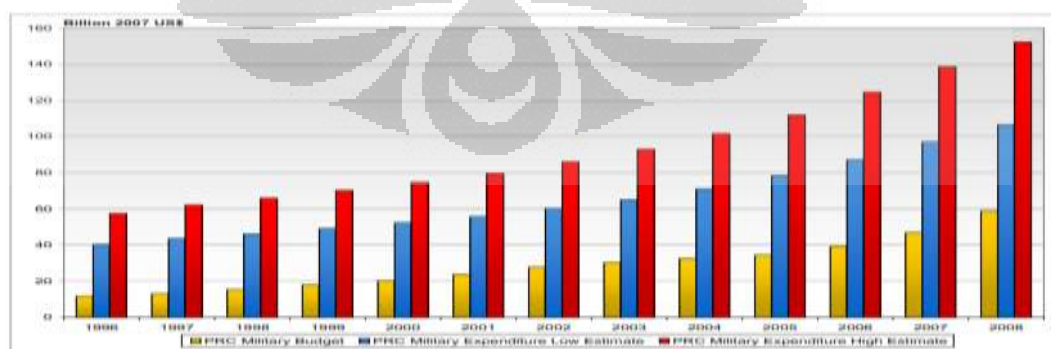
<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Lihat *China’s Defense White Paper* 2002, 2004, 2006, 2008, dan 2010. <http://china.org.cn/e-white/20021209/IV.htm#4>, diakses pada 23 April 2012, pukul 19.24. <http://china.org.cn/e-white/20041227/IV.htm#1>, diakses pada 23 April 2012, pukul 17.56. <http://www.china.org.cn/english/features/book/194470.htm>, diakses pada 22 April 2012, pukul 13. 24. [http://www.china.org.cn/government/whitepaper/2009-01/21/content\\_17162799.htm](http://www.china.org.cn/government/whitepaper/2009-01/21/content_17162799.htm), diakses pada 22 April 2012, pukul 13.01. [http://news.xinhuanet.com/english2010/china/2011-03/31/c\\_13806851\\_32.htm](http://news.xinhuanet.com/english2010/china/2011-03/31/c_13806851_32.htm), diakses pada 21 April 2012, pukul 03.02.

penurunan dilihat dari presentase terhadap GDP dan anggaran belanja negara. Dimana persentase anggaran pertahanan China terhadap GDP mengalami penurunan dari 1,62% di tahun 2002, menjadi 1,34% di tahun 2010. Hal serupa juga terjadi pada presentase anggaran pertahanan China terhadap Anggaran belanja negara, yang turun dari 8,03% menjadi 5,81% dalam periode yang sama.<sup>16</sup>

Komitmen China untuk menekan persentase anggaran pertahanan terhadap GDP ternyata, sangat kontras dengan fakta pertumbuhan anggaran pertahanan secara nominal relatif meningkat secara tajam. Hal ini bahkan menjadi perhatian AS yang menyebutkan China tidak transparan dalam sistem penganggaran dan publikasi pelaporannya. Departemen pertahanan Amerika Serikat melalui laporannya setiap tahun, mencatat anggaran pertahanan China tidak menyertai alokasi-alokasi seperti: pembelian senjata dari luar negeri (contohnya anggaran belanja senjata dari Rusia senilai lebih dari US\$ 3 milyar), biaya tambahan bagi paramiliter, proyek senjata dan hulu ledak nuklir, subsidi bagi industri pertahanan, beberapa proyek penelitian dan pengembangan pertahanan, serta kontribusi tambahan bagi operasional angkatan bersenjata di tingkat lokal, propinsi, maupun regional.<sup>17</sup> Selain itu, anggaran China tidak secara eksplisit menjelaskan alokasi bagi masing-masing angkatan laut, udara, dan darat PLA. Departemen pertahanan AS bahkan mengidentifikasi anggaran pertahanan China pertahunnya dapat mencapai lebih dari 200% dari yang dilaporkan.

**Grafik 4.1:** Estimasi Departemen Pertahanan AS terhadap Besaran Anggaran Pertahanan China 1996-2008.<sup>18</sup>



<sup>16</sup> <http://www.worldbank.org/>, Loc. Cit.

<sup>17</sup> Lihat US Secretary of Defense, “*Annual Reprt to Congress: Military Power of The People’s Republic of China 2005-2010*” (USA: Department of Defense: 2005), halaman 21-22.

<sup>18</sup> Lihat US Secretary of Defense, “*Annual Reprt to Congress: Military Power of The People’s Republic of China 2009*” (USA: Department of Defense: 2009), halaman 32.



Tidak transparannya dan jelasnya peningkatan kapabilitas militer China juga terlihat pada faktor *strategic resources* lainnya yaitu industri pertahanan dan sumber daya manusia. Pada industri pertahanan, ketertutupan pelaporan kemajuan industri pertahanan yang disertai dengan kontrol terpusat dari pemerintah China terhadap keseluruhan 11 sub-industri dan lebih dari 1000 anak perusahaan,<sup>19</sup> menjadikan AS sulit untuk memprediksikan arah pergerakan dan kemajuan keseluruhan industri tersebut. Kontrol pemerintah juga membawa konsekuensi bahwa industri pertahanan China akan tetap berjalan tanpa adanya kebutuhan pasar secara komersil, maupun dalam keadaan defisit perdagangan, dan dalam waktu yang cukup lama. Hal ini dapat terjadi dengan memperhitungkan besaran anggaran pertahanan serta keuntungan yang diperoleh industri pertahaananan China dalam hal akses teknologi. Selain itu dari laporan Departemen Pertahanan AS yang juga menyatakan sumber utama berjalannya dan keuntungan besar dari industri pertahanan China terletak pada:

- Transfer teknologi dari *joint ventures* dengan pihak asing,
- Peningkatan anggaran penelitian, pengembangan, dan pengadaan,
- Akuisisi teknologi militer asing, baik secara legal dan ilegal,<sup>20</sup>
- Peningkatan kerjasama dengan berbagai institusi akademis, serta
- *China's reverse brain drain* – yang dilakukan dengan pemanggilan kembali para ilmuwan dan ahli China yang telah memperoleh pengalaman dan pelatihan di luar negeri.<sup>21</sup>

Sedangkan pada faktor sumber daya strategis lainnya, ketidak-transparanan pemerintah China terletak pada ketidak-jelasan kuantitas dan kualitas kekuatan militer angkatan darat, laut, maupun udara, khususnya kekuatan

<sup>19</sup> Richard A. Bitzinger, “*The Prc's Defense Industry: Reform Without Improvement*” (The JamesTown Foundation). [http://www.jamestown.org/single/?no\\_cache=1&tx\\_ttnews\[tt\\_news\]=3726](http://www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=3726), diakses pada 10 Mei 2012, pukul 16.11.

<sup>20</sup> AS dalam laporan Departemen Kehakiman dan Department of Departemen Perdagangan menyatakan sejak tahun 20006 telah terjadi 26 kasus akuisisi China ilegal, Beberapa diantara kasus tersebut adalah akuisisi: *future warship technology, electronic propulsion systems, controlled power amplifiers, space launch technical data and services*, pesawat C-17, roket Delta IV rockets, informasi mengenai desain *cruise missile*, serta *grade accelerometers* militer. US Secretary of Defense, “*Annual Reprt to Congress: Military and Security Developments Involving The People's Republic of China 2010*” (Department of Defense USA: 2010), halaman 43.

<sup>21</sup> *Annual Reprt to Congress: Military Power of The People's Republic of China 2009. Op.Cit*, halaman 34.

cadangan dan paramiliter China. Permasalahan lain adalah pada jumlah kekuatan *Chinese Armed Forces* yang sebesar 3.355.000 personel di 2010, yang hampir sebesar dua kali kekuatan personel militer AS, dan bahkan sebagaimana data tambahan yang dihimpun, hanya berbeda 200 ribu personel dibandingkan dengan total personel aktif dari negara-negara NATO sebesar 3,7 juta personel.

Dengan kekuatan militer terbesar, China pada dasarnya memiliki kemampuan untuk berhadapan dengan AS baik secara diadik maupun dengan membandingkan kekuatan AS dengan aliansinya. Hal ini menjadi dilematis ketika jumlah personel militer China ini dapat mengalami kenaikan dalam kondisi tertentu, seperti ketika adanya perang, yang memungkinkan China untuk memobilisasi sejumlah besar sumber daya manusia negara. Hal ini sejalan doktrin perang yang digunakan oleh China yang akan dibahas berikutnya, serta mengingat bahwa mobilisasi sumber daya manusia negara China akan menjadi sangat penting dikarenakan besarnya populasi total populasi China, yang sebesar lebih dari 1,3 milyar di tahun 2010.<sup>22</sup> Bahkan, dengan hanya memperhitungkan jumlah personel militer aktif, serta dengan melihat perkembangan proses perbaikan kualitas melalui kerangka *PLA Education System (PME)* dan *The Military Training and Evaluation Program (MTEP)* yang ditujukan untuk kesiapan perang konvensional ataupun *informationalized wars*, China berpotensi untuk mengungguli AS.

Peningkatan faktor-faktor *strategic resources* China pada kondisi-kondisi tersebut, memunculkan konsekuensi besar bagi AS dalam memperhitungkan keunggulan ofensif-defensif yang dimilikinya. Konsekuensi ini secara umum berkenaan bukan pada bagaimana sifat ofensif dan defensif China, melainkan lebih dalam hal ketidak-jelasan modal yang dapat dimanfaatkan China untuk terus membangun kapabilitas dan modernisasi militernya. Yang mencakup konteks modal sumber daya yang akan, sedang, maupun telah digunakan dalam proses konversi sumber daya menjadi kekuatan China baik bersifat ofensif maupun defensif.

Faktor-faktor kehandalan tempur juga memperlihatkan sulitnya membedakan intensitas ofensif dan defensif. Data-data yang dihimpun dalam

---

<sup>22</sup> <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html>, diakses pada 27 Mei 2012, pukul 12.07.



tulisan ini memperlihatkan bahwa teknologi sistem persenjataan China dan AS saat ini berada dalam perkembangan ke arah yang sama, yaitu sebagai sistem persenjataan multifungsi yang mementingkan keunggulan daya tembak, mobilitas, dan perlindungan. Contoh dari perkembangan sistem persenjataan tersebut adalah hampir samanya teknologi yang melengkapi senjata-senjata unggulan AS dan China, seperti: MBT Tipe-99 China dengan M1A1 AS, pesawat tempur J-20 China yang diperkirakan memiliki teknologi yang mendekati *stealth* F-22A Raptor / F-35 AS, serta berbagai jenis sistem persenjataan lainnya. Sedangkan dalam hal kuantitas, terlihat mulai terjadinya penurunan selisih jumlah senjata AS dan China, khususnya pada senjata-senjata jenis MBT, *attack helicopter*, *submarine*, dan kapal-kapal jenis *principle surface combatants*. Tidak hanya dari hal teknologi, dilihat dari postur dan penempatan persenjataan, intensitas ofensif-defensif China juga sulit untuk dibedakan. Hal ini dikarenakan China yang mengoperasikan persenjataannya untuk keperluan *anti-denial* yang cenderung defensif, namun di sisi lain justru juga melakukan peningkatan pada persenjataan-persenjataan ofensifnya.

Sulitnya bagi AS untuk melakukan penilaian terhadap intensitas ofensif dan defensif dari China secara faktual terlihat ketika China pada tahun 2005 dan 2007, mulai menolak tentara AS untuk hadir dalam latihan bersama PLA dan Russia, yang biasanya dihadiri AS selama beberapa tahun terakhir. Selain itu, meskipun China beberapa kali membuka akses bagi AS bahkan sebagai pengunjung internasional pertama untuk melihat berbagai kemajuan peningkatan dan modernisasi militer China, hal ini umumnya berlangsung hingga tahun 2007. Kesempatan bagi AS untuk memantau kemajuan China baru berlangsung kembali tahun 2011, ketika China mengundang AS untuk melihat CSS-7 *short-range ballistic missile* dan kapal selam Yuan-class milik China.<sup>23</sup>

Intensitas ofensif defensif China yang sulit dibedakan juga terlihat dalam variabel *conversion capability*. Alasan utama yang mampu menjelaskan hal tersebut adalah ketidak-jelasan antara penggunaan strategi *active defense* dengan berbagai misi, strategi operasional, panduan modernisasi militer PLA, serta doktrin militer China. Strategi *active defenses* sendiri pada dasarnya menjelaskan komitmen

<sup>23</sup> Lihat Shirley A. Kan, "U.S.-China Military Contacts: Issues for Congress" (Congressional Research Service: 2012), halaman 23-40.

China untuk tidak terlibat dan memicu terjadinya perang maupun agresi, yang juga sejalan konsep “*self-defense counter attacks*,” dan konsep penggunaan senjata nuklir “*no first use*”.<sup>24</sup> Komitmen ini juga sejalan dengan tujuan pertahanan China, yakni menjaga kedaulatan, kepentingan nasional, stabilitas sosial, serta perdamaian internasional.<sup>25</sup>

Kontras dengan strategi tersebut, China juga menjalankan prinsip-prinsip lain yang akan memunculkan potensi ofensif. Salah satunya adalah memberlakukan prinsip “*Three Attacks, Three Defenses*”,<sup>26</sup> yang prinsip ini menjadikan China butuh untuk menjaga keseimbangan antara kekuatan defensif sekaligus kemungkinan menghadapi perang dengan mempersiapkan kekuatan ofensif pada besaran yang relatif sama. Hal lainnya yang juga diterapkan China adalah prinsip “*Three Warfare*” yang membuat China mampu menggunakan cara-cara penekanan secara psikologis dengan mengancam dan memaksa pihak lawan, penggunaan media untuk mempengaruhi opini publik, serta menggunakan kekuatan hukum untuk mencari dukungan politik dari aktor-aktor internasional lainnya.<sup>27</sup>

Penggunaan berbagai prinsip operasional militer yang bersifat ofensif, ditengah berlakunya strategi yang bersifat defensif, memeperlihatkan berlakunya standar ganda dalam operasional militer yang dijalankan China. Standar ganda ini, memberikan konsekuensi yaitu ketidakjelasan mengenai sifat pengerahan kekuatan militer, serta arah peningkatan kapabilitas militer China secara keseluruhan. Lebih dari itu, standra ganda yang diberlakukan juga menjadikan AS harus memperhitungkan kemungkinan munculnya persepsi dirinya dianggap ancaman atas operasional militer yang dijalankannya, terlebih di daerah dan wilayah yang juga menjadi area kepentingan seperti, wilayah Asia Pasifik, Semenanjung Korea, serta Laut China Selatan Dalam konteks yang lebih luas, bagaimana China memperluas kepentingannya dengan memberlakukan konsep *first islands chain* dan *second islands chain*, serta *critical sea lanes*, telah

<sup>24</sup> *Annual Reprt to Congress: Military Power of The People’s Republic of China 2005*. halaman32.

<sup>25</sup> *Annual Reprt to Congress: Military Power of The People’s Republic of China 2003*. halaman 1.

<sup>26</sup> *Annual Reprt to Congress: Military Power of The People’s Republic of China 2004*. Loc.Cit, halaman 22.

<sup>27</sup> *Ibid*, halaman 16.

mendorong China untuk mengerahkan sumber daya yang dimilikinya dengan memperkuat angkatan perang melalui modernisasi militer.

Dari penilaian *offense-defense differentiation* atas peningkatan kapabilitas militer China sepanjang periode 2002-2010, dapat disimpulkan bahwa intensitas ofensif atau defensif peningkatan kapabilitas China yang terjadi baik pada variabel *strategic resources*, *combat proficiency* dan *conversion capability*, sulit untuk dibedakan. Hal ini menyebabkan sulitnya AS menentukan dan memperkirakan modal, arah, kecepatan, potensi, dan sifat dari tindakan China. Yang pada akhirnya berimplikasi pada sulitnya identifikasi resiko yang akan ditanggung AS baik dalam melakukan tindakan defensif maupun ofensif.

#### 4.3. Strategi Keamanan Amerika Serikat dan Mitigasi Dilema Keamanan

Kemajuan China selama periode 2002-2010 telah membawa pergeseran pada perimbangan kapabilitas militer AS dan China. Perubahan ini kemudian membawa konsekuensi pada bagaimana AS memperhitungkan posisi dirinya serta membangun strategi keamanannya untuk menghadapi konsekuensi dari peningkatan kapabilitas militer China, yang dapat dikatakan strategi keamanan AS terhadap China juga merupakan perhitungan rasional dari resiko dan biaya yang dihadapinya. Yang disebutkan oleh Waltz bahwa negara akan cenderung '*sensitive to costs*',<sup>28</sup> dalam hubungannya dengan negara lain.

Beberapa hal penting dapat dirangkum dari fakta-fakta utama penilaian strategi AS di periode 2002-2010, yang menjelaskan bagaimana strategi AS pada periode ini akan sangat dipengaruhi oleh intensitas keunggulan defensif yang dimilikinya, serta kejelasan intensitas dari aksi China. *Pertama*, AS meningkatkan bantuan keuangan terhadap China sebesar lebih dari 450% pada tahun 2008 terhitung dari awal periode 2002, yang bantuan ini bukan bantuan terhadap pemerintah China, melainkan bagi NGO, universitas, dan komunitas lainnya; khususnya untuk tujuan program demokrasi.<sup>29</sup> Peningkatan ini pada dasarnya merupakan efek dari rendahnya keunggulan ofensif yang dimiliki AS. Dengan

<sup>28</sup> Birthe Hansen, Peter Toft dan Anders Wivel, "*Security Strategies and American World Order: Lost power*" (New York: Routledge, 2009), halaman 16.

<sup>29</sup> Thomas Lum, "U.S. Assistance Programs in China", *Congressional Research Service*(2012), halaman 1.

kondisi tersebut, AS akhirnya berada dalam posisi untuk mempertimbangkan alternatif lain dalam menjalankan supremasinya tanpa cara-cara militer yang cenderung bersifat ofensif. Menjadikan arah strategi AS bergerak ke cara-cara lain yang cenderung bersifat diplomatik dan defensif. Pemberian bantuan terhadap masyarakat China, yang berarti non pemerintah, adalah pertimbangan strategi yang paling rasional untuk mendorong tercapainya tujuan AS seperti demokratisasi global, dan merupakan alternatif cara yang lebih efektif dalam menekan pemerintah China.

Hal *kedua* dalam strategi yang dijalankan AS adalah dengan mengintensifkan kerjasama dan hubungan militer kedua negara. Dalam hal ini berbagai inisiatif penting yang digagas AS adalah: *Military Maritime Consultative Agreement* (MMCA), *Defense Policy Coordination Talks* (DPCT), *Incidents at Sea Protocol* (INCSEA), hingga dibentuknya *US-China Security and Economic Dialogue* (S&ED) dan *U.S-China Joint Statements*. Inisiatif-inisiatif yang diambil AS tersebut pada awalnya merupakan bagian dari penyelesaian masalah dan ketegangan yang muncul diantara kedua negara. Beberapa diantara adalah seperti: INCSEA yang lahir dari kasus ditembaknya pesawat EP-36, serta ketika China mulai menolak kehadiran tentara AS untuk hadir dalam latihan bersama PLA dan Russia khususnya sejak 2005, yang biasanya dihadiri AS selama beberapa tahun terakhir. Karenanya atrategi ini tidak didasari atas faktor keunggulan defensif AS, insentif-insentif yang lahir pada periode ini bukan hanya ditujukan untuk mempererat kerjasama kedua negara semata, tetapi mencakup pula dorongan atas semakin tidak transparannya dan ketidakjelasan aksi-aksi dan intensitas yang dilakukan China.

Hal lainnya dalam konteks *military deployment*, adalah pada tahun 2003-2010 ketika AS di wilayah Asia Pasifik mulai menurunkan kekuatannya, sebagaimana yang terjadi di basis-basis *Pacific Command* (PACOM) seperti Jepang dan Korea Utara. Tindakan yang diambil AS ini memiliki relevansi, dengan bagaimana di tengah resiko yang besar untuk melakukan tindakan dan strategi yang bersifat ofensif dan ketidakjelasan intensitas China, penting bagi AS untuk tidak memperbesar potensi untuk dianggap sebagai ancaman. Yang hal tersebut dapat memicu peningkatan kapabilitas militer China lebih besar.

Berbagai hal di atas yang menjelaskan bagaimana penurunan keuntungan ofensif AS yang menurun, serta semakin sulit untuk dibedakannya intensitas ofensif dan defensif China, menjelaskan bagaimana AS saat ini mengalami yang disebut dilema keamanan. Dalam kondisi ini sebagaimana pendapat Herz, “*security dilemma can only be mitigated but not eliminated*”.<sup>30</sup> Oleh karenanya, dilema keamanan yang berlangsung dan dihadapi AS hanya dapat dimitigasi jika baik AS maupun China memahami bahwa mereka berada dalam dilema keamanan yang dapat membahayakan kepentingan vital dari keamanan mereka masing-masing. Dalam pertimbangan AS, sebagaimana pendapat Jervis mengenai kerjasama dan intensifikasi aksi defensif di dalam kondisi dilema keamanan, mendorong AS untuk tidak melakukan aksi ofensif dan justru memperbesar kerjasama terhadap China di tengah peningkatan kapabilitasnya.

Strategi defensif yang dilakukan AS sangat erat pula kaitannya dengan pendapat Shippig Tang dalam *Realism's Ladder of Strategies*, dimana dari data-data yang tersaji dalam tulisan ini sebelumnya, dapat dikatakan strategi AS berada di antara *pasive containment* dan *engagement*. *Pasive engagement* sendiri dimaknai Tang sebagai pola bertahan tanpa melakukan banyak provokasi dan inisiasi krisis terhadap pihak lawan. Sedangkan strategi *engagement*, mengkombinasikan elemen *reassurance* dan *defense/dettesence*. Strategi ini ditandai dengan beberapa hal yaitu: adanya aksi untuk memastikan pihak lawan tidak berbuat hal yang mengancam, adanya perluasan ajakan kerjasama guna mengukur intensitas lawan, serta dengan tetap melindungi diri dari kemungkinan pihak lawan tetap akan menjadi agresor.

Berbagai deskripsi mengenai strategi yang dijalankan AS saat ini seperti pemberian bantuan luar negeri, intensifikasi hubungan kerjasaman militer kedua negara, serta penurunan kekuatan AS di Asia Pasifik menunjukkan bagaimana AS berkeinginan untuk memitigasi potensi peningkatan intensitas dilema keamana di antara kedua negara. Bentuk nyata lain dari implikasi pendapat Tang mengenai keberadaan pola *reassurance*, adalah tetap berlangsungnya aksi-aksi pengamanan yang dilakukan AS untuk menghindari ancaman yang mungkin datang dari China. Hal ini salah satunya terlihat pada penambahan jumlah kapal selama yang

---

<sup>30</sup> Shiping Tang, *Op.Cit*, halaman 70.

dioperasikan di wilayah Asia Pasifik dari sebesar 27 unit di tahun 2006 menjadi 39 unit di tahun 2010. AS sejalan dengan hal tersebut pada tahun 2010 dalam *National Security Strategi* AS, memberikan pernyataan tambahan mengenai kemajuan modernisasi militer China, yang menyebutkan:

*We will monitor China's military modernization program and prepare accordingly to ensure that U.S. interests and allies, regionally and globally, are not negatively affected. More broadly, we will encourage China to make choices that contribute to peace, security, and prosperity as its influence rises.*<sup>31</sup>

Dengan begitu, ditengah strategi defensif dan kooperatif yang dilakukan AS, pertimbangan munculnya ancaman dan kepentingan negara untuk memperhitungkan resiko yang dihadapinya, tidak mungkin dapat dihindari. Terlebih pola strategi keamanan AS serta kondisi peningkatan kapabilitas militer kedua negara dalam selama periode 2002-2010, juga seringkali berada dalam kondisi yang tidak sama khususnya pada periode 2002-2006 serta 2006-2010.

Pada periode 2002-2006, fakta yang ada memperlihatkan bahwa perbandingan kekuatan AS dan China yang semakin besar. Di mana posisi AS juga masih memiliki modal sumber daya strategis serta keunggulan industri pertahanan yang relatif besar. Pada periode ini, strategi dan aksi yang dibangun AS, lebih besar kaitannya dengan reposisi kekuatannya di wilayah Asia Pasifik, serta memperbesar pembiayaan bagi pengadaan sistem persenjataan yang dimilikinya. Yang dengan kata lain, meski intensifikasi kerjasama terjadi, tetapi melakukan penambahan kekuatan pertahanan atau defensif menjadi lebih penting.

Sedangkan pada periode 2006-2010 kondisi yang dialami AS cukup berbeda dari periode sebelumnya. AS pada periode ini menghadapi krisis keuangan di tengah fakta yang memperlihatkan perbandingan kekuatan AS dan China yang menurun, meski China berpotensi untuk meluncurkan persenjataan terbarunya dalam beberapa tahun kedepan. Dalam kondisi ini meskipun AS tetap memaksakan penambahan kekuatannya defensifnya dengan terus memperbesar biaya pengadaan senjata dan memperbesar anggaran pertahanannya dalam kondisi defisit anggaran negara, hal yang lebih penting adalah dengan memperbesar aksi *reassurance* yang dilakukan dengan peningkatan kerjasama.

<sup>31</sup> Lihat lampiran 6. President of The United States., "*The National Security Strategies of The United States of America 2010*" (White House: 2010).

**Gambar 4.1:** Kesimpulan Analisa mengenai Strategi Keamanan AS di tengah Peningkatan Kapabilitas Militer China 2002-2010.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

Strategi keamanan Amerika Serikat (AS) sepanjang periode 2002-2010, memperlihatkan peningkatan intensitas defensif dan peningkatan aksi kooperatifnya terhadap China. Peningkatan intensitas defensif tersebut dalam tulisan ini terlihat, baik dalam indikator bantuan luar negeri, aktivitas diplomasi dan komitmen kerjasama, serta sebaran pasukan dan sikap AS terhadap China. Dalam hal bantuan luar negeri, AS meningkatkan bantuan bagi China yang diperuntukan untuk komunitas dan *non-governmental organization* (NGO), dimana posisi China sebagai negara penerima bantuan terbesar setelah juga meningkat, khususnya sejak tahun 2006. Pada faktor aktivitas militer dan komitmen kerjasama, kedua negara memperlihatkan peningkatan jumlah aktivitas khususnya antar departemen pertahanan, serta peningkatan kerjasama dan pembicaraan melalui: *Military Maritime Consultative Agreement* (MMCA), *Defense Policy Coordination Talks* (DPCT), *Incidents at Sea Protocol* (INCSEA), *Defense Consultative Talks* (DCT), *Sanya Initiative*, hingga *Security and Economic Dialogue* (S&ED) serta *U.S-CHINA Joint Statements* pada 2009, yang hampir seluruhnya digagas oleh AS. Selain itu, AS juga menunjukkan peningkatan aksi defensif dengan mengurangi kekuatannya di wilayah Asia Pasifik, khususnya di Jepang dan Korea Selatan, serta menunjukkan sikap kooperatif melalui berbagai pernyataan resmi negara khususnya dalam *The Security Strategy of United States*. Dalam kondisi tersebut, AS juga memperlihatkan peningkatan potensi ofensifnya terhadap China, yang terlihat dalam penambahan anggaran pertahanan AS khususnya yang dialokasikan bagi pengadaan persenjataan, serta penambahan sejumlah persenjataan ofensifnya seperti kapal selam penyerang, di wilayah Pasifik.

Peningkatan intensitas strategi dan aksi defensif yang dilakukan AS tersebut terjadi di tengah peningkatan kapabilitas militer China. Dalam tulisan ini, beberapa kemajuan dan pencapaian China dalam peningkatan kapabilitasnya terjadi di hampir seluruh indikator baik sumber daya strategis, kapabilitas konversi, hingga kehandalan tempur yang dimilikinya. Pada faktor sumber daya



strategis, China memperlihatkan kemampuan untuk meningkatkan nominal anggaran pertahanannya hingga menjadi yang terbesar kedua di dunia dengan hanya memanfaatkan *share* anggaran belanja negara dan GDP yang relatif kecil dan menurun. China juga berhasil melakukan peningkatan kualitas personil militer dan menjadi salah satu negara yang memiliki industri pertahanan paling berkembang dan terbesar dalam cakupan produksinya di dunia. Pada faktor kehandalan tempur, China juga memperlihatkan peningkatan inventori dan teknologi persenjataannya, sebagai output dari modernisasi militer yang dilakukannya. Peningkatan kapabilitas militer ini menjadikan China memiliki potensi untuk melakukan aksi ofensif, termasuk dengan mempertimbangkan berbagai strategi dan doktrin militer China yang memiliki standar ganda serta perluasan cakupan sepanjang periode ini.

Dari kondisi tersebut analisis tulisan ini yang berusaha menjawab pertanyaan penelitian dan menguji hipotesis menyimpulkan bahwa: **strategi keamanan AS memperlihatkan peningkatan intensitas defensif di tengah peningkatan kapabilitas militer China pada periode 2002-2010, dikarenakan peningkatan intensitas dilema keamanan.** Berdasarkan alat analisis Jervis, analisis tulisan ini membuktikan peningkatan intensitas dilema keamanan tersebut, dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu: besarnya keunggulan defensif yang dimiliki AS serta intensitas ofensif-defensif China yang tidak dapat dibedakan. Kedua faktor penyebab tersebut erat kaitannya dengan perimbangan kapabilitas militer dari kedua negara, baik dalam kepemilikan sumber daya strategis, kapabilitas konversi, maupun kemampuan tempur; khususnya dalam kondisi peningkatan kapabilitas militer China yang besar.

Keunggulan defensif AS yang lebih dominan dibandingkan keunggulan ofensif yang dimilikinya, terjadi khususnya ketika sumber-sumber strategis peningkatan kapabilitas militer dapat berpotensi sebagai modal yang dapat dimobilisasi untuk mempercepat produksi dan memperbesar kekuatan persenjataan China. Kondisi ini membawa konsekuensi bahwa AS harus memperhitungkan resiko kegagalan melakukan aksi ofensif yang akan berpotensi menimbulkan biaya besar, baik dalam pemulihan kekuatan secara domestik, maupun memicu China semakin memperbesar kekuatannya. Karenanya strategi

AS yang bersifat defensif dan kooperatif akan lebih menguntungkan. AS dalam hal ini melakukan berbagai hal di antaranya intensifikasi kerjasama militer kedua negara, meningkatkan bantuan terhadap komunitas dan NGO demokrasi di China, serta memperkuat kerjasama pada bidang keamanan non tradisional lainnya.

Sedangkan di sisi lain, ketidakjelasan intensitas ofensif-defensif dari peningkatan kapabilitas China, utamanya berlaku pada sumber-sumber strategis dan kapabilitas konversi. Kondisi ini membawa konsekuensi sulitnya bagi AS untuk memprediksi besaran, arah, dan intensitas dari peningkatan kapabilitas China; yang pada akhirnya memicu kekhawatiran AS, akan munculnya aksi ofensif yang berpotensi dilakukan China. Untuk mengatasi hal itu, beberapa indikator aksi AS untuk perkuatan diri terlihat dari beberapa hal, yakni: desakan AS terhadap China melakukan transparansi pelaporan anggaran pertahanan serta kenaikan anggaran pertahanan AS yang mencakup anggaran pengadaan ditengah defisitnya anggaran belanja negara yang besar.

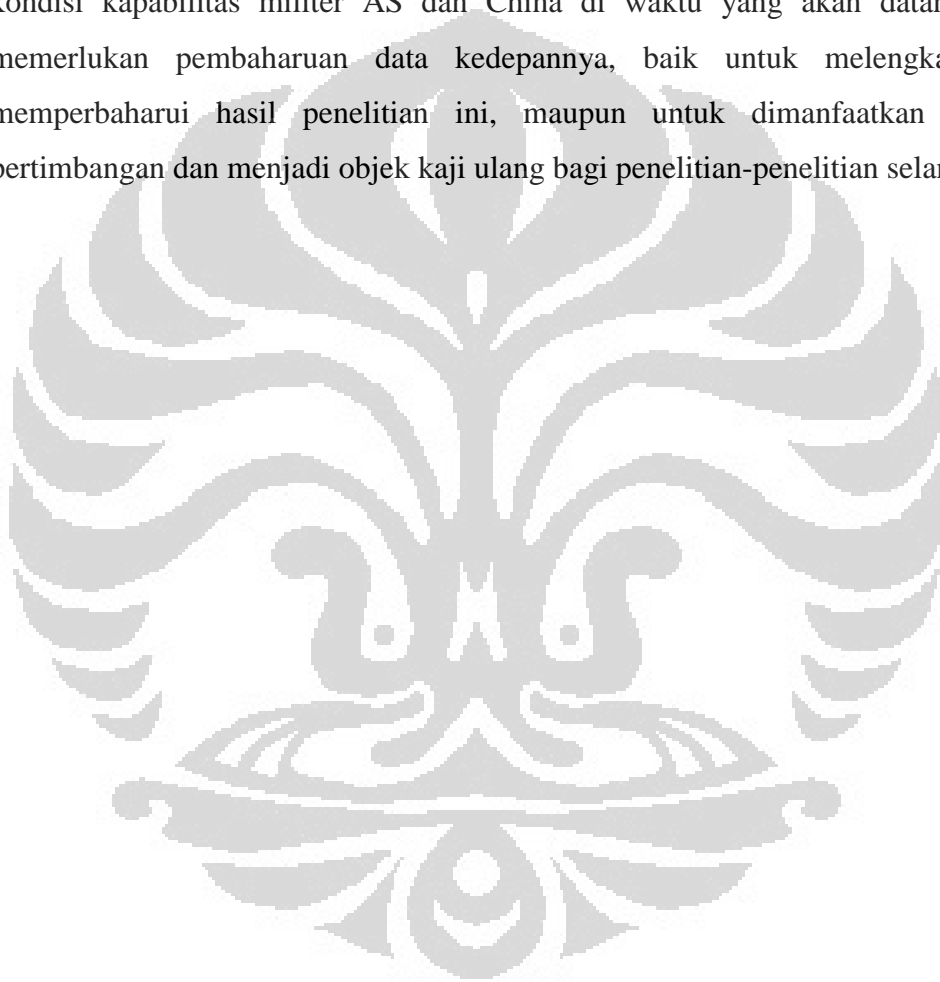
Di tengah dilema keamanan yang hadir dalam hubungan kedua negara, dan memperlihatkan tren peningkatan intensitas dari waktu ke waktu, maka bagi AS peningkatan kerjasama dan aksi defensif merupakan salah satu cara untuk memitigasi dilema keamanan, agar tidak sampai pada intensitas kompetisi yang dapat merugikan maupun memicu perlombaan senjata. Komitmen akan hal ini diperlihatkan dari bagaimana AS melakukan peningkatan kekuatan dan aksi defensif serta intensifikasi kerjasama yang dalam konteks mitigasi dilema keamanan serta konsep strategi keamanan dari John Dueck serta Stephen Tang, merupakan pertimbangan AS dalam melihat kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya, serta untuk tujuan *reassurance* atas intensitas China. Strategi AS sendiri pada periode 2002-2006 umumnya secara signifikan difungsikan dengan penambahan kekuatan defensif, sedangkan pada periode 2006-2010 lebih dititik beratkan pada intensifikasi kerjasama. Yang hal ini merupakan keputusan paling rasional bagi AS terutama pada periode 2006-2010, ketika AS menghadapi tantangan krisis, di tengah semakin meningkatnya kekuatan China. Strategi keamanan AS di kedua sub periode tersebut juga memperlihatkan pergeseran strategi dari yang bersifat *passive containment*, ke arah yang bersifat *engagement*.

Dari hasil kesimpulan analisis dalam tulisan ini, penulis mencoba menarik kesimpulan lebih lanjut untuk menjadi rekomendasi praktis dalam kelimuan Hubungan Internasional. *Pertama*, bahwa dengan semakin meningkatnya intensitas dilema keamanan, negara dapat memperbesar kerjasama untuk memitigasi dilema tersebut, baik dengan cara **memperkuat kekuatan defensif** yang dimilikinya, ataupun melakukan **peningkatan kerjasama** sebagai bentuk *reassurance* dengan negara lawan (yang sejalan juga dengan pendapat Robert Jervis dan Stephen Tang). *Kedua*, dikarenakan sumber daya dan modal yang dimiliki setiap negara untuk meningkatkan kekuatannya, terkadang dalam kondisi tertentu sulit untuk ditingkatkan dan dimiliki negara sehingga menjadi penghambat penguatan diri, maka peningkatan kerjasama dengan tetap memfokuskan *rassurance* intensitas pihak lawan merupakan cara yang paling rasional untuk diimplementasikan. *Ketiga*, kerjasama untuk *reassurance* tersebut, sebaiknya tidak membuat negara menghentikan proses penguatan kapabilitasnya, dikarenakan ketidak-jelasan dan sistem internasional yang bersifat anarki. Dan *keempat*, pertimbangan mengenai potensi yang dimiliki negara lawan di masa yang akan datang menjadi sangat penting untuk dipertimbangkan dalam perumusan strategi suatu negara.

Rekomendasi ini kiranya dapat berguna untuk digunakan oleh negara lain, seperti Indonesia dalam menghadapi tantangan dan potensi ancaman dari negara lain, seperti dari Malaysia yang saat ini tengah terjadi. Di tengah ketidak mampuan Indonesia untuk memperbesar kapabilitasnya melebihi Malaysia, dalam hal keterbatasan sumber daya baik modal anggaran pertahanan, teknologi dan sumber daya manusia; Indonesia dapat memperbesar kerjasama kedua negara. Di mana penguatan kapabilitas militer tetap harus berlangsung, serta dengan terus memperhatikan potensi peningkatan kekuatan dari Malaysia dan negara lain kedepannya.

Tulisan ini memperlihatkan kemampuan teori dilema keamanan dari Robert Jervis dan pengukuran kapabilitas militer Cristopher Layne dan kawan-kawan, serta konsep strategi keamana Collin Dueck serta Stephen Tang untuk menjelaskan dan menjadi alat analisa strategi AS di tengah peningkatan kapabilitas militer China 2002-2010. Mengingat kompleksnya pengukuran strategi

pertahanan dan kapabilitas militer, dibutuhkan telaah lebih lanjut atas indikator-indikator di dalamnya (seperti *strategic resources*, *conversion capability* dan *combat proficiency* yang tergolong masih baru digunakan) baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Tulisan ini juga memiliki kelemahan dengan tidak menerapkan uji signifikansi secara statistik, sehingga kesimpulan dalam penelitian ini tidak dapat serta-merta digeneralisasi dan kiranya harus diuji ulang untuk penerapannya dalam kasus lainnya. Tulisan ini yang juga memperoyeksikan kondisi kapabilitas militer AS dan China di waktu yang akan datang, juga memerlukan pembaharuan data kedepannya, baik untuk melengkapi dan memperbaharui hasil penelitian ini, maupun untuk dimanfaatkan sebagai pertimbangan dan menjadi objek kaji ulang bagi penelitian-penelitian selanjutnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Art, Robert J dan Jervis, Robert. (1996). *“International Politics, Enduring Concepts and Contemporary Issues”*. New York: Harper Collins College Publishers.
- Berebskoetter, Felix dan Williams, M.J, *et.all.* (2007). *“Power in World Politics”*. Oxon: Routledge.
- Boije, Hennie R. (2005). *Data Collection: Primary VS Secondary - Encyclopedia of Social Measurement*. Vol I, ISBN: 978-0-12-369398-3 : Elsevier Inc.
- Booth, Ken. (2007). *“Theory of World Security”*. New York: Cambridge University Press.
- Bryman, Alan. (2008). *Social Research 3<sup>rd</sup> edition*. New York: Oxford University Press.
- Burchill, Scott; *et.all.* (2001). *“Theories of International Relations”*(2<sup>nd</sup> edition). New York: Palgrave.
- Buzan, Barry. (1987). *“An Introduction to Strategic Studies: Military Technology and International Relations”*. London: MacMillan Press.
- Buzan, Barry. (1991). *“People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era“*, 2<sup>nd</sup> edition. New York: Harvester Wheatsheaf.
- Buzan, Barry dan Hansen, Lene. (2009). *“The Evolution Of International Security Studies“*. New York: Cambridge University Press.
- Collins, Alan. (2000). *“The Security Dilemmas of Southeast Asia”*. Singapore: Institute Of Southeast Asian Studies – MacMillan Press Ltd
- Dueck, Colin. (2006). *“Reluctant Crusaders: Power, Culture, And Change In American Grand Strategy”*. New Jersey: Princeton University Press.
- Echevarria II, Antulio J. Echevarria. (2007). *“Clausewitz and Contemporary War”*. New York: Oxford University Press: 2007.
- Gill, Bates *et,all.* (2011). *“SIPRI Year Book 2011: Armaments, Disarmaments and International Security Summary”*.Sweden: Stockholm International Peace Research Institute.
- Given, Lisa M. *et,all.* (2008). *The SAGE Encyclopedia of Qualitative Research Methods*. London: SAGE Publications.

- Gray, Colin S. (2002). *“Strategy for Chaos: Revolutions in Military Affairs and the Evidence of History”*. London: Frank Cass Publishers.
- Griffiths, Martin dan O’Collaghan, Terry. (2002). *“International Relations: The Key Concepts”*. London: Routledge.
- Griffiths, Martin. (2007). *“International Relations Theory for the Twenty-First Century: An Introduction”*. Oxon: Routledge.
- Hansen, Birthe; Toft, Peter dan Wivel, Anders. (2009). *“Security Strategies and American World Order: Lost power”*. New York: Routledge.
- Harrison, Tod. (2012). *“Analysis of the FY 2012 Defense Budget”*. Washington: Center for Strategic and Budgetary Assessments.
- Hart, Gary. 2004. *“The Fourth Power: A Grand Strategy for the United States in the Twenty-First Century”*. New York: Oxford University Press.
- Hough, Peter. (2004). *“Understanding Global Security”*. London: Routledge.
- Jervis, Robert. (1997). *“System Effects: Complexity In Political And Social Life”*. New Jersey: Princeton University Press.
- Jones, Richard Wyn. (1999). *“Security, Strategy, and Critical Theory”*. Boulder: Lynne Rienner Publishers, Inc.
- Kolodziej, Edward A. (2005). *“Security and International Relations”*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Neuman, W. Lawrence. (2006). *“Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches 6<sup>th</sup> edition”*. Boston: Pearson Education.
- Silalahi, Ulber. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Tang, Shiping. (2010). *“A Theory of Security Strategy for Our Time”*. New York: Palgrave MacMillan.
- Tellis, Ashley J., Janice Bially, Christopher Layne, Melissa McPherson. (2000). *“Measuring National Power in the Postindustrial Age”*. Santa Monica: RAND.
- Wilkinson, Paul. (2007). *“International Relations: A Very Short Introduction”*. New York: Oxford University Press.

#### **Jurnal, Penelitian, dan Data Report:**

- Balesco, Amy *et.all*. (2001). *“Appropriations and Authorization for FY2002: Defense”*. Washington: Congressional Report Service. Diakses melalui:

<http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=ADA397026>, pada 21 April 2012, pukul 14.33.

- Balesco, Amy. (2011). *“The Cost of Iraq, Afghanistan, and Other Global War on Terror Operations Since 9/11”*. Congressional Research Service. Diakses melalui <http://www.fas.org/sgp/crs/natsec/RL33110.pdf>, pada 21 April 2012, pukul 14.01.
- Cerny, Philip G. (2000). “The New Security Dilemma: Divisibility, Defection and Disorder in the Global Era”. *Review of International Studies* Vol. 26 No.4 (October 2000). New York: Cambridge University Press.
- Cohen, Richard dan Mihalka, Michael. (2001). “Cooperative Security: New Horizons for International Order”. *The Marshall Center Papers*, No. 3. Deutschland: European Center for Security Studies. Diakses melalui <http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a478928.pdf>, pada 21 April 2012, pukul 14.13.
- Daggett, Stephen. (2010). *“Costs of Major U.S. Wars”* (Congressional Research Service: 2010). Congressional Research Service. Diakses melalui <http://www.fas.org/sgp/crs/natsec/RS22926.pdf>, pada 23 April 2012, pukul 21.09.
- Dueck, Colin. (2004). “Ideas and Alternatives in American Grand Strategy 2000-2004”. *Review of International Studies*, Vol. 30, No. 4 (Oct., 2004). Cambridge University Press
- Friedman, Benjamin dan Logan, Justin. (2012). *“Why the U.S. Military Budget is ‘Foolish and Sustainable’*. Maryland Heights: Foreign Policy Research Institute. Elsevier Ltd. Diakses melalui <http://www.cato.org/pubs/articles/logan-friendman-obis-spring-2012.pdf>, pada 23 April 2012, pukul 23.44.
- Glaser, Charles L dan Kaufmann, Chaim Kaufmann. (1998). “What is the Offense-Defense Balance and Can We Measure it?”, *International Security* Vol.22 No.4 (Spring 1998) Massachusetts: MIT Press.
- Gortzak, Yoav; Haftel, Yoram Z; dan Sweeny, Kevin. (2005). “Offense-Defense Theory: An Empirical Assessment” *The Journal of Conflict Resolution*, Volume 49, Number 1 (February 2005) SAGE Publications Inc.
- Ikenbery, G. John. (2002). “America’s Imperial Ambitions”. *Foreign Affairs*, Vol. 81, No. 5 (September-Oktober). Council of Foreign Relations.
- IISS. (2002). *“The Military Balance 2002-2003”*. London: The International Institute for Strategic Studies.
- . (2003). *“The Military Balance 2003-2004”*.
- (2004). *“The Military Balance 2004-2005”*.

(2005). *"The Military Balance 2005-2006"*.

(2006). *"The Military Balance 2006"*.

(2007). *"The Military Balance 2007"*.

(2008). *"The Military Balance 2008"*.

(2009). *"The Military Balance 2009"*.

(2010). *"The Military Balance 2010"*.

(2011). *"The Military Balance 2011"*

Jervis, Robert. (Januari 1978). "Cooperation Under the Security Dilemma". *World Politics*, Vol. 30, No. 2 (January, 1978). New York: Cambridge University Press. Diakses melalui <http://www.jstor.org/stable/2009958>, pada 1 April 2012, pukul 18.21.

Kan, Shirley A. (2010). *"U.S.-China Counterterrorism Cooperation: Issues for U.S. Policy"*. Washington: Congressional Research Service.

Kan, Shirley A. (2012), *"U.S.-China Military Contacts: Issues for Congress"*. Washington: Congressional Research Service. Diakses melalui: <http://www.fas.org/sgp/crs/natsec/RL32496.pdf>, pada 15 April 2012, pukul 15.21.

Layne, Christopher. (1997). "From Preponderance to Offshore Balancing: America's Future Grand Strategy". *International Security*, Vol. 22, No. 1 (Summer, 1997). MIT Press.

Lieber, Keir A. dan Gerald Alexander. (2005). "Waiting for Balancing: Why the World Is Not Pushing Back". *International Security*, Vol. 30, No. 1 (Summer, 2005), pp. 109-139). MIT Press.

Lieber, Keir A. (2000). "Grasping the Technological Peace: The Offense-Defense Balance and International Security". *International Security* - Vol.25, No.1 (Summer, 2000). Cambridge: MIT Press.

Lum, Thomas. (2012). *"U.S. Assistance Programs in China"*. Washington: Congressional Research Service. Diakses melalui [http://assets.opencrs.com/rpts/RS22663\\_20110422.pdf](http://assets.opencrs.com/rpts/RS22663_20110422.pdf), pada 29 April 2012, pukul 21.27.

Lynn-Jones, SeanM. (2001). "Does Offense-Defense Theory Have A Future?", *Working Paper* no. 12, Research Group in International Security: Université de Montréal/McGill University.

Majeski, Stephen J. Majeski dan Frcks, Shane. (1995). "Conflict and Cooperation in International Relations", *The Journal of Conflict Resolution* Vol. 39 – No. 4 (December 1995). California: SAGE Publications Inc.



Posen, Barry R. dan Andrew L. Ross. (1996). "Competing Visions of US Grand Strategy". *International Security*, Vol. 21, No. 3 (Winter, 1996-1997), pp. 5-53). MIT Press.

Stephen Daggett *et.all.* (2006). "*Appropriations and Authorization for FY2007: Defense*". Washington: Congressional Report Service. Diakses melalui <http://www.fas.org/sgp/crs/natsec/RL33405.pdf>, pada 21 April 2012, pukul 15.22.

Taliaferro, Jeffrey. "Security Seeking under Anarchy: Defensive Realism Revisited", *International Security* Vol.25, No.3 (Winter 2000-2001).

Towell, Pat *et.all.* (2009). "*Appropriations and Authorization for FY2010: Defense*". Washington: Congressional Report Service. Diakses melalui <http://www.fas.org/sgp/crs/natsec/R40567.pdf>, pada 21 April 2012, pukul 15.42.

Van Evera, Stephen. (1998). "Offense, Defense, and the Causes of War". *International Security*, Volume 22, Number 4(Spring-1998). Massachusetts: MIT Press.

#### **Dokumen:**

Department of Defense. (2005). "*The National Defense Strategies of The United States of America 2005*". USA: Pentagon.

Department of Defense. (2008). "*The National Defense Strategies of The United States of America 2008*". USA: Pentagon.

President of The United States. (2002). "*The National Security Strategies of The United States of America 2002*". Washington: White House.

President of The United States. (2006). "*The National Security Strategies of The United States of America 2006*". Washington: White House.

President of The United States. (2010). "*The National Security Strategies of The United States of America 2010*". Washington: White House.

US Secretary of Defense. (2003). "*Annual Reprt to Congress: Military Power of The People's Republic of China 2003*" . USA: Department of Defense.

US Secretary of Defense. (2004). "*Annual Reprt to Congress: Military Power of The People's Republic of China 2004*" . USA: Department of Defense.

US Secretary of Defense. (2005). "*Annual Reprt to Congress: Military Power of The People's Republic of China 2005*" . USA: Department of Defense.

US Secretary of Defense. (2006). *“Annual Reprt to Congress: Military Power of The People’s Republic of China 2006”* . USA: Department of Defense

US Secretary of Defense. (2007). *“Annual Reprt to Congress: Military Power of The People’s Republic of China 2007”* . USA: Department of Defense.

US Secretary of Defense. (2008). *“Annual Reprt to Congress: Military Power of The People’s Republic of China 2008”* . USA: Department of Defense.

US Secretary of Defense. (2009). *“Annual Reprt to Congress: Military Power of The People’s Republic of China 2009”* . USA: Department of Defense.

US Secretary of Defense. (2010). *“Annual Reprt to Congress: Military and Security Developments Involving The People’s Republic of China 2010”* . USA: Department of Defense.

US Secretary of Defense. (2011). *“Annual Reprt to Congress: Military and Security Developments Involving The People’s Republic of China 2010”* . USA: Department of Defense.

#### **Artikel:**

Alexander Chieh-cheng Huang, *“Transformation and Refinement of Chinese Military Doctrine: Reflection and Critique on the PLA’s View”*. <http://www.rand.org/pubs/confproceedings/CF160/CF160.ch6.pdf>, diakses pada 12 Mei 2012, pukul 18.57.

Lieutenant Colonel Dennis J. Blasko. *“Chinese Army Modernization: An Overview”* (Military Review: September-Oktober 2005), halaman 69. <http://usacac.leavenworth.army.mil/CAC/milreview/download/English/SEPOCT05/blasko.pdf>, diakses pada 7 Mei 2012, pukul 13.29.

Richard A. Bitzinger, *“The Prc’s Defense Industry: Reform Without Improvement”* (The Jamestown Foundation). [http://www.jamestown.org/single/?no\\_cache=1&tx\\_ttnews\[tt\\_news\]=3726](http://www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=3726), diakses pada 10 Mei 2012, pukul 16.11.

Roger Cliff, *“Advances Underway in China’s Defense Industries”* (RAND: Maret 2006), halaman 4. [http://www.rand.org/pubs/testimonies/2006/RAND\\_CT256.pdf](http://www.rand.org/pubs/testimonies/2006/RAND_CT256.pdf), Diakses pada 10 Mei 2012, pukul 15.21.

Thomas Skypek , *“Soldier Scholars: Military Education as an Instrument of China’s Strategic Power”* (The Jamestown Foundation: 2008). <http://www.asianresearch.org/articles/3122.html>, diakses pada 7 Mei 2012, pukul 08.12.

#### **Situs Online:**

<http://archive.newsmax.com/>.

<http://armscontrolcenter.org/>.

<http://www.businessinsider.com/>  
<http://www.businessweek.com/>  
<http://www.cato.org/>  
<http://www.census.gov/>  
<http://www.china.org.cn/>  
<https://www.cia.gov/>  
[http://www.dtic.mil/doctrine/new\\_pubs/jp1\\_02.pdf](http://www.dtic.mil/doctrine/new_pubs/jp1_02.pdf), <http://www.chinaipa.org/>  
<https://www.cia.gov/>  
<http://www.defense.gov/>  
<http://www.dtic.mil>  
<http://eng.chinamil.com.cn/>  
<http://www.fas.org/>  
<http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/>  
<http://www.globalfirepower.com/>  
<http://www.globalsecurity.org/>  
<http://www.reachingcriticalwill.org/>  
<http://www.sinodefence.com/>  
<http://www.tradingeconomics.com>  
<http://www.treasury.gov/>  
<http://www.uscc.gov/>  
<http://www.usgovernmentpending.com/>  
<http://www.washingtontimes.com/>  
<http://www.whitehouse.gov/>  
<http://www.worldbank.org/>  
<http://www.worldpolicy.org/>

### Lampiran 1: Data Keseluruhan Ekonomi dan Anggaran Belanja Negara Amerika Serikat 2002-2010.

Data Anggaran Belanja Negara Amerika Serikat 2002-2010 (Dalam Milyar US \$)									
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Pensiun	493.82	518.91	530.74	555.01	590.77	630.16	659.90	728.19	766.32
Kesehatan	421.63	467.74	513.95	552.96	611.78	640.80	680.83	784.22	829.50
Pendidikan	79.46	94.34	95.92	105.43	118.91	103.40	104.30	91.69	157.00
Pertahanan	423.03	454.09	548.37	565.99	641.10	679.34	728.71	821.71	894.97
Kesejahteraan dan Ekonomi	225.74	243.78	250.20	256.61	261.45	260.62	279.35	403.43	565.24
Proteksi	34.44	36.14	41.60	40.66	41.34	45.31	46.20	53.31	55.03
Transportasi	62.13	64.23	68.14	68.49	71.64	74.61	80.27	94.31	106.46
Pengeluaran Umum Pemerintah	19.70	20.19	26.94	20.46	20.64	20.14	21.17	23.08	30.65
Pengeluaran lainnya	113.98	79.52	86.70	135.85	131.00	90.75	86.55	855.17	127.77
Interest /Bunga	178.39	161.44	156.26	177.95	220.05	239.15	243.95	142.74	187.77
<b>Total Pengeluaran</b>	<b>2052.32</b>	<b>2140.38</b>	<b>2318.83</b>	<b>2479.40</b>	<b>2708.68</b>	<b>2784.27</b>	<b>2931.22</b>	<b>3997.84</b>	<b>3720.70</b>
<b>Defisit Anggaran Federal</b>	<b>106.18</b>	<b>304.16</b>	<b>520.74</b>	<b>426.56</b>	<b>423.19</b>	<b>244.17</b>	<b>410.04</b>	<b>1841.19</b>	<b>1555.58</b>
<i>Gross Public Debt</i>	<i>6137.07</i>	<i>6752.03</i>	<i>7486.45</i>	<i>8031.38</i>	<i>8611.47</i>	<i>9007.77</i>	<i>9654.44</i>	<i>12867.46</i>	<i>12033.67</i>
Data Umum Perbandingan Ekonomi dan Pertahanan Amerika Serikat 2002-2010 (Dalam Milyar US \$)									
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
GDP	10590.20	11089.20	11812.30	12579.70	13336.20	13995.00	14296.90	14048.06	14586.74
Pertumbuhan GDP (%)	1.83	2.50	3.59	3.06	2.67	1.94	-0.02	-3.50	3.00
Total Anggaran Negara	2052.32	2140.38	2318.83	2479.40	2708.68	2784.27	2931.22	3997.84	3720.70
Anggaran Negara (% dari GDP)	0.19	0.19	0.20	0.20	0.20	0.20	0.21	0.28	0.26
Anggaran Pertahanan (data World Bank)	356.72	415.22	464.68	503.35	527.66	556.96	621.14	668.60	698.28
Anggaran Pertahanan - % dari GDP (data World Bank)	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05
Anggaran Pertahanan - % dari Anggaran Belanja Negara (data World Bank)	0.17	0.19	0.20	0.20	0.19	0.20	0.21	0.17	0.19
Anggaran Pertahanan (Aktual)	423.03	454.09	548.37	565.99	641.10	679.34	728.71	821.71	894.97
Anggaran Pertahanan - % dari GDP (Aktual)	0.04	0.04	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06
Anggaran Pertahanan - % dari Anggaran Belanja Negara (Aktual)	0.21	0.21	0.24	0.23	0.24	0.24	0.25	0.21	0.24
Anggaran Perang AS									
Irak	0.00	53.00	75.90	85.50	101.60	131.20	142.10	95.50	71.30
Afganistas	20.80	14.70	14.50	20.00	19.00	39.20	43.50	59.50	93.80
Enhanced Security	13.00	8.00	3.70	2.10	0.80	0.50	0.10	0.10	0.20
Belum dialokasikan	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Anggaran Perang</b>	<b>33.80</b>	<b>81.20</b>	<b>94.10</b>	<b>107.60</b>	<b>121.40</b>	<b>170.90</b>	<b>185.70</b>	<b>155.10</b>	<b>165.30</b>
Anggaran Perang - % dari Anggaran Petahanan (data World Bank)	0.09	0.20	0.20	0.21	0.23	0.31	0.30	0.23	0.24
Anggaran Perang - % dari Anggaran Petahanan (Aktual)	0.08	0.18	0.17	0.19	0.19	0.25	0.25	0.19	0.18
Anggaran Pertahanan non Perang	389.23	372.89	454.27	458.39	519.70	508.44	543.01	666.61	729.67

Data dari keseluruhan anggaran belanja pemerintahan Federal AS ini, diolah dari berbagai laporan “*US Federal Government Budget Spending*” yang dikeluarkan pemerintah untuk laporan kepada kongres (setiap *winter* per tahunnya), dan situs World Bank. Data resmi dapat dilihat pada situs percetakan negara AS yaitu <http://www.gpo.gov/> dan data agregat historis dapat diakses melalui: <http://www.usgovernmentspending.com/> dan <http://www.worldbank.org/> diakses pada 28 April 2012, pukul 23.00.

## Lampiran 2: Data Keseluruhan Anggaran Pertahanan Amerika Serikat 2002-2010.

Data Anggaran Pertahanan Amerika Serikat 2002-2010 (Dalam Milyar US \$)									
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Pertahanan Militer</b>	<b>347.99</b>	<b>376.29</b>	<b>453.68</b>	<b>465.87</b>	<b>535.94</b>	<b>571.87</b>	<b>607.26</b>	<b>690.31</b>	<b>719.18</b>
<i>Department of Defense - Militer</i>	330.55	358.16	434.78	443.90	512.05	548.89	583.05	664.99	692.03
Aktivitas <i>atomic energy defense</i>	15.86	16.35	16.63	18.69	18.75	17.88	17.78	18.54	19.98
Aktivitas Pertahanan Lainnya	1.57	1.783	2.276	3.287	5.141	5.108	6.434	6.781	7.172
<b>Pertahanan Sipil</b>	<b>na</b>	<b>na</b>	<b>na</b>	<b>na</b>	<b>na</b>	<b>na</b>	<b>na</b>	<b>na</b>	<b>na</b>
<b>Veteran</b>	51.53	57.07	60.45	68.16	70.41	72.40	86.62	96.68	124.66
<b>Bantuan Militer Luar Negeri</b>	<b>7.55</b>	<b>6.77</b>	<b>9.55</b>	<b>8.77</b>	<b>8.20</b>	<b>9.29</b>	<b>9.03</b>	<b>9.99</b>	<b>9.90</b>
<i>International security assistance</i>	7.55	6.77	9.55	8.77	8.20	9.29	9.03	9.99	9.90
<b>Bantuan Ekonomi Luar Negeri</b>	<b>15.97</b>	<b>13.97</b>	<b>24.69</b>	<b>23.19</b>	<b>26.55</b>	<b>25.79</b>	<b>25.80</b>	<b>24.74</b>	<b>41.24</b>
<i>International development and humanitarian assistance</i>	7.713	8.662	17.88	14.677	19.646	15.799	14.253	18.314	26.527
<i>Conduct of foreign affairs</i>	8.674	8.138	7.953	8.387	8.646	11.169	12.202	12.839	13.249
<i>Foreign information and exchange activities</i>	0.904	0.876	1.009	1.067	1.039	1.091	1.252	1.358	1.356
Program Internasional Lainnya	1.319	3.706	-2.151	0.943	2.783	2.274	1.906	7.775	0.11
<b>R&amp;D Pertahanan</b>	<b>na</b>	<b>na</b>	<b>na</b>	<b>na</b>	<b>na</b>	<b>na</b>	<b>na</b>	<b>na</b>	<b>na</b>
<b>Pengeluaran Pertahanan lainnya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>423.03</b>	<b>454.09</b>	<b>548.37</b>	<b>565.99</b>	<b>641.10</b>	<b>679.34</b>	<b>728.71</b>	<b>821.71</b>	<b>894.97</b>

Data dari keseluruhan anggaran belanja pemerintahan Federal AS ini, diolah dari berbagai laporan “*US Federal Government Budget Spending*” yang dikeluarkan pemerintah untuk laporan kepada kongres (setiap *winter* per tahunnya), dan situs World Bank. Data resmi dapat dilihat pada situs percetakan negara AS yaitu <http://www.gpo.gov/> dan data agregat historis dapat diakses melalui: <http://www.usgovernmentspending.com/> dan <http://www.worldbank.org/> diakses pada 28 April 2012, pukul 23.00.

## Lampiran 3: Bantuan Ekonomi dan Militer Amerika Serikat 2002-2009.

Negara									2008- 2009		
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Total	Eko-nomi	Militer
Total (dalam juta US\$)	16,83	20,03	25,89	33,61	37,18	39,41	40,86	48,92	44,957	33,95	11,01
Afghanistan	106	585	1,077	2,032	2,252	3,740	5,813	8,892	8,764	3,046	5,718
Albania	55	42	51	59	43	54	35	46	37	34	3
Algeria	3	4	4	4	2	4	6	13	12	11	1
Angola	88	126	161	116	67	52	49	58	55	54	1
Antigua and Barbuda	1	4	0	2	1	0	1	0	1	0	1
Argentina	4	3	5	4	2	3	9	4	4	3	1
Armenia	92	82	75	80	76	175	81	215	63	60	3
Austria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0

Azerbaijan	29	54	58	60	64	56	56	37	48	44	4
Bahamas	7	7	6	8	4	7	9	20	13	13	0
Bahrain	6	39	95	25	21	17	18	5	9	0	9
Bangladesh	162	101	102	93	84	82	93	171	172	171	1
Barbados	2	1	1	1	2	3	1	0	1	0	0
Belarus	6	3	6	4	13	13	15	12	14	14	0
Belgium	0	0	0	0	1	0	32	24	12	12	0
Belize	3	3	2	3	3	3	6	4	7	4	3
Benin	29	29	31	29	25	23	263	93	59	58	0
Bhutan	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Bolivia	203	188	209	183	162	224	181	128	101	101	0
Bosnia and Herzegovina	160	79	77	85	47	53	42	37	46	42	5
Botswana	2	3	15	22	42	44	214	211	104	103	1
Brazil	40	25	42	25	47	39	21	39	43	43	0
Bulgaria	60	55	55	43	44	40	27	26	21	12	9
Burkina Faso	15	16	15	18	33	21	28	45	509	508	0
Burma (Myanmar)	2	5	4	8	15	11	17	83	28	28	0
Burundi	35	26	44	49	59	50	38	46	63	63	1
Cambodia	45	54	63	93	98	71	75	76	83	80	4
Cameroon	6	8	16	13	13	10	7	20	24	24	0
Cape Verde	5	6	6	7	9	104	4	18	9	9	0
Central African Republic	0	1	16	19	16	4	37	31	36	36	0
Chad	9	5	7	59	63	82	98	127	222	222	0
Chile	3	2	4	3	4	2	2	3	7	6	1
China (P.R. Hong Kong)	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0
China (P.R.C.)	11	23	28	39	40	45	65	103	62	62	0
China (Tibet)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
China, Republic of (Taiwan)	0	0	0	1	1	2	43	21	32	32	0
Colombia	264	536	683	758	824	1,348	497	888	895	839	57
Comoros	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0
Congo (Brazzaville)	3	2	5	7	3	14	11	3	5	5	0
Congo (Kinshasa)	99	82	112	117	121	171	150	260	349	325	23
Costa Rica	4	3	5	5	5	5	7	9	9	7	2
Cote d'Ivoire	4	3	25	34	40	36	87	79	91	91	0
Croatia	71	62	42	29	30	17	14	6	5	4	2
Cuba	4	8	7	9	14	17	12	32	20	20	0
Cyprus	16	12	1	8	35	25	14	17	11	11	5
Czech Republic	11	14	29	10	8	14	32	8	9	5	0
Djibouti	3	3	22	32	8	13	14	10	12	10	2
Dominican Republic	46	35	39	45	36	47	57	54	69	68	1
Ecuador	65	89	89	91	87	76	66	52	46	45	1



Egypt	1,716	2,202	1,716	1,958	1,563	1,787	1,972	1,492	1,785	483	1,301
El Salvador	139	145	61	70	59	69	252	223	156	145	11
Equatorial Guinea	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eritrea	80	31	96	86	133	11	13	15	17	17	0
Estonia	8	8	11	9	8	9	5	11	13	10	3
Ethiopia	212	179	602	436	693	317	463	996	940	939	2
Fiji	0	0	1	2	2	3	1	2	3	3	0
France	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Gabon	2	2	3	3	2	2	2	1	1	1	0
Gambia	4	2	4	3	2	5	2	12	6	5	0
Georgia	97	190	92	124	106	251	97	274	622	609	13
Germany	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Ghana	70	62	76	73	72	94	431	230	175	174	1
Greece	5	1	8	1	1	1	1	1	1	1	0
Grenada	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0
Guatemala	80	92	83	77	96	106	84	111	141	140	1
Guinea	72	51	50	55	45	37	34	26	31	31	0
Guinea-Bissau	2	2	2	1	15	5	6	1	2	2	0
Guyana	17	6	11	20	24	22	31	30	23	23	0
Haiti	94	63	84	163	224	243	210	310	369	366	3
Honduras	52	50	71	66	271	89	63	74	42	42	0
Hungary	13	14	23	13	14	7	10	30	6	4	2
India	222	228	178	190	214	177	161	148	133	132	1
Indonesia	195	204	181	161	588	269	236	208	226	209	17
Iran	0	0	1	10	1	3	5	7	1	1	0
Iraq	0	2	3,885	8,675	9,482	10,563	7,959	7,506	2,256	2,253	3
Ireland	44	0	50	0	37	0	27	0	30	30	0
Israel	2,839	2,788	3,729	2,722	2,714	2,544	2,510	2,425	2,432	52	2,380
Jamaica	35	26	26	41	66	37	36	22	28	26	1
Japan	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
Jordan	272	339	1,696	637	683	562	542	879	816	578	238
Kazakhstan	47	66	61	78	66	110	105	112	91	86	5
Kenya	155	109	126	187	262	391	515	718	918	917	1
Kiribati	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
Korea	0	0	0	0	1	1	24	188	14	14	0
Republic of Korea	162	118	42	56	8	0	14	6	2	2	0
Democratic Republic of Korea	105	73	43	53	43	0	0	207	136	133	2
Kosovo	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
Kuwait	32	60	56	43	49	45	48	76	50	48	2
Kyrgyzstan	5	10	7	5	7	3	4	7	7	7	0
Laos	7	9	12	11	7	12	16	9	6	3	3
Latvia	53	15	67	36	25	174	209	198	215	155	61
Lebanon	2	2	3	5	4	4	39	362	38	37	0
Lesotho	2	2	3	5	4	4	39	362	38	37	0

Liberia	54	16	45	138	148	152	257	312	225	173	52
Libya	0	0	0	0	0	25	4	10	11	11	0
Lithuania	8	9	14	11	9	7	10	4	3	1	3
Macedonia	64	77	68	50	48	45	35	32	33	29	3
Madagascar	50	36	47	47	89	55	67	119	68	68	0
Malawi	39	61	39	53	84	73	105	103	135	135	0
Malaysia	2	2	3	2	12	5	7	53	40	39	1
Maldives	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
Mali	48	51	52	58	55	65	381	142	222	222	0
Malta	8	0	6	0	0	1	0	1	1	1	0
Marshall Islands	41	50	47	42	44	51	48	48	49	49	0
Mauritania	7	7	20	13	23	13	12	24	17	17	0
Mauritius	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0
Mexico	55	96	68	94	102	185	89	95	499	466	34
Micronesia (Federated States)	82	99	99	95	94	100	100	79	108	108	0
Moldova	51	39	39	47	32	27	47	20	28	26	1
Mongolia	18	26	23	32	19	16	17	325	39	37	2
Montenegro	0	0	0	0	0	17	9	10	6	5	1
Morocco	42	29	42	35	55	53	82	525	244	236	8
Mozambique	214	90	93	113	127	160	237	799	325	325	0
Namibia	16	15	32	31	50	64	91	131	396	396	0
Nepal	51	66	55	55	73	60	81	106	89	89	1
Netherlands	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	0
Nicaragua	67	54	67	62	96	163	58	145	46	44	1
Niger	11	15	14	20	27	34	38	50	44	44	0
Nigeria	98	111	93	132	151	187	340	485	501	498	2
Oman	1	26	82	26	26	19	15	24	19	11	8
Pakistan	188	1,080	587	441	758	954	975	963	1,783	1,354	429
Palau	14	14	14	15	13	27	27	27	27	27	0
Panama	17	21	20	26	21	34	29	16	30	27	3
Papua New Guinea	1	0	0	1	0	0	2	3	3	3	0
Paraguay	16	16	14	19	13	53	18	17	57	57	0
Peru	216	286	230	273	191	338	165	159	149	148	1
Philippines	151	208	205	238	167	212	169	161	185	155	30
Poland	18	44	32	37	93	34	32	31	79	49	29
Portugal	1	1	1	3	1	1	1	2	11	11	0
Qatar	0	0	0	0	1	1	1	0	4	4	0
Romania	67	56	67	49	63	53	35	26	21	8	14
Russia	541	447	722	941	1,585	1,530	1,593	1,261	479	396	83
Rwanda	39	47	48	59	83	103	122	172	170	169	0
Samoa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Sao Tome and Principe	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0
Saudi Arabia	0	0	0	0	1	2	1	1	1	1	0



Senegal	41	46	51	53	48	65	72	78	144	143	1
Serbia	0	0	0	0	0	129	119	58	51	49	2
Serbia and Montenegro	205	163	142	119	90	5	0	0	0	0	0
Seychelles	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
Sierra Leone	73	60	42	35	28	27	19	12	17	16	1
Singapore	0	0	0	0	0	0	7	1	8	8	0
Slovak Republic	16	12	17	8	13	6	6	7	3	1	2
Slovenia	6	5	6	4	6	1	4	2	3	2	1
Somalia	26	35	31	31	45	103	132	351	281	179	102
South Africa	70	106	86	130	187	262	399	568	571	570	1
Spain	0	0	0	0	0	0	3	0	2	2	0
Sri Lanka	28	31	31	39	160	49	44	69	90	82	8
St. Kitts and Nevis	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
St. Lucia	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	2
Sudan	96	122	188	482	1,043	908	1,180	1,416	1,213	1,174	39
Suriname	1	1	2	2	1	2	2	2	3	2	0
Swaziland	0	0	1	4	3	3	8	15	23	23	0
Syria	0	0	0	0	0	3	2	37	19	19	0
Tajikistan	62	77	47	50	64	48	33	70	48	47	1
Tanzania	107	60	80	100	137	188	233	1,056	377	377	0
Thailand	35	35	35	23	56	51	50	55	70	67	3
Timor-Leste	33	31	30	22	29	27	30	35	35	34	0
Togo	6	4	6	4	3	3	8	4	5	5	0
Tonga	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	1
Trinidad and Tobago	2	1	1	1	0	0	2	1	1	1	0
Tunisia	9	10	6	13	12	11	11	11	16	2	14
Turkey	7	278	29	50	54	23	30	21	19	15	4
Turkmenistan	7	12	7	7	11	9	14	23	10	9	0
Uganda	95	101	180	219	291	279	366	456	474	470	4
Ukraine	146	170	90	132	149	154	165	111	167	158	9
United Arab Emirates	0	1	0	0	1	1	11	1	0	0	0
United Kingdom	0	0	0	0	3	0	20	2	1	1	0
Uruguay	1	2	2	1	1	0	1	1	2	1	0
Uzbekistan	60	136	76	43	42	45	17	14	12	12	0
Vanuatu	1	1	2	2	2	60	4	13	5	5	0
Venezuela	12	16	16	13	10	10	8	19	7	7	0
Vietnam	25	19	45	47	39	48	68	88	104	103	0
West Bank/Gaza	240	218	191	139	350	274	165	575	1,039	1,039	0
Yemen	41	24	42	79	30	45	40	37	175	171	4
Zambia	51	72	66	103	144	196	204	263	292	292	0
Zimbabwe	23	50	31	33	61	31	141	234	286	286	0

Sumber : [http://www.census.gov/compendia/statab/cats/foreign\\_commerce\\_aid/foreign\\_aid.html](http://www.census.gov/compendia/statab/cats/foreign_commerce_aid/foreign_aid.html)

#### Lampiran 4: *Timeline* Kontak Militer Amerika Serikat dan China 2002-2010.

Tahun	Tanggal	Aktivitas	Cakupan Aktivitas	Total
2002	April 10-12	<i>The third plenary meeting under the MMCA was held in Shanghai. PACOM's Director for Strategic Planning and Policy (J5), Rear Admiral William Sullivan, and the PLA Navy's Deputy Chief of Staff, Rear Admiral Zhou Borong, led the delegations.</i>	D-D	15
	April 27-May 1	<i>PRC Vice President Hu Jintao visited PACOM and was welcomed by Admiral Dennis Blair. In Washington, Secretary of Defense Rumsfeld welcomed Hu with an honor cordon at the Pentagon. PRC media reported that Rumsfeld and Hu reached a consensus to resume military exchanges, but the Pentagon's spokeswoman said that they agreed to have their representatives talk about how to proceed on mil-to-mil contacts, which were still approved on a case-by-case basis. Vice President Hu also met with President Bush and Vice President Dick Cheney.</i>	P-P	
	May 14-28	<i>For the first time, the PLA sent observers to Cobra Gold 2002 in Thailand, a combined exercise involving forces of the United States, Thailand, and Singapore. Senators Jesse Helms and Robert Smith expressed their concerns to the Secretary of Defense.</i>	KM	
	June 26-27	<i>Assistant Secretary of Defense for International Security Affairs Peter Rodman visited Beijing to discuss a resumption of military exchanges. He met with General Xiong Guangkai and General Chi Haorian, who said that the PRC was ready to improve military relations with the United States. Secretary Rumsfeld told reporters on June 21, 2002, that Rodman would discuss the principles of transparency, reciprocity, and consistency for mil-to-mil contacts that Rumsfeld stressed to Vice President Hu Jintao.</i>	D-D	
	July 15-29	<i>In the first POW/MIA mission in China on a Cold War case, a team from the Army's Central Identification Laboratory in Hawaii (CILHI) went to northeastern Jilin province to search for, but did not find, the remains of two CIA pilots whose C-47 plane was shot down in 1952 during the Korean War.</i>	LB/MB	
	August 6-8	<i>The PLA and DOD held a meeting under the MMCA in Hawaii.</i>	D-D	
	August-September	<i>In a POW/MIA recovery mission, a team from the Army's Central Identification Laboratory in Hawaii (CILHI) recovered remains of the crew of a C-46 cargo plane that crashed in March 1944 in Tibet while flying the "Hump" route over the Himalaya mountains back to India from Kunming, China, during World War II. The two-month operation excavated a site at 15,600 ft.</i>	LB/MB	
	September	<i>PLA patrol aircraft and ships harassed the unarmed USNS Bowditch in international water in the Yellow Sea. The PLA claimed the ship's surveys violated the PRC's EEZ. The two countries traded diplomatic protests.</i>	NA	
	October 8-14	<i>The President of NDU, Vice Admiral Paul Gaffney, visited Beijing, Xian, Hangzhou, and Shanghai. He met with CMC Vice Chairman and Defense Minister Chi Haotian, Deputy Chief of General Staff Xiong Guangkai, and NDU President Xing Shizhong.</i>	D-D	
	October 25	<i>President Bush held a summit with PRC President Jiang Zemin at his ranch in Crawford, TX. Concerning security issues, President Bush said they discussed "the threat posed by the Iraqi regime," "concern about the acknowledgment of the Democratic People's Republic of Korea of a program to enrich uranium," counterterrorism (calling China an "ally"), weapons proliferation, Taiwan, and a "candid, constructive, and cooperative" relationship with contacts at many levels in coming months, including "a new dialogue on security issues." Jiang offered a vague proposal to reconsider the PLA's missile buildup in return for restraints in U.S. arms sales to Taiwan.</i>	P-P	
	November 24	<i>In the first U.S. naval port call to mainland China since the EP-3 crisis, the destroyer USS Paul F. Foster visited Qingdao.</i>	KM	
	November 30-December 8	<i>Lieutenant General Gao Jindian, a Vice President of the NDU, led a Capstone-like delegation to the United States.</i>	D-D	
December 4-6	<i>The Maritime and Air Safety Working Group under the MMCA met in Qingdao. The U.S. team toured the destroyer Qingdao.</i>	KM		

	December 9-10	<i>Following a two-year hiatus after the previous Defense Consultative Talks (DCT) in December 2000, the Pentagon held the 5th DCT (the first under the Bush Administration) and kept U.S. representation at the same level as that under the Clinton Administration. Under Secretary of Defense for Policy Douglas Feith met with General Xiong Guangkai, a Deputy Chief of General Staff, at the Pentagon. The PLA played up the status of Xiong and the DCT, calling the meeting "defense consultations at the vice ministerial level." At U.S. urging, Xiong brought a proposal for mil-to-mil exchanges in 2003. Feith told reporters that he could not claim progress in gaining greater reciprocity and transparency in the exchanges, although they had a discussion of these issues. They did not discuss Jiang's offer on the PLA's missile buildup. Feith also said that DOD had no major change in its attitude toward the PLA since the EP-3 crisis. Secretary Rumsfeld did not meet with Xiong. Deputy Secretary of Defense Wolfowitz and National Security Advisor Condoleezza Rice met with Xiong on December 10.</i>	D-D	
	December 12-17	<i>PACOM Commander, Admiral Thomas Fargo, visited Chengdu, Nanjing, Ningbo, Beijing, and Shanghai. The PLA showed him a live-fire exercise conducted by a reserve unit of an infantry division in Sichuan. General Liang Guanglie (Chief of General Staff) met with Admiral Fargo.</i>	KM	
2003	March 25-29	<i>The Director of the Defense POW/MIA Office (DPMO), Deputy Assistant Secretary of Defense Jerry Jennings, visited China and met with officials of the PLA, Ministry of Foreign Affairs, and Red Cross Society of China. Jennings said that the PRC has records that may well hold "the key" to helping DOD to resolve many of the cases of American POWs and MIAs from the Vietnam War, the Korean War, and the Cold War. While the PRC has been "very cooperative" in U.S. investigations of losses from World War II and Vietnam, Jennings said both sides suggested ways to "enhance cooperation" on Korean War cases and acknowledged that there is limited time. Jennings sought access to information in PRC archives at the national and provincial levels, assistance from PRC civilian researchers to conduct archival research on behalf of the United States, information from the Dandong Museum relating to two F-86 pilots who are Korean War MIAs, and resumption of contact with PLA veterans from the Korean War to build on information related to the PRC operation of POW camps during war.</i>	D-D	12
	April 9-11	<i>In Hawaii, in the fourth plenary meeting under the MMCA, PACOM's Director for Strategic Planning and Policy (J5), Rear Admiral William Sullivan, met with PLA Deputy Chief of Staff, Rear Admiral Zhou Borong.</i>	D-D	
	April 25-May 4	<i>The Commandant of the PLA's NDU, Lieutenant General Pei Hua'liang, led a delegation to visit the U.S. Naval Academy in Annapolis, MD; U.S. NDU in Washington, DC; Marine Corps Recruit Depot in San Diego, CA; and PACOM in Honolulu, HI.</i>	KM	
	May 15-29	<i>The PLA sent observers to Cobra Gold 2003 in Thailand, a combined exercise involving the armed forces of the US, Thailand, and Singapore.</i>	KM	
	August 19-21	<i>The Military Maritime and Air Safety Working Group under the MMCA met in Hawaii. The PLA met with PACOM's Chief of Staff for the Director for Strategic Planning and Policy, Brigadier General (USAF) Charles Neeley, and toured the U.S. Aegis-equipped cruiser USS Lake Erie.</i>	LB/MB	
	August 25	<i>The PLA arranged for 27 military observers from the United States and other countries to be the first foreign military observers to visit China's largest combined arms training base (in the Inner Mongolia Autonomous Region) and watch an exercise that involved elements of force-on-force, live-fire, and joint operational maneuvers conducted by the Beijing MR.</i>	KM	
	September 22-26	<i>In the first foreign naval ship visit to Zhanjiang, the cruiser USS Cowpens and frigate USS Vandegrift visited this homeport of the PLAN's South Sea Fleet. Its Chief of Staff, Rear Admiral Hou Yuexi, welcomed Rear Admiral James Kelly, Commander of Carrier Group Five, who also visited.</i>	KM	
	October 22-25	<i>The PLAN destroyer Shenzhen and supply ship Qinghai Lake visited Guam.</i>	KM	
	October 24-November 1	<i>Politburo Member, CMC Vice Chairman, and PRC Defense Minister, General Cao Gangchuan, visited PACOM in Hawaii, West Point in New York, and Washington, DC, where he met with Secretary of Defense Donald Rumsfeld and Secretary of State Colin Powell. General Cao stressed that Taiwan was the most important dispute. The PLA sought the same treatment for General Cao as that given to General Chi Haotian when he visited Washington as defense minister in 1996 and was granted a meeting with President Clinton. In the end, President Bush dropped by for five minutes when General Cao met with National Security Advisor Rice at the White House Rumsfeld did not attend the PRC Embassy's banquet for Cao. At PACOM, Cao met with Admiral Thomas Fargo and toured the cruiser USS Lake Erie.</i>	D-D	

	November 12-19	<i>Nanjing MR Commander, Lieutenant General Zhu Wenquan, visited PACOM where he met with Admiral Thomas Fargo and boarded the destroyer USS Russell. Zhu visited San Diego, where he toured the carrier USS Nimitz and the Marine Corps Recruit Depot. He also stopped in Washington and West Point in New York.</i>	KM	
	November 18	<i>PRC official on Taiwan affairs who is a PLA major general, Wang Zaixi, issued a threat to use force against the perceived open promotion of Taiwan independence campaigning for re-election on March 20, 2004, Taiwan's President Chen Shui-bian was calling for controversial referendums and a new Taiwan constitution. On the eve of his visit to Washington, PRC Premier Wen Jiabao threatened that China would "pay any price to safeguard the unity of the motherland." On December 3, PRC media reported the warnings of a PLA major general and a senior colonel at AMS, who wrote that Chen's use of referendums to seek independence will push Taiwan into the "abyss of war." They warned that China would be willing to pay the costs of war, including boycotts of the 2008 Olympics in Beijing, drops in foreign investment, setbacks in foreign relations, wartime damage to the southeastern coast, economic costs, and PLA casualties.</i>	NA	
	December 9	<i>Appearing with Premier Wen at the White House on , President Bush criticized Chen, saying that "we oppose any unilateral decision by either China or Taiwan to change the status quo. And the comments and actions made by the leader of Taiwan indicate that he may be willing to make decisions unilaterally to change the status quo, which we oppose."</i>	NA	
2004	January 13-16	<i>The Chairman of the Joint Chiefs of Staff, General (USAF) Richard Myers, visited Beijing, the first visit to China by the highest ranking U.S. military officer since November 2000. General Myers met with Generals Guo Boxiong and Cao Gangchuan (CMC Vice Chairmen) and General Liang Guanglie (PLA Chief of General Staff). CMC Chairman Jiang Zemin met briefly with Myers, echoing President Bush's brief meeting with General Cao. The PLA generals and Jiang stressed Taiwan as their critical issue. General Myers stressed that the United States has a responsibility under the TRA to assist Taiwan's ability to defend itself and to ensure that there will be no temptation to use force. Myers pointed to the PLA's missile buildup as a threat to Taiwan. The PLA allowed Myers to be the first foreign visitor to tour the Beijing Aerospace Control enter, headquarters of its space program. Myers discussed advancing mil-to-mil contacts, including search and rescue exercises, educational exchanges, ship visits, and senior-level exchanges (including a visit by General Liang Guanglie). Myers also indicated a U.S. expectation of exchanges between younger officers, saying that interactions at the lower level can improve mutual understanding in the longer run.</i>	KM	10
	February 10-11	<i>Under Secretary of Defense for Policy Douglas Feith visited Beijing to hold the 6th DCT with General Xiong Guangkai, a meeting which the PLA side claimed to be "defense consultations at the vice ministerial level." Feith met with General Cao Gangchuan (a CMC Vice Chairman and Defense Minister), who raised extensively the issue of Taiwan and the referendums. Feith said he discussed North Korean nuclear weapons, Taiwan, and maritime safety. He stressed that avoiding a war in the Taiwan Strait was in the interests of both countries and that belligerent rhetoric and the PLA's missile buildup do not help to reduce cross-strait tensions. The PRC's Foreign Ministry said that the two sides discussed a program for mil-to-mil contacts in 2004. The Department of defense proposed a defense telephone link (DTL), or "hotline," with the PLA.</i>	D-D	
	February 24-28	<i>The USS Blue Ridge , the 7th Fleet's command ship, visited Shanghai. In conjunction with the port call, Vice Admiral Robert Willard, Commander of the 7th Fleet, met with Rear Admiral Zhao Guojun, Commander of the East Sea Fleet.</i>	KM	
	March 9-11	<i>The Maritime and Air Safety Working Group under the MMCA met in Shanghai. The U.S. visitors met with Rear Admiral Zhou Borong, Deputy Chief of Staff of the PLAN, and toured the frigate Lianyungang.</i>	KM	
	May 3- June 29	<i>A team from the Joint POW/MIA Accounting Command (JPAC) traveled to northeastern city of Dandong near China's border with North Korea on an operation to recover remains of a pilot whose F-86 fighter was shot down during the Korean War. In following up on an initial operation in July 2002 on a Cold War case, the U.S. team also went to northeastern Jilin province to recover remains of two CIA pilots whose C-47 transport plane was shot down in 1952.</i>	LB/MB	



	July 21-25	<i>PACOM Commander, Admiral Thomas Fargo, visited China and met with General Liu Zhenwu (Guangzhou MR Commander), Foreign Minister Li Zhaoxing, General Liang Guanglie (Chief of General Staff), and General Xiong Guangkai (a Deputy Chief of General Staff), who opposed U.S arms sales with Taiwan. Fargo said that policy on Taiwan has not changed.</i>	D-D	
	August-September	<i>DPMO sent a team to Tibet to recover wreck age from a site where a C-46 aircraft crashed during World War II.</i>	LB/MB	
	September 24-27	<i>The USS Cushing , a destroyer with the Pacific Fleet, visited Qingdao for a port visit.</i>	KM	
	October 24-30	<i>Reciprocating General Myers' visit to China, PLA Chief of General Staff, General Liang Guanglie, visited the United States, including the Joint Forces Command and Joint Forces Staff College at Norfolk; the carrier USS George Washington and the destroyer USS Laboon at Norfolk Naval base; Air Combat Command at Langley Air Force Base; Joint Task Force-Civil Support at Fort Monroe; Army Infantry Center at Fort Benning; Washington, D.C.; and Air Force Academy in Colorado Springs. In Washington, General Liang held meetings with National Security Advisor Condoleezza Rice, Secretary of State Colin Powell, and General Richard Myers, Chairman of the Joint Chiefs of staff. Secretary of Defense Rumsfeld saw General Liang briefly. Talks covered military exchanges, the Six-Party Talks on North Korea, and Taiwan.</i>	D-D	
	November 22-23	<i>DPMO held Technical Talks in Beijing on POW/MIA recovery operations in 2005.</i>	D-D	
2005	January 30-February 1	<i>Deputy Under Secretary of Defense Richard Lawless visited Beijing to hold a Special Policy Dialogue for the first time, as a forum to discuss policy problems separate from safety concerns under the MMCA. Meeting with Zhang Bangdong, Director of the PLA's Foreign Affairs Office, Lawless tried to negotiate an agreement on military maritime and air safety. He also discussed a program of military contacts in 2005, the U.S. proposal of February 2004 for a "hotline," Taiwan, the DCTs, PLA's buildup, and a possible visit by Secretary Rumsfeld. Lawless also met with General Xiong Guangkai.</i>	D-D	13
	February 23-25	<i>Deputy Assistant Secretary of Defense for POW/MIA Affairs Jerry Jennings visited Beijing and Dandong to discuss China's assistance in resolving cases from the Vietnam War and World War II. He also continued to seek access to China's documents related to POW camps that China managed during the Korean War. At Dandong, Jennings announced the recovery of the remains of a U.S. Air Force pilot who was missing-in-action from the Korean War.</i>	D-D	
	April 29-30	<i>General Xiong Guangkai, Deputy Chief of General Staff, visited Washington to hold the 7th DCT with Under Secretary of Defense Douglas Feith. They continued to discuss the U.S. proposal for a "hotline" and an agreement on military maritime and air safety with the PLA and also talked about military exchanges, international security issues, PLA modernization, U.S. military redeployments and energy. Xiong also met with Deputy Secretary of Defense Paul Wolfowitz, National Security Advisor Stephen Hadley, and Under Secretary of State Nicholas Burns.</i>	D-D	
	July 7-8	<i>The Department of Defense and the PLA held an annual MMCA meeting in Qingdao, to discuss unresolved maritime and air safety issues under the MMCA.</i>	D-D	
	July 18-22	<i>General Liu Zhenwu, Commander of the PLA's Guangzhou MR, visited Hawaii, as hosted by Admiral William Fallon, Commander of the Pacific Command. Among visits to parts of the Pacific Command, General Liu toured the USS Chosin, a Ticonderoga-class cruiser.</i>	KM	
	September 6-11	<i>Admiral William Fallon, Commander of the Pacific Command, visited Beijing, Shanghai, Guangzhou, and Hong Kong at the invitation of General Liu Zhenwu, Guangzhou MR Commander. As Admiral Fallon said he sought to deepen the "exceedingly limited military interaction," he met with high-ranking PLA Generals Guo Boxiong (CMC Vice Chairman) and Liang Guanglie (Chief of General Staff). Fallon discussed military contacts between junior officers; PLA observers at U.S. exercises; exchanges with more transparency and reciprocity; cooperation in disaster relief and control of avian flu; and reducing tensions.</i>	D-D	
	September 13-16	<i>The destroyer USS Curtis Wilbur visited Qingdao, hosted by the PLAN's North Sea Fleet.</i>	KM	
	September 27	<i>U.S. and other foreign military observers (from 24 countries) observed a PLA exercise ("North Sword 2005") at the PLA's Zhurihe training base in Inner Mongolia in the Beijing MR.</i>	LB/MB	

	October 18-20	<i>Defense Secretary Donald Rumsfeld visited Beijing, China. He met with General Cao Gangchuan (including a visit to the office in the August 1st [Bayi] Building of this CMC Vice Chairman and Defense Minister), General Guo Boxiong (a CMC Vice Chairman), General Jing Zhiyuan (commander of the Second Artillery, or missile corps, in the first foreign visit to its headquarters), and Hu Jintao (Communist Party General Secretary, CMC Chairman, and PRC president). General Jing introduced the Second Artillery and repeated the PRC's declared "no first use" nuclear weapons policy. Rumsfeld's discussions covered military exchanges; greater transparency from the PLA, including its spending; China's rising global influence; Olympics in Beijing in 2008; and China's manned space program. Rumsfeld also held round-tables at the Central Party School and Academy of Military Science. The PLA denied a U.S. request to visit its command center in the Western Hills, outside Beijing, and continued to deny agreement on a "hot line." The PLA did not agree to open archives believed to hold documents on American POWs in the Korean War, an issue raised by Assistant Secretary of Defense Peter Rodman and Deputy Under Secretary of Defense Richard Lawless.</i>	D-D	
	November 13-19	<i>The PLA sent its first delegation of younger, mid-ranking brigade and division commanders and commissars to the United States. Led by Major General Zhang Wenda, Deputy Director of the GSD's General Office, they visited units of the Pacific Command in Hawaii and Alaska.</i>	KM	
	December 8-9	<i>Deputy Under Secretary of Defense Lawless visited Beijing to discuss the military exchange program in 2006 and military maritime security. He met with the Director of the PLA's Foreign Affairs Office, Major General Zhang Bangdong, and Deputy Chief of General Staff, General Xiong Guangkai.</i>	D-D	
	December 12-15	<i>A delegation from the PLA's NDU, led by Rear Admiral Yang Yi, Director of the Institute for Strategic Studies, visited Washington (NDU, Pentagon, and State Department).</i>	D-D	
	13 December	<i>Following up on Rumsfeld's visit, a DPMO delegation visited Beijing to continue to seek access to China's archives believed to contain information on American POWs during the Korean War. The delegation also discussed POW/MIA investigations and recovery operations in China in 2006.</i>	D-D	
2006	January 9-13	<i>PLA GLD delegation representing all MRs visited PACOM (hosted by Col. William Carrington, J1) to discuss personnel management, especially U.S. vs. PLA salaries.</i>	D-D	23
	February 27-28	<i>A PACOM military medical delegation visited China.</i>	KM	
	March 13-18	<i>To reciprocate the PLA's first mid-ranking delegation's visit in November 2005, PACOM's J5 (Director for Strategic Planning and Policy), Rear Admiral Michael Tracy, led a delegation of 20 O-5 and O-6 officers from PACOM's Army, Marines, Navy, and Air Force commands to Beijing, Shanghai, Nanjing, Hangzhou, and Ningbo.</i>	KM	
	April 9-15	<i>NDU President Lt. Gen. Michael Dunn and Commandant of the Industrial College of the Armed Forces (ICAF) Maj. Gen. Frances Wilson visited Beijing, Nanjing, and Shanghai.</i>	KM	
	May 9-15	<i>PACOM Commander, Admiral William Fallon, visited Beijing, Xian, Hangzhou, and cities close to the border with North Korea, including Shenyang. He met with a CMC Vice Chairman, General Cao Gangchuan, and a Deputy Chief of General Staff, General Ge Zhenfeng, and discussed issues that included the U.S.-Japan alliance and real PLA spending. Fallon was the first U.S. official to visit the 39th Group Army, where he saw a showcase unit (346th regiment). At the 28th Air Division near Hangzhou, he was the first U.S. official to see a new FB-7 fighter. He invited the PLA to observe the U.S. "Valiant Shield" exercise in June near Guam.</i>	D-D	
	May 15-26	<i>A PLA delegation observed "Cobra Gold," a multilateral exercise hosted by Thailand and PACOM.</i>	LB/MB	
	June 8	<i>Assistant Secretary of Defense Peter Rodman visited Beijing for the 8th DCT, the first time at this lower level and without Xiong Guangkai. He talked with Major General Zhang Qinsheng, Assistant Chief of General Staff, about exchanges, weapons nonproliferation, counterterrorism, Olympics, invitation to the Second Artillery commander to visit, etc.</i>	D-D	
	June 16-23	<i>A PLA and civilian delegation of 12, led by Rear Admiral Zhang Leiyu, a PLAN Deputy Chief of Staff and submariner, observed the U.S. "Valiant Shield" exercise that involved three carrier strike groups near Guam. They boarded the USS Ronald Reagan and visited Guam's air and naval bases.</i>	KM	
	June 27-30	<i>USS Blue Ridge (7th Fleet's command ship) visited Shanghai.</i>	KM	

July 16-22	<i>The highest ranking PLA commander, a Politburo Member, and a CMC Vice Chairman, General Guo Boxiong, visited San Diego (3rd Marine Aircraft Wing and carrier USS Ronald Reagan ), Washington, and West Point, at Defense Secretary Rumsfeld's invitation. General Guo agreed to hold a combined naval search and rescue exercise (a U.S. proposal for the past two years in the context of the MMCA talks) and to allow U.S. access to PLA archives with information on U.S. POW/MIAs from the Korean War (a U.S. request for many years). Guo personally gave Rumsfeld information on his friend, Lt. j.g. James Deane, a Navy pilot who was shot down by the PLA Air Force in 1956. Guo also had meetings with Representatives Mark Steven Kirk and Rick Larsen (co-chairs of the U.S.-China Working Group), Secretary of State Condoleezza Rice, and National Security Advisor Stephen Hadley, and President Bush briefly dropped by for 10 minutes during the last meeting. During the meetings and an address at the National Defense University, General Guo discussed North Korea's July 4 missile tests, critically citing the U.N. Security Council resolution condemning the tests (remarks not reported by PRC press). In contrast to the meeting in Beijing with General Myers in January 2004, Taiwan was not a heated topic in General Guo's talks with Rumsfeld and the Chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Peter Pace.</i>	D-D
August 7-11	<i>MMCA plenary and working group meetings held in Hawaii. The two sides established communication protocols, planned communications and maneuver exercises, and scripted the two phases of the planned search and rescue exercise.</i>	D-D
August 21-23	<i>PACOM Commander, Admiral Fallon, visited Harbin.</i>	KM
September 6-20	<i>The PLAN destroyer Qingdao visited Pearl Harbor (and held the first U.S.-PLA basic exercise in the use of tactical signals with the U.S. Navy destroyer USS Chung-Hoon ) and San Diego (and held the first bilateral search and rescue exercise (SAREX), under the MMCA, with the destroyer USS Shoup).</i>	KM
September 10-21	<i>In the second such visit after 1998, a huge 58-member PLA Air Force delegation, with its own PLAAF aircraft, visited Elmendorf AFB (saw an F-15C fighter) in Alaska, Air Force Academy and Air Force Space Command in Colorado, Maxwell AFB and Air War College in Alabama, Andrews AFB in Maryland, the Pentagon in DC, McGuire AFB and Atlantic City in New Jersey, Philadelphia, and New York.</i>	KM
September 20-30	<i>DPMO Team visited China to discuss POW/MIA concerns.</i>	D-D
September 26	<i>USS Chancellorsville made a port visit to Qingdao.</i>	KM
September 26-28	<i>Principal Deputy Under Secretary of Defense for Policy, Ryan Henry, visited Beijing and Xian. He briefed PLA General Ge Zhenfeng, Deputy Chief of General Staff, on the Quadrennial Defense Review (QDR) of February 2006.</i>	D-D
October 8-13	<i>A U.S. delegation from the Office of the Deputy Under Secretary of Defense for Installations and Environment visited China to discuss military environmental issues.</i>	D-D
October 20-27	<i>A delegation of NDU operational commanders visited the United States.</i>	D-D
October 26	<i>a PLAN Song-class diesel electric submarine approached undetected to within five miles of the aircraft carrier USS Kitty Hawk near Okinawa. PACOM Commander Admiral Fallon argued that the incident showed the need for military-to-military engagement to avoid escalations of tensions.</i>	NA
October 30-November 4	<i>PLA mid-level, division and brigade commanders (senior colonels and colonels) visited Honolulu, toured the destroyer USS Preble in San Diego, and observed training at Camp Pendleton Marine Base. They were denied requests to have closer looks at an aircraft carrier and Strykers.</i>	KM
November 12-19	<i>Commander of the Pacific Fleet, Adm. Gary Roughead, visited Beijing, Shanghai, and Zhanjiang, overseeing second phase of bilateral search and rescue exercise (involving the visiting amphibious transport dock USS Juneau and destroyer USS Fitzgerald ), and the first Marine Corps visit to the PRC.</i>	KM
December 7-8	<i>Stemming from the MMCA-related Special Policy Dialogue of 2005, the Deputy Assistant Secretary of Defense held the 1st Defense Policy Coordination Talks (DPCT) in Washington with the director of the PLA's Foreign Affairs Office to discuss a dispute over EEZs.</i>	D-D

	January 11	<i>PLA conducted its first successful direct-ascent anti-satellite (ASAT) weapons test by launching a missile with a kinetic kill vehicle to destroy a PRC satellite at about 530 miles up in space.</i>	NA	
	January 28-February 9	<i>Deputy Chief of General Staff, General Ge Zhenfeng led a PLA delegation to visit PACOM in Honolulu, Washington, Fort Monroe, Fort Benning, and West Point. The U.S. Chief of Staff of the Army (CSA) hosted Ge, who also met with the Deputy Secretary of Defense and Vice Chairman of the Joint Chiefs of Staff in the Pentagon. However, the PLA declined to attend the Pacific Armies' Chiefs' Conference in August and a reciprocal visit by the CSA.</i>	D-D	
	January 30-31	<i>DPMO/JPAC delegation visited China to discuss POW/MIA cooperation.</i>	D-D	
	February 23-28	<i>Commander of Combined Forces Command-Afghanistan, Lt. General Karl Eikenberry, visited China.</i>	KM	
	March 22-25	<i>Chairman of the Joint Chiefs of Staff, Marine Corps General Peter Pace, was hosted in China by Chief of General Staff Liang Guanglie and also met with CMC Vice Chairmen Guo Boxiong and Cao Gangchuan. Pace visited Beijing, Shenyang, Anshan, Dalian, and Nanjing, including the Academy of Military Sciences, Shenyang MR (where he was the first U.S. official to sit in a PLAAF Su-27 fighter and a T-99 tank), and the Nanjing MR command center.</i>	KM	
	April 1-7	<i>PLA Navy Commander Wu Shengli visited Honolulu and Washington, where he met with the PACOM Commander Keating, Pacific Fleet Commander Roughhead, Chief of Naval Operations (CNO) Mullen, Deputy Secretary of Defense England, Chairman of the Joint Chiefs of Staff Pace, and Navy Secretary Winter. The CNO, Admiral Michael Mullen, discussed his "1,000-ship navy" maritime security concept with Vice Admiral Wu. He also toured the Naval Academy at Annapolis, the cruiser USS Lake Erie in Honolulu, and aircraft carrier USS Harry Truman and nuclear attack submarine USS Montpelier at Norfolk Naval Base. Wu also went to West Point.</i>	D-D	
	April 15-22	<i>General Counsel of the Defense Department William Haynes II visited Beijing and Shanghai, and met with GPD Director Li Jinai. Haynes sought to understand the rule of law in China.</i>	D-D	
2007	April 21-28	<i>U.S. mid-level officers' visit to China, led by RAdm Michael Tracy (PACOM J-5). The delegation visited Beijing, Qingdao, Nanjing, and Shenyang, including the East Sea Fleet Headquarters, a Su-27 fighter base, and 179th Brigade.</i>	KM	15
	May 12-16	<i>PACOM Commander Admiral Timothy Keating visited Beijing, meeting with CMC Vice Chairman Guo Boxiong and questioning the ASAT weapon test in January. Keating also met with PLA Navy Commander Wu Shengli and heard interest in acquiring an aircraft carrier. Keating visited the Nanjing MR (including the Nanjing Naval Command, Nanjing Polytechnic Institute, and 179th Brigade). At a press conference in Beijing on May 12, Keating suggested U.S. "help" if China builds aircraft carriers.</i>	D-D	
	June 15-25	<i>In the third such visit and nominally under its Command College, the PLAAF sent a 20-member delegation (U.S. limit reduced from 58 members in September 2006). They visited New York, McGuire AFB (saw KC-135 Stratotanker) in New Jersey, the Pentagon in D.C., Maxwell AFB and Air War College in Alabama, Lackland AFB and Randolph AFB (Personnel Center) in Texas, and Los Angeles.</i>	KM	
	July 23-29	<i>Pacific Air Forces Commander, General Paul Hester, visited Beijing and Nanjing. He met with PLAAF Commander Qiao Qingchen and Deputy Chief of General Staff Ge Zhenfeng. Hester visited Jining Air Base (as the first U.S. visitor) and Jianqiao Air Base. He was denied access to the J-10 fighter.</i>	KM	
	August 17-23	<i>After nomination to be Chairman of Joint Chiefs of Staff, the CNO, Adm. Michael Mullen, visited Lushun, Qingdao, Ningbo, and Dalian Naval Academy. He met with PLAN Commander Wu Shengli and two CMC Vice Chairmen, Generals Guo Boxiong and Cao Gangchuan. After postponing his reciprocal visit (for hosting PLAN Commander Wu Shengli in April) due to inadequate substance and access given by the PLA, Mullen got unprecedented observation of an exercise, boarding a Song-class sub and Luzhou-class destroyer.</i>	D-D	
	November 4-6	<i>Defense Secretary Robert Gates visited China (then South Korea and Japan). Defense Minister Cao Gangchuan finally agreed to the U.S. proposal to set up a defense telephone link (hotline). Gates also sought a dialogue on nuclear policy and broader exchanges beyond the senior level. Gates also met with CMC Vice Chairmen Guo Boxiong and Xu Caihou, and Chairman Hu Jintao.</i>	D-D	



	November	<i>In November 2007, the PRC Ministry of Foreign Affairs disapproved a number of port calls at Hong Kong by U.S. Navy ships, including two minesweepers in distress (USS Patriot and USS Guardian ) seeking to refuel in face of an approaching storm, and the aircraft carrier USS Kitty Hawk and accompanying vessels planning on a holiday and family reunions for Thanksgiving. In response, on November 28, President Bush raised the problem with the PRC's visiting Foreign Minister, and Deputy Assistant Secretary of Defense David Sedney lodged a demarche to the PLA. When the Kitty Hawk left Hong Kong, it transited the Taiwan Strait, raising PRC objections. In Beijing in January 2008, Admiral Keating asserted that the strait is international water and PRC permission is not needed.</i>	NA	
	December 3	<i>9th DCT was held in Washington. PLA Deputy Chief of General Staff Ma Xiaotian and Under Secretary of Defense for Policy Eric Edelman led discussions that covered PLA objections to U.S. arms sales to Taiwan and U.S. law restricting military contacts, military exchanges in 2008, nuclear proliferation in North Korea and Iran (including the just-issued U.S. National Intelligence Estimate on Iran's nuclear program), lower-ranking exchanges, hotline, PLA's suspension of some visits and port calls in Hong Kong, and U.S. interest in a strategic nuclear dialogue. The PLA delegation included PLAN Deputy Chief of Staff Zhang Leiyou and 2nd Artillery Deputy Chief of Staff Yang Zhiguo. They also met: Deputy Defense Secretary Gordon England, Vice Chairman of the Joint Chiefs of Staff James Cartwright, Deputy National Security Advisor James Jeffrey, and Deputy Secretary of State John Negroponte.</i>	D-D	
	January 13-18	<i>In his 2nd visit as PACOM Commander, Adm. Timothy Keating, visited Beijing, Shanghai, and Guangzhou, before Hong Kong. He visited AMS and Guangzhou MR, and met with PLA Chief of General Staff, General Chen Bingde; CMC Vice Chairman, General Guo Boxiong, who demanded an end to U.S. arms sales to Taiwan. Keating discussed planned exchanges with a new invitation to the PLA to participate in the Cobra Gold multilateral exercise in May, the PRC's strategic intentions, denied port calls in Hong Kong, etc. (But the PLA only observed Cobra Gold in Thailand in May 2008.)</i>	D-D	
	February 23-27	<i>PACOM's Director for Strategic Planning and Policy (J-5), USMC Major General Thomas Conant, and PLA Navy Deputy Chief of Staff Zhang Leiyou led an annual plenary meeting under the MMCA in Qingdao, the first since 2006. The U.S. delegation visited the frigate Luoyang. The U.S. side opposed PLA proposals to discuss policy differences and plan details of naval exercises at the MMCA meetings.</i>	D-D	
	February 25-29	<i>Deputy Assistant Secretary of Defense for POW/MIA Affairs Charles Ray signed a Memorandum of Understanding in Shanghai on February 29, 2008, gaining indirect access to PLA archives on the Korean War in an effort to resolve decades-old POW/MIA cases.</i>	D-D	
2008	February 26-29	<i>Deputy Assistant Secretary of Defense David Sedney met with PLA Assistant Chief of General Staff, Major General Chen Xiaogong, in Beijing. Sedney also led the 2nd meeting of the DPCT in Shanghai. Sedney and Major General Qian Lihua, Director of the PLA's Foreign Affairs Office, signed an agreement to set up a hotline.</i>	D-D	13
	March 22	<i>Days before Taiwan's presidential election and referendums on March 22, 2008, in a sign of U.S. anxiety about PRC threats to peace and stability, the Defense Department had two aircraft carriers (including the Kitty Hawk returning from its base in Japan for decommissioning) positioned east of Taiwan to respond to any provocative situation.</i>	NA	
	March 7-15	<i>PACOM's Deputy Director for Strategic Planning and Policy, Brigadier General Sam Angelella, led a 19-member group of mid-level officers to Beijing, Zhengzhou, and Qingdao.</i>	KM	
	March 29-April 6	<i>The U.S. Marine Corps Commandant, General James Conway, visited Beijing, as hosted by PLA Navy Commander Wu Shengli. Conway met with Defense Minister Liang Guanglie and spoke at NDU. The PLAN allowed Conway to board an amphibious ship, a destroyer, and an expeditionary fighting vehicle. In meeting Guangzhou MR Commander, Lt. Gen. Zhang Qinsheng, Conway apparently discussed deploying forces together in disaster relief operations.</i>	D-D	
	April 21-22	<i>The first talks on nuclear weapon strategy and policy held in Washington at the "experts" level.</i>	D-D	
	May 18	<i>After the earthquake in China on May 12, PACOM sent two C-17 transport aircraft from Guam to Chengdu to deliver disaster relief supplies. PACOM Commander Keating used the Pentagon's hotline to discuss that aid with PLA Deputy Chief of General Staff Ma Xiaotian.</i>	D-D	

	June 16-21	<i>Air Force Command Chief Master Sgt James Roy from PACOM led the first U.S. NCO delegation to China. The group of senior NCOs visited the PLA's 179th Infantry Battalion in Nanjing and the Second Artillery (Missile Force) Academy's NCO training school in Wuhan.</i>	KM	
	July 6-17	<i>PLA Lieutenant General Zhang Qinsheng, Guangzhou MR Commander, led a delegation to Hawaii. He met with Admiral Robert Willard, Commander of the Pacific Fleet, at his headquarters and with Rear Adm. Joe Walsh, Submarine Force Commander, during a tour of the attack submarine USS Santa Fe. The PLA delegation also was able to observe the RIMPAC exercise. PACOM Commander, Admiral Timothy Keating, agreed with Zhang about planning for two humanitarian aid exercises, the first combined land-based ones, to "push the envelope." The PLA delegation also visited Alaska, Washington, D.C., and New York. In Washington, Zhang met with U.S. officials of the Marine Corps, Departments of Defense and State, and NSC, including Deputy Secretary of Defense Gordon England.</i>	D-D	
	September 30-October 2	<i>The PLA sent its first "NCO" delegation to PACOM supposedly to reciprocate the U.S. NCO visit in June. However, the PLA delegation was led by Major General Zhong Zhiming, and only 3 out of 13 members in the group were enlisted.</i>	KM	
	December 17-19	<i>After the PLA suspended some military exchanges in response to notifications to Congress of arms sales to Taiwan on October 3, Deputy Assistant Secretary of Defense David Sedney visited Beijing to try without success to resume exchanges. He met with PLA Assistant Chief of General Staff Chen Xiaogong.</i>	D-D	
2009	January	<i>The PLA Navy and U.S. Navy coordinated anti-piracy operations off Somalia.</i>	D-D	13
	February 27-28	<i>Deputy Assistant Secretary of Defense David Sedney again visited Beijing to resume military exchanges after suspension in October 2008. He held the 3rd DPCT, met with Deputy Chief of General Staff Ma Xiaotian, and then called his meetings "the best set of talks" he has experienced. However, results were limited, and the PLA raised U.S. "obstacles," including arms sales to Taiwan, legal restrictions on military contacts, and reports on PRC Military Power.</i>	D-D	
	April 5-11	<i>Deputy Assistant Secretary of Defense for Prisoner of War/Missing Personnel Affairs (POW/MPA) Charles Ray and JPAC Commander Rear Admiral Donna Crisp visited Beijing and Liaoning province to discuss progress in the PLA's research of archives from the Korean War and toured the PLA's archives.</i>	D-D	
	April 17-21	<i>Admiral Gary Roughead, CNO, visited Beijing and Qingdao in part for the international fleet review for the 60th anniversary of the PLA Navy. Admiral Roughead conducted a working visit with PLAN Commander Admiral Wu Shengli and also met with Defense Minister General Liang Guanglie, and PLAN North Sea Fleet Commander Admiral Tian Zhong. Roughead raised concern about operational safety of naval encounters, port visits and reciprocity, and potential cooperation in anti-piracy and search and rescue.</i>	D-D	
	May	<i>In May 2009, there was another incident involving the USNS Victorious and PRC fishing ships in the Yellow Sea. In June, the USS John S. McCain's towed sonar array suffered a collision with a PLA submarine off the coast of the Philippines, in what could have been an accident.</i>	NA	
	June 23-24	<i>Under Secretary of Defense for Policy Michele Flournoy visited Beijing for the 10th DCT and met with Lt. Gen. Ma Xiaotian, Deputy Chief of General Staff. They agreed to hold a special MMCA meeting to discuss disputes over maritime safety and freedom of navigation in the PRC's EEZ. While the U.S. Navy tracked a North Korean ship with suspicious cargo for Burma, Flournoy said they did not discuss enforcement of U.N. sanctions against North Korea and the meeting was not "appropriate" to discuss "operational" matters. They discussed regional security in North Korea, Iran, Afghanistan, and Pakistan. The U.S. side briefed the PLA on the Nuclear Posture Review (NPR) and Quadrennial Defense Review (QDR).</i>	D-D	
	July 27-28	<i>Under Secretary of Defense for Policy Michele Flournoy and PACOM Commander, Admiral Timothy Keating, represented the DOD at the 1st Strategic and Economic Dialogue (S&amp;ED) in Washington, co-chaired by the Secretaries of State and Treasury. Pressed by the U.S. side to participate, the PLA reluctantly dispatched Rear Admiral Guan Youfei, Deputy Director of the Foreign Affairs Office, in charge of mil-to-mil with the United States. The two sides reiterated that they "resumed" mil-to-mil and agreed on visit by a CMC Vice Chairman, General Xu Caihou.</i>	D-D	

	August 19-22	<i>As the first Chief of Staff of the Army (CSA) to visit China after 1997, General George Casey visited Beijing and met with Chief of General Staff and Deputy Chief of General Staff, Generals Chen Bingde and Ge Zhenfeng, who complained about U.S.-only "obstacles" in mil-to-mil exchanges (including arms sales to Taiwan). Casey countered that it was difficult to build a lasting relationship when the PLA's constant starting point was to blame the United States for problems. Still Casey sought to advance ties and agreed to explore a bilateral humanitarian assistance/disaster relief exercise. Casey also visited the AMS and Shenyang MR and rode in a Type-99 tank. The two sides agreed to "cultural," mid-level officer, and functional exchanges, and humanitarian assistance and disaster relief exercises. General Casey then traveled to Tokyo for the Pacific Army Chiefs conference, which the PLA rejected.</i>	D-D	
	August 26-27	<i>PACOM's Director of Strategic Planning and Policy, Major General (USMC) Randolph Alles, traveled to Beijing for a special meeting under the MMCA. The PLA side complained about U.S. surveillance, while the U.S. side stressed safety as well as freedom of navigation in and over international waters, including the PRC's EEZ.</i>	D-D	
	August 31-September 3	<i>The Director of the Second Department (on intelligence) of the PLA's General Staff Department, Major General Yang Hui, visited Washington and met with the Director of the Defense Intelligence Agency (DIA), Lieutenant General Ronald Burgess. Yang also visited the National Defense Intelligence College, National Medical Intelligence Center, and West Point. Yang complained about press reports on the incident in 2006 when a PLAN submarine closely followed the USS Kitty Hawk and about alleged terrorist ties of Muslim Uighurs in China's northwest.</i>	D-D	
	September 1-3	<i>The PLA's Archives Department visited Washington, DC, including Gray Research Center at Marine Corps Base Quantico and National Archives and Records Administration, and met with DPMO to review progress in the first year of the PLA's research on POW/MIAs from the Korean War (as agreed in 2008).</i>	KM	
	October 24-November 3	<i>A CPC Politburo Member and CMC Vice Chairman, General Xu Caihou, led a 26-member delegation to visit Washington where he publicly presented a propaganda film on the PLA's relief work after an earthquake in China and met with Defense Secretary Robert Gates, National Security Advisor James Jones, Deputy National Security Advisor Thomas Donilon (last meeting at which President Obama dropped by for 10 minutes for a PLA-requested presidential encounter). Gates called Xu his "counterpart" and said both sides agreed to build a "sound and sustainable" mil-to-mil relationship. They agreed to a "7-point consensus" (to exchange senior visits in 2010 by Gates, Chief of General Staff General Chen Bingde, and Chairman of the Joint Chiefs of Staff admiral Mike Mullen; conduct a maritime search and rescue exercise and other exchanges on humanitarian assistance and disaster relief; cooperate in military medicine; expand service-level exchanges; enhance mid-grade and junior officer exchanges; promote cultural and sports exchanges; and invigorate existing mechanisms for maritime safety). Xu complained about four U.S. "obstacles" to ties (U.S. arms sales to Taiwan, activities in the EEZ off China's coast, the FY2000 NDAA, and DOD reports on the PLA). Gates raised the importance of following up on the nuclear dialogue in April 2008. In the first such PLA visit, Xu briefly visited the Strategic Command (STRATCOM), hosted by General Kevin Chilton. Xu also visited the Naval Academy, Nellis Air Force Base, and Naval Air Station North Island (and the carrier USS Ronald Reagan) in San Diego, and visited PACOM, hosted by PACOM Commander, Admiral Robert Willard.</i>	D-D	
	December 16-17	<i>Deputy Assistant Secretary of Defense for East Asia Michael Schiffer held the 4th DPCT in Honolulu with the Director of the Foreign Affairs Office of the Defense Ministry, Major General Qian Lihua. They discussed military exchanges, regional security, and weapon nonproliferation. The U.S. side briefed the PLA on the QDR, and the PLA briefed on its military modernization. Schiffer and Major General Randolph Alles, PACOM J5, sought to reinvigorate the MMCA process to manage problems in maritime and air safety. The PLA proposed to change the MMCA charter, to shift attention away from operational safety to planning for naval exercises and other navy-to-navy contacts.</i>	D-D	
2010	January 28	<i>After an earthquake in Port-Au-Prince, Haiti, the Army's 82nd Airborne had soldiers conduct the first U.S. combined patrol with U.N. peacekeepers there. The U.N. unit was a PRC paramilitary People's Armed Police (PAP) unit deployed in police uniforms.</i>	LB/MB	7
	April 23-30	<i>Deputy Assistant Secretary of Defense for POW/MIA Personnel Affairs Bob Newberry visited Beijing to discuss accounting for missing personnel.</i>	D-D	



May 25	<i>PACOM Commander Admiral Robert Willard and Assistant Secretary of Defense Wallace Gregson visited Beijing for the 2nd S&amp;ED and met with Deputy Chief of General Staff, Air Force General Ma Xiaotian and Rear Admiral Guan Youfei, who complained about U.S. "obstacles" (arms sales to Taiwan, U.S. reconnaissance, and FY2000 NDAA). The State Department proposed DOD briefings on the Quadrennial Defense Review and Nuclear Posture Review, but the PLA did not accept the proposal.</i>	D-D
September 27-28	<i>Deputy Assistant Secretary of Defense Michael Schiffer visited Beijing to discuss the mil-to-mil relationship with Director of the PLA's Foreign Affairs Office Qian Lihua. The PLA called the meeting merely "working-level" talks and raised concern about U.S.-ROK combined exercises in the Yellow Sea and U.S. policy in the South China Sea. Schiffer also held meetings at the Taiwan Affairs Office (TAO), China Foundation for International Strategic Studies (CFISS), a PLA-affiliated group, and Foreign Ministry.</i>	D-D
October 14-15	<i>PACOM hosted an annual plenary meeting of the MMCA in Honolulu. Major General Randolph Alles (USMC), J5, led the U.S. side, but the PLA sent a delegation led only by the PLAN and Rear Admiral Liao Shining, PLAN Deputy Chief of Staff. The U.S. military raised concern about several recent incidents involving unsafe and unprofessional actions by PRC ships as well as aircraft that risked that lives of U.S. sailors and airmen. They agreed to hold future exchanges on maritime search and rescue operations.</i>	D-D
December 10	<i>Under Secretary of Defense for Policy Michele Flournoy hosted in Washington General Ma Xiaotian, PLA Deputy Chief of General Staff, for the 11th DCT. Flournoy pointed out the positive tone of the talks with the PLA, which reaffirmed the "7-point consensus" between Secretary Gates and Xu Caihou in 2009 and the invitation for Gates to visit (January 10-14, 2011), expected right before Hu Jintao's visit later in January. Also, Chief of General Staff General Chen Bingde will visit in 2011. The DCT reviewed discussions under the MMCA, where there remain disagreements over maritime safety and security. They discussed possible cooperation in regional security. The U.S. side briefed on the Nuclear Posture Review, Ballistic Missile Defense Review, and Space Posture Review (the same briefings given to allies), and the PLA briefed on its strategy and modernization. The PLA complained about three U.S. "obstacles" (arms sales to Taiwan, FY2000 NDAA, and reconnaissance in the EEZ off China's coast). Flournoy and Chairman of the Joint Chiefs of Staff Admiral Mike Mullen pressed the PLA side to help end North Korea's provocations and get it to show willingness to denuclearize. (Earlier in December, Mullen publicly criticized China for "tacit approval" of North Korea's belligerence.) Representatives Rick Larsen and Charles Boustany (of the U.S.-China Working Group) hosted a dinner in the Capitol.</i>	D-D
December 10	<i>The commander of the PLAN's anti-piracy task force in the Gulf of Aden, also the Director of the PLAN's Navigational Support Department, visited the Headquarters of the U.S. Navy's Fifth Fleet at Naval Support Activity (NSA) Bahrain. In return, a U.S. delegation from the Fifth Fleet and the Central Command (CENTCOM) visited the PLAN's Kunlunshan assault ship (a large landing platform dock (LPD)).</i>	D-D

**Keterangan:**

**P-P** : Merupakan kontak yang melibatkan kepala negara, baik dalam konteks pembahasan suatu perjanjian, maupun berupa diplomasi kunjungan politik.

**D-D** : Merupakan kontak yang melibatkan petinggi antar departemen pertahanan kedua negara. Kontak ini mencakup pertemuan untuk pembahasan masalah-masalah teknis dan strategis di bidang pertahanan.

**LB/MB** : Merupakan latihan maupun misi bersama yang melibatkan kekuatan angkatan bersenjata kedua negara. Latihan dan misi bersama tidak hanya terbatas pada konteks pengamanan wilayah teritorial, namun mencakup pula operasi kemanusiaan dan penanggulangan bencana.

**KM** : Merupakan kunjungan militer, baik dilakukan oleh pejabat tinggi maupun personel angkatan bersenjata dari kedua negara.

**NA** : Merupakan aktivitas negatif yang memicu adanya persepsi kurang baik dari masing-masing pihak terhadap pihak lainnya.

Data *timeline* diperoleh dari laporan kongres AS. Dalam Shirley A. Kan, "U.S.-China Military Contacts: Issues for Congress" (Congressional Research Service: 2012), halaman 57-68.

**Lampiran 5: Penggalan Isi *National Security Strategy* dan *Military/Defense Strategy* Amerika Serikat dalam Kaitannya Dengan China, Sepanjang Periode 2002-2010.**

***The National Security Strategy of the United States of America - 2002***

The concept of “free trade” arose as a moral principle even before it became a pillar of economics. If you can make something that others value, you should be able to sell it to them. If others make something that you value, you should be able to buy it. This is real freedom, the freedom for a person—or a nation—to make a living. To promote free trade, the United States has developed a comprehensive strategy: Seize the global initiative: The new global trade negotiations we helped launch at Doha in November 2001 will have an ambitious agenda, especially in agriculture, manufacturing, and services, targeted for completion in 2005. The United States has led the way in completing the accession of China and a democratic Taiwan to the World Trade Organization. We will assist Russia’s preparations to join the WTO.

Economic growth should be accompanied by global efforts to stabilize greenhouse gas concentrations associated with this growth, containing them at a level that prevents dangerous human interference with the global climate. Our overall objective is to reduce America’s greenhouse gas emissions relative to the size of our economy, cutting such emissions per unit of economic activity by 18 percent over the next 10 years, by the year 2012. Our strategies for attaining this goal will be to: assist developing countries, especially the major greenhouse gas emitters such as China and India, so that they will have the tools and resources to join this effort and be able to grow along a cleaner and better path.

We are attentive to the possible renewal of old patterns of great power competition. Several potential great powers are now in the midst of internal transition—most importantly Russia, India, and China. In all three cases, recent developments have encouraged our hope that a truly global consensus about basic principles is slowly taking shape.

The United States relationship with China is an important part of our strategy to promote a stable, peaceful, and prosperous Asia-Pacific region. We welcome the emergence of a strong, peaceful, and prosperous China. The democratic development of China is crucial to that future. Yet, a quarter century after beginning the process of shedding the worst features of the Communist legacy, China’s leaders have not yet made the next series of fundamental choices about the character of their state. In pursuing advanced military capabilities that can threaten its neighbors in the Asia-Pacific region, China is following an outdated path that, in the end, will hamper its own pursuit of national greatness. In time, China will find that social and political freedom is the only source of that greatness.

The United States seeks a constructive relationship with a changing China. We already cooperate well where our interests overlap, including the current war on terrorism and in promoting stability on the Korean peninsula. Likewise, we have coordinated on the future of Afghanistan and have initiated a comprehensive dialogue on counterterrorism and similar transitional concerns. Shared health and environmental threats, such as the spread of HIV/AIDS, challenge us to promote jointly the welfare of our citizens.

Addressing these transnational threats will challenge China to become more open with information, promote the development of civil society, and enhance individual human rights. China has begun to take the road to political openness, permitting many personal freedoms and conducting village-level elections, yet remains strongly committed to national one-party rule by the Communist Party. To make that nation truly accountable to its citizen’s needs and aspirations, however, much work remains to be done. Only by allowing the Chinese people to think, assemble, and worship freely can China reach its full potential.

Our important trade relationship will benefit from China’s entry into the World Trade Organization, which will create more export opportunities and ultimately more jobs for American farmers, workers, and companies. China is our fourth largest trading partner, with over \$100 billion in annual two-way trade. The power of market principles and the WTO’s requirements for transparency and accountability will advance openness and the rule of law in China to help establish basic protections for commerce and for citizens. There are, however, other areas in which we have profound disagreements. Our commitment to the self-defense of Taiwan under the Taiwan Relations Act is one. Human rights is another. We expect China to adhere to its nonproliferation commitments. We will work to narrow differences where they exist, but not allow them to preclude cooperation where we agree.

The events of September 11, 2001, fundamentally changed the context for relations between the United States and other main centers of global power, and opened vast, new opportunities. With our long-standing allies in Europe and Asia, and with leaders in Russia, India, and China, we must develop active agendas of cooperation lest these relationships become routine and unproductive. Every agency of the United States Government shares the challenge. We can build fruitful habits of consultation, quiet argument, sober analysis, and common action. In the long-term, these are the practices that will sustain the supremacy of our common principles and keep open the path of progress.

***The National Security Strategy of the United States of America - 2006***

The North Korean regime also poses a serious nuclear proliferation challenge. It presents a long and bleak

record of duplicity and bad faith negotiations. In the past, the regime has attempted to split the United States from its allies. This time, the United States has successfully forged a consensus among key regional partners – China, Japan, Russia, and the Republic of Korea (ROK) – that the DPRK must give up all of its existing nuclear programs. Regional cooperation offers the best hope for a peaceful, diplomatic resolution of this problem. In a joint statement signed on September 19, 2005, in the Six-Party Talks among these participants, the DPRK agreed to abandon its nuclear weapons and all existing nuclear programs. The joint statement also declared that the relevant parties would negotiate a permanent peace for the Korean peninsula and explore ways to promote security cooperation in Asia. Along with our partners in the Six-Party Talks, the United States will continue to press the DPRK to implement these commitments.

The global economy is more open and free, and many people around the world have seen their lives improve as prosperity and economic integration have increased. The Administration has accomplished much of the economic freedom agenda it set out in 2002: Pressing for open markets, financial stability, and deeper integration of the world economy. We have partnered with Europe, Japan, and other major economies to promote structural reforms that encourage growth, stability, and opportunity across the globe. The United States has: Worked with other nations that serve as regional and global engines of growth – such as India, China, the ROK, Brazil, and Russia – on reforms to open markets and ensure financial stability; and urged China to move to a market-based, flexible exchange rate regime – a step that would help both China and the global economy. We will continue to advance this agenda through the WTO and through bilateral and regional FTAs. In Asia, we are pursuing FTAs with Thailand, the ROK, and Malaysia. We will also continue to work closely with China to ensure it honors its WTO commitments and protects intellectual property.

China encapsulates Asia's dramatic economic successes, but China's transition remains incomplete. In one generation, China has gone from poverty and isolation to growing integration into the international economic system. China once opposed global institutions; today it is a permanent member of the UNSC and the WTO. As China becomes a global player, it must act as a responsible stakeholder that fulfills its obligations and works with the United States and others to advance the international system that has enabled its success: enforcing the international rules that have helped China lift itself out of a century of economic deprivation, embracing the economic and political standards that go along with that system of rules, and contributing to international stability and security by working with the United States and other major powers.

China's leaders proclaim that they have made a decision to walk the transformative path of peaceful development. If China keeps this commitment, the United States will welcome the emergence of a China that is peaceful and prosperous and that cooperates with us to address common challenges and mutual interests. China can make an important contribution to global prosperity and ensure its own prosperity for the long term if it will rely more on domestic demand and less on global trade imbalances to drive its economic growth. China shares our exposure to the challenges of globalization and other transnational concerns. Mutual interests can guide our cooperation on issues such as terrorism, proliferation, and energy security. We will work to increase our cooperation to combat disease pandemics and reverse environmental degradation.

The United States encourages China to continue down the road of reform and openness, because in this way China's leaders can meet the legitimate needs and aspirations of the Chinese people for liberty, stability, and prosperity. As economic growth continues, China will face a growing demand from its own people to follow the path of East Asia's many modern democracies, adding political freedom to economic freedom. Continuing along this path will contribute to regional and international security.

China's leaders must realize, however, that they cannot stay on this peaceful path while holding on to old ways of thinking and acting that exacerbate concerns throughout the region and the world. These old ways include:

- Continuing China's military expansion in a non-transparent way;
- Expanding trade, but acting as if they can somehow "lock up" energy supplies around the world or seek to direct markets rather than opening them up – as if they can follow a mercantilism borrowed from a discredited era; and
- Supporting resource-rich countries without regard to the misrule at home or misbehavior abroad of those regimes.

China and Taiwan must also resolve their differences peacefully, without coercion and without unilateral action by either China or Taiwan.

Ultimately, China's leaders must see that they cannot let their population increasingly experience the freedoms to buy, sell, and produce, while denying them the rights to assemble, speak, and worship. Only by allowing the Chinese people to enjoy these basic freedoms and universal rights can China honor its own constitution and international commitments and reach its full potential. Our strategy seeks to encourage China to make the right strategic choices for its people, while we hedge against other possibilities.

***The National Security Strategy of the United States of America - 2010***

Today, we need to be clear-eyed about the strengths and shortcomings of international institutions that were developed to deal with the challenges of an earlier time and the shortage of political will that has at times stymied the enforcement of international norms. Yet it would be destructive to both American national security and global security if the United States used the emergence of new challenges and the shortcomings of the international system as a reason to walk away from it. Instead, we must focus American engagement on strengthening international institutions and galvanizing the collective action that can serve common interests such as combating violent extremism; stopping the spread of nuclear weapons and securing nuclear materials;



achieving balanced and sustainable economic growth; and forging cooperative solutions to the threat of climate change, armed conflict, and pandemic disease.

The starting point for that collective action will be our engagement with other countries. The cornerstone of this engagement is the relationship between the United States and our close friends and allies in Europe, Asia, the Americas, and the Middle East—ties which are rooted in shared interests and shared values, and which serve our mutual security and the broader security and prosperity of the world. We are working to build deeper and more effective partnerships with other key centers of influence—including China, India, and Russia, as well as increasingly influential nations such as Brazil, South Africa, and Indonesia—so that we can cooperate on issues of bilateral and global concern, with the recognition that power, in an interconnected world, is no longer a zero sum game. We are expanding our outreach to emerging nations, particularly those that can be models of regional success and stability, from the Americas to Africa to Southeast Asia. And we will pursue engagement with hostile nations to test their intentions, give their governments the opportunity to change course, reach out to their people, and mobilize international coalitions.

More actors exert power and influence. Europe is now more united, free, and at peace than ever before. The European Union has deepened its integration. Russia has reemerged in the international arena as a strong voice. China and India—the world’s two most populous nations—are becoming more engaged globally. From Latin America to Africa to the Pacific, new and emerging powers hold out opportunities for partnership, even as a handful of states endanger regional and global security by flouting international norms. International institutions play a critical role in facilitating cooperation, but at times cannot effectively address new threats or seize new opportunities. Meanwhile, individuals, corporations, and civil society play an increasingly important role in shaping events around the world.

We will continue to deepen our cooperation with other 21st century centers of influence—including China, India, and Russia—on the basis of mutual interests and mutual respect. We will also pursue diplomacy and development that supports the emergence of new and successful partners, from the Americas to Africa; from the Middle East to Southeast Asia. Our ability to advance constructive cooperation is essential to the security and prosperity of specific regions, and to facilitating global cooperation on issues ranging from violent extremism and nuclear proliferation, to climate change, and global economic instability—issues that challenge all nations, but that no one nation alone can meet.

The United States is part of a dynamic international environment, in which different nations are exerting greater influence, and advancing our interests will require expanding spheres of cooperation around the world. Certain bilateral relationships—such as U.S. relations with China, India, and Russia—will be critical to building broader cooperation on areas of mutual interest. And emerging powers in every region of the world are increasingly asserting themselves, raising opportunities for partnership for the United States.

We will continue to pursue a positive, constructive, and comprehensive relationship with China. We welcome a China that takes on a responsible leadership role in working with the United States and the international community to advance priorities like economic recovery, confronting climate change, and nonproliferation. We will monitor China’s military modernization program and prepare accordingly to ensure that U.S. interests and allies, regionally and globally, are not negatively affected. More broadly, we will encourage China to make choices that contribute to peace, security, and prosperity as its influence rises. We are using our newly established Strategic and Economic Dialogue to address a broader range of issues, and improve communication between our militaries in order to reduce mistrust. We will encourage continued reduction in tension between the People’s Republic of China and Taiwan. We will not agree on every issue, and we will be candid on our human rights concerns and areas where we differ. But disagreements should not prevent cooperation on issues of mutual interest, because a pragmatic and effective relationship between the United States and China is essential to address the major challenges of the 21st century.

#### **The National Defense Strategy of the United States of America - 2005**

While remaining alert to the possibility of renewed great power competition, recent developments in our relations with states like Russia and China should encourage a degree of hope. As the President’s National Security Strategy states, “Today, the international community have the best chance since the rise of the nation-state in the seventeenth century to build a world where great powers compete in peace instead of continually prepare for war.

#### **The National Defense Strategy of the United States of America – 2008**

China is one ascendant state with the potential for competing with the United States. For the foreseeable future, we will need to hedge against China’s growing military modernization and the impact of its strategic choices upon international security. It is likely that China will continue to expand its conventional military capabilities, emphasizing anti-access and area denial assets including developing a full range of long-range strike, space, and information warfare capabilities. Our interaction with China will be long-term and multi-dimensional and will involve peacetime engagement between defense establishments as much as fielded combat capabilities. The objective of this effort is to mitigate near term challenges while preserving and enhancing U.S. national advantages over time. The United States welcomes the rise of a peaceful and prosperous China, and it

encourages China to participate as a responsible stakeholder by taking on a greater share of burden for the stability, resilience, and growth of the international system. However, much uncertainty surrounds the future course China's leaders will set for their country. Accordingly, the NSS states that "our strategy seeks to encourage China to make the right strategic choices for its people, while we hedge against other possibilities." A critical component of this strategy is the establishment and pursuit of continuous strategic dialogue with China to build understanding, improve communication, and to reduce the risk of miscalculation. China continues to modernize and develop military capabilities primarily focused on a Taiwan Strait conflict, but which could have application in other contingencies. The Department will respond to China's expanding military power, and to the uncertainties over how it might be used, through shaping and hedging. This approach tailors investment of substantial, but not infinite, resources in ways that favor key enduring U.S. strategic advantages. At the same time, we will continue to improve and refine our capabilities to respond to China if necessary. We will continue to press China to increase transparency in its defense budget expenditures, strategies, plans and intentions. We will work with other elements of the U.S. Government to develop a comprehensive strategy to shape China's choices. Both China and Russia are important partners for the future and we seek to build collaborative and cooperative relationships with them. We will develop strategies across agencies, and internationally, to provide incentives for constructive behavior while also dissuading them from destabilizing actions.

### Lampiran 6: Data Umum Ekonomi dan Anggaran Pertahanan China Periode 2002-2010.

Data Umum Ekonomi dan Anggaran Pertahanan PRC 2002-2010									
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Rata-Rata Nilai Tukar RMB / 1US\$	8.3	8.3	8.3	8.2	8.0	7.6	6.9	6.8	6.8
Gross Domestic Product (GDP) dalam milyar RMB	10517.2	11725.2	15987.8	18305.5	21192.3	25730.6	31405.5	34090.3	39800.0
GDP dalam milyar US \$ (Pemerintah PRC)	1270.7	1416.6	1931.6	2234.6	2658.4	3383.8	4522.0	4990.5	5879.3
GDP dalam milyar US \$ (World Bank)	1453.8	1641.0	1931.6	2256.9	2713.0	3494.1	4521.8	4991.3	5926.6
Real GDP Annual Growth - % (Pemerintah PRC)	9.1	10.0	10.1	9.9	11.1	11.4	9.6	8.7	10.4
Real GDP Annual Growth - % (World Bank)	9.1	10.0	10.1	11.3	12.7	14.2	9.6	9.2	10.4
Total Anggaran Belanja Negara dalam milyar RMB	2126.7	2464.9	2848.7	3393.0	4042.3	4978.1	6259.3	7630.0	9161.3
Total Anggaran Belanja Negara dalam milyar US \$	256.9	297.8	344.2	414.2	507.1	654.7	901.2	1117.0	1353.3
% Growth	na	15.9	15.6	19.1	19.1	23.2	25.7	21.9	20.1
Total Anggaran Belanja Negara - % GDP	20.2	21.0	17.8	18.5	19.1	19.3	19.9	22.4	23.0
% Growth	na	4.0	-15.2	4.0	2.9	1.4	3.0	12.3	2.8
Anggaran Pertahanan dalam Milyar RMB (PRC)	170.8	190.8	220.0	247.5	297.9	355.5	417.9	495.1	532.1
Anggaran Pertahanan dalam Milyar US \$	20.6	23.1	26.6	30.2	37.4	46.8	60.2	72.5	78.6
% Growth	na	11.7	15.3	12.5	20.4	19.3	17.5	18.5	7.5
Anggaran Pertahanan - % GDP	1.6	1.6	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.5	1.3
% Growth	na	0.2	-15.4	-1.7	4.0	-1.7	-3.7	9.2	-7.9
Anggaran Pertahanan - % Anggaran Belanja Negara	8.0	7.7	7.7	7.3	7.4	7.1	6.7	6.5	5.8
% Growth	na	-3.6	-0.2	-5.6	1.0	-3.1	-6.5	-2.8	-10.5



Anggaran Pertahanan dalam Milyar RMB (WB)	262.1	287.8	331.3	379.3	452.3	546.2	637.7	752.4	808.1
Anggaran Pertahanan dalam Milyar US \$	31.7	34.8	40.0	46.3	56.7	71.8	91.8	110.1	119.4
% Growth	na	9.8	15.1	14.5	19.2	20.8	16.7	18.0	7.4
Anggaran Pertahanan - % GDP	2.2	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.0	2.2	2.0
% Growth	na	-2.7	-2.2	-1.0	1.9	-1.7	-1.2	8.7	-8.7
Anggaran Pertahanan - % Anggaran Belanja Negara	12.3	11.7	11.6	11.2	11.2	11.0	10.2	9.9	8.8
% Growth	na	-5.2	-0.4	-3.9	0.1	-1.9	-7.2	-3.2	-10.6
Estimasi Terendah oleh AS - dalam Milyar US\$	60.0	65.0	70.0	75.0	80.0	97.0	105.0	115.0	126.0
% Growth	na	8.3	7.7	7.1	6.7	21.3	8.2	9.6	9.6
Estimasi Tertinggi oleh AS - dalam Milyar US\$	85.0	92.0	100.0	105.0	122.0	139.0	150.0	165.0	181.0
% Growth	na	8.2	8.7	5.0	16.2	13.9	7.9	10.0	10.0
Estimasi dalam Military Balance - dalam Milyar US\$	31.7	55.9	62.5	100.6	121.7	113.3	147.8	173.2	188.7
% Growth	na	76.6	11.8	60.9	21.0	-6.9	30.4	17.2	8.9

Data ini diolah dari berbagai sumber, yaitu: China Defense White Paper (2002, 2004, 2006, 2008, 2010). Melalui: <http://china.org.cn/e-white/20021209/IV.htm#4>, diakses pada 23 April 2012, pukul 19.24. <http://china.org.cn/e-white/20041227/IV.htm#1>, diakses pada 23 April 2012, pukul 17.56. <http://www.china.org.cn/english/features/book/194470.htm>, diakses pada 22 April 2012, pukul 13.24. [http://www.china.org.cn/government/whitepaper/2009-01/21/content\\_17162799.htm](http://www.china.org.cn/government/whitepaper/2009-01/21/content_17162799.htm), diakses pada 22 April 2012, pukul 13.01. [http://news.xinhuanet.com/english/2010/china/2011-03/31/c\\_13806851\\_32.htm](http://news.xinhuanet.com/english/2010/china/2011-03/31/c_13806851_32.htm), diakses pada 21 April 2012, pukul 03.02. Informasi data World Bank didapat melalui: <http://www.worldbank.org/> diakses pada 28 April 2012, pukul 23.00. Sedangkan untuk estimasi anggaran pertahanan China dari pihak AS diperoleh dari: "Annual Reprt to Congress: Military Power of The People's Republic of China" (2003-2009) serta "Annual Reprt to Congress: Military and Security Developments Involving The People's Republic of China" (2010-2011)

### Lampiran 7: Perbandingan Anggaran Pertahanan China dengan Berbagai Negara 2002-2010.

Perbandingan Data Ekonomi Negara-Negara dengan Anggaran Pertahanan Terbesar di Dunia (2002-2010)									
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Anggaran Pertahanan - Milyar US\$									
Australia	7.653	8.914	11.603	13.032	14.158	16.125	19.888	17.899	23.019
Brazil	9.630	8.394	9.781	13.591	16.400	20.473	24.442	25.722	33.524
Kanada	8.496	9.958	11.336	12.989	14.810	17.417	19.342	19.516	22.791
PRC	31.660	34.771	40.032	46.308	56.732	71.832	91.814	110.140	119.368
Perancis	36.402	45.919	53.007	52.909	54.516	60.595	66.009	66.884	59.322
Jerman	29.332	35.056	38.008	38.054	38.092	42.552	48.081	47.463	45.152
India	14.815	16.559	20.392	22.802	23.807	28.878	30.531	36.455	41.410
Italia	24.362	30.243	34.116	33.526	33.408	35.962	41.244	38.311	36.972
Jepang	39.524	42.729	45.363	44.239	41.501	40.448	46.086	51.008	54.526
Korea Selatan	14.102	15.847	17.830	22.160	25.177	27.726	26.072	24.372	27.573
Russia	14.994	18.522	22.757	28.487	35.568	44.709	58.263	53.330	58.670
Arab Saudi	18.502	18.747	20.910	25.392	29.581	35.465	38.223	41.273	45.245

Tuki	9.051	10.278	10.921	12.081	13.483	14.071	17.132	16.303	17.507
Inggris	39.661	46.940	53.971	55.151	57.483	65.986	65.620	57.915	59.600
Amerika Serikat	356.720	415.223	464.676	503.353	527.660	556.961	621.138	668.604	698.281
<b>Anggaran Pertahanan - % GDP Negara</b>									
Australia	1.927	1.903	1.885	1.871	1.888	1.881	1.873	1.937	2.034
Brazil	1.910	1.519	1.474	1.541	1.506	1.499	1.479	1.613	1.606
Kanada	1.156	1.150	1.143	1.146	1.158	1.223	1.287	1.459	1.445
PRC	2.178	2.119	2.072	2.052	2.091	2.056	2.030	2.207	2.014
Perancis	2.507	2.562	2.579	2.476	2.417	2.346	2.331	2.548	2.317
Jerman	1.462	1.446	1.394	1.376	1.312	1.280	1.327	1.439	1.376
India	2.921	2.762	2.826	2.734	2.502	2.324	2.511	2.647	2.398
Italia	1.988	1.997	1.966	1.877	1.784	1.691	1.788	1.806	1.794
Jepang	1.009	1.010	0.985	0.972	0.951	0.924	0.944	1.013	0.999
Korea Selatan	2.449	2.462	2.470	2.623	2.645	2.642	2.799	2.922	2.718
Russia	4.345	4.304	3.850	3.729	3.593	3.440	3.508	4.364	3.965
Arab Saudi	9.813	8.737	8.353	8.046	8.294	9.214	8.025	11.075	10.409
Tuki	3.892	3.392	2.785	2.501	2.540	2.174	2.346	2.653	2.384
Inggris	2.461	2.523	2.452	2.418	2.351	2.346	2.489	2.667	2.635
Amerika Serikat	3.368	3.744	3.934	4.001	3.957	3.980	4.345	4.759	4.787
<b>Pertumbuhan Anggaran Pertahanan per tahun (dalam %)</b>									
Australia	4.72	16.48	30.16	12.32	8.64	13.89	23.33	-10.00	28.60
Brazil	-11.37	-12.83	16.51	38.96	20.67	24.84	19.39	5.24	30.33
Kanada	1.433	17.214	13.844	14.573	14.024	17.605	11.052	0.899	16.778
PRC	15.356	9.827	15.128	15.679	22.510	26.615	27.819	19.960	8.378
Perancis	9.39	26.14	15.44	-0.19	3.04	11.15	8.94	1.32	-11.31
Jerman	6.95	19.52	8.42	0.12	0.10	11.71	12.99	-1.29	-4.87
India	2.556	11.767	23.154	11.817	4.404	21.304	5.723	19.404	13.593
Italia	10.70	24.14	12.81	-1.73	-0.35	7.64	14.69	-7.11	-3.49
Jepang	-2.97	8.11	6.16	-2.48	-6.19	-2.54	13.94	10.68	6.90
Korea Selatan	8.96	12.38	12.51	24.28	13.62	10.12	-5.96	-6.52	13.13
Russia	19.70	23.53	22.87	25.18	24.85	25.70	30.31	-8.47	10.01
Arab Saudi	-12.01	1.33	11.54	21.43	16.50	19.89	7.78	7.98	9.62
Tuki	25.42	13.56	6.26	10.62	11.60	4.36	21.75	-4.84	7.39
Inggris	12.26	18.35	14.98	2.19	4.23	14.79	-0.55	-11.74	2.91
Amerika Serikat	14.062	16.400	11.910	8.323	4.829	5.553	11.523	7.642	4.439
Data ini diolah dari sumber <a href="http://www.worldbank.org/">http://www.worldbank.org/</a> diakses pada 28 April 2012, pukul 23.00.									

### Lampiran 8: Alokasi Anggaran Pertahanan China 2002-2010.

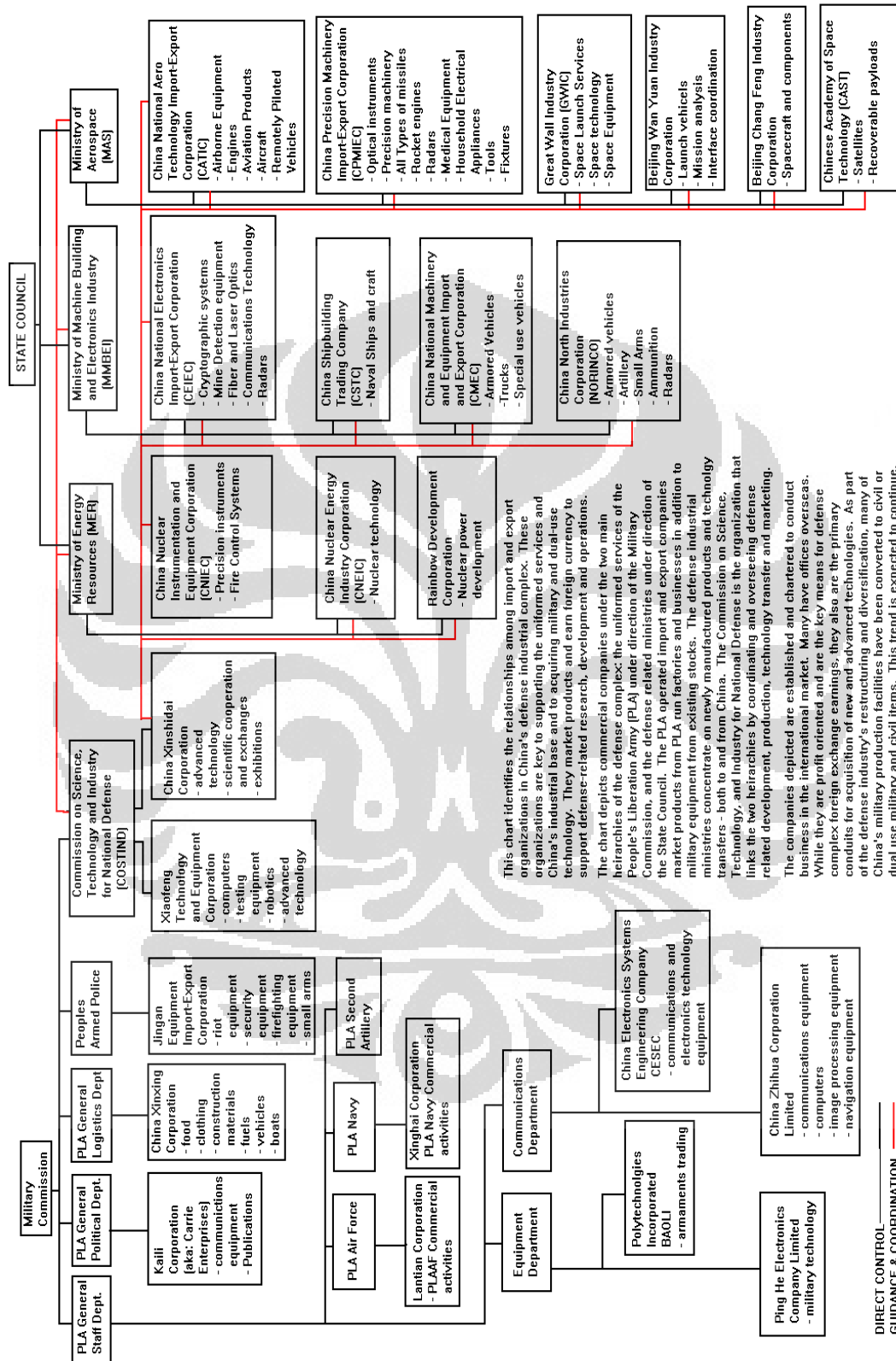
<b>Distribusi Alokasi Anggaran Pertahanan China 2002-2010</b>									
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Personil (dalam Milyar)</b>	<b>54.040</b>	<b>62.010</b>	<b>72.714</b>	<b>83.159</b>	<b>100.349</b>	<b>120.020</b>	<b>141.613</b>	<b>168.530</b>	<b>181.134</b>

<b>RMB)</b>									
dalam Milyar US\$	6.529	7.492	8.785	10.152	12.588	15.784	20.390	24.671	26.757
% dari total anggaran pertahanan	31.89	32.50	33.05	33.60	33.68	33.76	33.90	34.04	34.04
<b>Pemeliharaan dan Operasional (dalam Milyar RMB)</b>	<b>58.120</b>	<b>64.100</b>	<b>72.819</b>	<b>80.683</b>	<b>99.286</b>	<b>121.040</b>	<b>141.613</b>	<b>166.990</b>	<b>179.48</b>
dalam Milyar US\$	7.022	7.744	8.798	9.849	12.455	15.918	20.390	24.446	26.514
% dari total anggaran pertahanan	34.30	33.60	33.10	32.60	33.32	34.05	33.89	33.73	33.73
<b>Peralatan (dalam Milyar RMB)</b>	<b>57.280</b>	<b>64.670</b>	<b>74.468</b>	<b>83.654</b>	<b>98.305</b>	<b>114.430</b>	<b>134.605</b>	<b>159.590</b>	<b>171.50</b>
dalam Milyar US\$	6.920	7.813	8.997	10.212	12.332	15.049	19.381	23.363	25.335
% dari total anggaran pertahanan	33.81	33.90	33.85	33.80	32.99	32.19	32.21	32.23	32.23
Notes		data aktual pemerintah PRC					adjustment rata-rata		
Data diolah dari <i>China Defense White Paper</i> (2002, 2004, 2006, 2008, 2010)									

### Lampiran 9 : Perbandingan Jumlah Personil Militer dan Sipil Antara Amerika Serikat dan China 2002-2010.

PERBANDINGAN KEKUATAN PERSONIL AS DAN PRC 2002-2010 (Militer dan Sipil)									
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>AS</b>	na	na	2166332	na	2531058	na	2529091	2455837	2383271
<b>Aktif</b>	na	na	1473960	na	1547257	na	1539587	1580255	1563996
Angkatan Darat	na	na	502000	na	595946	na	632245	662232	639063
Angkatan Laut	na	na	376750	na	376750	na	339453	335822	336289
Angkatan Udara	na	na	379500	na	347400	na	340530	334342	340990
<i>Coast Guard</i>	na	na	40360	na	40500	na	40698	43598	43598
<i>Marine Corps</i>	na	na	175350	na	186661	na	186661	204261	204056
<b>Cadangan</b>	na	na	682246	na	973675	na	979378	864547	808240
Angkatan Darat	na	na	324100	na	539350	na	547050	447203	483393
Angkatan Laut	na	na	152850	na	155350	na	126211	109222	102998
Angkatan Udara	na	na	111750	na	178875	na	191038	191038	107695
<i>Coast Guard</i>	na	na	1546	na	8100	na	10787	7484	7484
<i>Marine Corps</i>	na	na	92000	na	92000	na	104292	109600	106670
<b>Sipil</b>	na	na	10126	na	10126	na	10126	11035	11035
Sipil	na	na	10126	na	10126	na	10126	11035	11035
<b>PRC</b>	<b>4450000</b>	<b>4555000</b>	<b>4555000</b>	<b>4555000</b>	<b>4555000</b>	<b>4405000</b>	<b>3685000</b>	<b>3355000</b>	<b>3355000</b>
<b>Aktif</b>	<b>3850000</b>	<b>3755000</b>	<b>3755000</b>	<b>3755000</b>	<b>3755000</b>	<b>3605000</b>	<b>2885000</b>	<b>2845000</b>	<b>2845000</b>
Angkatan Darat	1700000	1600000	1600000	1600000	1600000	1600000	1600000	1600000	1600000
Angkatan Laut	250000	255000	255000	255000	255000	255000	255000	255000	255000
Angkatan Udara	400000	400000	400000	400000	400000	250000	330000	330000	330000
Paramiliter	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	700000	660000	660000
<b>Cadangan</b>	<b>600000</b>	<b>800000</b>	<b>800000</b>	<b>800000</b>	<b>800000</b>	<b>800000</b>	<b>800000</b>	<b>510000</b>	<b>510000</b>
Data diolah dari <i>The Military Balance</i> 2003 hingga 2010.									

Lampiran 10: Struktur dan Pola Pengawasan Industri Pertahan China.



Sumber: <http://www.softwar.net/pladef.html>, diakses pada 13 Mei 2012, pukul 00.21

**Lampiran 11: Sebaran Kekuatan Militer Amerika Serikat di Berbagai Negara dan Wilayah Dunia.**

AREA KOMANDO	LOKASI	2003	2006	2010
US PACIFIC COMMAND	AUSTRALIA	<b>TOTAL: 59 Personnel.</b> AIR FORCE : 59 - 1 NAVY comms facility, 1 SEWS/SIGINT.	<b>TOTAL: 121 Personnel.</b> NAVY: 29. USMC: 23. AIR FORCE: 69. ARMY: 17 - 1 SEWS facility, 1 Comms facility, 1 SIGINT Stn.	<b>TOTAL: 129 Personnel.</b> US Pacific command - 1 SEWS ; 1 comms facility 1 SIGINT stn.
	DIEGO GARCIA & SAMUDRA HINDIA	<b>TOTAL: 1071 Personnel.</b> DIEGO GARCIA NAVY: 370 - MPS-2, 1 Naval air station, 1 spt facilities. AIR FORCE: 701. <b>EQUIPMENT: 5</b> equipment ships	<b>TOTAL: Personnel.</b> AIR FORCE: 643. NAVY: 258 - 1 MPS sqn, 1 logistics, 2 support facilities, 1 naval airbase. <b>EQUIPMENT: 1</b> Spacetrack Optical Trackers, 1 ground based electro optical deep space surveillance system GEODSS, 5 logistic and support ships.	<b>TOTAL: 261 Personnel.</b> 1 MPS sqn (MPS-2 with equipment for one MEB) ; 1 naval air base, 1 support facility. <b>EQUIPMENT: 5</b> logistics and support ships, 1 Spacetrack Optical Tracker at Diego Garcia; 1 ground based electro optical deep space surveillance system (GEODSS)
	GUAM	<b>TOTAL: 4400 Personnel.</b> AIR FORCE: 2,100 - 1 air force HQ (13th Air Force). NAVY: 2,300 - 1 MPS-3, 1 Naval air station, 1 comms and spt facilities. <b>EQUIPMENT: 4</b> ships.	<b>TOTAL: 2916 Personnel.</b> AIR FORCE: 1,672. ARMY: 44. NAVY: 1200. - 1 MPS sqn, 1 Support facilities, 1 Naval airbase , 1 naval Comms facility. <b>EQUIPMENT: 4</b> logistic and support ships.	<b>TOTAL: 2982</b> <b>Perssonnel.</b> US Pacific command- 1 air base; 1 naval base, 1 MPS sqn. <b>EQUIPMENT: 3</b> SSN; 4 Logistics and Support vessels.
	JEPANG	<b>TOTAL: 43550</b> <b>Personnel.</b> ARMY: 1,750 - 1 corps HQ, base and spt units. AIR FORCE: 14,700 - 1 air force HQ (5th Air Force), 1 ftr wg (2 sqn), 1 wg (2 sqn) , 1 sqn , 1 SAR sqn, 1 sqn with , 1 Airlift Wg, 1 special ops gp. NAVY: 9,250 - 1 bases (HQ 7th Fleet), 1 MCM sqn. USMC: 17,850 - 1 mne div. <b>EQUIPMENT: 36</b> F-16, 48 F-15C/D, 15 KC-135, 8 HH-60, 2 E-3B AWACS, 10 C-130E, 4 C- 21, 4 C-9, 1 CV, 9 surface combatants, 1 LCC, 4 amph ships, 1 MEF.	<b>TOTAL: 35372</b> <b>Personnel.</b> ARMY: 1,690 - 1 HQ ( 9th Theater Army Area Command), 1 HQ – HQ USARPAC. NAVY: 4,313 - 2 Base, 1 HQ (7th Fleet), 1 MCM sqn. USMC: 15,926 - 1 elems MEF div. AIR FORCE: 13,443 - 1 Special Ops gp (5th Air Force), 1 ftr wg (2 ftr sqn), 1 ftr wg (1 AEW sqn), 1 SAR sqn with , 2 ftr sqn, 1 airlift wg . <b>EQUIPMENT: CV 1</b> Kitty Hawk (capacity 50 F/A-18 Hornet FGA ac; 4 EA-6B Prowler EW ac; 4 E-2C Hawkeye AEW ac; 6 S-3B Viking ASW ac; 4 SH-60F Seahawk ASW hel; 2 HH-60H Seahawk SAR hel), 10 Principal Surface Combatants, LCC 1 Blue Ridge (capacity 3 LCPL; 2 LCVP; 700 troops; 1 SH-3H Sea King ASW hel), 4 Amphibious, 18 F-16 Fighting Falcon, 2 E-3B Sentry, 8 HH-60G Pave Hawk, 24 F-15C Eagle/F-15D Eagle, 10 C- 130E/H Hercules; 4 C-21 Learjet , 4 C-9 Nightingale.	<b>TOTAL: 35598</b> <b>Personnel.</b> ARMY: 2,677 - 1 HQ (9th Theater Army Area Command). NAVY: 3,539 - 1 HQ (7th Fleet), 2 naval base. AIR FORCE: 12,380 - 1 HQ (5th Air Force), 1 ftr wg (2 ftr sqn), 1 ftr wg (1 AEW&C sqn) with , 1 CSAR sqn with, 2 ftr sqn, 1 tpt wg, 1 Special Ops gp. USMC: 17,002 - 1 Marine div (3rd); 1 ftr sqn, 1 tkr sqn, 2 tpt hel sqn, 1 tpt hel sqn, 3 tpt hel sqn. <b>EQUIPMENT: 1</b> CVN; 2 CGHM; 3 DDGHM; 4 DDGM; 1 LCC; 4 MCO; 1 LHD; 1 LPD; 2 LSD, 18 F-16 Fighting Falcon, 2 E-3B Sentry, 8 HH-60G Pave Hawk, 24 F-15C/D Eagle, 10 C-130H Hercules; 2 C-12J, 12 F/A-18D Hornet, 12 KC- 130J Hercules, 12 CH-46E Sea Knight, 12 MV-22B Osprey, 10 CH-53E Sea Stallion.



	<b>KOREA SELATAN</b>	<p><b>TOTAL: 34500</b>  <b>Personnel. ARMY:</b>            25,000 - 1 Army HQ (UN comd), 1 inf div (mech) with 1 bde (1 mech inf, 2 tk bn), 2 SP arty, 2 MLRS, 1 AD bn, 1 avn, 1 engr bde, 1 air cav bde (2 ATK hel bn), 1 Patriot SAM bn (Army tps). <b>AIR FORCE:</b> 8,900; 1 air force HQ (7th Air Force): 2 ftr wg, 84 cbt ac; 4 sqn, 1 special ops sqn. <b>NAVY:</b> 420. <b>USMC:</b> 180.  <b>EQUIPMENT:</b> incl 116 MBT, 126 AIFV, 111 APC, 45 Arty/MRL /mor, 60 F-16, 12 A-10, 12 OA-10.</p>	<p><b>TOTAL: 29602</b>  <b>Personnel. ARMY:</b>            20,088 - 1 (UN comd) HQ (8th Army), 1 elems HQ (1 avn bde (1 aslt hel bn, 1 atk hel bn), 1 armd bde (1 armd inf bn, 2 tk bn), 1 air cav bde (2 atk hel bn), 2 fd arty bn with MLRS, 2 SP arty bn)), 1 SAM bn. <b>AIR FORCE:</b> 9,085 - 1 HQ (7th Air Force), 2 ftr wg (each with 2 ftr sqn), 1 Special Ops sqn. <b>NAVY:</b> 294. <b>USMC:</b> 135.  <b>EQUIPMENT:</b> MBT 116 M-1 Abrams, AIFV 126 M-2 Bradley, APC 111 APC (T), ARTY 45 MOR/MRL/SP, 20 F-16C Fighting Falcon/F-16D Fighting Falcon, 24 A-10 Thunderbolt II/OA-10 Thunderbolt II, 20 F-16C Fighting Falcon/F-16D Fighting Falcon, MIM-104 Patriot.</p>	<p><b>TOTAL: 25374</b>  <b>Personnel. ARMY:</b>            17,130 - 1 HQ (8th Army); 1 div HQ (2nd Inf), 1 armd HBCT; 1 (hvy) cbt avn bde, 1 arty (fires) bde; 1 AD bde. <b>NAVY:</b> 254. <b>AIR FORCE:</b> 7,857. 1 (AF) HQ (7th Air Force); 1 ftr wg (2 ftr sqn ); 1 ftr wg (1 ftr sqn with total of ); 1 Special Ops sqn. <b>USMC:</b> 133.  <b>EQUIPMENT:</b> M-1 Abrams; M-2/M-3 Bradley; M-109 ; AH-64 Apache CH-47 Chinook; UH-60 Black Hawk ; MLRS; MIM-104 Patriot /FIM-92A Avenger; 1 (APS) HBCT set, 20 F-16C Fighting Falcon/F-16D Fighting Falcon, 12 A-10 Thunderbolt II , 12 OA-10 Thunderbolt II, 20 F-16C Fighting Falcon/F-16D Fighting Falcon.</p>
	<b>LAUT PASIFIK</b>	<p><b>TOTAL: 140400</b>  <b>Personnel.</b> Surface Forces divided between two fleets: 3rd Fleet (HQ: San Diego) covers Eastern and Central Pacific, Aleutian Islands, Bering Sea; and 7th Fleet (HQ: Yokosuka) covers Western Pacific.  <b>EQUIPMENT:</b>            Submarines 8 SSBN, 27 SSN, 6 CV/CVN, 13 CG, 24 DDG, 15 FFG, 2 LCC, mph 1 comd, 6 ARG - 3 LHA, 3 LHD, 8 LSD, 1 ST, 6 LPD plus 1 AG, 62 MSC ships, ther 2 MCM, 8 auxiliary ships.</p>	<p><b>TOTAL: 15044</b>  <b>Personnel. USMC:</b> 2,027. <b>NAVY:</b> 11,617. <b>NAVAL AVIATION:</b> 1,400. <b>US Navy 3rd Fleet</b>  <b>EQUIPMENT:</b>            Submarine 27 SSN, Aircraft Carrier 6 CVN/CV, Cruisers 13 CG, Destroyers 24 DDG, Frigates 15 FFG, Mine Countermeasures 2 MCM, Command Ships 2 LCC, Logistic and Support 8 AG.</p>	<p>US Pacific command - US Navy 3rd Fleet  <b>EQUIPMENT:</b>            Submarine (8 SSBN; 2 SSGN; 29 SSN); Aircraft Carrier 4 CVN; Cruiser 8 CGHM; Destroyers (12 DDGHM; 9 DDGM); Frigates 12 FFH; Command Ships 2 LCS; Mine Countermeasures 6 MCO; Support &amp; Logistics (3 LHD; 3 LPD; 3 LSD).</p>
	<b>SINGAPURA</b>	<p><b>TOTAL: 89 Personnel.</b>  <b>NAVY:</b> 50 - log facilities. <b>AIR FORCE:</b> 39 - spt sqn.</p>	<p><b>TOTAL: 171 Personnel.</b>  <b>USMC:</b> 24. <b>AIR FORCE:</b> 46 - 1 log spt sqn. <b>NAVY:</b> 101 - 1 support facility.</p>	<p><b>TOTAL: 122 Personnel.</b>            US Pacific command - 1 log spt sqn; 1 spt facility.</p>
	<b>THAILAND</b>	<p><b>TOTAL: 69 Personnel.</b>  <b>NAVY:</b> 10. <b>AIR FORCE:</b> 30. <b>USMC:</b> 29.</p>	<p><b>TOTAL: 492 Personnel.</b>  <b>ARMY:</b> 252. <b>AIR FORCE:</b> 28. <b>USMC:</b> 204. <b>NAVY:</b> 8.</p>	<p><b>TOTAL: 122 Personnel.</b></p>
	<b>FILIPINA</b>			<p><b>TOTAL: 117 Personnel.</b></p>
<b>US EUROPEAN COMMAND</b>	<b>BELANDA</b>	<p><b>TOTAL: 303 Personnel.</b>  <b>AIR FORCE:</b> 303.</p>	<p><b>TOTAL: 559 Personnel.</b>  <b>AIR FORCE:</b> 243. <b>ARMY:</b> 277. <b>NAVY:</b> 25. <b>USMC:</b> 14.</p>	<p><b>TOTAL: 477 Personnel.</b></p>
	<b>BELGIA</b>	<p><b>TOTAL: 1390 Personnel.</b>  <b>ARMY:</b> 788. <b>NAVY:</b> 94. <b>AIR FORCE:</b> 508.</p>	<p><b>TOTAL: 1327 Personnel.</b>  <b>ARMY:</b> 782. <b>NAVY:</b> 78. <b>AIR FORCE:</b> 467.</p>	<p><b>TOTAL: 1261 Personnel.</b></p>

	<b>INGGRIS</b>	<p><b>TOTAL: 9800 Personnel.</b> NAVY - 1 HQ, 1 admin, 1 spt facilities, 1 SEAL detachment. AIR FORCE : 9,800 - 1 air force HQ (3rd Air Force), 1 ftr wg, 72 cbt ac, 2 sqn (1 special ops gp, 1 air refuelling wg )  <b>EQUIPMENT:</b> 48 F-15E, 24 F-15C/D, 15 KC-135</p>	<p><b>TOTAL: 10564 Personnel.</b> US Strategic command - 2 Strategic Defences Radar (1 ballistic missile early warning system BMEWS, 1 Spacetrack Radar). USAF: 9,438 - 1 Special Ops, 1 HQ (AF); 1 ftr wg (3 ftr sqn). ARMY: 403. NAVY: 648 - 1 HQ (HQ US Navy Europe (USNAVEUR)), 1 tkr wg. USMC: 75.  <b>EQUIPMENT:</b> 5 MC-130H Combat Talon II, 5 MC-130P Combat Shadow, 1 C-130E Hercules, 8 MH-53J Pave Low III, 24 F-15C Eagle/F-15D Eagle, 24 F-15E Strike Eagle, 15 KC-135 Stratotanker.</p>	<p><b>TOTAL: 9221 Personnel.</b> AIR FORCE - 1 ftr wg (1 ftr sqn , 2 ftr sqn), 1 tkr wg , 1 Spec Ops gp.  <b>EQUIPMENT:</b> 1 ballistic missile early warning system (BMEWS), 1 Spacetrack Radar at Fylingdales Moor, 24 F-15C Eagle/F-15D Eagle, 24 F-15E Strike Eagle, 15 KC-135 Stratotanker, 5 MC-130H Combat Talon II; 5 MC-130P Combat Shadow; 1 C-130E Hercules.</p>
	<b>ITALIA</b>	<p><b>TOTAL: 15474 Personnel.</b> ARMY: 3,070 - 1 HQ, 1 AB Task Force Bde. NAVY: 7,780 - 1 HQ, 1 MR sqn. AIR FORCE: 4,550 - 1 AF HQ (16th Air Force), 1 ftr wg (2 sqn). USMC 74  <b>EQUIPMENT:</b> 116 MBT, 127 AIFV, 4 APC, 9 P-3C, 42 F-16C/D.</p>	<p><b>TOTAL: 11251 Personnel.</b> ARMY: 3,341 - 1HQ Task Force, 2 SETAF batalion, 1 SETAF log unit, 1 HQ, 1 MR sqn. NAVY: 3,493 - 1 Base 1. AIR FORCE: 4,361 - 1 HQ (16th Air Force), 1 ftr wg (2 ftr sqn). USMC 56.  <b>EQUIPMENT:</b> 116 M-1 Abrams MBT; 127 AIFV; 4 APC (T); 9 P-3C Orion, 1 F-16C Fighting Falcon/F-16D Fighting Falcon.</p>	<p><b>TOTAL: 9665 Personnel.</b> ARMY: 3,321. NAVY: 2,155 - 1 HQ (US Navy Europe (USNAVEUR)), 1 HQ ; 1 MP sqn. AIR FORCE: 4,131 - 1 ftr wg with (2 ftr sqn). USMC 58.  <b>EQUIPMENT:</b> 9 P-3C , 21 F-16C /D Fighting Falcon.</p>
	<b>JERMAN</b>	<p><b>TOTAL: 69790 Personnel.</b> ARMY 53,300 - with 1 armd div, 1 inf div (mech), 1 arty, 1 AD (2 Patriot (10 bty), 1 Avenger bn), 1 engr, 1 avn bde Army Prepositioned Stocks (APS). AIR FORCE 15,900 - 1 air force HQ: USAFE, 1 ftr wg (3 sqn), 1 airlift wg. NAVY 330. USMC 260.  <b>EQUIPMENT:</b> some 568 arty/MRL/mor, 115 ATK hel, 60 cbt aircraft (42 F-16C/D, 12 A-10, and 6 OA-10), incl support aircraft (16 C-130E and 6 C-9A, 9 C-21, 2 C-20, 1 CT-43).</p>	<p><b>TOTAL: 63939 Personnel.</b> US Armed Forces: 1 Combined Service HQ (EUCOM), 1 HQ (HQ US Army Europe (USAREUR). ARMY: 48,065 - 1 armd corps HQ (1 armd div, 1 engr bde, 1 avn bde, 1 mech inf div, 1 arty bde, 1 AD bde). NAVY 293. AIRFORCE 15,308 - 1 airfield construction HQ (HQ US Airforce Europe (USAFE)), 3rd Air Force (1 ftr wg, US Air Force Air combat command, 1 Airlift wg. USMC 273.  <b>EQUIPMENT:</b> MBT 568 M-1 Abrams, AIFV 1,266 M-2 Bradley, ARTY 312 mor/MRL/SP, 115 atk helicopter , support aircraft (16 C-130E Hercules, 2 C-20 Gulfstream; 9 C-21 Learjet ; 1 CT-43 Boeing 737)</p>	<p><b>TOTAL: 53130 Personnel.</b> US Africa command: 1 HQ, 1 USAF HQ (17th Air Force). US european command: 1 Combined Service HQ (EUCOM). ARMY: 37,828 - 1 HQ (US Army Europe (USAREUR)), 2 armd inf bde (1 mech inf SBCT currently deployed to AFG), 1 (hvy) cbt avn bde, 1 engr bde, 1 spt bde, 1 int bde, 2 sigs bde, 1 (APS) armd HBCT eqpt set. NAVY: 225. AIR FORCE: 14,708 - 1 HQ (US Air Force Europe (USAFE)), 1 HQ (3rd Air Force), 1 ftr wg (1 ftr sqn), 1 atk sqn; with ); 1 tpt. USMC 369.  <b>EQUIPMENT:</b> M-1 Abrams; M-2/M-3 Bradley; Stryker, M109; MLRS; AH-64 Apache ; CH-47 Chinook UH-60 Black Hawk; 24 F-16C Fighting Falcon; 12 A-10 Thunderbolt II; 6 OA-10A Thunderbolt II; 16 C-130E Hercules; 2 C-20 Gulfstream; 9 C-21</p>

				Learjet ; 1 CT-43 Boeing 737.
	<b>LAUT MEDITERAN IA</b>	<b>TOTAL: 14000 Personnel.</b> NAVY: 14,000 (incl 2,200 Marines). <b>EQUIPMENT:</b> 3 SSN, 1 CVBG, 1 CV, 6 surface combatants, 1 fast spt ship, 2 LHD/LPD, 2 AO, 1 AE, 1 AF, 1 AT/F. MPS-1 (4 ships eqpt for 1 MEF (fwd)).	<b>TOTAL: 14,000 Personnel.</b> NAVY: 11,800. USMC: 2,200. <b>EQUIPMENT:</b> 1 CVBG gp (1 Aircraft Carrier; 6 Principle Surface Combatants; circa 1 spt (fast); 1 MPS gp (MPS-1) eqpt. with 4 Logistics and Support (1 MEF fwd)); MBT 116 M-1 Abrams, AIFV 126 M-2 Bradley, APC 111 APC (T), 3 SSN, 2 LHD/LPD, 1AE, 1 AF, 2 AO, 1 AOE, 1 ATF.	US european command - US Navy 6th Fleet. <b>EQUIPMENT:</b> 1 LCC.
	<b>NORWEGIA</b>	<b>TOTAL: 50 Personnel.</b> AIR FORCE: 50. <b>EQUIPMENT:</b> 18 M-109, 18 M-198 arty, no aviation assets.	<b>TOTAL: 80 Personnel.</b> AIR FORCE: 40. NAVY: 15. USMC: 9. ARMY: 16. <b>EQUIPMENT:</b> 36: 18 M-109 (Army Prepositioned Stocks (APS)), and 18 M-198 (APS).	<b>EQUIPMENT:</b> US European command - 1 (APS) SP 155mm arty bn set.
	<b>PORTUGAL</b>	<b>TOTAL: 1058 Personnel.</b> NAVY: 50. AIR FORCE: 1,008.	<b>TOTAL: 941 Personnel.</b> US Northern command - 1 Support facility. AIRFORCE: 872. ARMY: 22. NAVY: 37. USMC: 10.	<b>TOTAL: 705 Personnel.</b> US Northern command - 1 Support facility.
	<b>SPANYOL</b>	<b>TOTAL: 562 Personnel.</b> NAVY: 280 - 1 naval base. AIR FORCE: 282.	<b>TOTAL: 1598 Personnel.</b> European Command - 1 naval base. AIR FORCE: 312. ARMY: 90. NAVY: 1,002. USMC: 194.	<b>TOTAL: 1256 Personnel.</b> US european command - 1 air base, 1 naval base.
	<b>TURKI</b>	<b>TOTAL: 1650 Personnel.</b> NAVY - spt facilities. AIR FORCE: 1,650 - 1 facilities, 1 wing . <b>EQUIPMENT:</b> F-15E, F-16, EA-6Bm KC-135, E-3B/C, C-12, HC-130, HH-60)	<b>TOTAL: circa 1600 Personnel.</b> US Strategic command Strategic Defences - 1 Spacetrack Radar, 1 European command Support facility. ARMY: 57. NAVY: 9. AIR FORCE: 16th Air Force - 1 air wg , 1 air base. USMC: 17. <b>EQUIPMENT:</b> F-16 Fighting Falcon, F-15E Strike Eagle, EA-6B 1 Prowler, E-3B Sentry /E-3C Sentry, HC-130 Hercules, KC-135 Stratotanker, C-12 Huron, HH-60 Seahawk.	<b>TOTAL: 1560 Personnel.</b> US European Command - 1 air base, 2 support facility. US Strategic command - 1 Spacetrack Radar.
	<b>YUNANI</b>	<b>TOTAL: 538 Personnel.</b> ARMY: 52. NAVY: 418 - 1 base facilities. AIR FORCE: 68 - air base.	<b>TOTAL: 409 Personnel.</b> ARMY: 11. NAVY: 340 - 2 base facilities. AIR FORCE: 47 - 1 air base (16th Air Force base). USMC: 11.	<b>TOTAL: 346 Personnel.</b> NAVY - 2 base facilities. AIR FORCE - 1 air base (16th Air Force base).
	<b>LUKSEMBUR G</b>	<b>TOTAL: 27 Personnel.</b> ARMY: 27.	<b>TOTAL: 27 Personnel.</b> ARMY: 27.	



	ISRAEL			<b>EQUIPMENT:</b> US european command - 1 AN/TPY-2 X-band radar.
US CENTRAL COMMAND	AFGANISTAN	<b>TOTAL: 18000 Personnel.</b> Operation Enduring Freedom: 18,000.	<b>TOTAL: 23,300 Personnel.</b> NATO - ISAF: 12,000. ARMY: 6,000. NAVY: 900. USMC: 200. AIR FORCE: 4,200.	<b>TOTAL: 97000 Personnel.</b> NATO - ISAF 90,000 - 1 corps HQ; 1 div HQ; 1 armd HBCT; 1 mech inf SBCT; 1 lt inf IBCT; 4 Air Aslt IBCT; 1 AB IBCT; 1 BfSB; 3 cbt avn bde; 1 ARNG IBCT; 1 USMC MEF HQ with (2 RCT). US Personnel: 7,000. <b>EQUIPMENT:</b> AH-64 Apache , OH-58 Kiowa, CH-47 Chinook, UH-60 Black Hawk , M1-A1 Abrams; M119, M198, Stryker, 3,200 MRAP, M-ATV, F-15E Strike Eagle , A-10 Thunderbolt II , EC-130H Compass Call, C-130 Hercules, HH-60 Pave Hawk, MV-22B Osprey, AV-8B Harrier, KC-130J Hercules, AH-1W Cobra, CH-53 Sea Stallion , UH-1N Iroquois, RQ-7B Shadow, MQ-1 Predator, MQ-9 Reaper
	ARAB EMIRAT	<b>TOTAL: 1300 Personnel.</b> AIR FORCE: 1,300.	<b>TOTAL: 56 Personnel.</b> Air Force: 56.	US Central Command - 2 bty. <b>EQUIPMENT:</b> MIM-104
	BAHRAIN	<b>TOTAL: 3000 Personnel.</b>	<b>TOTAL: 1418 Personnel.</b> ARMY: 26. NAVY: 1,222. AIR FORCE: 28. USMC: 142.	<b>TOTAL: 1339 Personnel</b> - 1 HQ (5th Fleet).
	DJIBOUTI	<b>TOTAL: 1000 Personnel.</b>	<b>TOTAL: 1729 Personnel.</b> ARMY: 490. NAVY: 450. AIR FORCE: 325. USMC: 464.	<b>TOTAL: 1285 Personnel.</b> US Africa command - 1 naval air base.
	IRAQ	<b>TOTAL: 121600 Personnel.</b> ARMY: 85,600 - 1 armd, 1 inf (mech), 1 AB (air aslt) div, 1 armd cav regt, 1 armd, 3 inf bde. AIR FORCE: 7,100. NAVY: 2,850. USMC 26,050 - 1 MEF with 1 mne div.	<b>TOTAL: 165600 Personnel.</b> AIR FORCE: 20,100 - 1 MAW wg. ARMY: 103,300 - 1 Armd div; 1 Armd bde; 1 Mech inf div; 1 Armd Cav regt (Cav regt is bde equivalent); 1 Air aslt div. NAVY: 19,000. USMC: 23,300 - 1 MEF HQ (1 FSSG regt, 1 MARDIV div. <b>EQUIPMENT:</b> 58 M-1 Abrams; 207 LAV-CP; 247 AAV; 72 M-198,48 F/A-18A Hornet /F/A-18C Hornet ; 36 F/A-18D Hornet ; 64 AV-8B Harrier II ; F-15 Eagle; F-16 Fighting Falcon; Intelligence, Surveillance and Recce ac; 12 KC-130 Hercules; 92 AH-1W Cobra; 90 CH-46E Sea Knight; 64 CH-53E Sea Stallion ; 50 UH-1N Iroquois.	<b>TOTAL: 49791 Personnel.</b> NATO - NTM-I: 12. UN - UNAMI: 4 observers. US central command - Operation New Dawn: 49,775 - 1 corps HQ; 3 div HQ; 3 armd HBCT (AAB); 1 armd HBCT HQ (AAB); 1 armd cav regt (AAB); 1 mech inf SBCT (AAB); 1 lt inf IBCT (AAB); 1 ARNG lt inf IBCT (LoC duties); 2 cbt avn bde. <b>EQUIPMENT:</b> M1 Abrams, M2 Bradley, M3 Bradley, Stryker, M109, M198, 9,341 MRAP, AH-64 Apache , OH-58 Kiowa, UH-60 Black Hawk , CH-47 Chinook, F-16D Fighting Falcon; A-10 Thunderbolt II ; C-130 Hercules; C-17 Globemaster III; HH-60G Pave Hawk; RQ-1B Predator

	<b>LAUT ARAB</b>	<b>TOTAL: 3300 Personnel.</b> ARMY: 1,100. USMC: 2200 - AT SEA 5th Fleet. <b>EQUIPMENT:</b> 1 CVBG (1 CV, 6 surface combatants), 3 amph ships, 4 MCM.	<b>TOTAL: 4762 Personnel.</b> US ARMY: 3300. Operation Enduring Freedom: 1,462. NAVY - 5th Fleet's operating forces. <b>EQUIPMENT:</b> 1 CVSG CVGP; 1 ARG gp, Principal Surface Combatants 7 (CVN 1 CV/CVN, Cruisers 1 CG, Destroyers 4 DDG, Frigates 1 FFG), 6 Principal Amphibious Ships (1 LPD; 1 LSD LHD 4 LHA/LHD)	<b>TOTAL: circa 3300 Personnel.</b> <b>EQUIPMENT:</b> 2 CVN; 2 CGHM; 5 DDGHM; 1 DDGM; 1 LHD; 1 LHA; 1 LPD; 1 LSD; 2 AOE, TF 53: 1 AE; 2 AKE; 1 AOH; 3 AO, CTF-151: 1 CGHM; 1 DDGHM; 1 FFH; 1 LPD; 1 LSD.
	<b>QATAR</b>	<b>TOTAL: 6540 Personnel.</b> ARMY: 800. AIR FORCE: 5,350. NAVY: 230. USMC: 160.	<b>TOTAL: 440 Personnel.</b> ARMY: 188. NAVY 4. AIR FORCE: 181. USMC: 67.	<b>TOTAL: 531 Personnel.</b> <b>EQUIPMENT:</b> elm 1 (APS) HBCT set.
	<b>ARAB SAUDI</b>	<b>TOTAL: 300 Personnel.</b> ARMY/AIR FORCE: 300 (trg personnel only)	<b>TOTAL: 300 Personnel.</b> ARMY/AIR FORCE: 300 (trg personnel only)	<b>TOTAL: 258 Personnel.</b>
	<b>OMAN</b>	<b>TOTAL: 270 Personnel.</b> AIR FORCE: 210. NAVY: 60.	<b>TOTAL: 25 Personnel.</b> AIR FORCE: 25.	
	<b>PAKISTAN</b>	<b>TOTAL: 400 Personnel.</b> ARMY/AIR FORCE: 400.	<b>TOTAL: 54 Personnel.</b> ARMY: 35. USMC: 19.	
	<b>KUWAIT</b>			US Central Command - Troops deployed as part of Operation New Dawn ; 2 AD bty. <b>EQUIPMENT:</b> 16 PAC-3 Patriot; elm 1 (APS) HBCT set.
<b>US SOUTHERN COMMAND</b>	<b>HONDURAS</b>	<b>TOTAL: 587 Personnel.</b> ARMY: 382. AIR FORCE: 205.	<b>TOTAL: 414 Personnel.</b> ARMY: 209. NAVY 2 - Commander Naval Forces South. AIR FORCE: 194. USMC: 9.	<b>TOTAL: 397 Personnel.</b> US Southern Command - 1 avn bn. <b>EQUIPMENT:</b> CH-47 Chinook ; UH-60 Black Hawk.
	<b>KOLOMBIA</b>	<b>TOTAL: 400 Personnel.</b> ARMY/ AIR FORCE/ NAVY/ USMC: 400,	<b>TOTAL: 89 Personnel.</b> ARMY: 53. NAVY 4. AIR FORCE: 7. USMC 25.	<b>TOTAL: 65 Personnel</b>
	<b>EKUADOR</b>	<b>TOTAL: 290 Personnel.</b> ARMY/ AIR FORCE/ NAVY/ USMC: 290.	<b>TOTAL: 33 Personnel.</b> ARMY: 6. NAVY 2. AIR FORCE: 20. USMC: 5.	
	<b>GUYANA</b>	<b>TOTAL: 200 Personnel.</b> ARMY/ AIR FORCE/ NAVY/ USMC: 200.	<b>TOTAL: 2 Personnel.</b> ARMY: 2.	
	<b>PUERTO RICO</b>		United States Southern command. NAVY - 1 HQ US Special Operations South; 1 HQ (SOCSOUTH).	
	<b>ARUBA</b>			US Southern command - 1 Forward Operating Location at Aruba
	<b>ELSAVADOR</b>			US Southern command - 1 Forward Operating Location (Military, DEA, USCG and Customs personnel
<b>US NORTHERN COMMAND</b>	<b>KUBA</b>	<b>TOTAL: 2190 Personnel.</b> ARMY: 1,600. NAVY: 510. USMC: 80. AIR FORCE: 65.	<b>TOTAL: 1016 Personnel.</b> ARMY: 344. USMC: 140. NAVY: 532.	<b>TOTAL: 886 Personnel.</b>

	<b>LAUT ATLANTIK</b>	<b>TOTAL: 108,000 Personnel.</b> Surface Forces divided into 2 fleets: 2nd Fleet (HQ: Norfolk) covers Atlantic; typically 4-5 CVBG, amph gp, 4 URG 6th Fleet (HQ: Gaeta, Italy) under op comd of EUCOM, typically 1 CVBG, 1 amph gp. <b>EQUIPMENT:</b> Submarines (10 SSBN, 28 SSN), Surface Combatants (6 CV/CVN, 14 CG, 21 DDG, 20 FFG), Amph (1 LCC, 2 LHA, 4 LPH, 6 LPD, 5 LSD, 6 LST, 1 LKA)	US Northern Command - US Navy 2nd Fleet <b>EQUIPMENT:</b> Submarine 35 (Strategic: 10 SSBN, Tactical 25 SSN), Principal Surface Combatants 54 (Aircraft Carrier: CVN 5 CV/CVN, Cruiser 13 CG, Destroyers 18 DDG, Frigates 18 FFG, Command Ships (LCC 1 Blue Ridge (capacity 3 LCPL; 2 LCVP; 700 troops; 1 SH-3H Sea King ASW hel), Principal Amphibious Ships 15: 2 LHA; 4 LPD; 4 LPH; 5 LSD; LS 7 (6 LST; 1 LKA).	US Northern Command - US Navy 2nd Fleet <b>EQUIPMENT:</b> 6 SSBN; 2 SSGN; 21 SSN; 4 CVN; 9 CGHM; 8 DDGHM; 13 DDGM; 15 FFH; 3 LHD; 1 LHA; 3 LPD; 5 LSD
	<b>BERMUDA</b>	<b>TOTAL: 800 Personnel.</b> NAVY: 800.		
	<b>PORTUGAL</b>	NAVY - 1 limited facilities at Lajes. AIR FORCE - SAR detachments to spt space shuttle ops.		
	<b>ISLANDIA</b>	<b>TOTAL: 1758 Personnel.</b> NAVY: 1,058 - 1 MR sqn. AIR FORCE: 700. <b>EQUIPMENT:</b> 6 P-3, 1 UP-3, 4 HH-60G.	<b>TOTAL: 690 Personnel.</b> NAVY: 422. AIR FORCE: 268 - 1 MR sqn eqp. <b>EQUIPMENT:</b> 6 P-3 Orion; 1 UP-3 Orion, FTR 4 F-15C Eagle, Hel SAR 4 HH-60G Pave Hawk.	
	<b>KANADA</b>			<b>TOTAL: 133 Personnel.</b>
<b>US AFRICA COMMAND</b>	<b>REPUBLIK SEYCHELES</b>			<b>EQUIPMENT:</b> some MQ-9 Reaper UAV.
<b>US STRATEGIC COMMAND</b>	<b>ANTIGUA &amp; BARBUDA</b>		<b>EQUIPMENT:</b> 1 Detection and Tracking Radars	<b>EQUIPMENT:</b> 1 Detection and Tracking Radars, 1 Air Station
	<b>GREENLAND</b>		<b>TOTAL: 139 Personnel.</b> Air Force: 139 <b>EQUIPMENT:</b> 1 Ballistic Missile Early Warning System (BMEWS), 1 Spacetrack Radar.	<b>TOTAL: 133 Personnel.</b> Air Force: 133 <b>EQUIPMENT:</b> 1 Ballistic Missile Early Warning System (BMEWS), 1 Spacetrack Radar.
	<b>PULAU ASCENSION</b>		<b>EQUIPMENT:</b> 1 Detection and Tracking Radars	<b>EQUIPMENT:</b> 1 Detection and Tracking Radars, 1 Auxiliary Air Field
	<b>REPUBLIK KEPULAUAN MARSHALL</b>		<b>EQUIPMENT:</b> 1 Detection and Tracking Radars	<b>EQUIPMENT:</b> 1 Detection and Tracking Radars
<b>MISI ANGKATAN BERSENJATA AMERIKA SERIKAT</b>	<b>MESIR</b>	<b>TOTAL: 750 Personnel.</b> EGYPT (MFO): 750 - 1 inf, 1 spt bn.	<b>TOTAL: 762 Personnel.</b> EGYPT (MFO): 392 - 1 inf, 1 spt bn. AIR FORCE: 302. ARMY: 41. USMC: 27.	<b>TOTAL: 688 Personnel.</b> EGYPT (MFO): 688 - 1 inf, 1 spt bn.
	<b>LIBERIA</b>	<b>TOTAL: 11 Personnel.</b> UNMIL: 4. OBSERVERS: 7.	<b>TOTAL: 12 Personnel.</b> UNMIL: 6, OBSERVERS: 6.	<b>TOTAL: 9 Personnel.</b> UNMIL: 5. OBSERVERS: 4.
	<b>SERBIA &amp; MONTENEGRO</b>	<b>TOTAL: 1802 Personnel.</b> UN-UNMIK OBSERVERS: 2. NATO-KFOR: 1,800.	<b>TOTAL: 1893 Personnel.</b> NATO-KFOR: 1893.	<b>TOTAL: 833 Personnel.</b> NATO-KFOR: 810 - 1 ARNG cbt spt bde. OSCE for Serbia: 5. OSCE for Kosovo: 18.
	<b>TIMUR TENGAH</b>	<b>TOTAL: 3 Personnel.</b> UN-UNTSO: 3 observers.	<b>TOTAL: 3 Personnel.</b> UN-UNTSO: 3 observers.	<b>TOTAL: 2 Personnel.</b> UN-UNTSO: 2 observers.

	<b>BOSNIA-HERZEGOVINA</b>	<b>TOTAL: 839 Personnel.</b> SFOR II: 839.	<b>TOTAL: 256 Personnel.</b> EUFOR - Althea Operations. ARMY: 196. NAVY: 30. AIRFORCE: 20. USMC: 10.	<b>TOTAL: 9 Personnel.</b> OSCE for Bosnia and Herzegovina Operations.
	<b>ETHIOPIA</b>	<b>TOTAL: 7 Personnel.</b> UNMEE: 7 observers.	<b>TOTAL: 7 Personnel.</b> UNMEE: 7 observers.	
	<b>GEORGIA (SAKARTVELO)</b>	<b>TOTAL: 2 Personnel.</b> UNOMIG: 2 observers.	<b>TOTAL: 2 Personnel.</b> UNOMIG: 2 observers.	
	<b>KIRGIZTAN</b>	<b>TOTAL: 950 Personnel.</b>	<b>TOTAL: 6 Personnel.</b> NATO: 6.	
	<b>REPUBLIK MAKEDONIA</b>	<b>TOTAL: 260 Personnel.</b> KFOR: 260.		
	<b>TAJKISTAN</b>	<b>TOTAL: 14 Personnel.</b>		
	<b>UZBEKISTAN</b>	<b>TOTAL: 900 Personnel.</b>		
	<b>SUDAN</b>		<b>TOTAL: 1 observer.</b>	
	<b>MASEDONIA</b>		<b>TOTAL: 79 Personnel.</b> ARMY: 3. AIR FORCE: 6. USMC: 31. NATO-KFOR Joint Enterprise: 39.	
	<b>HAITI</b>		<b>TOTAL 3 Personnel.</b> UN-MINUSTAH: 3.observers.	<b>TOTAL 9 Personnel.</b> UN-MINUSTAH: 9.observers.
	<b>LITHUANIA</b>			<b>EQUIPMENT:</b> NATO-Baltic Air Policing : 4 F-15C Eagle.
	<b>MOLDOVA</b>			<b>TOTAL: 2 Personnel.</b> OSCE for Moldova: 2.
	<b>REPUBLIK AFRIKA TENGAH</b>			<b>TOTAL: 2 Personnel.</b> UN-MINURCAT: 2 observers.
	<b>REPUBLIK KONGO</b>			<b>TOTAL: 2 Personnel.</b> UN-MONUSCO: 2 observers.
	<b>TELUK PERSIA</b>			<b>EQUIPMENT:</b> for combined Maritime Forces: CTF-152: 4 MCO
Sumber: <i>Military Balance</i> 2003 hingga 2010				

### Lampiran 12: Rekap Data Persenjataan China dan Amerika Serikat.

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>AS</b>			<b>69006</b>		<b>64741</b>				<b>66858</b>
<b>Aircraft</b>			<b>12735</b>		<b>8708</b>				<b>8942</b>
Airborne Early Warning			69		77				
Airborne Early Warning & Control					33				104
Anti-Submarine Warfare			107		58				159
Attack			895		461				389
Bomber			203		180				155
Combat Intelligence, Surveillance and Reconnaissance					59				186
combat search and rescue					13				36
Command & Control			88		20				20
Electronic Intelligence			341		151				50

Electronic Warfare		19	50			187
Fighter		2404	583			609
Fighter Ground Attack		3001	2749			2585
Intelligence, Surveillance and Reconnaissance		267	118			230
Maritime Patrol		17	64			26
Maritime Patrol		247	174			
Search and Rescue		22	23			27
Tanker		302	329			479
Tanker / Transport		59	59			59
Tiltrotor		660	2			95
Training		2403	2276			1781
Transport		1448	1063			1292
Trials and Test		32	48			50
Unmanned Aerial Vehicle		36	37			423
Utility		115	81			
<b>Armoured Combat Vehicle</b>		<b>23423</b>	<b>24386</b>			<b>30456</b>
Amphibious Assault Vehicle		1311	1311			1311
Armoured Infantry Fighting Vehicle		6719	6719			6452
Armoured Personnel Carrier		14900	16008			22106
Reconnaissance		493	348			587
<b>Artillery</b>		<b>16440</b>	<b>16390</b>			<b>13956</b>
Man Portable Air-Defense						
Man Portable Anti-Tank		2204	2204			2204
Mortar		2701	2651			2651
Multiple-Launch Rocket System		830	830			1054
Rocket Launcher		2764	2764			
Self Propelled		4985	4985			4492
Towed		2956	2956			3555
<b>Helicopter</b>		<b>7486</b>	<b>5999</b>			<b>6076</b>
Anti-Submarine Warfare		225	231			266
Assault		36	36			
Attack		1479	1107			1239
Attack Helicopter		420	216			165
Combat Intelligence, Surveillance and Reconnaissance						
combat search and rescue		169	100			111
Intelligence, Surveillance and Reconnaissance						250
Mine Countermeasures		38	41			36
Multi-Role Helicopter						517
Observation		463	466			
Search and Rescue		260	322			229
Special Operations		133	176			

Support		639	417			
Training		271	286			286
Transport		1200	487			2974
Trials and Test		6	3			3
Utility		2147	2111			
<b>Radar</b>		<b>278</b>	<b>274</b>			<b>274</b>
Radar		278	274			274
<b>Ship</b>		<b>621</b>	<b>961</b>			<b>912</b>
Amphibious Command Ship		2	2			2
Cruiser		27	22			22
Aircraft Carrier		3	2			
Aircraft Carrier Nuclear Powered		9	10			11
Amphibious Assault Ship		7	8			
Amphibious Craft		192	334			269
Attack Submarine Nuclear Powered		54	54			53
Ballistic-Missile Submarine Nuclearfuelled		18	14			14
coastal buoy tender			14			14
Destroyer		49	50			59
Dry Dock Shelter			6			12
fast patrol crafts coastal		13	13			3
Frigates		30	30			22
icebreaker			13			13
Inland construction tenders			18			18
Landing Craft		79	79			79
Landing Craft Utility		45	45			45
Landing Platform Dock		11	11			
Landing Ship Assault		5	4			
Landing Ship Dock		15	12			
Littoral Combat Ship			1			
medium harbour tug			11			11
Mine Countermeasures Vessel		26	24			9
offshore patrol vessel over 60 metres						1
offshore patrol vessel over 60 metres / with helicopter		28	28			28
Patrol Boat						28
patrol boat inshore			45			73
patrol craft coastal			49			41
Patrol Craft Inshore		8	8			
patrol craft offshore			14			14
Principal Amphibious Ships						31
river buoy tender			18			18
sea-going buoy tender			16			16

SSN with dedicated non-ballistic missile launchers					4				4
Training					2				2
<b>Tank</b>			<b>8023</b>		<b>8023</b>				<b>6242</b>
Main Battle Tank			8023		8023				6242
<b>PRC</b>	<b>69534</b>	<b>70132</b>	<b>71677</b>	<b>69908</b>	<b>69885</b>	<b>69294</b>	<b>68568</b>	<b>66914</b>	<b>61003</b>
<b>Aircraft</b>	<b>3288</b>	<b>3280</b>	<b>4071</b>	<b>4487</b>	<b>4468</b>	<b>3771</b>	<b>2965</b>	<b>2938</b>	<b>2922</b>
Airborne Early Warning			4	4	4	4	4	8	8
Anti-Submarine Warfare	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Bomber	248	248	290	352	352	212	132	132	132
Electronic Warfare							9	10	10
Fighter	1940	1210	1326	1648	1525	1525	1220	1184	1070
Fighter Ground Attack	50	776	1443	1465	1538	847	421	421	571
Intelligence, Surveillance and Reconnaissance									
Patrol	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Reconnaissance	171	171	60	60	60	186	133	133	112
Survey Ship									
Tanker	13	13	13	13	13	21	21	21	13
Training	273	273	566	566	566	595	644	644	584
Transport	585	581	361	361	391	362	362	365	402
Unmanned Aerial Vehicle					1	1	1	2	2
Unmanned Combat Aerial Vehicle				10	10	10	10	10	10
<b>Armoured Combat Vehicle</b>	<b>4560</b>	<b>4560</b>	<b>4560</b>	<b>4560</b>	<b>4560</b>	<b>4560</b>	<b>4560</b>	<b>4820</b>	<b>5338</b>
Armoured Infantry Fighting Vehicle	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1140	2390
Armoured Personnel Carrier	3560	3560	3560	3560	3560	3560	3560	3680	2948
<b>Artillery</b>	<b>49312</b>	<b>50012</b>	<b>50762</b>	<b>50762</b>	<b>50762</b>	<b>50762</b>	<b>50768</b>	<b>49880</b>	<b>43214</b>
Combined Gun	100	100	100	100	100	100	100	150	150
Conventional									
Conventional									
Guided Weapon	6500	7176	7176	7176	7176	7176	7176	7176	
Guns	24000	8000	24000	24000	24000	24000	24000	23960	25430
Laser-Guided									
Man Portable Air-Defence									
Missile									
Mortar									2586
Multiple Rocket Launcher	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	1770
Recoilles									3966
Rocket Launcher									
Self Propelled	1200	1224	1224	1224	1224	1224	1224	1304	2026
Surface-to-Air	1112	17112	1862	1862	1862	1862	1868	890	890
Surface-to-Surface									
Towed	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	6396



TV-Guided									
<b>Helicopter</b>	<b>449</b>	<b>503</b>	<b>499</b>	<b>526</b>	<b>526</b>	<b>525</b>	<b>565</b>	<b>657</b>	<b>669</b>
Airborne Early Warning									2
Anti-Submarine Warfare	43	43	8	10	10	10	10	13	38
Anti-Surface Warfare				25	25	25	25	25	
Assault	8	8	16	8	8	8	8		
Attack	40	31	31	31	31	31	48	126	10
Combat Capable		70							
Multi-Role									248
Search and Rescue			34	42	42	42	42	47	
Support	263	220	316	316	316	316	320	334	
Training	1	1	1	1	1				
Transport	8	8							351
Utility	86	122	93	93	93	93	112	112	20
<b>Radar</b>									
Land									
Radar									
Surveillance									
<b>Ship</b>	<b>3095</b>	<b>3047</b>	<b>3055</b>	<b>843</b>	<b>839</b>	<b>866</b>	<b>900</b>	<b>909</b>	<b>886</b>
Air Force Support	14	14	14	14	14				
Anti-Submarine	10	10	10	10	10	8	8	8	8
Attack Submarine Diesel, Non-Ballistic Missile Launchers	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Attack Submarine Nuclear Powered	5	5	5	4	4	6	6	6	6
Ballistic-Missile Submarine Nuclearfuelled	1	1	1	1	1	3	3	3	3
Cargo Ship						23	23	23	23
Container	191	191	191						
Degaushing						5	5	5	5
Destroyer	21	21	21	27	28	29	28	28	13
Dry Bulk	555	555	555						
Fast Patrol Craft			88	98	98	93	93	93	102
Fast Patrol Craft (with Surface-to-Surface Missile)	93	96	96	55	42	63	77	83	
Frigates	42	42	42	44	48	46	50	52	65
Hospital Ship	6	6	6	6	6	6	6	7	1
Icebreakers	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Intelligence Collection Vessel						1	1	1	1
Landing Ship Medium	37	31	31	47	47	47	56	56	71
Landing Ship Tank	19	19	19	26	26	27	27	27	26
Landing Craft Air Cushion		10	10						1
Landing Craft Medium				20	20	20	20	20	
Landing Craft Utility	285	275	275	128	130	130	130	130	130
Mine Countermeasures Vessel							4	4	7

Mine Sweeper	134	129	129	68	64	64	64	64	81
Minelayers	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Misc Auxiliary									6
Oceanographic Research Vessel	33	33	33	33	33	5	5	5	5
Patrol Boat									34
Patrol Craft	259	226	138	101	102	77	77	77	75
Patrol Hydrofoil with Torpedo	16	9	9						
Patrol Submarine With ASW (Anti-Submarine Warfare) Capability	62	62	62	52	57	52	55	55	61
Principal Amphibious Vessels							1	1	1
Repair Ship	2	2	2	2	2				
Salvage Ship						2	2	2	2
sea-going buoy tender						7	7	7	7
Submarine Rescue Craft	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Support	913	913	913						
Survey Ship						6	6	6	6
Tanker	331	331	331	33	33	50	50	50	50
Tanker with Helicopter Capacity						5	5	5	5
Tanker with Replenishment at Sea Capability	3	3	3	3	3	5	5	5	5
Training	1	1	1	1	1	2	2	2	2
Transport	30	30	38	38	38	8	8	8	8
Tug / Ocean Going	25	25	25	25	25	51	51	51	51
Water Tanker						18	18	18	18
<b>Tank</b>	<b>8830</b>	<b>8730</b>	<b>8730</b>	<b>8730</b>	<b>8730</b>	<b>8810</b>	<b>8810</b>	<b>7710</b>	<b>7974</b>
Light Tank	1650	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1160	924
Main Battle Tank	7180	7580	7580	7580	7580	7660	7660	6550	7050
<b>Grand Total</b>	<b>69534</b>	<b>70132</b>	<b>14068</b> <b>3</b>	<b>69908</b>	<b>13462</b> <b>6</b>	<b>69294</b>	<b>68568</b>	<b>66914</b>	<b>12786</b> <b>1</b>
Data diolah dari <i>The Military Balance 2002-2011</i> .									